PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021-2026

SALINAN

BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat harus selaras dengan Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur demi terwujudnya keberlanjutan pembangunan secara sinergis guna mewujudnyatakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat;
b. bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengakibatkan terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan nasional sehingga berdampak pada tidak sinkronnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026;
c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021- 2026 dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 - 2026.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 219) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD meliputi:
   a. bab I pendahuluan;
   b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab III gambaran keuangan Daerah;
   d. bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah;
   e. bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
   f. bab VI Strategi, arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah;
   g. bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   h. bab VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   i. bab IX penutup.
(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 JUNI 2023

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 05

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG .04/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARIA BARAT
NOMOR 5. TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021- 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 – 2025 serta dengan memperhatikan dokumen Perencanaan lainnya ditingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya ditingkat Daerah. Selain Visi dan Misi, RPJMD Tahun 2021-2026 memuat Tujuan, sasaran, Strategi, arah Kebijakan dan Program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi realisasi target RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan. Perubahan RPJMD juga perlu dilakukan akibat diundangkannya beberapa Peraturan Perundang-undangan sehingga mengakibatkan perubahan yang mendasar pada kebijakan nasional dan berdampak pada perlu dilakukan penyesuaian RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2026. Peraturan dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 243

LAMPIRAN ...

PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, kami panjatkan atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 dapat terselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk mengawal pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021.

Dalam proses pembangunan selalu terjadi dinamika yang menciptakan perkembangan kondisi sosial yang baru. Dalam merespon berbagai dinamika yang terjadi, Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun sebagai respon dalam menanggapi tantangan dan peluang pembangunan guna meningkatkan pelayanan yang optimal dalam berbagai fokus dan bidang. Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dilakukan karena dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dalam merespon dinamika dan capaian pembangunan pada periode sebelumnya, serta menyesuaikan perkembangan pembangunan nasional dan global yang bergerak secara cepat dan dinamis.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat saat ini dan kedepannya.

Labuan Bajo, Juni 2023

Bupati Manggarai Barat,

Edistasius Endi, S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GRAFIK ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3. Hubungan Antar Dokumen 8

1.3.1. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2005-2025 9

1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 10

1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 12

1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat 14

1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030 15

1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 17

1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 19

1.3.8. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD 19

1.3.9. Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD 19

1.3.10. Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan RPJMD 20

1.4. Maksud dan Tujuan 20

1.4.1. Maksud 20

1.4.2. Tujuan 20

1.5. Sistematika Penulisan 21

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **23**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 23

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 23

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana 37

2.1.3. Demografi 46

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 48

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 48
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 59
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 68
2.3. Aspek Pelayanan Umum 70
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 70
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 143
2.3.3. Fokus Fungsi Penunjang 162
2.3.4. Fokus Urusan Pemerintahan Umum 174
2.3.5. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 175
2.3.6. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur 178
2.3.7. Fokus Sumber Daya Manusia 190
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 194
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 194
3.1.1. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah 194
3.1.2. Kinerja Pelaksanaan APBD 199
3.1.3. Neraca Daerah 211
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu 219
3.2.1. Kontribusi Penggunaan Anggaran 219
3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah 226
3.3. Kerangka Pendanaan 229
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Manggarai Barat 229
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan 234
3.3.3. Kebijakan Alokasi Anggaran 237
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 238
4.1. Permasalahan Pembangunan 238
4.1.1. Tinjauan Terhadap Struktur Perekonomian Daerah 238
4.1.2. Tinjauan Terhadap Aspek Kesejahteraan Sosial 242
4.1.3. Tinjauan Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 243
4.1.4. Tinjauan Terhadap Lingkungan Strategis 274
4.2. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Manggarai Barat 312
4.2.1. Manggarai Barat sebagai destinasi wisata super prioritas 312
4.2.2. Manggarai Barat sebagai wilayah pertanian 314
4.2.3. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 315
4.2.4. Stabilitas ekonomi serta pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan 316
4.2.5. Infrastruktur dasar untuk menopang perekonomian yang berkelanjutan 317
4.2.6. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan pelayanan publik yang prima 318
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 320
5.1. Visi 320

5.2. Misi 322

5.3. Tujuan dan Sasaran 325

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 337

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan 337

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan 353

6.3. Program Pembangunan Daerah 354

6.4. Integrasi KLHS P-RPJMD 413

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 458

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 526

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah 526

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 527

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK) 534

BAB IX PENUTUP 548

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTT 2024-2026 13

Tabel 2. 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Barat 24
Tabel 2. 2. Persentase Ketinggian Wilayah Kabupaten Manggarai Barat 26
Tabel 2. 3. Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 30
Tabel 2. 4. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Manggarai Barat 36
Tabel 2. 5. Jenis Potensi Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat 43
Tabel 2. 6. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Manggarai Barat 45
Tabel 2. 7. Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 - 2022 47
Tabel 2. 8. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Tahun 2019-2022 (Juta Rupiah) 49
Tabel 2. 9. Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019-2022 50
Tabel 2. 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2022 52
Tabel 2. 11. Laju Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2018-2022 (Persen) 53
Tabel 2. 12. Indeks Gini Provinsi NTT Tahun 2019-2022 56
Tabel 2. 13. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 (Persen) 56
Tabel 2. 14. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 57
Tabel 2. 15. Penduduk Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020 57
Tabel 2. 16. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 58
Tabel 2. 17. Perkembangan Angka Melek Huruf Manggarai Barat Tahun 2017-2021 60
Tabel 2. 18. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-202262
Tabel 2. 19. Tingkat Pengangguran di Kab. Manggarai Barat Tahun 2017-2021 (persen) 63
Tabel 2. 20. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022 (persen) 64
Tabel 2. 21. Rasio penduduk yang bekerja (persen) 64
Tabel 2. 22. IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 65
Tabel 2. 23. Komponen IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 65
Tabel 2. 24. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2022 (persen) ... 67
Tabel 2. 25. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2022 68
Tabel 2. 26. Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 69
Tabel 2. 27. Prestasi Kabupaten Manggarai Barat dalam Pekan Olah Raga (POR) NTT Tahun 2015-2019 70
Tabel 2. 28. Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2022 (juta rupiah) 71
Tabel 2. 29. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017-2022 72
Tabel 2. 30. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 73
Tabel 2. 31. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021 74
Tabel 2. 32. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021 75
Tabel 2. 33. Angka Mengulang Kelas tahun 2017-2019 (orang)* 76
Tabel 2. 34. Jumlah Siswa Putus Sekolah tahun 2017-2021 (orang) 77
Tabel 2. 35. Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2015-2019 77

Tabel 2. 36. Rasio Guru dan Siswa Kab Manggarai Barat Tahun 2017-2021 78
Tabel 2. 37. Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2017-2021 (Persen) 81
Tabel 2. 38. Persentase Guru Tersertifikasi Tahun 2018-2020 82
Tabel 2. 39. Nilai UKG Manggarai Barat dan Kabupaten Tetangga Tahun 2019 82
Tabel 2. 40. Angka Kelulusan SiswaTahun 2016-2020 (Persen) 83
Tabel 2. 41. Persentase Kondisi Ruang Kelas Tahun 2019 dan 2020 83
Tabel 2. 42. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2016-2020 84
Tabel 2. 43. Akreditasi Sekolah Tahun 2020 dan 2021 85
Tabel 2. 44. AKB dan AKI Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 86
Tabel 2. 45. Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022 87
Tabel 2. 46. Rasio Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2021 dan 2022 88
Tabel 2. 47. Capaian Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022 89
Tabel 2. 48. Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 91
Tabel 2. 49. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 – 2022 (Km) 92
Tabel 2. 50. Kondisi Prasarana Jembatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 93
Tabel 2. 51. Daerah Irigasi (DI) sesuai kewenangan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 94
Tabel 2. 52. Panjang Saluran Irigasi Berdasarkan Kondisi (m) Tahun 2021-2022 94
Tabel 2. 53. Luas Irigasi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2021 94
Tabel 2. 54. Sambungan Rumah PDAM Mbeliling Tahun 2022 100
Tabel 2. 55. Cakupan Kegiatan PAMSIMAS Tahun 2021 101
Tabel 2. 56. Kepemilikan Jamban di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 102
Tabel 2. 57. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase tahun 2017-2022 104
Tabel 2. 58. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 105
Tabel 2. 59. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2022 108
Tabel 2. 60. Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 109
Tabel 2. 61. Tingkat Pengangguran di Kab. Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%) 110
Tabel 2. 62. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022 (persen) 110
Tabel 2. 63. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 111
Tabel 2. 64. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-2022 112
Tabel 2. 65. Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi dan Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2018 – 2022 112
Tabel 2. 66. Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2017-2022 113
Tabel 2. 67. Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2018-2022 116
Tabel 2. 68. Persentase Jumlah Pekerja Anak di Bawah Umur dan Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan Tahun 2018-2022 116
Tabel 2. 69. Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadi Kabupaten Maggarai Barat Tahun 2018 - 2022 117
Tabel 2. 70. Indeks ketahanan pangan dan komponen pembentuknya di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018 -2022 118
Tabel 2. 71. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 (kg/kapita/tahun) 119
Tabel 2. 72. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 120
Tabel 2. 73. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2019 120

Tabel 2. 74. Jumlah Trayek Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2020 121
Tabel 2. 75. Prasarana Transportasi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 121
Tabel 2. 76. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab Manggarai Barat Tahun 2019-2022 122
Tabel 2. 77. Volume Sampah di Wilayah Kota Labuan Bajo Tahun 2018-2022 123
Tabel 2. 78. Gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 124
Tabel 2. 79. Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Tertutup Pepohonan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 124
Tabel 2. 80. Luas Lahan yang Bersertifikat Tahun 2015-2022 125
Tabel 2. 81. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 . 127
Tabel 2. 82. Jumlah Koperasi yang Meningkat SHU-nya dan Jumlah Koperasi Sehat di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018 - 2022 128
Tabel 2. 83. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018-2022 128
Tabel 2. 84. Omzet Usaha Mikro dan Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Menjadi Kecil di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018 – 2022 129
Tabel 2. 85. Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2022 .. 130
Tabel 2. 86. Jumlah dan Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 s.d 2020 131
Tabel 2. 87. Realisasi Investasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020 132
Tabel 2. 88. Realisasi Investasi PMDN di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020 132
Tabel 2. 89. Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 133
Tabel 2. 90. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016-2020 135
Tabel 2. 91. Bumdes Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 136
Tabel 2. 92. Persentase Bumdes Aktif di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 137
Tabel 2. 93. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020 Kabupaten Manggarai Barat 138
Tabel 2. 94. Perkembangan Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 ... 139
Tabel 2. 95. Persentase OPD yang Memiliki Tata Kearsipan secara Baik Tahun 2018 - 2022 139
Tabel 2. 96. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 - 2022 140
Tabel 2. 97. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022 140
Tabel 2. 98. Pemenuhan Kebutuhan Data/Statistik Tahun 2016-2020 141
Tabel 2. 99. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2015-2019 142
Tabel 2. 100. Luas Areal Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Tahun 2022 (Ha) 143
Tabel 2. 101. Luas Areal Tanaman Pangan (Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau) Tahun 2022 (Ha) 144
Tabel 2. 102. Jumlah Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2022 145
Tabel 2. 103. Luas Areal Tanaman Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (Ha) . 147
Tabel 2. 104. Jumlah Produksi (Ton) dan Produktivitas (Kg/Ha) Tanaman Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 148
Tabel 2. 105. Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (Ton) 149
Tabel 2. 106. Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (Ton) 150
Tabel 2. 107. Jumlah Poktan dan Gapoktan di Kab Manggarai Barat Tahun 2018-2021 151
Tabel 2. 108. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021 (Orang) 152
Tabel 2. 109. Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (kg) 153
Tabel 2. 110. Produksi Produk Asal Ternak Tahun 2017-2022 153
Tabel 2. 111. Populasi Ternak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 154

Tabel 2. 112. Tingkat Kelahiran dan Kematian Ternak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 154
Tabel 2. 113. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 155
Tabel 2. 114. Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2018-2022 155
Tabel 2. 115. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke ODTW di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 156
Tabel 2. 116. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 158
Tabel 2. 117. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2022 (Ton) 158
Tabel 2. 118. Tingkat kelancaran distribusi barang di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 . 160
Tabel 2. 119. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2021 160
Tabel 2. 120. Perkembangan Industri di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 161
Tabel 2. 121. Nilai produksi IKM dan jumlah produk IKM yang bersertifikasi di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016 – 2020 161
Tabel 2. 122. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 162
Tabel 2. 123. Opini BPK terhadap LKPD Kab. Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020 163
Tabel 2. 124. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kab. Manggarai Barat Tahun 2018-2022 165
Tabel 2. 125. Tingkat Pendidikan PNS tahun 2020-2022 166
Tabel 2. 126. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak tahun 2022 167
Tabel 2. 127. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2022 167
Tabel 2. 128. Perkembangan Jumlah PNS yang Melanjutkan Studi Tahun 2018-2022 168
Tabel 2. 129. Persentase Jabatan Struktural yang Terisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 169
Tabel 2. 130. Persentase Pejabat Eselon II, III dan IV yang Telah Mengikuti PIM Tahun 2018-2022 169
Tabel 2. 131. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kab. Manggarai Barat Tahun 2019-2022 170
Tabel 2. 132. Jumlah dan Persentase Auditor Kab. Manggarai Barat Tahun 2018-2022 171
Tabel 2. 133. Jumlah Temuan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Tahun 2018-2022 172
Tabel 2. 134. Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2018-2022 172
Tabel 2. 135. Capaian Kinerja Daerah Tahun 2016-2020 173
Tabel 2. 136. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kasus Kantibmas di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019 175
Tabel 2. 137. Angka Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2019 176
Tabel 2. 138. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) 177
Tabel 2. 139. Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2016-2020 177
Tabel 2. 140. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2019 179
Tabel 2. 141. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019 179
Tabel 2. 142. Perkembangan Jumlah Akomodasi Hotel di Manggarai Barat Tahun 2016-2021 181
Tabel 2. 143. Jumlah Hotel Berdasarkan Klasifikasi dan Jumlah Tenaga Kerjanya Tahun 2019 181
Tabel 2. 144. Cakupan dan Pengguna Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 182
Tabel 2. 145. Sebaran Sistem Jaringan Pembangkit Tenaga Listrik di Manggarai Barat tahun 2020 187
Tabel 2. 146. Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 188
Tabel 2. 147. Kawasan Budidaya Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 189
Tabel 2. 148. Kondisi Sumber Daya Manusia Kab Manggarai Barat Tahun 2018-2022 191

Tabel 2. 149. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021 192
Tabel 2. 150. Tindak Kriminal di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021 193

Tabel 3. 1 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 201
Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 ... 208
Tabel 3. 3 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 210
Tabel 3. 4. Rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021 212
Tabel 3. 5 Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021 (%) 215
Tabel 3. 6 Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021 216
Tabel 3. 7 Rasio Hutang terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021 217
Tabel 3. 8 Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Manggarai Barat Tahun 2017-2021 218
Tabel 3. 9 Tingkat realisasi Belanja, rata-rata proporsi komponen Belanja terhadap total Belanja, dan rata-rata pertumbuhan tiap komponen Belanja Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 220
Tabel 3. 10. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 225
Tabel 3. 11 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 227
Tabel 3. 12 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026 230
Tabel 3. 13 Proyeksi Belanja Mengikat Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026 235
Tabel 3. 14 Proyeksi Perhitungan Kapasitas Riil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023-2026 236
Tabel 3. 15 Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2024-2026 237

Tabel 4. 1. Kategori Sektor PDRB Berdasarkan Analisis Location Quotient 239
Tabel 4. 2. Kategori Sektor PDRB Berdasarkan Analisis Shift Share 240
Tabel 4. 3. Posisi Relatif Sektor Basis pada PDRB Kab Manggarai Barat Berdasarkan Analisis Shift Share 241
Tabel 4. 4. Pemetaan Permasalahan Urusan Pendidikan 244
Tabel 4. 5. Pemetaan Permasalahan Urusan Kesehatan 245
Tabel 4. 6.Pemetaan Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 246
Tabel 4. 7. Pemetaan Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 247
Tabel 4. 8. Pemetaan Permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat 248
Tabel 4. 9. Pemetaan Permasalahan Urusan Sosial 250
Tabel 4. 10. Pemetaan Permasalahan Urusan Tenaga Kerja 250
Tabel 4. 11. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 251
Tabel 4. 12. Pemetaan Permasalahan Urusan Pangan 252
Tabel 4. 13. Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanahan 253
Tabel 4. 14. Pemetaan Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup 253
Tabel 4. 15. Pemetaan Permasalahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 254
Tabel 4. 16. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 255
Tabel 4. 17. Pemetaan Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB 256
Tabel 4. 18. Pemetaan Permasalahan Urusan Perhubungan 257

Tabel 4. 19. Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika 258
Tabel 4. 20. Pemetaan Permasalahan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 259
Tabel 4. 21. Pemetaan Permasalahan Urusan Penanaman Modal 259
Tabel 4. 22. Pemetaan Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga 260
Tabel 4. 23. Pemetaan Permasalahan Urusan Statistik 260
Tabel 4. 24. Pemetaan Permasalahan Urusan Kebudayaan 261
Tabel 4. 25. Pemetaan Permasalahan Urusan Perpustakaan 262
Tabel 4. 26. Pemetaan Permasalahan Urusan Kearsipan 262
Tabel 4. 27. Pemetaan Permasalahan Urusan Persandian 263
Tabel 4. 28. Pemetaan Permasalahan Urusan Perikanan 263
Tabel 4. 29. Pemetaan Permasalahan Urusan Perindustrian 264
Tabel 4. 30. Pemetaan Permasalahan Urusan Pariwisata 265
Tabel 4. 31. Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanian 266
Tabel 4. 32. Pemetaan Permasalahan Urusan Perdagangan 267
Tabel 4. 33. Pemetaan Permasalahan Urusan Perencanaan 268
Tabel 4. 34. Pemetaan Permasalahan Urusan Keuangan 269
Tabel 4. 35. Pemetaan Permasalahan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 270
Tabel 4. 36. Pemetaan Permasalahan Urusan Penelitian dan Pengembangan 270
Tabel 4. 37. Pemetaan Permasalahan Urusan Pengawasan 271
Tabel 4. 38. Pemetaan Permasalahan Urusan Sekretariat Dewan 272
Tabel 4. 39. Pemetaan Permasalahan Urusan Sekretariat Daerah 273
Tabel 4. 40. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemerintahan Umum 274
Tabel 4. 41. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 286
Tabel 4. 42. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 288
Tabel 4. 43. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Sosial 289
Tabel 4. 44. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Ekonomi 292
Tabel 4. 45. Tabel Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Lingkungan 294
Tabel 4. 46. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola 297
Tabel 4. 47. Sistem Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat 298
Tabel 4. 48. Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Utama untuk Transportasi Darat, Laut Dan Udara 299
Tabel 4. 49. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Barat 300
Tabel 4. 50. Luas Kawasan Hutan Lindung Per Kecamatan Di Kabupaten Manggarai Barat 305
Tabel 4. 51. Luas Kawasan Rawan Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat 307
Tabel 4. 52. Luas Kawasan Budidaya Per Kecamatan, Kabupaten Manggarai Barat 311

Tabel 5. 1. Keterkaitan Anatara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Visi dan Misi RPJMN dan Tujuan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 325
Tabel 5. 2. Keterkaitan antara Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Tujuan RPD Provinsi NTT 326
Tabel 5. 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 327

Tabel 6. 1. Strategi dan Arah Kebijakan 338
Tabel 6. 2. Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050-5889 355

Tabel 6. 3. Program Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 359
Tabel 6. 4. Matriks Penelaahan Integrasi KLHS Dalam P-RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 413

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026 458
Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas Perubahan RPJMD yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 459

Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 526
Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 528
Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 -2026 535

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1. Suhu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2019 33
Grafik 2. 2. Curah Hujan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2019..... 33
Grafik 2. 3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 – 2022..... 46
Grafik 2. 4. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antara Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2022 (Persen)..... 51
Grafik 2. 5. PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia 2020-2022 (Juta Rupiah)..... 54
Grafik 2. 6. Perbandingan PDRB Per Kapita antara Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai (Juta Rupiah)..... 55
Grafik 2. 7. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 60
Grafik 2. 8. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 61
Grafik 2. 9. Perbandingan IPM Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Kabupaten Sekitarnya Tahun 2022 66
Grafik 2. 10. Indeks Pemerataan Guru Kelas dan Mapel di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2020..... 79
Grafik 2. 11. Indeks Pemerataan Guru UN dan Mapel di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2020..... 80
Grafik 2. 12. Presentase Jalan dalam Kondisi Mantab di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2021 91
Grafik 2. 13. Jumlah Bangunan ber-IMB di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2022..... 96
Grafik 2. 14. Proporsi jumlah rumah layak huni terhadap rumah tidak layak huni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2022..... 97
Grafik 2. 15. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Maggarai Barat Tahun 2018 – 2022 Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023..... 98
Grafik 2. 16. Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2020 99
Grafik 2. 17. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat akses air minum di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2021 100
Grafik 2. 18. Jumlah Kepemilikan Jamban Rumah Tangga Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020..... 103
Grafik 2. 19. Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Maggarai Barat Tahun 2018 - 2022 106
Grafik 2. 20. Angka Kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2022 107
Grafik 2. 21. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2022 (Ton) 159
Grafik 2. 22. Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2020..... 164

Grafik 3. 1 Proporsi realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%) 195
Grafik 3. 2 Proporsi Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%)..... 196

Grafik 3. 3 Proporsi Realisasi Total Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Realisasi Total Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%) 197
Grafik 3. 4 Proporsi realisasi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022..... 198
Grafik 3. 5 Proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%) 199
Grafik 3. 6 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%)..... 200
Grafik 3. 7 Proporsi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022..... 204
Grafik 3. 8 Proporsi komponen Dana Perimbangan terhadap total Dana Perimbangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022..... 205
Grafik 3. 9 Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 207

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Hubungan Antar dokumen Perencanaan 9
Gambar 1. 2. Tahapan pembangunan dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025 9
Gambar 1. 3. Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 12
Gambar 1. 4. Peta Destinasi Pariwisata Nasional Komodo-Ruteng 18

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Manggarai Barat 25
Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Manggarai Barat 27
Gambar 2. 3. Peta Kelerengan Kabupaten Manggarai Barat 28
Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Manggarai Barat 29
Gambar 2. 5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Manggarai Barat 31
Gambar 2. 6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Manggarai Barat 32
Gambar 2. 7. Peta Penutup Lahan Kabupaten Manggarai Barat 35
Gambar 2. 8. Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Manggarai Barat 37
Gambar 2. 9. Peta Kerawanan Gempa Bumi Kabupaten Manggarai Barat 38
Gambar 2. 10. Peta Kerawanan Bencana Tsunami Kabupaten Manggarai Barat 38
Gambar 2. 11. Peta Tingkat Kerawanan Longsor di Kabupaten Manggarai Barat 39
Gambar 2. 12. Peta Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Kabupaten Manggarai Barat 40
Gambar 2. 13. Peta Tingkat Kerawanan Bencana Kekeringan Kabupaten Manggarai Barat 41
Gambar 2. 14. Peta Tingkat Kerawanan Abrasi Kabupaten Manggarai Barat 42

Gambar 5. 1. Pohon Kinerja Pariwisata Inklusif dan Berkelanjutan 336

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Aturan ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan menurut prakarsa sendiri guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya. Maka dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Dalam kerangka itu pula, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan dituntut untuk selalu dinamis dalam merespon perkembangan kondisi sosial guna mendukung peningkatan pelayanan yang berkualitas. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah menunjukkan capaian hasil yang baik di berbagai fokus dan bidang, namun di sisi lain masih terdapat kinerja yang belum memenuhi target.

RPJMD 2021-2026 memiliki 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 6 IKU yang mencapai target, 7 IKU belum tercapai, dan 1 IKU belum terdapat realisasi kinerja pada tahun 2022. IKU yang mencapai target yaitu Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), prevalensi stunting, PDRB per Kapita, Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Risiko Bencana. Adapun IKU yang belum mencapai target, yakni Indeks Pariwisata Inklusif, Indeks Desa Membangun (IDM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Reformasi Birokrasi, dan Kontribusi PAD, sedangkan 1 IKU yang belum terdapat realisasi kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender.

Beberapa IKU yang belum tercapai telah menunjukkan realisasi yang cukup baik atau mendekati target kinerja, yaitu Indeks Pariwisata Inklusif, IDM, dan tingkat kemiskinan. Ketiga indikator tersebut memiliki capaian di atas 90% dari target. Meskipun demikian, adanya kinerja yang belum tercapai tetap menunjukkan tantangan dan persoalan pembangunan yang harus direspon dan diperbaiki. Salah satu tantangan yang paling besar adalah optimalisasi potensi dan peluang yang dimiliki daerah, seperti optimalisasi sektor pariwisata dan dampak multigandanya yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Adanya kinerja yang belum dan telah tercapai tersebut membentuk urgensi untuk perubahan RPJMD. Urgensi perubahan juga terbentuk dari dinamika lingkungan strategis, yakni terkait kebijakan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dinamika kebijakan nasional antara lain terkait diundangkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta perkembangan prioritas pembangunan nasional di Kabupaten Manggarai Barat. Dinamika kebijakan provinsi paling mendasar dibentuk dari berakhirnya periode Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, sehingga di dalam perencanaan pembangunan, Provinsi NTT diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Dasar kebijakan perubahan RPJMD, yaitu Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 dilakukan guna merumuskan kembali fokus sasaran, target kinerja, strategi dan program pembangunan yang efektif. Perubahan RPJMD yang mempertimbangkan capaian kondisi internal dan eksternal diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi **Bupati Edistasius Endi, SE** dan **Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes** yang dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 26 Februari 2021. Visi pembangunan jangka menengah yang akan dicapai adalah **"Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap"**.

Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat ini melalui proses penyusunan Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan penetapan Perda Perubahan RPJMD. Muatan Perubahan RPJMD terdiri dari 9 bab yang secara substansi merupakan sinkronisasi antara pendekatan perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas, serta tematik-holistik, integratif, dan spasial. Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dipadukan dengan berbagai pendekatan perencanaan yang kemudian dioperasionalisasikan ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah, yang disertai kerangka pendanaan indikatif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2041; dan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah haruslah saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah harus pula berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya Perubahan RPJMD ini akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD. Hubungan antar dokumen perencanaan secara sistematis tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.

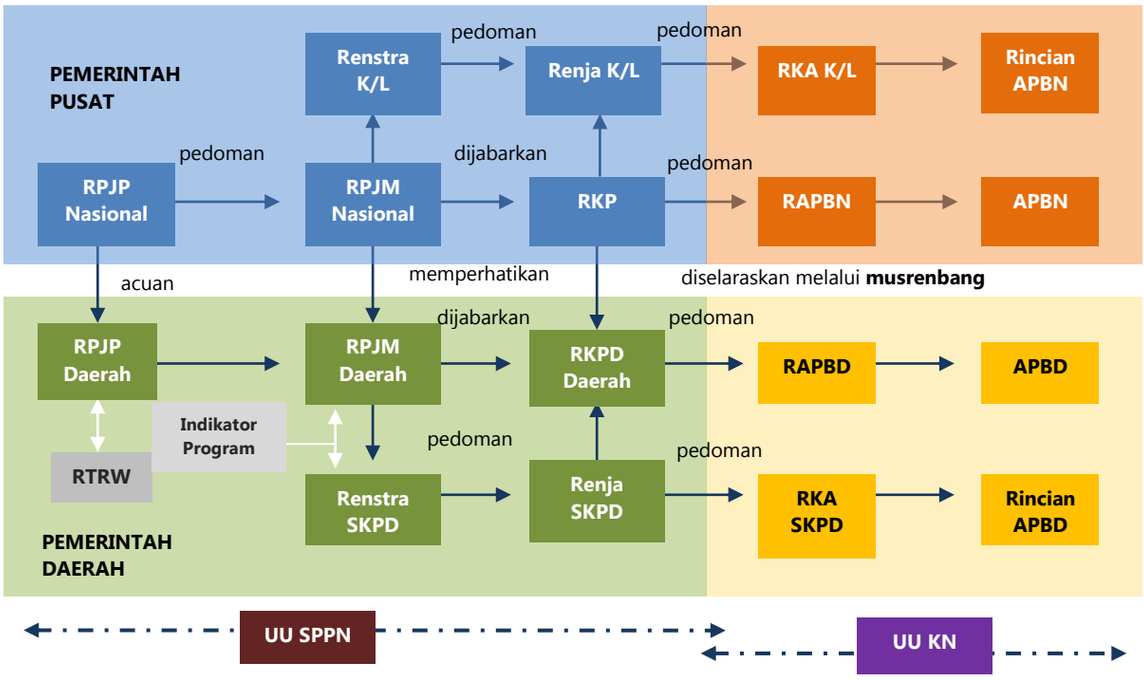

Gambar 1. 1. Hubungan Antar dokumen Perencanaan

1.3.1. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2005-2025

RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Secara ringkas, tahapan pembangunan dan arahan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015-2025 dapat dilihat pada gambar 1.2.

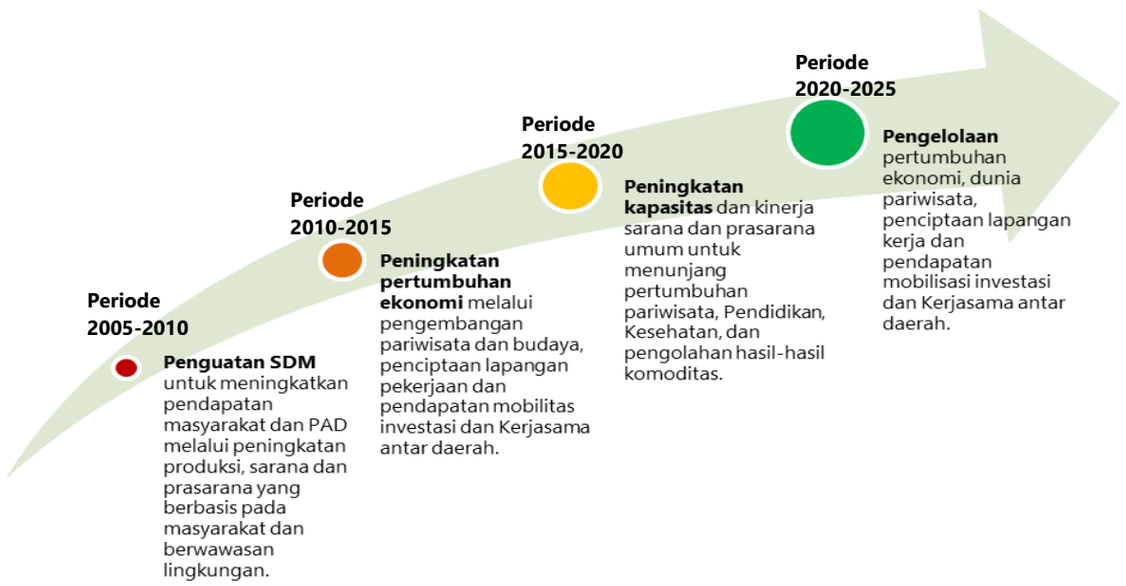

Gambar 1. 2. Tahapan pembangunan dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa RPJMD periode 2021-2026 merupakan tahapan terakhir atau tahap IV dari RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2015-2025. Prioritas pembangunan pada dokumen RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2015-2025 ini menjadi pedoman substansi dalam penyusunan RPJMD tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan tahap ini diprioritaskan pada aspek-aspek berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pengelolaan dunia pariwisata
3. Penciptaan lapangan kerja dan pendapatan
4. Mobilisasi investasi
5. Kerja sama antardaerah

Lima fokus arah kebijakan periode keempat RPJPD tersebut telah relevan dengan substansi misi RPJMD 2021-2026 yang memuat tentang pembangunan pariwisata inklusif, peningkatan daya saing ekonomi daerah yang telah memuat upaya peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang salah satunya memiliki sasaran untuk meningkatnya pendapatan asli daerah dan memiliki strategi terkait peningkatan kerjasama daerah.

1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

RPJMD bagian dari upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Dalam upaya mencapai visi tersebut, RPJMN memiliki posisi sebagai bahan penyusunan RPJMD dan RPJMD merupakan instrumen penjabaran dari program RPJMN. Pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD juga harus memperhatikan 9 Misi RPJMN atau Nawa Cita Jilid 2 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi dan misi RPJMN memiliki fokus intervensi yang termuat dalam 7 agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuta stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara mencakup kegiatan prioritas: pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan strategis; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan desa, Kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

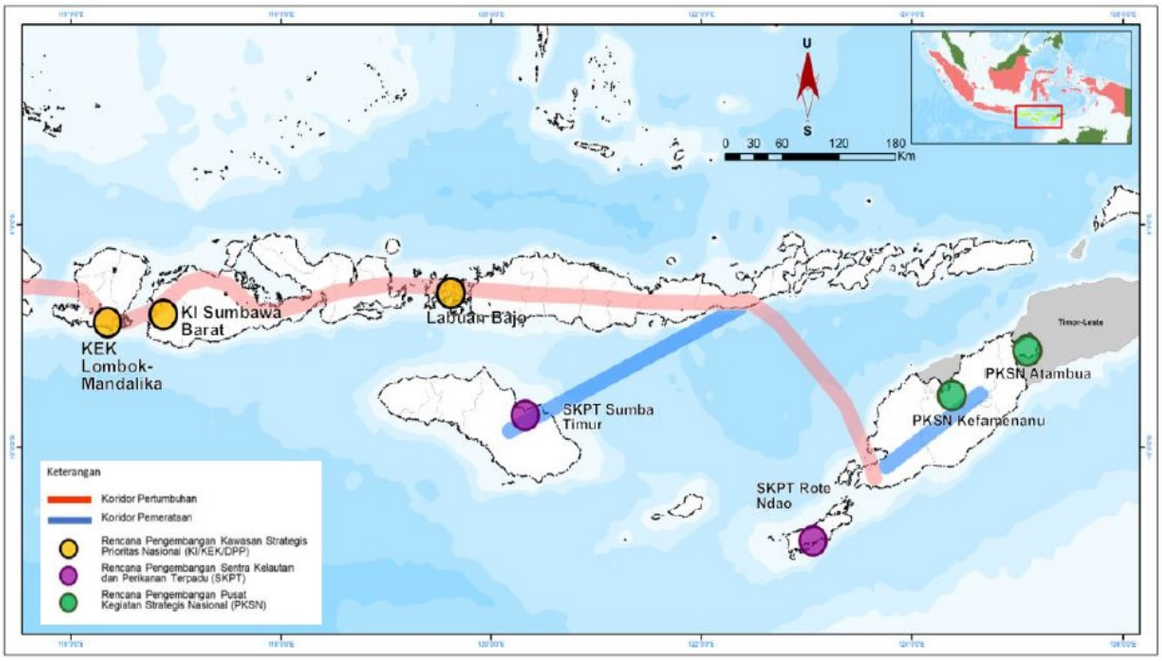

Gambar 1. 3. Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024

Sumber: Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024

Kabupaten Manggarai Barat bagian dari Koridor Pertumbuhan dalam pembangunan wilayah Nusa Tenggara di RPJMN 2020-2024. Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan sebagai bagian pengembangan Kawasan strategis dengan proyek prioritas: destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa; serta pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, antara lain yang berlokasi di Labuan Bajo berupa jalan akses Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Pelabuhan, dan Bandara. Labuan Bajo sebagai 10 detinasi pariwisata prioritas RPJMN diharapkan membawa manfaat bagi peningkatan devisa pariwisata dan peningkatan jumlah perjalanan dan kedatangan wisatawan mancanegara.

1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat di awal periode menjadi bagian untuk mencapai Visi RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 yaitu "NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"**,** serta mendukung pelaksanaan misi mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dan adil; membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*); meingkatkan ketersediaan dan

kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; serta mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Provinsi NTT pada tahun 2023 seiring berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Oleh karena itu, Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat memiliki waktu yang tepat untuk memperkuat sinergi dengan perencanaan pembangunan Provinsi NTT. Dokumen RPD tidak memiliki visi dan misi, sehingga Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat mengacu kepada rumusan tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTT 2024-2026

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Tumbuhnya ekonomi daerah
	Terciptanya lapangan kerja
	Meningkatnya daya beli masyarakat
	Menurunnya kemiskinan masyarakat
	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
	Terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat
	Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan
Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan, dan mitigasi bencana	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah
	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim
Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif

Tujuan RPD Provinsi NTT telah memuat aspek pembangunan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Tujuan RPD tersebut selaras dengan visi dan misi Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 yang tidak berubah di dalam dokumen perubahan RPJMD. Visi dan misi Manggarai Barat memuat tentang pembangunan pariwisata yang inklusif, pembangunan SDM yang berkualitas, pengembangan daya saing ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan, dan pembangunan tata kelola pemerintahan.

1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat

Penyusunan RPJMD harus mempedomani tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan pola ruang di dalam RTRW. Kebijakan pembangunan yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 diarahkan selaras dengan kebijakan penataan ruang, baik dalam rangka mengoptimalkan kawasan peruntukan budidaya untuk pengembangan potensi dan akselerasi pembangunan ekonomi daerah, maupun menjaga kawasan lindung. Tujuan penataaan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat untuk mewujudkan ruang daerah yang produktif dan berwawasan lingkungan sebagai pusat distribusi barang dan jasa sesuai ruang peruntukan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari:

1. Pemantapan sistem perkotaan yang mendukung kegiatan pariwisata, pertanian dan kelautan untuk peningkatan pelayanan wisata dan peningkatan komoditi pertanian serta potensi kelautan unggulan;
2. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
3. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman yang mendukung pelayanan wisata serta peningkatan komoditi pertanian dan potensi kelautan unggulan;

4. Pengelolaan sistem transportasi yang terpadu untuk membantu kelancaran bagi masyarakat untuk melakukan pergerakan interaksi fungsional antar pusat kegiatan satu dengan yang lainnya;
5. Penyediaan fasilitas pelayanan bagi rumah-rumah masyarakat;
6. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi;
7. Pengembangan kawasan budidaya meliputi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan kawasan pariwisata, agropolitan, dan minapolitan;
8. Pengaturan zona pemanfaatan dan zona konservasi pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, guna mencegah terjadinya konflik kepentingan, serta pengaturan mekanisme penegakan hukum yang mengikutsertakan masyarakat;
9. Mengembangkan kawasan pariwisata, agropolitan, minapolitan dan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, sebagai kawasan strategis kabupaten;
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat yang berkualitas, adil, dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana. Kebijakan penataan ruang daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

1. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi;
2. Pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama;
4. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya;

5. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang;
7. Pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Terkait dengan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat, terutama dalam konteks pembangunan sektor pariwisata, maka perlu ditelaah beberapa ketentuan terkait pembangunan pariwisata di dalam RTRW Provinsi NTT. Kawasan Pariwisata didefinisikan sebagai Kawasan dengan luas tertentu yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk pembangunan atau pendirian fasilitas pariwisata terutama hotel berbintang dan fasilitas penunjang lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan kepariwisataan. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari peruntukan pariwisata alam, budaya, dan buatan/taman rekreasi. Kawasan Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam. Pengembangan Kawasan peruntukan pariwisata dijalankan melalui basis klaster. Kabupaten Manggarai Barat berada dalam Klaster II yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Nagekeo dengan konsep pengembangan pulau penuh pesona yang bertumpu pada binatang Komodo sebagai ciri khas serta kehidupan dan peninggalan budaya masyarakat. RTRW Provinsi NTT memberikan arahan pengembangan klaster-klaster pariwisata sebagai berikut:

1. Menonjolkan citra kawasan berdasarkan konsep pengembangan yang telah ditetapkan di masing-masing klaster, sebagai aset lokal yang berkelanjutan, yang harus dipertahankan dan dilestarikan
2. Memanfaatkan pariwisata alam laut dan darat yang bersifat ekowisata
3. Turut serta dalam konservasi alam dan melestarikan alam
4. Mengembangkan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan atraksi budaya
5. Menghindari kawasan terbangun untuk pariwisata pantai dan laut sehingga dapat menikmati keindahan alami panorama pesisir pantai dan laut

6. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata tidak dapat dialihfungsikan sebagai kawasan peruntukan lainnya yang dapat merusak fungsi pariwisata alam Kawasan
7. Mempertahankan dan meningkatkan pengembangan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi sub sektor pariwisata
8. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
9. Mengembangkan kawasan pariwisata alam yang tanggap dengan kemungkinan adanya bencana alam baik di darat dan di laut
10. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang pelayanan prima di kawasan wisata potensial
11. Melakukan penyusunan sistem data dan informasi kawasan pariwisata sebagai paket wisata wilayah Provinsi

1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Kawasan Peruntukan Pariwisata diatur dalam RTRW Nasional yang didefinisikan sebagai Kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup Sebagian areal dalam kawasan lindung atau Kawasan budi daya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Adapun kriteria suatu Kawasan ditetapkan sebagai peruntukan pariwisata, yaitu memiliki obyek dan daya tarik wisata; serta menudukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Penerapan kriteria tersebut diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi
2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya
3. Tidak mengganggu fungsi lindung
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah
7. Menciptakan kesempatan kerja
8. Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam

9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

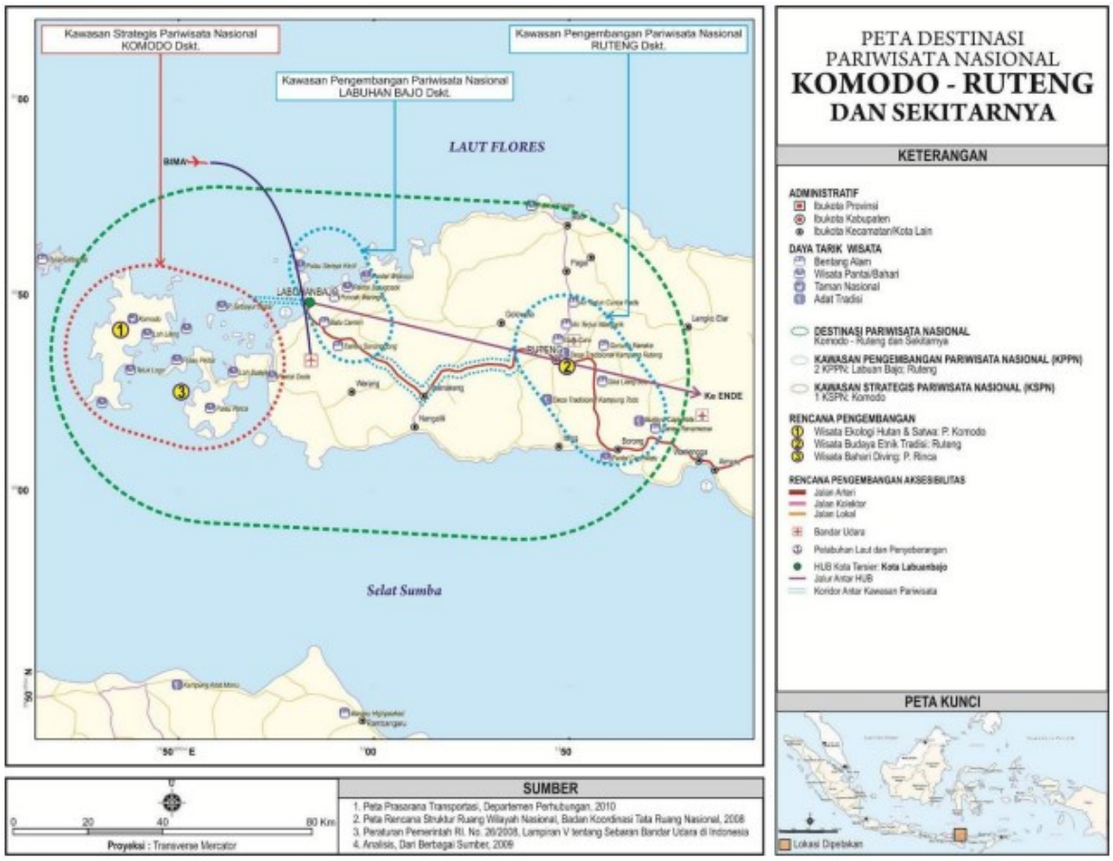

Gambar 1. 4. Peta Destinasi Pariwisata Nasional Komodo-Ruteng

Sumber: Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011

Kebijakan nasional yang lebih detail dalam pengaturan Kepariwisataan adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Kabupaten Manggarai Barat memiliki posisi strategis karena ditetapkan ke dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Komodo-Ruteng dan sekitarnya, yang di dalamnya terdapat terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo dan sekitarnya, serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Labuan Bajo dan sekitarnya. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 telah merumuskan kriteria prioritas pembangunan DPN dan KSPN sebagai berikut:

1. Komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan
2. Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis
3. Posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional
4. Potensi kecenderungan produk wisata masa depan

5. Kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat
6. Citra yang sudah dikenal secara luas
7. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia
8. Keunggulan daya saing internasional

1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS RPJMD memiliki peran untuk memandu agar prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi perencanaan jangka menengah daerah. Penyusunan KLHS RPJMD dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Bentuk integrasi tersebut secara operasional adalah prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi setidaknya mulai dari pendahuluan; analisis gambaran kondisi daerah; pemetaan masalah dan isu strategis pembangunan; rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan; strategi dan arah kebijakan pembangunan; serta program pembangunan dan perangkat daerah.

1.3.8. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD

Rencana Strategis (Renstra) memiliki peran untuk menjabarkan program pembangunan daerah dan perangkat daerah yang terdapat di dalam RPJMD melalui rumusan kegiatan dan sub kegiatan. Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra memiliki peran strategis untuk mencapai target indikator kinerja kepala daerah yang ditopang dengan pencapaian indikator kinerja kepala perangkat daerah beserta struktur yang berada di bawahnya.

1.3.9. Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD

Perencanaan jangka menengah harus dijabarkan setiap tahunnya melalui RKPD. Oleh karena itu, di dalam RPJMD juga memiliki tema atau fokus pembangunan tahunan untuk memandu sinkronisasi dengan perencanaan

tahunan. RKPD juga memiliki peran penting untuk sinkronisasi antara RPJMD dengan dukungan penganggaran setiap tahun dalam bentuk APBD.

1.3.10. Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan RPJMD

Desa memiliki posisi penting bagi efektivitas pembangunan di daerah, karena desa menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sinergi perencanaan desa dengan pemerintah daerah diperlukan agar terdapat pembagian peran yang jelas dan sinergis berbasis kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan dengan menyelaraskan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Perubahan RPJMD adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan/perangkat daerah, dan kerangka pendanaan, sehingga dapat menjadi panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat.

1.4.2. Tujuan

Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 ini disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan sasaran, target kinerja, strategi dan program pembangunan yang fokus dan efektif dalam mencapai visi dan misi;
2. Pedoman untuk penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat gambaran umum Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat kinerja keuangan lima tahun sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini memuat visi dan misi RPJMD, serta tujuan dan sasaran beserta indikatornya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk strategi dan arah kebijakan, serta program pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat kerangka pendanaan sebagai dasar alokasi belanja dan program perangkat daerah serta indikatornya yang berbasis setiap urusan pemerintah daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci di setiap urusan pemerintah daerah.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi pembangunan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran umum Kabupaten Manggarai Barat dari aspek geografi dan demografinya, daya saing serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran ini menunjukkan potensi dasar yang dimiliki Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi sumber daya bagi pembangunan daerah pada masa datang. Bab ini juga memberikan gambaran dasar tentang kekuatan dan kelemahan yang perlu diatasi pada masa yang akan datang.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub-bab ini berisi tentang gambaran kondisi geografi maupun demografi Kabupaten Manggarai Barat. Aspek geografi yang dijelaskan pada sub-bab ini meliputi karateristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi akan mendeskripsikan struktur dan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Manggarai Barat dapat dideskripsikan melalui beberapa hal, meliputi: letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, geologi, hidrologi, dan klimatologi. Data-data tersebut penting untuk membangun kebijakan berbasis spasial. Penjabaran karakteristik lokasi dan wilayah dilengkapi dengan analisis terhadap data sekunder dan narasi kualitatif yang relevan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas wilayah 9.450 km². Luas daratannya sebesar 2.947,50 km². Daratan tersebut terdiri dari Pulau Flores, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Longos, dan beberapa pulau kecil lainnya. Sisanya adalah lautan

dengan luas 6.052,50 km², atau sekitar 64% dari total luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Barat

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Komodo	Labuan Bajo	813.53	19
2	Boleng	Terang	486.56	11
3	Sano Nggoang	Werang	360.19	15
4	Mbeliling	Warsawe	231.53	15
5	Lembor	Wae Nakeng	145.68	15
6	Welak	Orong	319.19	16
7	Lembor Selatan	Lengkong Cepang	275.87	15
8	Kuwus	Golo Welu	54.55	12
9	Ndoso	Ndoso	124.95	15
10	Macang Pacar	Bari	42.66	10
11	Kuwus Barat	Nandong	174.64	13
12	Pacar	Kampung Pacar	112.12	13
Jumlah			**3141.47**	**169**

Sumber: Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka, 2022

Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 kecamatan, yakni Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Lembor, Kecamatan Welak, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Ndoso, Kecamatan Pacar dan Kecamatan Kuwus Barat. Jumlah desa/kelurahan yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Barat adalah 169 desa/kelurahan, yang terdiri dari 164 desa dan 5 kelurahan.

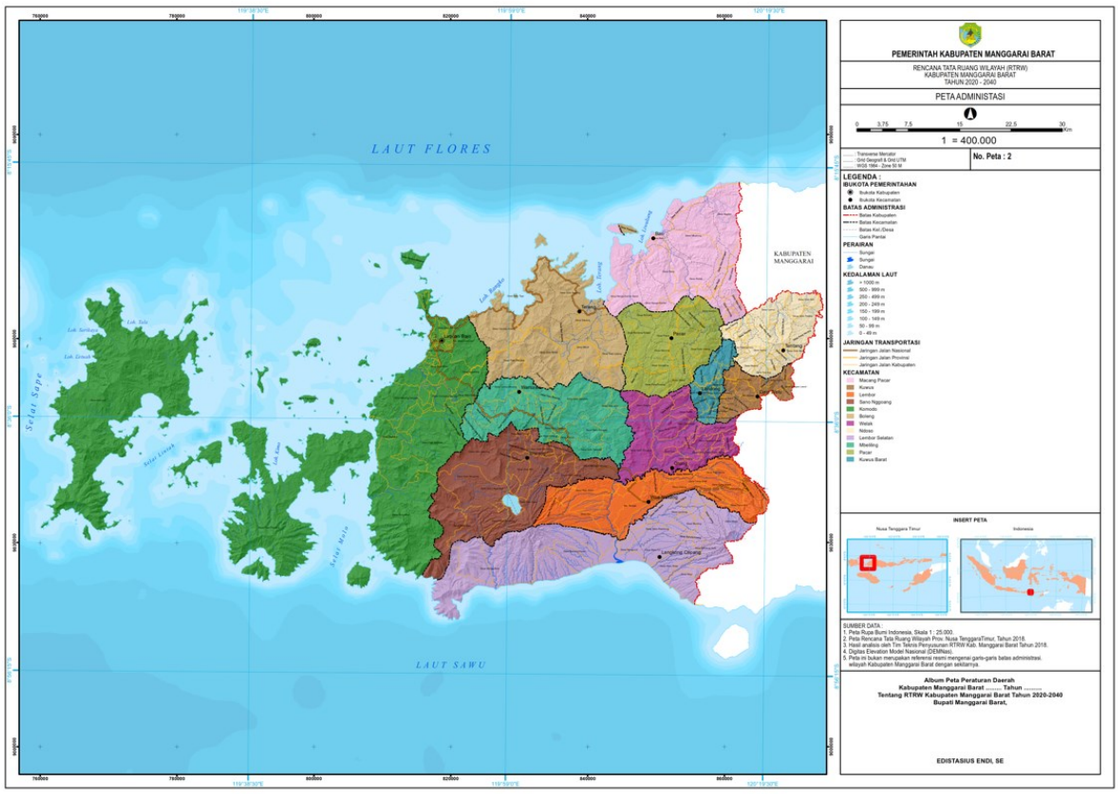

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Manggarai Barat

Sumber Data: Dokumen RTRW Kab. Manggarai Barat, 2023

Kecamatan terluas di Kabupaten Manggarai Barat adalah Kecamatan Komodo. Luas total area dari Kecamatan Komodo sebesar 813,53 Km^2, atau mencapai 25,88% dari luasan total Kabupaten Manggarai Barat. Kecamatan Kuwusa Barat menjadi daerah dengan luasan administratif terkecil di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu dengan luasan total 42,55 Km^2. Batas-batas Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi NTB;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Manggarai Barat terletak di ujung barat pulau Flores di antara 08°.14’ - 09°.00’ Lintang Selatan, dan 119°.21’ - 120.20’ Bujur Timur. Secara geografis, wilayah daratan Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh daerah dataran tinggi dan pegunungan. Daerah permukiman dan lahan pertanian

umumnya berada di lereng-lereng dan lembah antar pegunungan. Keberadaan lembah antar pegunungan yang relatif luas tersebut berada di bagian selatan hingga barat wilayah daratan Pulau Flores.

Keberadaan Kabupaten Manggarai Barat yang berada di ujung paling barat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi keuntungan strategis secara geografis. Akses yang sangat baik dan berkontribusi sebagai pintu bagian barat dari Provinsi NTT untuk menghubungkan dengan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi di daerah Indonesia bagian barat dan tengah, seperti Kota Surabaya dan Kota Makassar. Selain itu, keberadaan obyek dan daya tarik pariwisata yang juga potensial, seperti keberadaan Pulau Komodo dan keindahan alam Labuan Bajo, menjadikan Kabupaten Manggarai Barat berpeluang besar menjadi penghubung wisata paket utama di Indonesia, seperti dengan Bali dan Toraja.

2.1.1.3. Topografi

Klasifikasi topografi di Kabupaten Manggarai Barat terbagi menjadi empat. Dominan kelas topografi berada di ketinggian 100 – 500 m. Kelas topografi dengan unit terkecil yaitu di ketinggian > 1.000 m. Rincian wilayah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan ketinggian dari permukaan laut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Persentase Ketinggian Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Klasifikasi Topografi (Ha)				Jumlah
		0-100m	100-500m	500-1.000m	>1.000m	
1	Boleng	11013	16907	1474	0	29394
2	Komodo	47434	45550	6005	0	98989
3	Kuwus	304	32	4003	1023	5362
4	Kuwus Barat	2089	707	3688	68	6552
5	Lembor	1458	11905	5538	1806	20707
6	Lembor Selatan	7637	19121	6134	2754	35646
7	Macang Pacar	8659	13653	4602	0	26914
8	Mbeliling	322	14279	6187	116	20904
9	Ndoso	5802	0	3717	389	9908
10	Pacar	1407	7192	7773	0	16372
11	Sano Nggoang	340	17679	9765	265	28049
12	Welak	194	11442	3425	290	15351
Total		**86659**	**158467**	**62311**	**6711**	**314148**

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Manggarai Barat, 2023

Topografi Manggarai Barat dengan dominasi wilayah berketinggian sedang antara 100 – 500 m di atas permukaan laut (dpl) mencerminkan karakteristik dataran yang bergelombang, dengan dominasi morfologi berupa perbukitan. Sedangkan kelas topografi > 1.000 m memiliki morfologi berupa pegunungan, dengan kelerengan yang curam. Kontrol secara genesis yang dipengaruhi adanya tenaga endogen maupun eksogen menjadi salah satu indikator penyebab berkembanganya fisiografis Kabupaten Manggarai Barat.

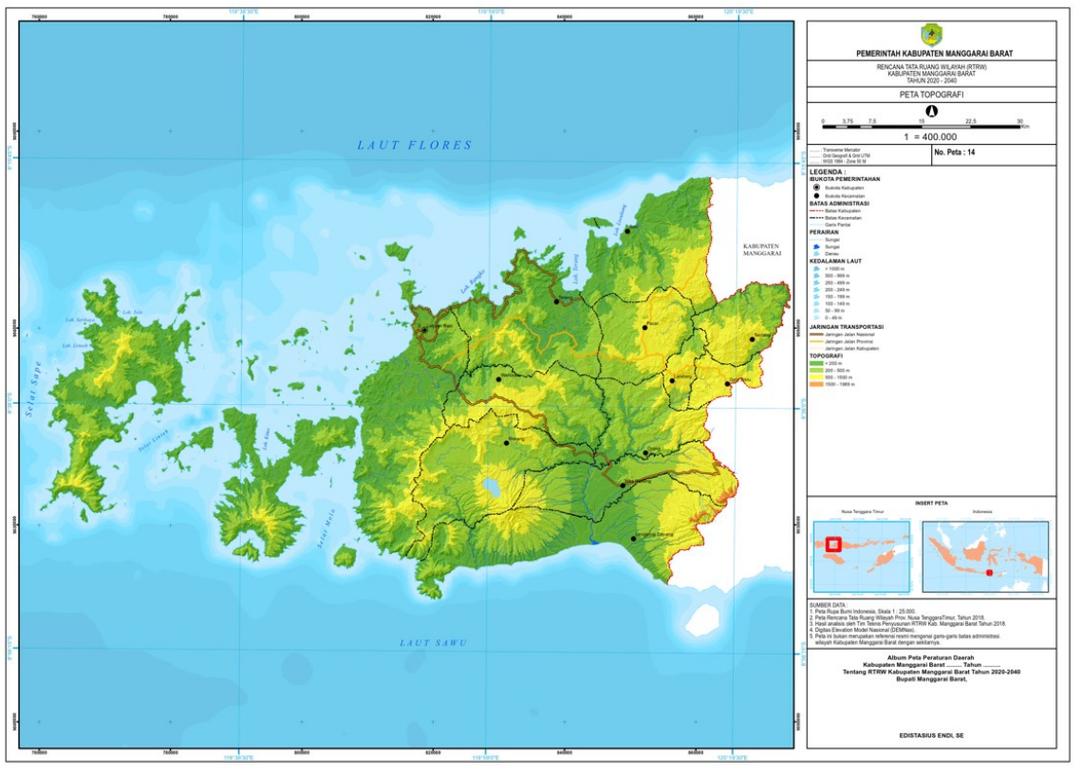

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Manggarai Barat, 2023

Dataran rendah hingga dataran tinggi yang direpresentasikan dengan warna hijau muda, hijau tua hingga kuning di peta, mendominasi seluruh Kabupaten Manggarai Barat, kecuali di bagian sisi Timur Laut. Adanya variasi karakteristik topografi, morfologi maupun kelerengan dari suatu wilayah, berimplikasi kompleks dalam penyusunan suatu perencanaan dan pengembangan wilayah. Beberapa aspek tersebut tentu menjadi aspek yang juga harus dipertimbangkan dalam menerapkan suatu kebijakan pembangunan wilayah.

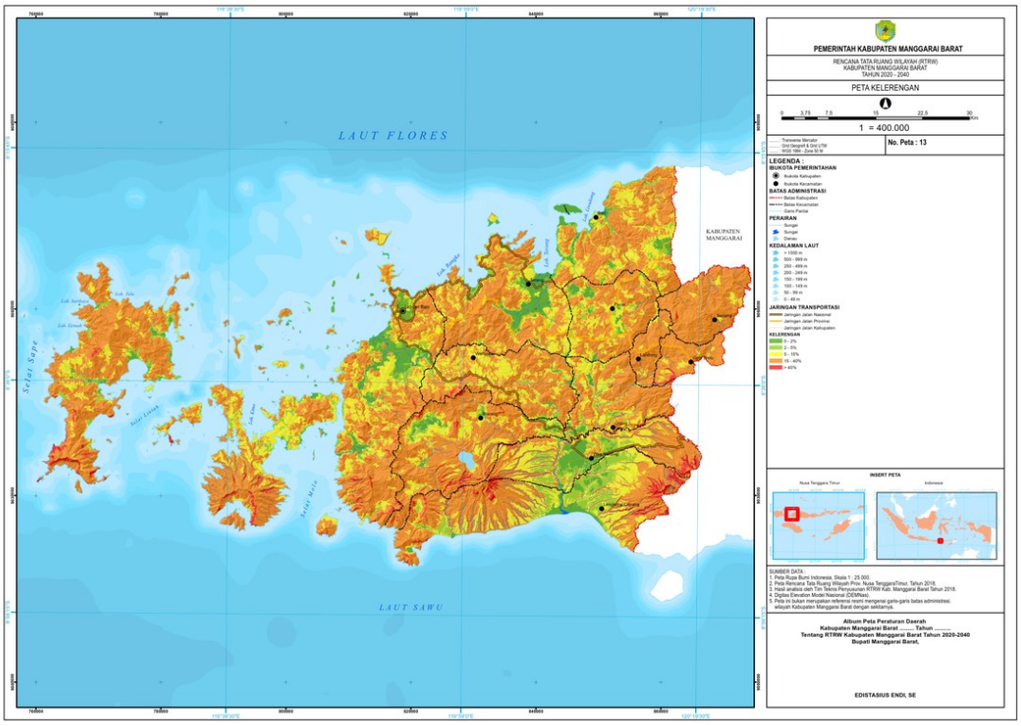

Gambar 2. 3. Peta Kelerengan Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Manggarai Barat, 2023

Kemiringan lereng di Kabupaten Manggarai Barat diklasifikasikan ke dalam 5 kelas. Kelas kemiringan lereng dominan di kemiringan 16% – 35% atau terkategori pada kelas lereng 5. Artinya, kelerengan di Kabupaten Manggarai Barat didominasi dengan kelas lereng agak curam. Kondisi dengan kelerengan tersebut memberikan peluang terjadinya beberapa bencana, terutama bencana tanah gerak ataupun longsor. Informasi mengenai kondisi lereng menjadi salah satu aspek lain yang penting, khususnya dalam menerapkan pengaturan zonasi maupun aspek kebijakan penataan ruang.

2.1.1.4. Geologi

Tatanan geologi Kabupaten Manggarai Barat mempunyai kondisi yang cukup rumit dan kompleks. Kompleksitas dari kondisi geologi juga berimplikasi terhadap geomorfologi di Kabupaten Manggarai Barat. Posisi dari Kabupaten Manggarai Barat yang terdapat di Pulau Flores, menjadikan keberadaannya terletak di antara Busur Sunda di bagian barat dan Busur Banda di bagian timur. Selain itu, posisi Kabupaten Manggarai Barat juga berada di antara perbatasan antara Cekungan Flores di bagian utara dan Cekungan Sawu di bagian selatan.

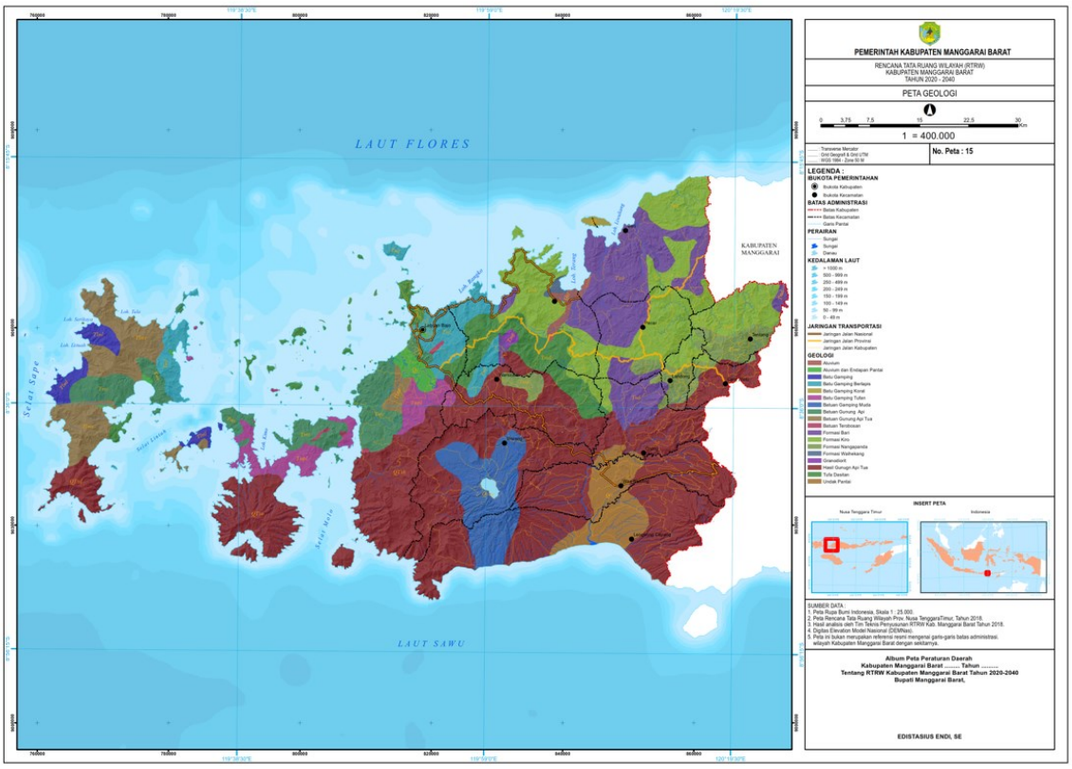

Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Manggarai Barat, 2023

Sisi utara tersusun atas batuan berumur tersier dengan dominasi batuan berupa batuan beku, klastika gunung api dan batuan sedimen. Sedangkan bagian selatan didominasi dengan batuan berumur kuarter dengan keberadaan gunung api yang masih aktif. Dominasi formasi batuan yaitu QTvb, yang mencerminkan formasi batuan tersusun dari material gunung api. Tatanan formasi geologi yang kompleks dan juga unik tersebut juga memberikan potensi geologis yang dapat dimanfaatkan. Potensi geothermal yang ditemukan di Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang dapat dikembangkan sebagai sumber energi. Sementara potensi geowisata juga dapat dikembangkan. Potensi tersebut antara lain berasal dari dari bentukan asal karst yang berasal dari formasi batuan gamping, seperti gua-gua gamping, travertine, stalagtit, dan stalagmit.

2.1.1.5. Jenis Tanah

Karakteristik topografi Kabupaten Manggarai Barat berupa dataran hingga bergunung. Kondisi tersebut berimplikasi pada variasi sebaran jenis tanah di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan peta jenis tanah yang dikeluarkan oleh

Lembaga Penelitian Tanah Bogor, variasi jenis tanah di wilayah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah mediteran, litosol dan latosol.

Tabel 2. 3. Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016

Kecamatan	Jenis Tekstur Tanah (km^2)			Jumlah (km^2)
	Mediteraan	Litosol	Latosol	
Komodo	183,11	578,20	1,98	763,29
Boleng	42,09	413,20	1,22	456,51
Sano Nggoang [1]	389,38	91,20	74,60	555,81
Lembor [2]	292,25	97,33	5,93	3395,51
Welak	220,54	75,27	3,67	299,48
Kuwus [3]	186,84	-	21,60	208,44
Macang Pacar [4]	20,00	249,05	-	269,05
Manggarai Barat	1.334,21	1.504,25	109,00	2.947,46

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Manggarai Barat, 2023

[1] Termasuk Kecamatan Mbelling

[2] Termasuk Kecamatan Lembor Selatan

[3] Termasuk Kecamatan Ndoso dan Kuwus Barat

[4] Termasuk Kecamatan Pacar

Tanah Mediteran memiliki lapisan solum yang tebal dengan kemampuan menahan airnya sedang, sehingga kepekaan terhadap erosi juga sedang. Selain itu, tekstur tanah mediteran berupa geluh hingga lempung. Persebaran jenis-jenis tanah mediteran banyak dijumpai di Kecamatan Sano Nggoang dan Lembor. Jenis tanah selanjutnya yaitu tanah latosol. Karakteristik tanah latosol diantaranya mempunyai horizon yang telah berkembang, dengan tekstur lempung, dan struktur remah hingga gumpal. Adapun persebaran tanah latosol banyak ditemukan di Kecamatan Sano Nggoang. Adapun distribusi variasi jenis tanah di Kabupaten Manggarai Barat disajikan pada peta sebagai berikut.

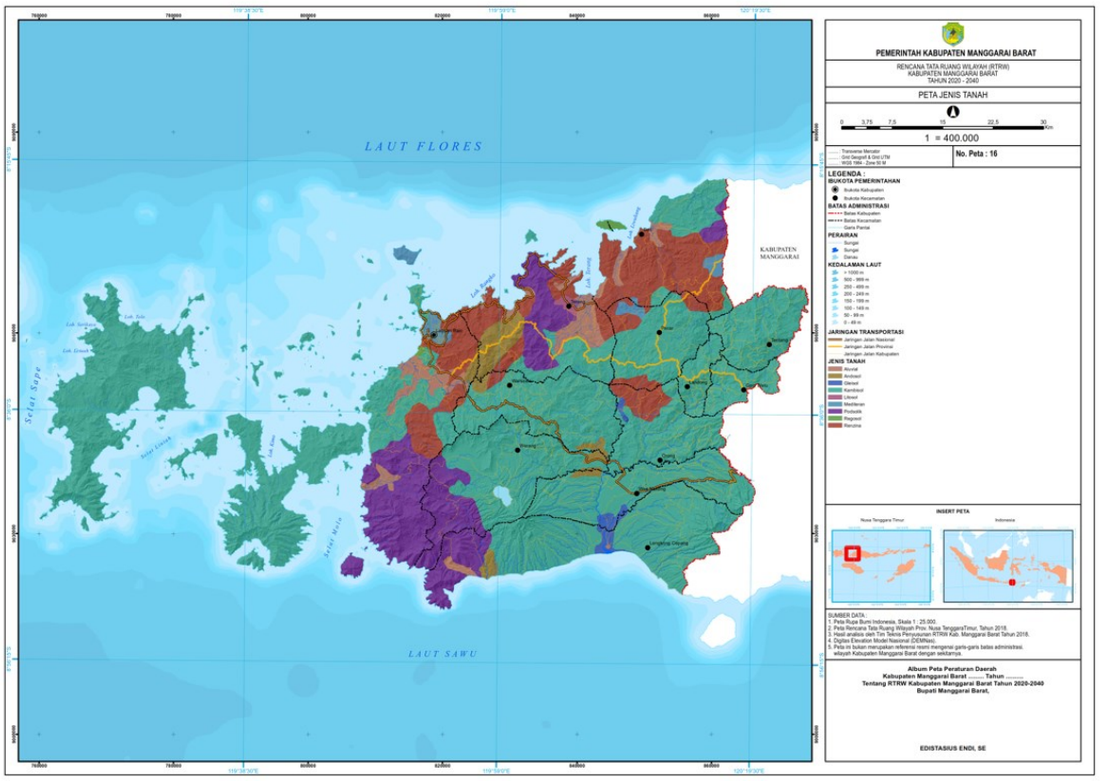

Gambar 2. 5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Manggarai Barat, 2023

Jenis tanah litosol merupakan tanah mineral dengan sedikit perkembangan di atas batuan, sehingga kedalaman profil kurang dari 50 cm. Kedangkalan profil tanah memicu kurangnya kadar air, sehingga kemungkinan untuk diolah sebagai lahan pertanian sangat terbatas. Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya berpasir dengan dominasi solum yang umumnya tidak berstruktur. Distribusi tanah litosol dominan berada di Kecamatan Komodo.

Jenis tanah mediteran dan latosol, yang memiliki tekstur dominan berupa geluh hingga lempung, memiliki karakteristik cenderung mudah menyerap air, namun sulit untuk meloloskan air. Kondisi tersebut berimplikasi pada karakterisitik kembang susut tanah yang sangat signifikan (stabilitas tanah kurang baik). Sehingga, diperlukan upaya stabilisasi terhadap jenis tanah tersebut, apabila dimanfaatkan sebagai tanah dasar dalam pendirian suatu bangunan maupun jalan.

2.1.1.6. Hidrologi

Air permukaan yang ditemukan di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 15 sungai dan satu danau. Sungai mengalir dari pegunungan ke arah utara dan selatan. Dari 15 sungai yang berada di daerah ini, kurang lebih 25% di antaranya

mengalir sepanjang tahun, sedangkan selebihnya merupakan sungai musiman. Sungai-sungai utama yang mengalir sepanjang tahun di antaranya adalah sungai Wae Jamal, Wae Jare, Wae Mese, Wae Impor, Wae Reno, Wae Ncuring, Wae Bakok Pa'a, Wae Longge.

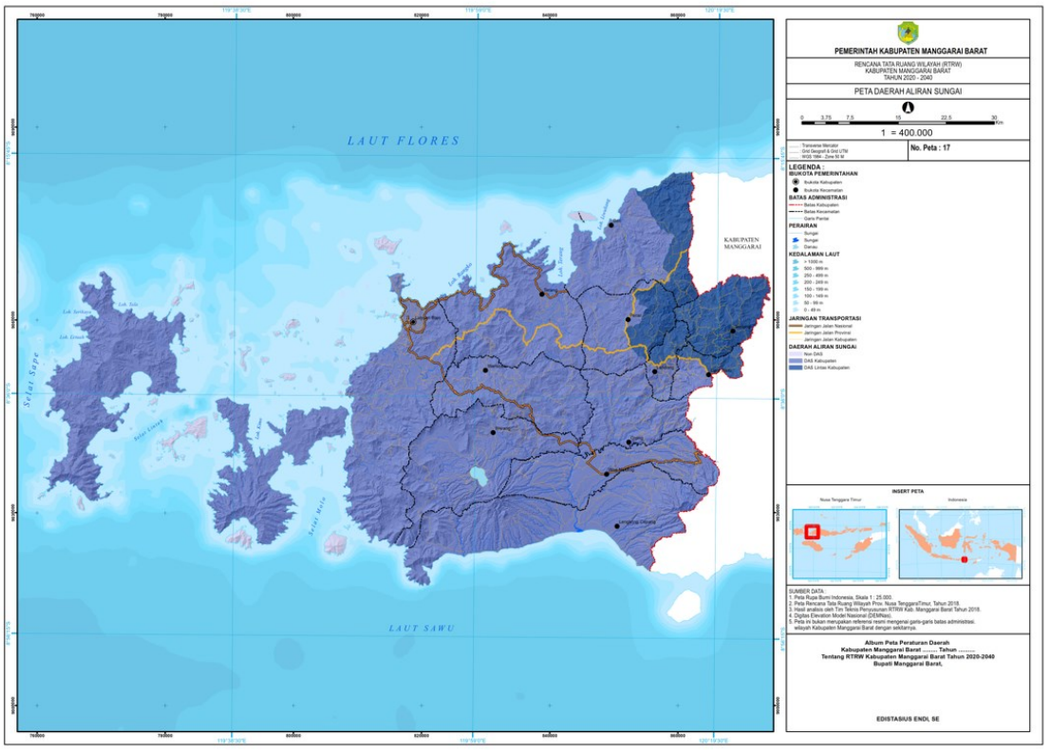

Gambar 2. 6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Manggarai Barat, 2023

Adanya kesamaan karakteristik fisiografis, dan juga arah aliran, kesatuan dari unit – unit sungai tersebut, tergabung menjadi beberapa daerah aliran sungai (DAS), menjadikan Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari beberapa DAS. Daerah aliran sungai yang dimaksud antara lain, DAS Jamal, Nae, Bereh, Terang, Raru, Komodo dan Rinca. DAS yang memiliki luasan yang terbesar adalah DAS Jamal, yaitu kurang lebih 85.974,14 Ha. Selain itu, DAS Jamal juga termasuk dalam DAS lintas kabupaten, karena juga mencakup dari sebagian wilayah dari Kabupaten Manggarai Barat di bagian tengah. Dengan demikian, dalam pengelolaan setiap DAS, diperlukan kajian yang saling terintegrasi antar wilayah, dari segi regulasi maupun secara teknisi.

2.1.1.7. Klimatologi

Kondisi iklim dari Kabupaten Manggarai Barat dapat diidentifikasi dari kondisi suhu dan curah hujan tahunannya. Analisis suhu yang dilakukan selama 6 tahun

menunjukkan bahwa rata-rata suhu di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 27,24^{o}C. Suhu minimun dalam kurun waktu 6 tahun sebesar 25,4^{o}C dan suhu maksimum 28.7^{o}C.

Grafik 2. 1. Suhu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2019

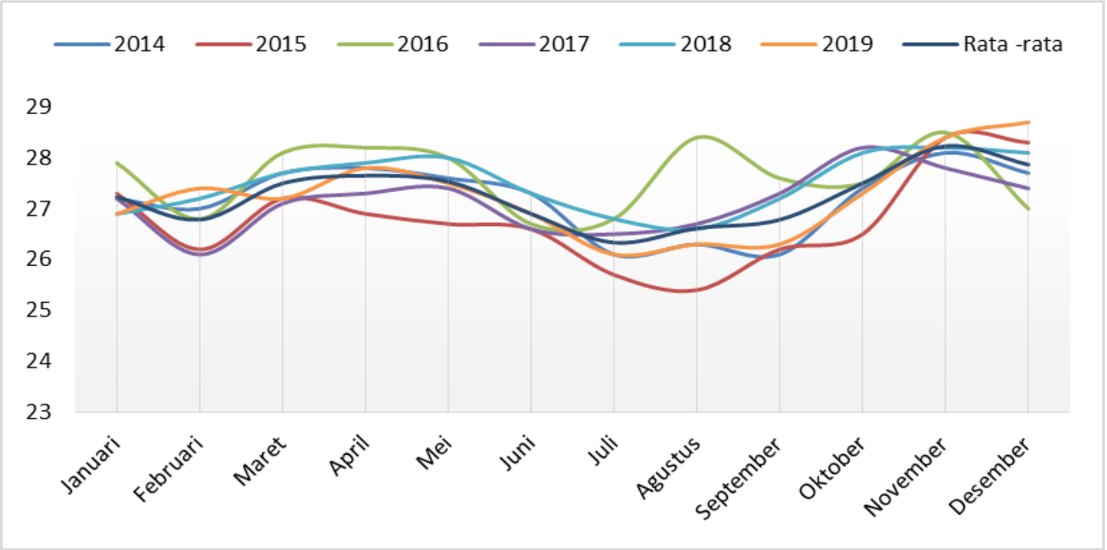

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2020

Rata-rata suhu di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2014 – 2019 relatif dalam kondisi yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya perubahan suhu yang signifikan. Kondisi ini juga merepresentasikan belum adanya aktivitas – aktivitas yang memicu kenaikan suhu secara drastis. Selain itu, suhu yang relatif stabil juga mencerminkan kondisi tutupan lahan masih dalam kondisi yang baik, belum terjadi perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun secara masif.

Grafik 2. 2. Curah Hujan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2019

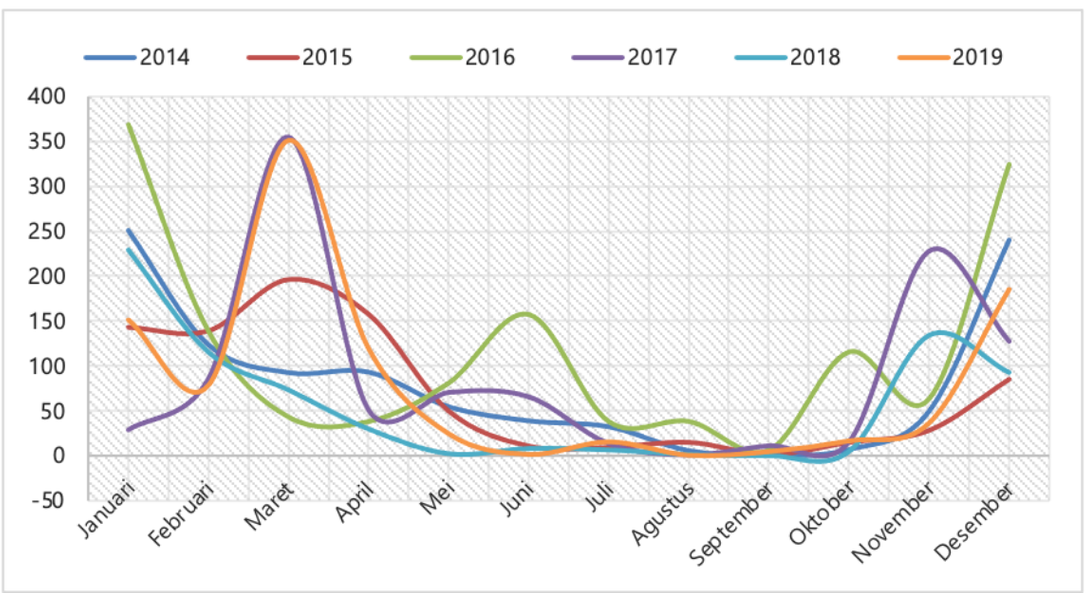

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2020

Curah hujan Kabupaten Manggarai Barat menurut klasifikasi tipe curah hujan di Indonesia tergolong dalam tipe monsunal. Artinya, musim hujan hanya terjadi sekali periode dalam 1 tahun, dan biasanya terjadi pada Bulan Oktober hingga Bulan April, mengikuti pergerakan angin musim barat dan timur. Rata-rata curah hujan dalam kurun waktu 6 tahun, yaitu tahun 2014 hingga 2019 sebesar 994,7 mm/tahun, dengan curah hujan tertinggi 1406 mm/tahun dan curah hujan terendah 696,9 mm/tahun. Besaran curah hujan di Kabupaten Manggarai Barat, jika diklasifikasikan dalam iklim menurut Schmidt Ferguson termasuk dalam iklim E atau agak kering. Kondisi tersebut sejalan dengan tipe dari musim hujan yang berlangsung di Kabupaten Manggarai Barat yaitu tipe monsunal. Curah hujan tipe monsunal dihasilkan dari angin yang berhembus dari benua Asia menuju Indonesia. Uap air yang dibawa menuju Indonesia bagian timur akan semakin sedikit, karena telah melewati wilayah Indonesia bagian barat. Dengan demikian, seringkali periode musim hujan di Kabupaten Manggarai Barat sangat singkat jika dibandingkan dengan periode musim kemarau.

2.1.1.8. Penggunaan Lahan

Tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah tentu memperhatikan beberapa aspek, seperti kondisi kelerangan, morfologi, karakteristik tanah maupun topografi dari wilayah tersebut. Aspek tersebut yang selanjutnya menjadi indikator dalam menentukan kelas kemampuan lahan terhadap penggunaan lahan tertentu. Distribusi spasial penggunaan lahan di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada peta berikut ini.

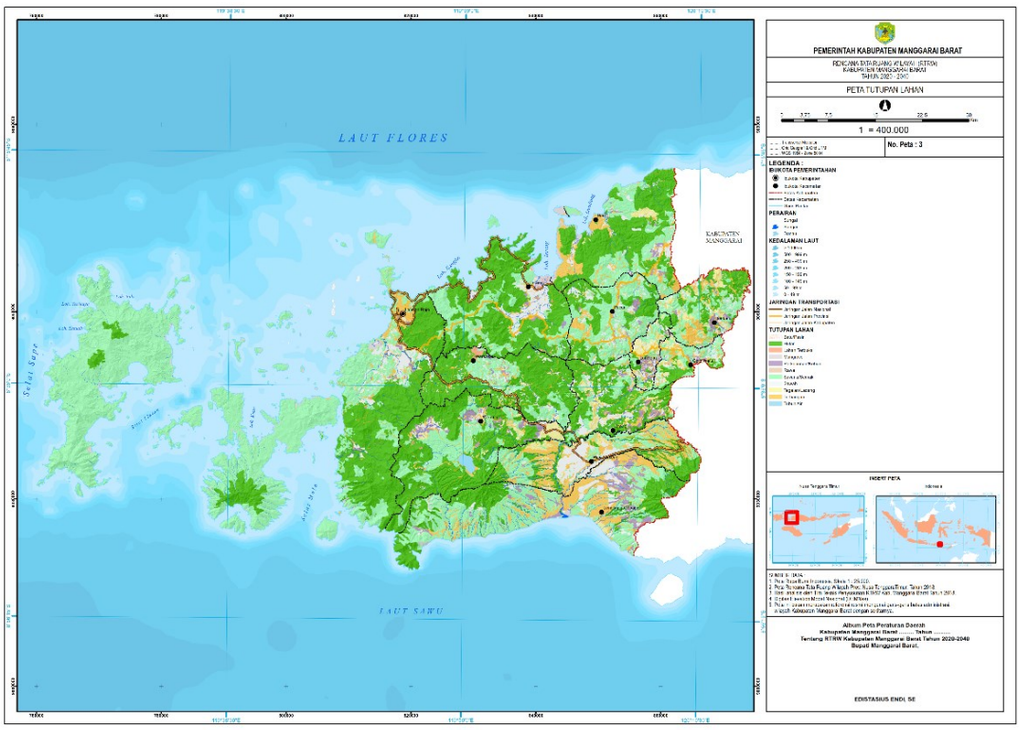

Gambar 2. 7. Peta Penutup Lahan Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Penutup lahan mencerminkan kegiatan manusia pada suatu lahan dengan luasan tertentu. Penutup lahan dapat dibagi menjadi lahan hijau dengan fungsi utama kawasan lindung dan kawasan penyangga serta lahan budidaya yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan. Tutupan lahan hijau di Kabupaten Manggarai Barat berupa hutan, semak dan belukar, mangrove, dan savanna. Tutupan hutan mencakup 37,37% luas wilayah di Kabupaten Manggarai Barat dan terdistribusi pada lereng atas morfologi perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan terjal hingga curam. Pada lereng bawah dan kaki perbukitan, tutupan lahan semak dan belukar lebih mendominasi sehingga jenis tutupan ini menutupi 28,19% wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Tutupan padang rumput sabana merupakan ciri khas Pulau Flores sebagai wilayah beriklim kering di Kepulauan Indonesia. Tutupan sabana Sebagian besar ditemukan pada bagian barat dengan luas tutupan mencapai 11,25%. Eksistensi bioma sabana ditemukan juga pada sepanjang pesisir barat pada Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar yang menjadi daya tarik wisata.

Penutup lahan kawasan budidaya di Kabupaten Manggarai Barat berupa permukiman, perkebunan, sawah, dan tegalan/ladang. Lahan terbangun atau kawasan pusat permukiman mencakup 2,06% area di Kabupaten Manggarai Barat.

Sebaran permukiman terkonsentrasi pada pusat ibukota kecamatan dengan pola linier mengikuti sepanjang jaringan jalan utama. Pemanfaatan lahan untuk lahan terbangun atau permukiman di Kabupaten Manggarai Barat tergolong rendah dibandingkan pemanfaatan lahan untuk budidaya lainnya. Kawasan pertanian mencakup kegiatan perkebunan seluas 0,59%; sawah seluas 5,70%; dan tegalan seluas 8,23%. Budidaya pertanian tersebar pada topografi lembah dan dataran kaki perbukitan dengan kemiringan datar hingga landai.

Tabel 2. 4. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)						Jumlah
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Kelas VI	Kelas VII	
1	Boleng	2.939,41	-	2.939,41	4.703,06	587,88	1.763,65	12.933,41
2	Komodo	17.818,39	2.969,73	26.727,59	31.677,14	11.878,93	47.515,72	138.587,50
3	Kuwus	53,61	-	107,23	321,68	-	-	482,52
4	Kuwus Barat	-	-	196,59	458,71	-	65,53	720,83
5	Lembor	1.656,48	207,06	-	1.242,36	-	-	3.105,90
6	Lembor Selatan	3.208,10	1.069,37	356,46	2.851,65	356,46	712,91	8.554,95
7	Macang Pacar	1.076,53	-	807,4	1.345,67	-	807,4	4.037,00
8	Mbeliling	836,16	-	627,12	2.717,51	418,078	-	4.598,87
9	Ndoso	-	-	297,26	693,60	-	-	990,86
10	Pacar	163,71	-	327,42	818,54	-	-	1.309,67
11	Sano Nggoang	2.524,46	560,99	560,99	2.524,46	1.121,98	280,50	7.573,38
12	Welak	1.381,55	153,51	921,03	2.149,07	-	-	4.605,16
Total		**31.658,40**	**4.960,66**	**33.868,50**	**51.503,45**	**14.363,33**	**51.145,71**	**187.500,05**

Sumber: Dokumen Reisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

Penggunaan lahan dengan dominasi berupa tegalan / ladang berkorelasi dengan kelas kemampuan lahan yang dominan di Kabupaten Manggarai Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelas kemampuan lahan dominan pada kelas IV. Artinya, terdapat aspek – aspek yang menjadi faktor pembatas, lahan – lahan di Kabupaten Manggarai Barat untuk dikembangkan. Faktor tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karakteristik kelerengan, jenis tanah, morfologi maupun topografinya.

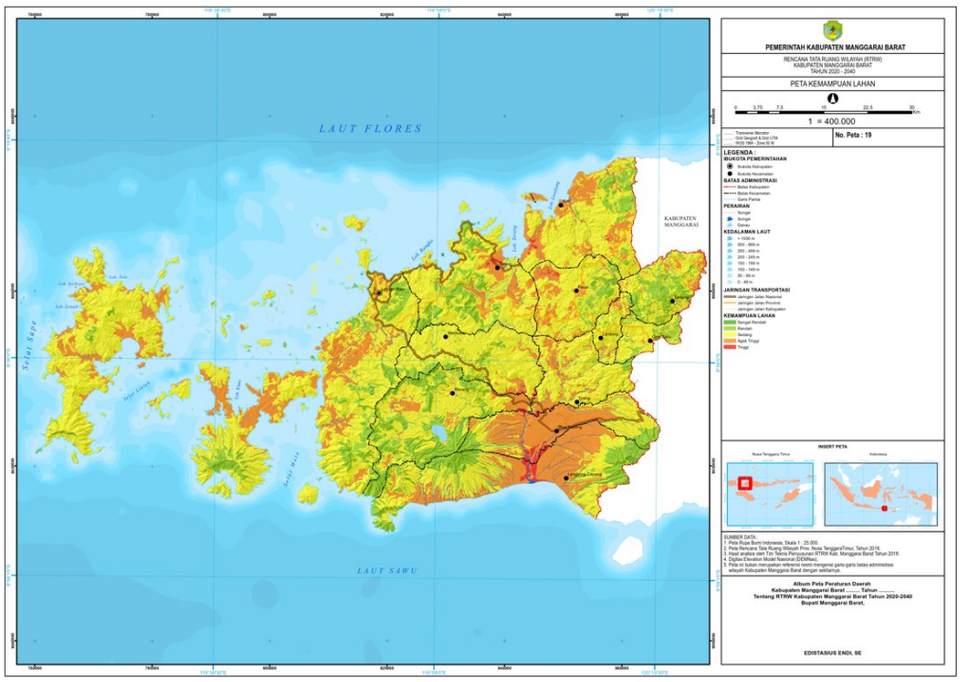

Gambar 2. 8. Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Terdapat 6 kelas kemampuan lahan yang terdistribusi di Kabupaten Manggarai Barat. Hanya terdapat 19,53% lahan yang termasuk dalam kategori kemampuan lahan kelas I dan II (direpresentasikan dengan warna hijau tua dan muda pada peta), sedangkan 80,47% sisanya merupakan lahan dengan kelas III hingga VII. Semakin tinggi suatu lahan terkategori dalam kelas kemampuan lahan, maka semakin banyak juga faktor pembatas yang menghambat lahan tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara produktif.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Bencana didefinisikan sebagai fenomena alamiah dan non-alamiah yang mengakibatkan kerugian material, kehilangan nyawa, dan kerusakan ekosistem lingkungan. Karakteristik fisik wilayah perbukitan dan pegunungan yang berasosiasi langsung dengan perairan laut menjadikan Kabupaten Manggarai Barat tergolong rawan mengalami kejadian tsunami, gempa bumi, dan tanang longsor. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi infrastruktur daerah dan mengancam perikehidupan didalamnya. Melalui pemodelan spasial, diketahui distribusi tingkat kerawanan bencana tsunami, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, banjir, dan abrasi di Kabupaten Manggarai Barat.

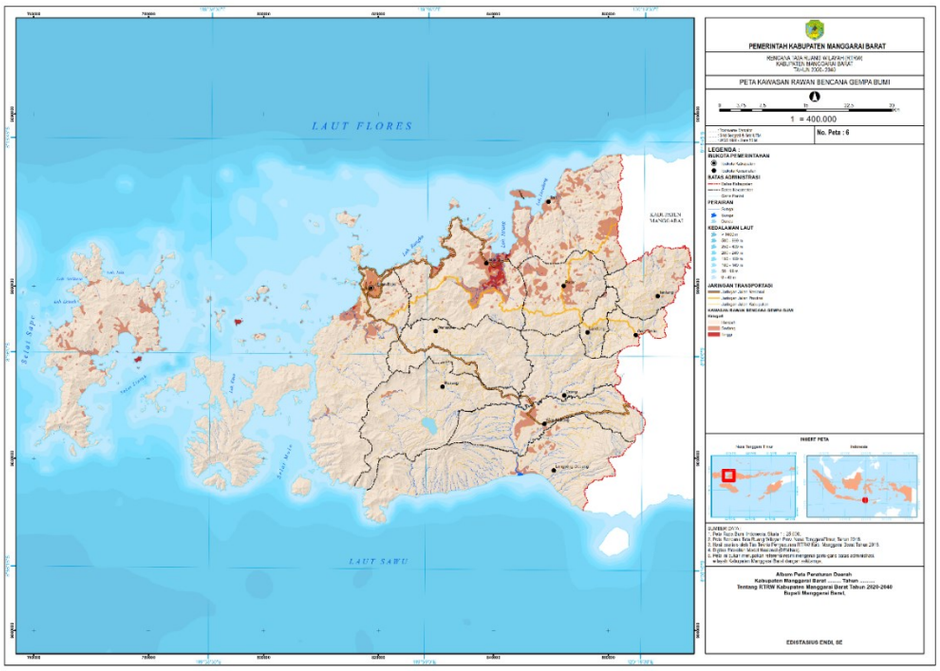

Gambar 2. 9. Peta Kerawanan Gempa Bumi Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Tingkat kerawanan gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat dominan berada di sisi utara dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi. Bahaya gempa bumi terutama ditimbulkan oleh Sesar Flores yang tergolong sesar lokal dan bertipe sesar naik. Sesar Flores dapat menimbulkan bahaya gempa bumi hingga skala magnitude 7. Selain kerawanan gempa bumi, pergerakan sesar tersebut berpotensi menimbulkan tsunami.

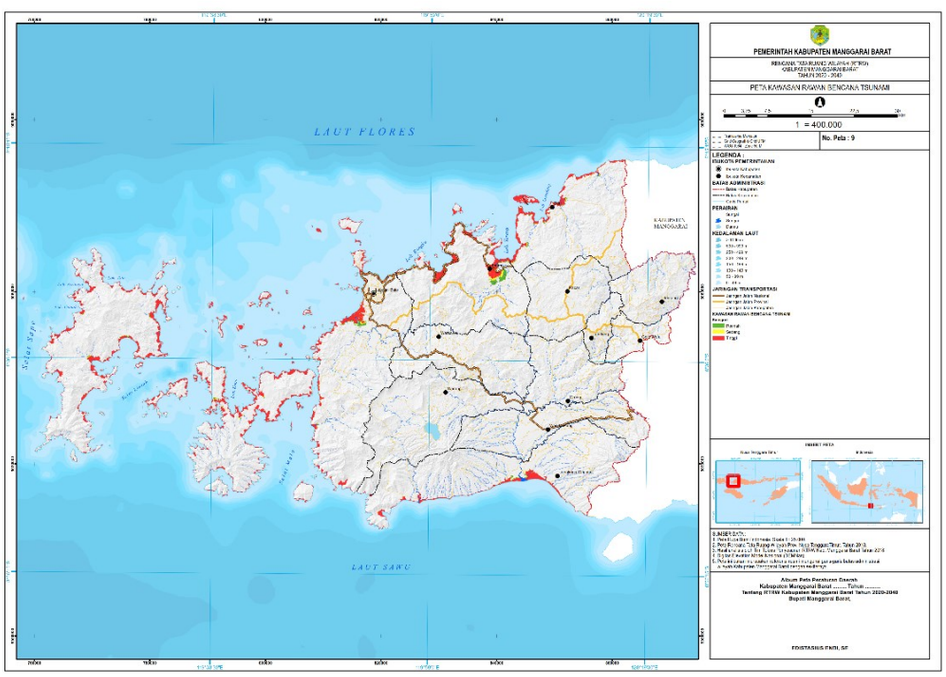

Gambar 2. 10. Peta Kerawanan Bencana Tsunami Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Daerah dengan tingkat kerawanan tsunami tertinggi berasosiasi langsung dengan perairan laut karena berada dalam radius yang dekat dengan pusat gempa Zona Megathrust Segmen Sumba. Tingkat kerawanan semakin menurun seiring dengan semakin jauhnya jarak dari garis pantai dan sempadan sungai utama. Kerawanan tsunami yang tinggi dipengaruhi oleh faktor morfologi dataran rendah, kelerengan landai hingga datar, serta jarak lokasi yang dekat dengan garis pantai dan sempadan sungai. Kota Labuan Bajo dan pusat Kecamatan Reok memiliki tingkat kerentanan bencana tsunami yang lebih tinggi dianding daerah lainnya karena menjadi pusat permukiman penduduk, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan kehilangan yang lebih besar.

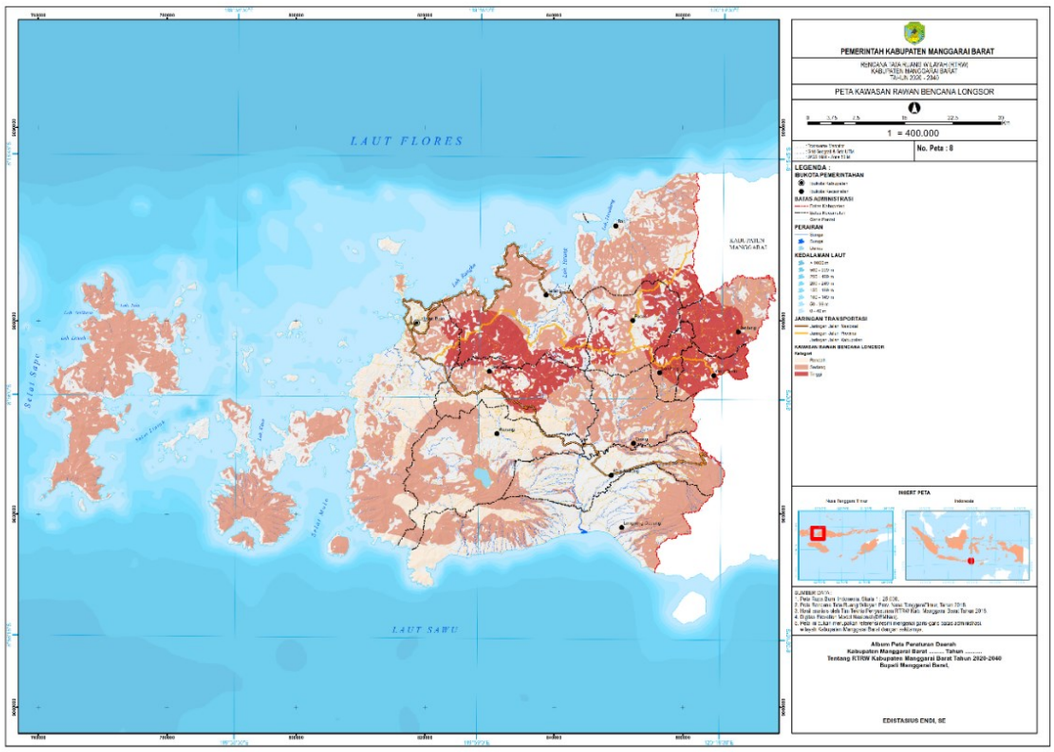

Gambar 2. 11. Peta Tingkat Kerawanan Longsor di Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Bencana longsor diakibatkan oleh fenomena perpindahan atau pergerakan massa batuan dan atau tanah yang menuruni lereng. Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan tanah adalah kelerengan dan jenis tanah. Tingkat kerawanan longsor tinggi di Kabupaten Manggarai Barat berada pada morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar 15%-40% (curam) dan didominasi jenis tanah mediteran. Tanah mediteran peka terhadap erosi karena tersusun atas butir lanau dengan karakteristik ikatan antar butir yang lemah. Jika dipicu dengan

curah hujan tinggi dan penggunaan lahan yang tidak sesuai akan mudah menyebabkan pergerakan tanah.

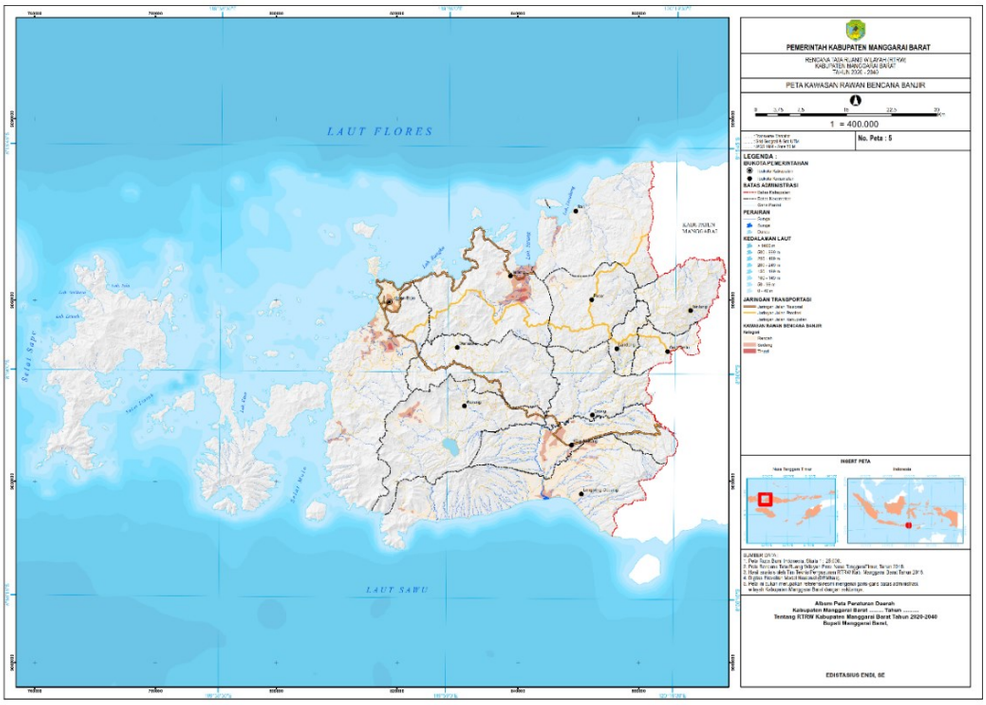

Gambar 2. 12. Peta Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Bagian sisi utara Kabupaten Manggarai Barat didominasi tingkat kerawanan banjir yang tinggi karena berasosiasi dengan aliran sungai dengan lembah yang lebih lebar. Bagian sisi selatan Kabupaten Manggarai Barat juga terdapat aliran sungai dengan lembah yang lebar namun dengan jenis tanah bertekstur geluh. Jenis tanah di bagian sisi utara bermaterial alluvium dengan komposisi tekstur lempung yang lebih mendominasi. Tekstur lempung memiliki permeabilitas yang buruk sehingga air mudah menggenang jika penataan dan peruntukan ruang tidak sesuai.

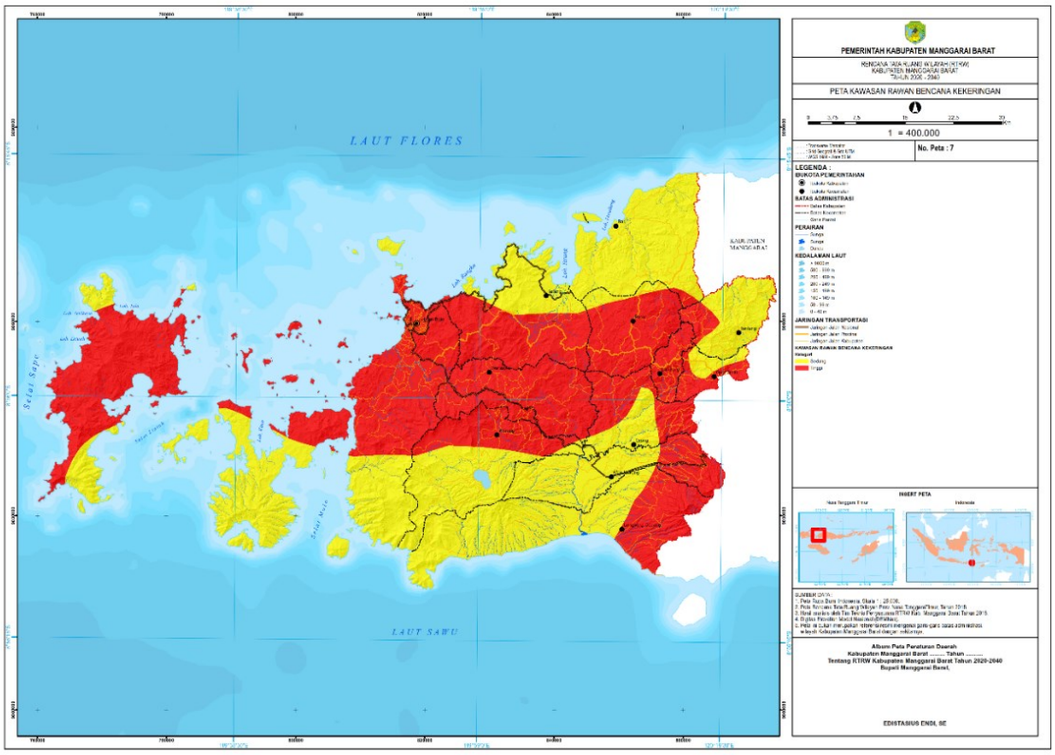

Gambar 2. 13. Peta Tingkat Kerawanan Bencana Kekeringan Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Manggarai Barat rawan kekeringan dengan kategori tinggi. Kerawanan bencana kekeringan di Kabupaten Manggarai Barat dipengaruhi oleh faktor iklim monsunal. Iklim monsoon membagi secara tegas antar periode bulan hujan dan bulan kering pada suatu wilayah, sehingga curah hujang tidak terjadi sepanjang tahun. Faktor lain yang mempengaruhi kondisi kekeringan adalah topografi wilayah. Wilayah dengan morfologi perbukitan dan pegunungan cenderung lebih rawan mengalami kekeringan lahan jika penggunaan lahan tidak dapat melindungi dan mempertahankan kawasan *recharge area.*

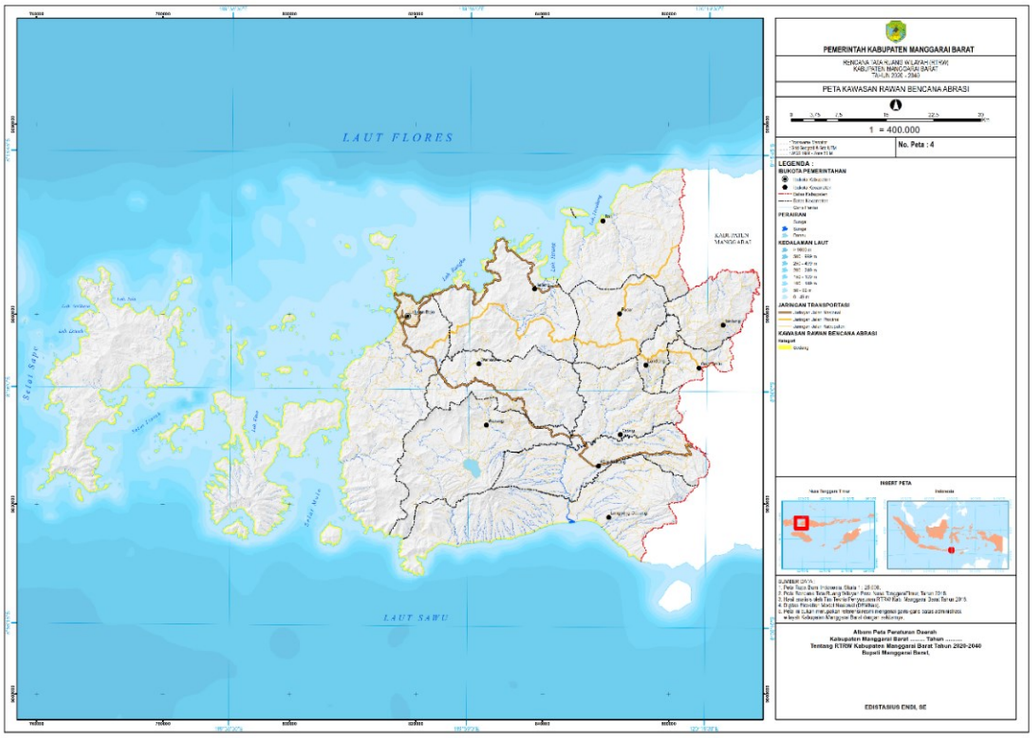

Gambar 2. 14. Peta Tingkat Kerawanan Abrasi Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Abrasi merupakan fenomena pengikisan material pantai oleh tenaga gelombang dan atau arus air laut. Abrasi cenderung bersifat destruktif yang mengakibatkan garis pantai mundur ke arah daratan. Tingkat kerawanan abrasi sedang berada di seluruh garis pantai Kabupaten Manggarai Barat. Abrasi yang terjadi terus menerus akan merusak perlindungan alami garis pantai sehingga daratan mudah tergenang banjir air laut (bajir rob). Manajemen abrasi dapat dilakukan dengan mambangun perlindungan alami garis pantai seperti penanaman hutan bakau atau membangun pelindung buatan seperti pemecah gelombang dan normalisasi garis pantai.

Tabel 2. 5. Jenis Potensi Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat

No	Wilayah/Kecamatan	Jenis Potensi Bencana
1	Komodo	1. Kebakaran 2. Gempa Bumi 3. Tanah Longsor 4. Banjir 5. Abrasi 6. Stunami 7. Angin Putting Beliung 8. Gunung Api 9. Kekeringan 10. Endemi Menular 11. Konflik Sosial 12. Gelombang Pasang
2	Boleng	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Stunami 7. Abrasi 8. KonflikSosial 9. Kekeringan 13. Endemi Menular 14. Gelombang Pasang
3	Mbeliling	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular
4	Sano Nggoang	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular 9. Gunung Api

No	Wilayah/Kecamatan	Jenis Potensi Bencana
5	Lembor Selatan	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular 9. Abrasi 10. Gelombang Pasang
6	Lembor	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular
7	Welak	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular
8	Kuwus dan Kuwus Barat	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular
9	Ndoso	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular

No	Wilayah/Kecamatan	Jenis Potensi Bencana
10	Macang Pacar dan Pacar	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Stunami 7. Abrasi 8. Konflik Sosial 9. Kekeringan 10. Endemi Menular 11. Gelombang pasang

Sumber Data: BPBD Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Potensi bencana alam pada masing-masing kecamatan berbeda satu sama lain. Kecamatan Komod, Boleng, dan Lembor memiliki potensi jenis bencana yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lain. Perbedaan potensi bencana dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, lahan, dan sosial budaya masyarakat.

Data BPBD Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 9 jenis bencana yang memiliki tingkat risiko yang sedang hingga tinggi di Kabupaten Manggarai Barat. Jenis bencana tersebut di antarannya yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gelombang tinggi dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Berikut data yang menyajikan tingkat risiko dari setiap jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 6. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Manggarai Barat

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Lahan Terpapar (Ha)	Kerugian (Juta Rupiah)
1	Banjir	Sedang	39.436	12.954,06	621.014,00
2	Banjir bandang	Tinggi	5.310	2.721,06	140.458,48
3	Gempa bumi	Tinggi	256.269	-	2073061,33
4	Tsunami	Tinggi	4.945	8.406,81	233.990,84
5	Tanah longsor	Tinggi	120.286	174.848,92	1.314.131,06
6	Gelombang ekstrim dan abrasi	Sedang	3.059	7.021,62	68.647,28
7	Cuaca ekstrim	Tinggi	87.579	-	2.688.801,00
8	Kekeringan	Tinggi	243.156	192.053,46	2.869.385,08
9	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi	155.236	120.732,63	-

Sumber Data: Dokumen KRB Kabupaten Manggarai Barat, 2018

Jumlah penduduk terpapar terbanyak terjadi pada bencana gempa bumi dan kekeringan. Hal tersebut terjadi karena bencana tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan bencana kekeringan dan tanah longsor paling tinggi berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara bencana gempa bumi, cuaca ekstrim, dan kekeringan berpotensi menyebabkan kerugian paling tinggi secara ekonomi.

2.1.3. Demografi

Data kependudukan merupakan suatu aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Kondisi kependudukan, atau yang biasa disebut demografi, memberikan gambaran umum terkait pemerataan perkembangan masyarakat dalam hal populasi hingga penyebaran penduduk. Dengan demikian, aspek kependudukan menjadi komponen internal yang sangat penting dalam pengembangan suatu daerah. Adapun tiga hal yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi.

Grafik 2. 3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 – 2022

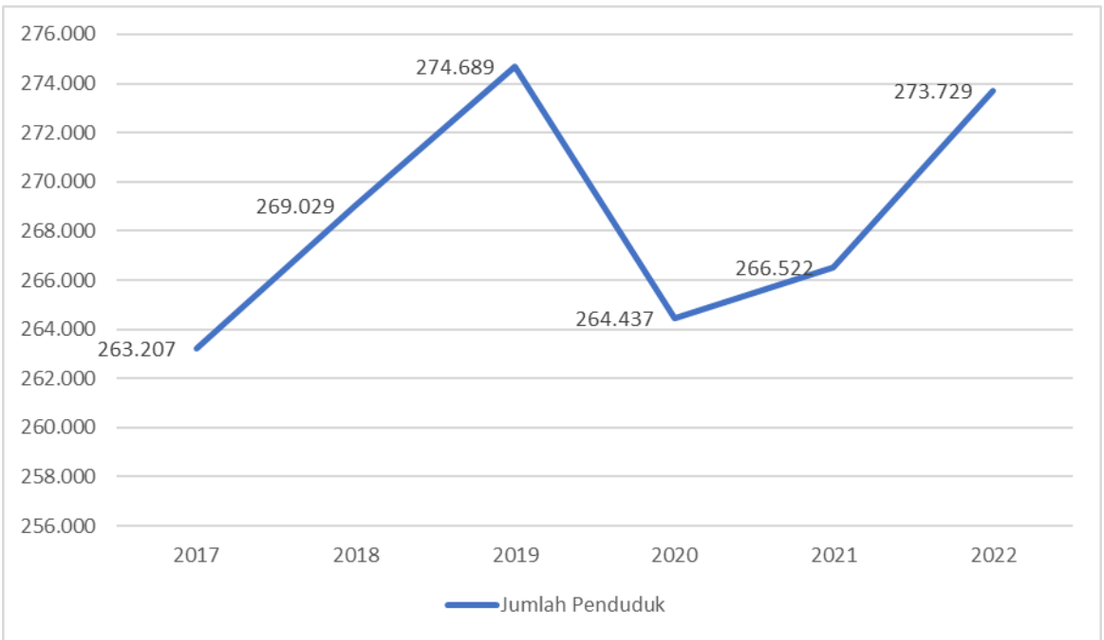

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manggarai Barat, 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2017, walaupun sempat menurun pada tahun 2020. Pertumbuhan jumlah penduduk mencapai 1,35 persen pada tahun 2022, melanjutkan

peningkatan sebesar 0,39 persen pada tahun 2021. Kecamatan Komodo menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Manggarai Barat dengan proporsi 20,85 persen dari jumlah keseluruhan. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kuwus Barat, hanya 4,18 persen dari keseluruhan. Macang Pacar merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 398 jiwa/km^2, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Boleng dan Sano Nggoang dengan kepadatan 42 jiwa/km^2.

Tabel 2. 7. Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 - 2022

Kecamatan	Tahun							
	2019		2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Komodo	27638	27359	27717	26952	28205	27381	28927	28150
Boleng	10267	10299	9895	9569	9933	9626	10301	9967
Sano Nggoang	7554	7797	7598	7410	7473	7317	7582	7479
Mbeliling	6805	6998	7160	7176	7132	7192	7298	7357
Lembor	17471	18142	17215	16984	17389	17132	17825	17605
Welak	11554	11803	11377	11075	11549	11262	11998	11747
Lembor Selatan	12616	13026	12531	12431	12701	12610	12968	12896
Kuwus	7605	7942	7124	7051	7113	7038	7269	7177
Ndoso	10040	10359	10286	10175	10389	10191	10552	10417
Kuwus Barat	5507	5745	5519	5507	5561	5512	5772	5684
Macang Pacar	9153	9582	8240	8188	8227	8178	8475	8505
Pacar	9479	9948	8668	8589	8759	8652	8918	8860
JUMLAH	**135.689**	**139.000**	**133.330**	**131.107**	**134.431**	**132.091**	**137.885**	**135.844**
TOTAL		**274.689**		**264.437**		**266.522**		**273.729**

Sumber Data: Dinas Kependuukan dan Catatan Sipil Manggarai Barat, 2023

Perubahan demografi tidak hanya dapat dilihat secara jumlah keseluruhan, namun juga melalui komposisi jenis kelaminnya. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting untuk membantu penyusunan perencanaan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik setiap sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Secara keseluruhan, perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Manggarai Barat tidak terpaut begitu jauh. Selisih antar kedua jenis kelamin hanya 2.041 orang pada tahun 2022, dengan jumlah laki-laki lebih banyak. Rata-rata selisih antara kedua jenis kelamin sejak tahun 2019 hingga 2022 adalah 2.479 orang. Penduduk berjenis kelamin laki-laki mendominasi secara jumlah sejak

tahun 2020, dimana dua tahun sebelumnya penduduk berjenis kelamin perempuan menjadi yang terbanyak berturut-turut.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspek kesejahteraan masyarakat dalam dokumen perencanaan terdiri atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga. Fokus-fokus tersebut diisi oleh data-data yang bersifat makro sebagai landasan penyusunan isu strategis daerah. Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai fokus-fokus yang terdapat pada aspek kesejahteraan masyarakat.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang krusial yang harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan. Pemetaan mengenai kondisi ekonomi masyarakat sangat diperlukan agar intervensi kebijakan ekonomi yang disusun sesuai dengan karakteristik lokal. Kondisi perekonomian masyarakat dapat dicermati melalui beberapa indikator makro, seperti produk domestik regional bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini dan angka kemiskinan. Berikut merupakan deskripsi capaian beberapa indikator ekonomi makro tersebut:

2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator makro yang mengukur transaksi ekonomi yang terjadi di suatu daerah tanpa mempertimbangkan asal dari transaksi tersebut, apakah dari penduduk atau pendatang. PDRB terdiri dari dua jenis, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB adalah indikator yang menghitung nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahunnya, sedangkan PDRB ADHK adalah indikator yang menghitung nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan satu tahun tertentu sebagai dasar.

Tabel 2. 8. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Tahun 2019-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.447 389,00	1.479.314, 46	1.584.557,74	927 915,14	941.174,47	974.065,11
B	Pertambangan dan Penggalian	64 195,05	66.429,49	69.719,71	43 128,64	44.446,06	45.946,13
C	Industri Pengolahan	15 846,22	15.104,99	15.846,22	10 167,01	9.677,41	10.339,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1 669,73	1.961,25	1.669,73	1 147,79	1.325,88	1.442,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,64	35,63	30,64	22,81	25,78	26,27
F	Konstruksi	484 124,45	529.039,65	484.124,45	304 687,27	322.657,21	338.983,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	337 082,28	366.605,21	337.082,28	216 443,63	228.657,30	243.119,13
H	Transportasi dan Pergudangan	119 055,93	126.553,86	120.901,48	79 707,18	82.578,91	89.134,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18 106,56	20.172,89	18.564,56	11 222,48	12.835,66	17.474,42
J	Informasi dan Komunikasi	254 713,67	264.385,02	254.713,67	201 039,60	207.546,82	214.190,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20 871,83	20.882,80	20.871,83	13 692,76	13.606,88	14.010,42
L	Real Estate	102 294,44	104 845,11	102.294,44	65 080,46	67.471,88	70.358,43
M,N	Jasa Perusahaan	9 325,65	8.028,79	9.325,65	6 558,62	5.602,46	5.794,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	487 842,37	446. 059,86	485.552,77	302 219,72	273.116,92	282.020,92
P	Jasa Pendidikan	112 076,19	111. 676,79	112.062,24	61 690,44	60.394,02	58.105,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40 894,24	46.311,02	40.894,24	21 556,96	23.716,49	24.069,36
R,S, T,U	Jasa lainnya	3 821,75	3 .729,36	3.821,75	2 310,86	2.240,37	2.284,06
	PDRB	**3.519.340,01**	**3 .611.635,58**	**3.519.340,01**	**2 267 552,96**	**2.296 736,21**	**2.391.363,67**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Manggarai Barat, 2023

PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2020-2022. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya perbaikan pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Struktur ekonomi Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat melalui data mengenai distribusi PDRB (ADHB). Distribusi PDRB dapat memberikan gambaran mengenai sektor-sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah hingga sektor lain yang tidak berkontribusi secara signifikan.

Tabel 2. 9. Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019-2022

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
		2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,13	40,97	40,80
B	Pertambangan dan Penggalian	1,82	1,85	1,80
C	Industri Pengolahan	0,45	0,42	0,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	0,00
F	Konstruksi	13,76	14,65	13,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,58	10,14	9,58
H	Transportasi dan Pergudangan	3,44	3,5	3,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	0,55	0,59
J	Informasi dan Komunikasi	7,24	7,32	7,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,58	0,55
L	Real Estate	2,91	2,9	2,97
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,22	0,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,8	12,35	11,92
P	Jasa Pendidikan	3,18	3,09	2,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,28	1,21
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,11	0,13	0,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Manggarai Barat, 2023

Struktur ekonomi Kabupaten Manggarai Barat saat ini masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata kontribusi sebesar 40,96 persen. Sektor ini menjadi sektor dominan karena produksi pertanian di Kabupaten Manggarai Barat relatif melimpah. Sektor kedua adalah sektor konstruksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,06 persen. Sektor

ini berkembang pesat karena pembangunan infrastruktur yang massif sebagai respon karena ditetapkannya Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super premium. Sektor ketiga adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang berkontribusi sebesar 12,69 persen. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi PDRB di atas angka 10 persen.

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi menghitung bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah tertentu. Komponen yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk nasional bruto (PNB) atau produk domestik bruto (PDB). Berikut adalah data mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat:

Grafik 2. 4. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antara Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2022 (Persen)

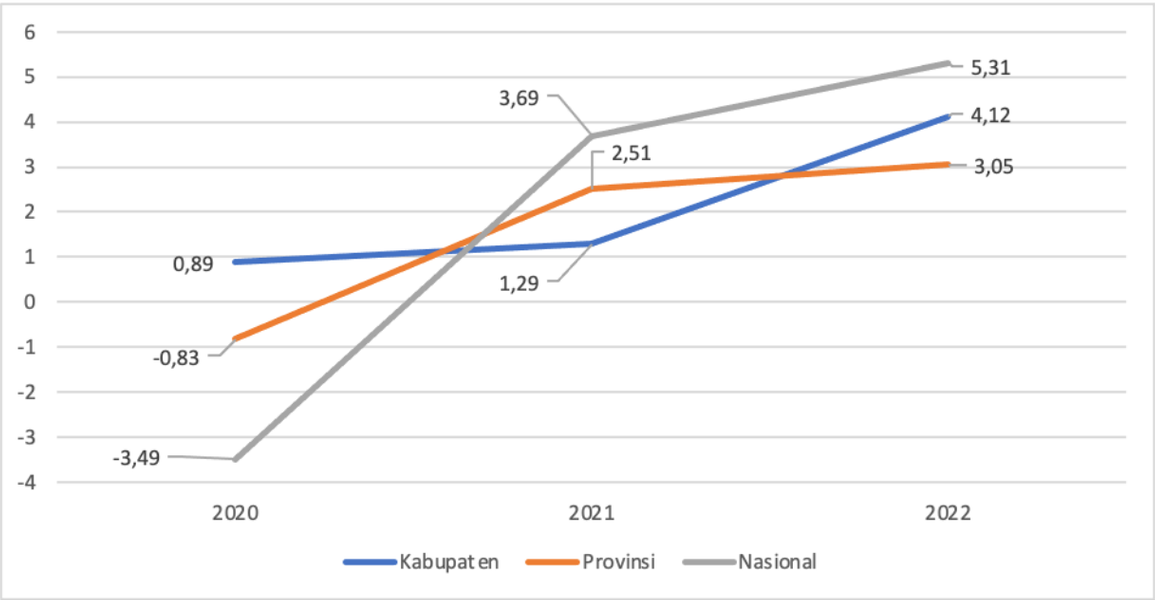

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan angka yang relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia yang cenderung fluktuatif pada tahun 2020-2022. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat memperlihatkan angka yang mulai meningkat pada tahun 2021, setelah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki capaian yang relatif stagnan jika dibandingkan

dengan provinsi dan nasional pada tahun 2021. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat dapat mencetak angka pertumbuhan ekonomi yang pesat dibandingkan dengan angka pertumbuhan Provinsi NTT pada tahun 2022.

Data pertumbuhan ekonomi per lapangan usaha dapat digunakan untuk untuk mengetahui perkembangan ekonomi per sektor. Data ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan indicator makro di tingkat dampak dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Berikut data mengenai laju pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 2. 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2022

Sektor PDRB		Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
		2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,84	1,43	3,49
B	Pertambangan dan Penggalian	5,37	3,29	3,38
C	Industri Pengolahan	-1,2	-4,82	6,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,08	15,52	8,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,43	12,98	1,91
F	Konstruksi	6,88	5,9	5,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,06	5,49	6,48
H	Transportasi dan Pergudangan	-20,95	3,93	7,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-34,47	9,47	36,14
J	Informasi dan Komunikasi	12,55	3,24	3,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	0,11	2,97
L	Real Estate	-1,98	3,29	4,28
M,N	Jasa Perusahaan	-44,31	-14,58	3,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,79	-9,23	3,26
P	Jasa Pendidikan	2,91	-2,1	-3,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,09	10,02	1,49
R,S,T	Jasa lainnya	-15,5	-3,05	1,95
	PDRB	**0,89**	**1,29**	**4,12**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kab Manggarai Barat, 2023

Pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Manggarai Barat memperlihatkan ada tiga sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang besar. Ketiga sektor tersebut terdiri dari sektor pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 10,8 persen, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,11 persen, dan sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,26 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa produksi dan pemasaran barang dan jasa di ketiga sektor tersebut mengalami peningkatan.

Selain sektor yang memiliki angka pertumbuhan yang signifikan, terdapat sektor-sektor yang memiliki angka pertumbuhan negatif yang cukup besar, di antaranya adalah sektor jasa perusahaan yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -18,46 persen, disusul dengan sektor jasa lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -5,53 persen, dan sektor transportasi dan pergudangan yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -3,09 persen. Angka pertumbuhan yang minus ini secara umum terjadi pada tahun 2020, dimana pembatasan sosial mulai diterapkan akibat dari Pandemi Covd-19. Sektor-sektor yang terdampak dari kebijakan ini sebagian besar merupakan sektor yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pariwisata dan perdagangan.

2.2.1.3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga-harga barang yang terjadi di suatu daerah. Pergerakan harga barang tersebut perlu dikendalikan agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemetaan laju inflasi diperlukan indikator ini tetap terkendali. Laju inflasi di Kabupaten Manggarai Barat diukur dengan melihat tingkat inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data ini disusun dengan mencermati kondisi di tiga kota inflasi, yaitu Kota Kupang, Kota Maumere, dan Kota Waingapu. Berikut adalah data mengenai laju inflasi:

Tabel 2. 11. Laju Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2018-2022 (Persen)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Inflasi NTT	3,07	0,67	0,26	0,49	0,81
Inflasi Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kab Manggarai Barat, 2022

Laju inflasi di Provinsi NTT berada di bawah laju inflasi nasional. Laju inflasi di Provinsi NTT memiliki tren yang menurun pada tahun 2018-2022. Laju inflasi di Provinsi NTT juga cenderung lebih stabil dibandingkan dengan laju inflasi nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan-bahan pokok di Provinsi NTT cenderung stabil, sehingga tidak terjadi peningkatan harga bahan-bahan pokok yang besar.

2.2.1.4. PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah data yang berusaha menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan membagi antara angka PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Berikut adalah data mengenai PDRB perkapita di Kabupaten Manggarai Barat:

Grafik 2. 5. PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia 2020-2022 (Juta Rupiah)

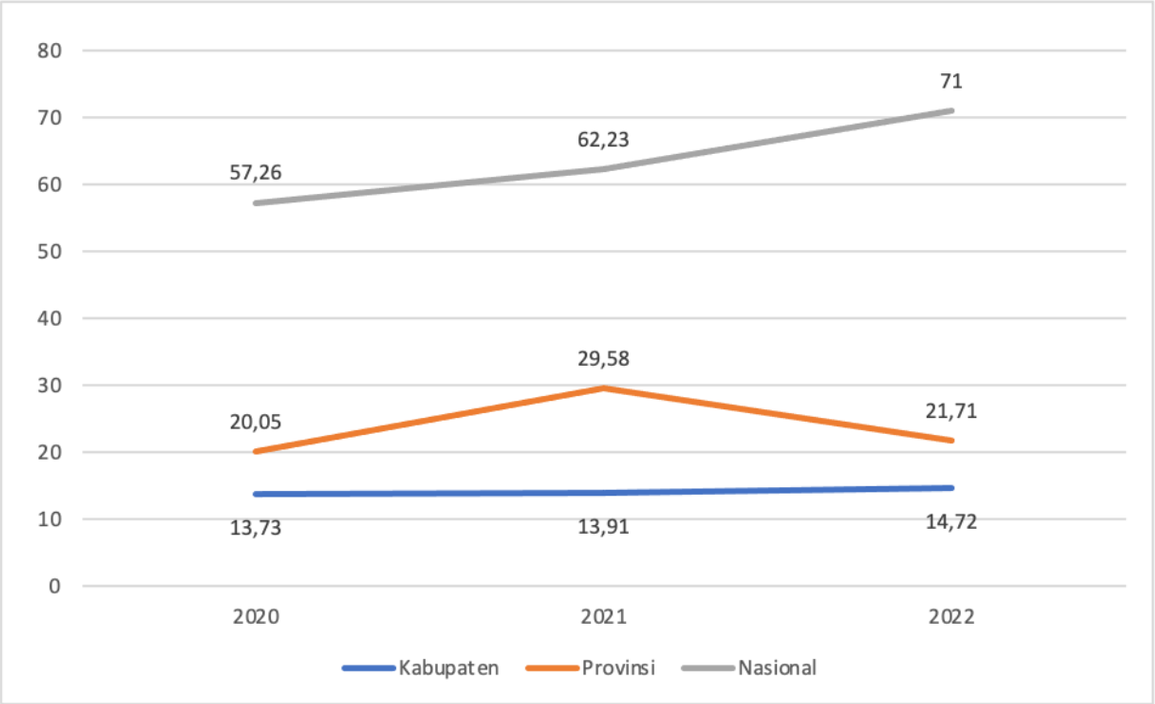

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren yang semakin meningkat sebesar Rp0,99 juta rupiah, namun masih di bawah rata-rata nasional pada tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan diperlukannya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial Kabupaten Manggarai Barat.

Grafik 2. 6. Perbandingan PDRB Per Kapita antara Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai (Juta Rupiah)

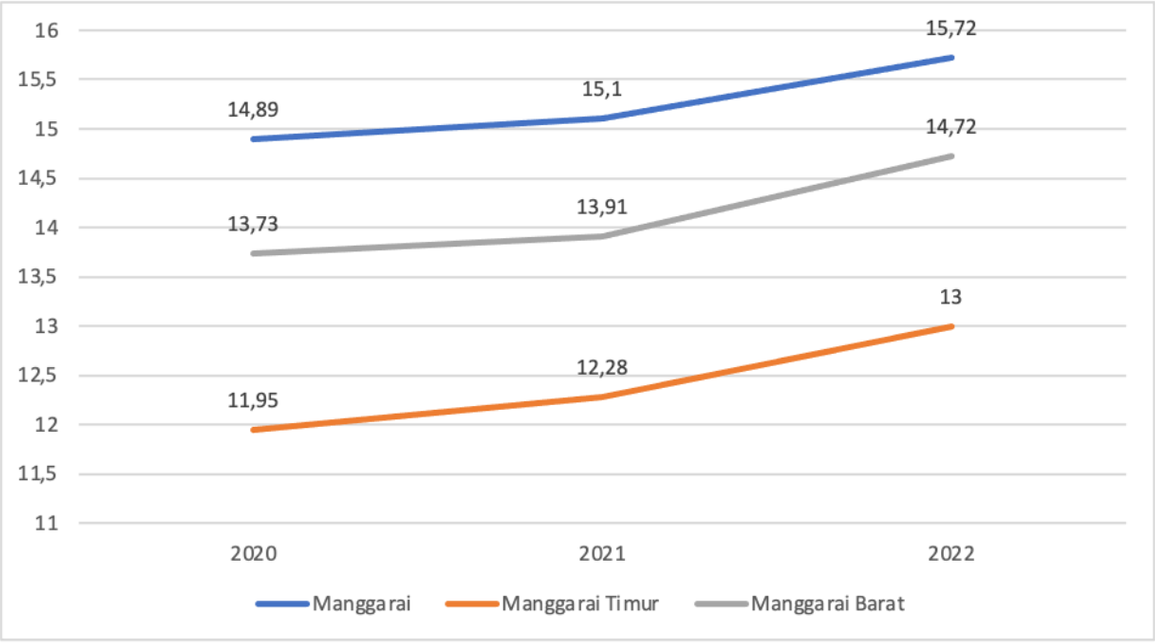

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Perbandingan data PDRB per kapita antara Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat berada di posisi tengah di antara Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Ketiga daerah tersebut memiliki PDRB per kapita dengan tingkat pertumbuhannya yang tidak jauh berbeda.

2.2.1.5. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi di suatu daerah. Pengukuran tingkat kesenjangan ini diperlukan untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi di suatu daerah dengan melihat aspek pemerataan ekonominya. Indeks Gini memiliki rentang antara 0 hingga 1, dimana jika suatu daerah memiliki Indeks Gini yang semakin mendekati angka 0 maka daerah tersebut memiliki kondisi kesenjangan yang minim, dan begitu pun sebaliknya dimana daerah memiliki Indeks Gini mendekati angka 1 maka kondisi ketimpangan di daerah tersebut dapat digolongkan cukup parah.

Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat sejauh ini belum dihitung secara mandiri oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, Acuan yang

digunakan untuk mendapatkan gambaran umum adalah Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah data tentang indeks gini:

Tabel 2. 12. Indeks Gini Provinsi NTT Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Semester 1 (Maret)	0,36	0,354	0,346	0,334
Semester 2 (September)	0,355	0,356	0,339	0,340

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur, 2023

Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan angka yang berada di kategori sedang, yaitu antara 0.3-0.4. Angka ini menunjukkan bahwa persebaran pendapatan di Kabupaten Manggarai Barat semakin merata. Indeks gini dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan antar lapisan masyarakat. Pemberdayaan usaha mikro dan peningkatan kesempatan kerja dapat menurunkan indeks gini.

2.2.1.6. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah. Indikator angka kemiskinan disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memperhatikan pendekatan *basic needs approach.* Berikut adalah data mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022:

Tabel 2. 13. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022 (Persen)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	18,14	18,01	17,71	17,92	17,15
Provinsi	21,03	20,62	20,9	20,99	20,05
Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,54

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang semakin menurun pada tahun 2018-2022. Penurunan tertinggi sebesar 0,3 persen pada tahun 2020. Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat berhubungan dengan beberapa faktor seperti kurangnya kesejahteraan petani dan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi potensial.

Tabel 2. 14. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018-2022

Kabupaten	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Manggarai	69,320	69,330	69,520	71,030	69,680
Manggarai Barat	48,530	49,230	49,400	51,150	49,950
Manggarai Timur	74,880	75,830	76,690	77,170	74,550

Sumber BPS NTT, 2022

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Manggarai Barat menempati peringkat ke 13 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat juga lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya, seperti Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Kinerja perekonomian yang baik untuk masing-masing sektor ekonomi menjadi determinan yang berpengaruh terhadap kondisi ini.

Tabel 2. 15. Penduduk Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Komodo	2.125	1.634	3.138	4.470	4.425
2	Boleng	1.778	1.322	2.745	3.121	3.108
3	Sano Nggoang	3.047	1.349	2.504	2.815	2.784
4	Mbeliling*	-	1.208	2.107	2.329	2.300
5	Lembor	4.522	3.385	4.214	5.065	5.052
6	Welak	1.945	1.467	3.296	3.650	3.633
7	Lembor Selatan	-	1.547	3.410	4.150	4.104
8	Kuwus	5.206	3.513	2.294	3.300	3.288
9	Ndoso	-	2.243	3.566	4.182	4.177
10	Kuwus Barat	-	-	1.902	2.411	2.393
11	Macang Pacar	2.557	3.664	2.532	3.165	3.564
12	Pacar	-	-	2.438	2.828	2.400
Total		**21.180**	**21.332**	**34.146**	**41.486**	**41.228**

Sumber: Dinas Sosial Kab Manggarai Barat, 2021

Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020, kecuali Kabupaten Macang Pacar. Penurunan jumlah penduduk miskin paling tinggi dialami oleh Kecamatan Pacar. Kecamatan Lembor dan Komodo tetap menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Struktur perekonomian di Kecamatan Komodo dan Lembor didominasi oleh petani dan

nelayan. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di kedua kecamatan tersebut adalah rendahnya produktivitas dan minimnya diversifikasi produk pertanian. Disamping itu, jumlah petani yang menggarap sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau sistem kontrak tanah juga masih cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petani di Kecamatan Lembor bukanlah pemilik sawah, melainkan hanya buruh tani.

Kemiskinan tidak dapat hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk karena tidak memberikan gambaran yang cukup mengenai dinamika di masyarakat. Tiga istilah yang bisa digunakan dalam menjelaskan kemiskinan di suatu daerah adalah garis kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seorang penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks, maka rata-rata pengeluaran penduduk semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluarannya di antara penduduk miskin.

Tabel 2. 16. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Variabel Kemiskinan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	48,53	49,23	49,40	51,15	49,95
Persentase Penduduk Miskin	18,14	18,01	17,71	17,92	17,15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,42	3,39	3,09	3,55	4,44
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,00	0,90	0,79	0,99	1,36
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	313 380	318 546	340 094	370 943	405 746

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2022. Peningkatan ini tidak dibarengi dengan

keparahan kemiskinan yang indeksnya semakin meningkat dari 0,79 pada tahun 2020 hingga 1,36 pada tahun 2022. Capaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun ketimpangan pengeluarannya di antara penduduk miskin di tingkat kabupaten masih lebih lebar ketimbang di tingkat provinsi.

Menurunnya angka kemiskinan tidak dibarengin dengan penurunan garis kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat seiring meningkatnya berbagai risiko perekonomian. Ambang batas garis kemiskinan pada tahun 2022 meningkat sebesar 9,3 persen menjadi Rp. 405.746,-/kapita/bulan dari sebelumnya Rp. 370.943 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk hidup layak di Kabupaten Manggarai Barat semakin meningkat sejak tahun 2018 hingga 2022.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Salah satu fokus penting dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah kesejahteraan sosial. Fokus ini menjadi arah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Barat. Adapun indikator yang mengukur capaian kinerja dari fokus kesejahteraan sosial yaitu Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Rasio Penduduk yang Bekerja, Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Balita Gizi Buruk, dan *Stunting.*

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Persentase angka melek huruf di Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan sebesar 0,70 persen pada tahun 2021, setelah mengalami penurunan satu tahun sebelumnya. Capaian ini mengindikasikan bahwa hampir semua penduduk Kabupaten Manggarai Barat usia 15 tahun ke atas sudah bisa membaca. Adapun tersisa hanya 2,76 persen yang masih buta huruf dan perlu mendapat perhatian pemerintah ke depannya.

Tabel 2. 17. Perkembangan Angka Melek Huruf Manggarai Barat Tahun 2017-2021

Uraian	Capaian (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten	96,67	96,83	96,79	95,89	97,24
Provinsi	94,52	94,76	95,76	95,76	93,85
Nasional	97,93	98,07	98,22	98,29	96,04

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2022

Capaian angka melek huruf di Kabupaten Manggarai Barat cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT. Namun demikian, secara umum angka ini masih di bawah rata-rata nasional. Peningkatan angka melek huruf ini bisa dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang menjadi fokus intervensi di Kabupaten Manggarai Barat.

2.2.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah salah satu indikator makro dalam urusan pendidikan yang menjadi salah satu komponen perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini dapat dihitung dengan cara melakukan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.

Grafik 2. 7. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

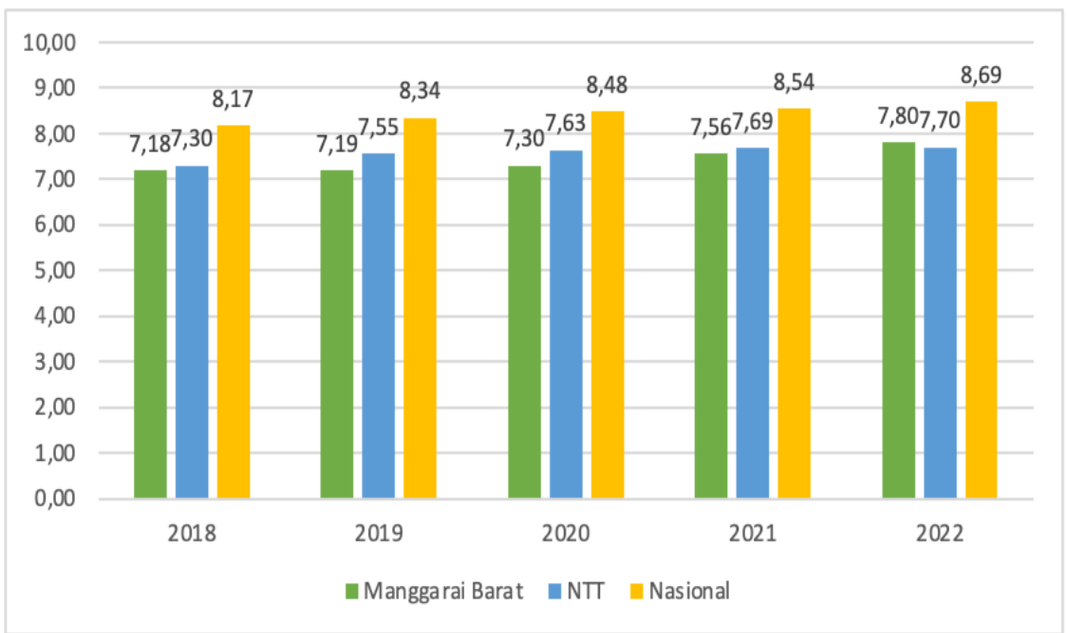

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2022. Rata-rata peningkatan RLS Kabupaten

Manggarai Barat selama lima tahun terakhir mencapai 0,9 poin. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 adalah 7,80. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Manggarai Barat yang berusia 25 tahun ke atas sudah mengenyam pendidikan formal selama 7,8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Meskipun mengalami tren yang meningkat, capaian RLS Kabupaten Manggarai Barat masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional. Rata-rata capaian RLS Kabupaten Manggarai Barat masih terpaut 0,17 poin dengan Provinsi NTT dan 1,04 poin dengan Nasional.

2.2.2.3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut Angka HLS Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018-2022 yang disandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan Nasional:

Grafik 2. 8. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

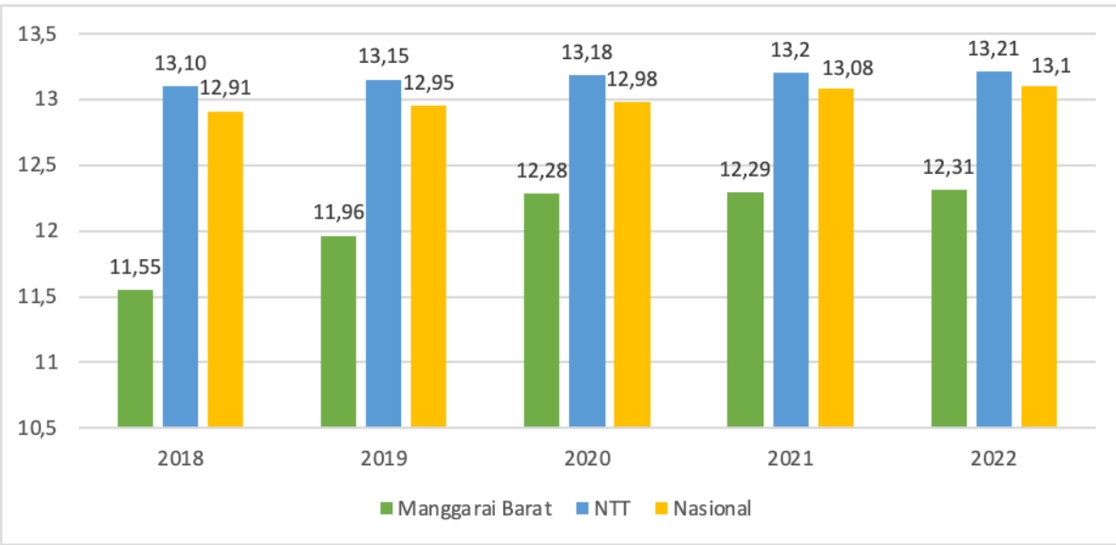

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Capaian HLS Kabupaten Manggarai Barat meningkat sebesar 0,76 poin dengan rata-rata peningkatan setiap

tahunnya mencapai 0,16 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh masyarakat usia sekolah di Kabupaten Manggarai Barat pada masa yang akan datang berada pada angka 12,31 Tahun atau setara dengan kelas 3 SMA. Namun demikian, walaupun capaian HLS Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang meningkat, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian provinsi NTT dan Nasional. Capaian HLS Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 masih terpaut 0,9 poin dengan Provinsi NTT dan 0,79 poin dengan capaian Nasional. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan pembangunan pada sektor pendidikan harus terus dilakukan guna dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat.

2.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk menentukan kondisi kesejahteraan sosial pada aspek kesehatan di suatu daerah. Indikator ini memperkirakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang untuk dapat terus hidup. Faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup antara lain kesehatan fisik, kesehatan lingkungan, dan kondisi ekonomi.

Tabel 2. 18. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	66,58	67,12	67,38	64,88	65,26
Provinsi	66,38	66,85	67,01	67,15	67,47
Nasional	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Barat cenderung fluktuatif sejak tahun 2018 hingga 2022. Fluktuasi tersebut sempat menurun tajam pada tahun 2021 sebesar 64,88 tahun, kemudian naik kembali pada tahun 2022 sebesar 65,26 tahun. Capaian tersebut tergolong lebih rendah jika dibanding capaian provinsi dan nasional. Selain itu, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, rata-rata Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Barat juga masih lebih rendah dibanding Kabupaten Manggarai yaitu 67,38 tahun dan Kabupaten Manggarai Timur dengan angka 68,29 tahun.

2.2.2.5. Rasio Penduduk yang Bekerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi sekaligus masalah sosial yang selalu menjadi perhatian di Indonesia. Penduduk yang tidak bekerja dapat mengurangi produktivitas serta pendapatan masyarakat yang nantinya akan menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pengangguran di suatu daerah. Indikator ini berfokus pada penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 2. 19. Tingkat Pengangguran di Kab. Manggarai Barat Tahun 2017-2021 (persen)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2017	1,12	1,51	1,3
2018	0,55	2,13	1,19
2019	1,68	3,52	2,42
2020	2,84	4,76	3,72
2021	3,99	6,07	4,94

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2022

Selama periode tahun 2018-2021, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama periode tersebut kenaikan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Manggarai Barat sebesar 3,64%. Dari 1,3% pada tahun 2018, naik menjadi 4,94% di tahun 2021. Jika dilihat dari data tingkat pengangguran terbuka berdasarkan gender, tingkat pengangguran perempuan selalu lebih besar daripada laki-laki. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja laki-laki selalu lebih tinggi dibanding perempuan. Tingginya tingkat pengangguran ini merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi pemerintah untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 20. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2022 (persen)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	1,19	2,42	3,72	4,94	4,91
Provinsi	3,01	3,35	4,28	3,77	3,54
Nasional	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai Barat masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan capaian provinsi. Meskipun masih lebih baik daripada capaian nasional, tetapi masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Kebijakan seperti perluasan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja perlu diimplementasikan guna mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat.

b. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja menggambarkan tentang perbandingan antara penduduk berusia diatas 15 tahun yang bekerja dan angkatan kerja di suatu daerah. Hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan melalui rasio ini. Penyerapan tenaga kerja adalah salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, maka semakin rendah tingkat pengangguran dan semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2. 21. Rasio penduduk yang bekerja (persen)

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten	98,69	98,81	97,58	96,27	95,06

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Tren penduduk yang bekerja di Kabupaten Manggarai Barat cenderung menurun sejak tahun 2017 hingga 2021. Tingkat penurunan rasio penduduk yang bekerja menyentuh 0,73 persen per tahunnya, mencapai rasio 95,06 persen pada tahun 2021. Angka ini juga masih berada dibawah capaian provinsi yaitu 96,23 persen. Menurunnya jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Manggarai Barat

perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat jumlah angkatan kerja yang semakin bertambah namun tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan penduduk usia bekerja untuk menyerap lapangan pekerjaan.

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu tujuan pokok dalam misi pembangunan daerah adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Indikator yang paling umum dalam melihat derajat kesejahteraan sosial secara meluas adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM merupakan indikator komposit yang terdiri dari tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi.

Tabel 2. 22. IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	62,58	63,50	63,89	64,17	64,92
Provinsi	64,39	65,23	65,19	65,28	65,90
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Capaian IPM Kabupaten Manggarai Barat sepanjang tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Manggarai Barat mencapai angka 0,468 per tahun. Capaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, selisih capaian IPM Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu mengecil sejak tahun 2018, dan hanya terpaut 0,98 pada tahun 2022. Capaian IPM ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Manggarai Barat semakin membaik dalam fokus kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 23. Komponen IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

No	Komponen IPM thn 2022	Kabupaten	Provinsi	Nasional
1.	Rata-rata lama sekolah	7,80 tahun	7,70 tahun	8,69 tahun
2.	Harapan lama sekolah	12,31 tahun	13,21 tahun	13,10 tahun
3.	Umur harapan hidup	67,73 tahun	67,47 tahun	71,85 tahun
4.	Pengeluaran per kapita	7,63 juta	7,87 juta	11,47 juta

Sumber BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Capaian angka IPM Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 juga dapat dilihat dari setiap indikator kompositnya. Secara keseluruhan, komponen IPM Kabupaten Manggarai Barat masih tertinggal dari capaian nasional. Namun, beberapa komponen Kabupaten Manggarai Barat masih lebih baik daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rata-rata lama sekolah di tingkat kabupaten memiliki selisih 0,10 tahun dari rata-rata provinsi, diikuti oleh Umur Harapan Hidup yang terpaut 0,26 tahun dari rata-rata provinsi. Pengeluaran per kapita Kabupaten Manggarai Barat yang masih terpaut cukup jauh dengan capaian provinsi dan nasional menunjukan pengaruh paling signifikan terhadap rendahnya angka IPM Kabupaten Manggarai Barat.

Grafik 2. 9. Perbandingan IPM Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Kabupaten Sekitarnya Tahun 2022

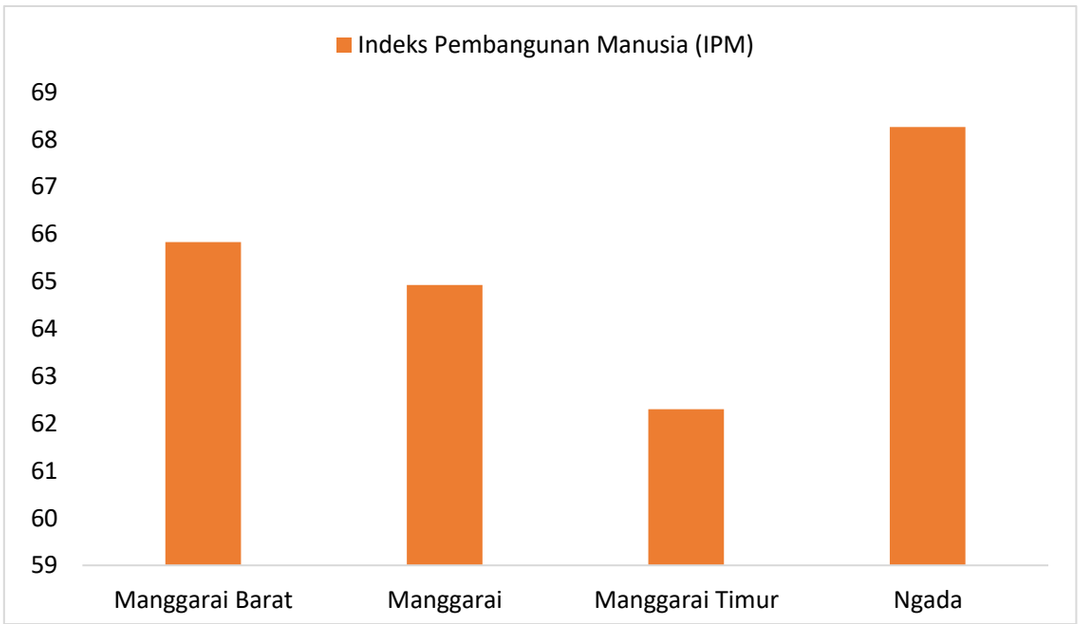

Sumber: BPS, 2022

Capaian IPM Kabupaten Manggarai Barat menempati urutan kedua jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya pada tahun 2022. Jika dibandingkan, beberapa indikator komponen Kabupaten Manggarai Barat masih jauh berada dibawah capaian Kabupaten Ngada yang menempati peringkat pertama. Selisih Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Barat dengan Kabupaten Ngada adalah 0.67. Perbedaan cukup signifikan juga terlihat pada komponen pengeluaran per kapita. Selisih antar dua kabupaten menyentuh 1,36 juta rupiah per kapita per bulan dengan capaian Kabupaten Ngada lebih baik.

Dengan demikian, fokus utama dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Manggarai Barat harus ditekankan pada kedua komponen tersebut.

2.2.2.7. Persentase Balita Gizi Buruk

Indikator lain yang dapat digunakan sebagai ukuran kesehatan masyarakat adalah persentase balita gizi buruk. Semakin besar persentasi balita gizi buruk, maka semakin rendah kualitas kesehatan balita di suatu daerah. Status gizi balita Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017-2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 24. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2022 (persen)

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	0,40	2,6	N/A	0,73
Provinsi	2,50	5,10	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Barat, 2023

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Manggarai selama periode 2019-2022 cukup fluktuatif. Persentase balita gizi buruk terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,6%. Namun, capaian tersebut masih lebih rendah jika dibanding dengan capaian provinsi sebesar 5,10% di tahun yang sama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa kasus balita gizi buruk dari bulan Januari hingga Agustus pada tahun 2020 tercatat sebanyak 349 kasus dari 87.924 balita di Kabupaten Manggarai Barat. Namun setelah diintervensi melalui kegiatan PMT, jumlah kasus terus berkurang hingga tersisa 125 kasus pada bulan November 2020. Pada tahun 2022, persentase balita gizi buruk semakin turun menjadi 0,73%. Hal tersebut mengindikasikan upaya peningkatan kualitas kesehatan bayi semakin meningkat dan perlu dipertahankan pada periode pembangunan berikutnya.

2.2.2.8. Stunting

Stunting merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia, secara khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Stunting sendiri merupakan suatu kondisi dimana seorang balita mengalami masalah kekurangan gizi secara kronis dalam jangka waktu panjang sehingga menghambat pertumbuhan pada anak. Secara umum, tinggi dan berat badan anak yang

mengalami stunting lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya, serta rentan mengalami gangguan kesehatan.

Pencegahan stunting menjadi agenda besar mengingat kondisi ini merupakan penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk berdaya saing. Stunting diyakini berdampak besar terhadap kemiskinan serta memperlebar ketimpangan. Melalui upaya pencegahan yang beragam juga, pemerintah juga dapat membuka peluang untuk menyelesaikan permasalahan sistemik lainnya, seperti penyediaan air bersih, jamban yang bersih, serta drainase yang tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

Tabel 2. 25. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022
Kabupaten	17,27	15,07	15,90
Provinsi	23,8	37,8	35,3
Nasional	26,9	24,4	21,6

Sumber: Bidang Sosbud BP4D, 2023

Selama periode 2020-2022, prevalensi stunting Kabupaten Manggarai Barat tergolong lebih rendah dibanding capaian provinsi dan nasional. Dilihat dari sebaran jumlah balita stunting per kecamatan, ada dua kecamatan dengan jumlah balita stunting tertinggi yaitu Kecamatan Lembor dan Kecamatan Komodo. Dari 23.349 balita yang diukur, terdapat 627 balita stunting di Kecamatan Lembor dan 618 balita stunting di Kecamatan Komodo. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat isu Stunting menjadi agenda prioritas nasional serta Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga menjabarkan tentang indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa data yang dianalisis meliputi persentase cagar budaya yang dilestarikan, kegiatan seni budaya yang diselenggarakan, berbagai sarana seni budaya yang tersedia, prestasi olahraga, dan sarana olahraga yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

2.2.3.1. Seni Budaya

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mempengaruhi sektor kebudayaan, terutama dengan munculnya sanggar-sanggar budaya. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyebutkan bahwa jumlah sanggar budaya di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2019 mencapai 63 sanggar. Umumnya sanggar budaya tersebut dikelola secara mandiri oleh kelompok masyarakat desa di sekitar objek wisata.

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat juga menyelenggarakan pentas seni dan budaya untuk menggairahkan perkembangan sanggar-sanggar tersebut. Hal ini juga dijalankan untuk menciptakan daya tarik bagi wisatawan. Tercatat setiap tahunnya pemerintah menyelenggarakan minimal 1 even Karnaval atau Festival Seni dan Budaya, bahkan pada tahun 2018 terselenggara 3 festival; yakni Festival Komodo, Festival Florata, dan Karnaval Budaya.

2.2.3.2. Olahraga

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat juga mengembangkan partisipasi para pemuda dalam pembangunan melalui bidang olahraga. Data Dinas PKO menyebutkan bahwa jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat cukup banyak. Berikut adalah data tentang jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 26. Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Lapangan Olahraga
1	2016	603
2	2017	603
3	2018	603
4	2019	603
5	2020	603

Sumber Data: Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Walaupun jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat tidak berubah sejak tahun 2016-2020 yakni sebanyak 603 buah. Namun, prestasi para atlet daerah dalam Pekan Olah Raga (POR) Daerah NTT cukup baik. Capaian prestasi olahraga tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan olahraga di

Kabupaten Manggarai Barat semakin baik. Berikut adalah data mengenai prestasi olahraga Kabupaten Manggarai Barat dalam POR NTT.

Tabel 2. 27. Prestasi Kabupaten Manggarai Barat dalam Pekan Olah Raga (POR) NTT Tahun 2015-2019

No	Tahun	Medali
1	2015	2
2	2016	2
3	2017	3
4	2018	5
5	2019	3
6	2020	Tidak ada event

Sumber Data: Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Perolehan prestasi pada bidang keolahragan selalu meningkat dari tahun ke tahun, terbukti dengan capaian perolehan medali pada kegiatan pekan olah raga provinsi NTT yang diikuti oleh perwakilan atlet dari Kabupaten Manggarai Barat. Walaupun pada tahun 2019 perolehan medali menurun jika dibandingkan pada tahun 2018, namun kecenderungan perolehan medali sejak tahun 2015 selalu mengalami peningkatan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun mendatang. Berikut adalah deskripsi capaian kinerja aspek pelayanan umum di Kabupaten Manggarai Barat:

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis pada fokus layanan urusan pemerintahan wajib terdiri atas capaian-capaian pada layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar terdiri atas enam urusan, sedangkan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

terdiri atas 18 urusan. Berikut adalah capaian layanan urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi analisis pada capaian urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Layanan urusan ini memiliki standar pelayanan minimal yang harus dijaga dengan baik. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

1. Urusan Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu indikator paling efektif untik melihat mutu sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial suatu daerah. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana penyelengaraan dan pembinaan tenaga pendidik. Salah satu upaya untuk merealisasikan peningkatan mutu tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran setiap tahunnya agar capaian kinerja dari urusan pendidikan dapat terpenuhi.

Tabel 2. 28. Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2022 (juta rupiah)

Tahun	Belanja	Urusan pendidikan	Persentase
2022	1.494,25	264.53	17,70
2021	1.423,05	234.26	16,46
2020	1.370,83	221.70	17,28
2019	1.228,83	284.89	23,18
2018	1.121,37	291.99	26,04
2017	1.078,25	250.96	23,27

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2021

Urusan pendidikan mengambil proporsi sebesar 17,70 persen dari seluruh anggaran belanja Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022. Persentase alokasi ini adalah sebuah peningkatan dari tahun 2021 meskipun tidak begitu signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 hingga 2019, trennya cenderung menurun karena masih dibawah rata-rata yaitu 20,13 persen. Fungsi pendidikan yang

diharapkan akan ikut membaik dari peningkatan alokasi anggaran ini antara lain adalah Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan Sekolah, Tenaga Pendidik, Angka Kelulusan, hingga Akreditasi Sekolah.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Indikator pertama untuk melihat perkembangan mutu pendidikan di suatu daerah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang berstatus sebagai siswa sekolah pada rentang umur tertentu terhadap jumlah dari seluruh penduduk dari rentang umur tersebut. Semakin tinggi APS, maka bisa diasumsikan bahwa kesadaran akan pentingnya seorang anak untuk bersekolah di suatu daerah juga tinggi. Hal ini juga melihat pada bagaimana akses pendidikan di suatu daerah dapat merangkul seluruh penduduk dengan memiliki eligibilitas untuk masuk ke jenjang pendidikan sesuai umurnya.

Tabel 2. 29. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2017-2022

Kelompok Umur (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5 – 6 tahun	49,10	33,13	29,23	21,13	49,04	37,08
7 – 12 tahun	98,77	98,48	99,11	99,35	98,65	96,71
13 – 15 tahun	94,08	94,77	93,26	89,70	95,38	82,68
16 – 18 tahun	74,72	66,98	58,71	66,57	74,84	74,78
19 – 24 tahun	15,35	13,46	11,16	9,70	19,66	

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2022

Seluruh kelompok umur penduduk yang memenuhi syarat untuk sekolah menunjukkan peningkatan, kecuali pada rentang umur 7-12 tahun. Perubahan signifikan terlihat pada rentang umur 5-6 tahun dimana capaian APS pada tahun 2021 mencapai dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama juga dilihat pada rentang umur 19-24 tahun, dimana peningkatan pada tahun 2021 mencapai 102,68 persen. Meski demikian, capaian APS pada tahun 2022 menurun di seluruh kelompok umur. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan menyekolahkan anak di tingkat awal dan akhir harus kembali ditingkatkan.

Kelompok umur lain juga menunjukkan capaian yang tinggi pada tahun 2021 walaupun perubahannya tidak begitu signifikan. Kelompok umur 7-12 tahun, atau

penduduk dengan eligibilitas Sekolah Dasar (SD), memiliki capaian APS hampir sempurna walaupun mengalami penurunan sebesar 1,64 persen pada tahun 2022. Sementara itu, kelompok umur 13-15 mengalami peningkatan hingga 95,38 persen pada tahun 2021 dan setelah itu kembali turun meskipun tidak begitu signifikan. Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak di kelompok usia 16-18 tahun, atau penduduk dengan eligibilitas Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), masih terbilang rendah. Meskipun selalu menunjukkan tren peningkatan, kelompok ini perlu menjadi sasaran perubahan utama mengingat begitu signifikannya peran pendidikan dalam pembentukan karakter penduduk di rentang usia tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah juga dapat menjelaskan tentang sejauh mana upaya menciptakan akses pendidikan yang inklusif. Persentase APS berdasarkan jenis kelamin dapat menggambarkan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang tidak hanya tinggi secara angka, namun juga merata. Temuan dari indikator ini nantinya bisa menjadi suatu gambaran awal dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang berbasis gender di suatu daerah.

Tabel 2. 30. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

Kelompok Umur (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)									
	Laki-laki					Perempuan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
5 – 6	30,89	49,28	26,95	45,87	49,59	35,83	48,94	49,40	53,62	48,38
7 – 12	97,02	98,40	98,42	98,12	98,85	100	99,17	98,63	99,30	90,93
13 – 15	90,51	92,05	94,41	96,29	93,04	98,58	96,10	94,59	94,28	97,47
16 – 18	68,13	78,25	75,24	72,49	62,95	65,86	70,75	72,07	74,70	90,93
19 – 24	17,24	20,60	-	45,87	19,45	9,90	10,61	-	53,62	19,88

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2021

Perbandingan antara persentase APS laki-laki dan perempuan pada tahun 2021 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, kecuali kelompok umur 16-18 tahun. Terdapat perbedaan cakupan antara laki-laki dan perempuan hingga 28 persen pada kelompok umur tersebut. Perbedaan ini terlampau cukup jauh jika dibandingkan dengan kelompok umur lain yang hanya terpaut dibawah 10 persen. Namun demikian, peningkatan partisipasi perempuan pada kelompok umur 16-18 tahun di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, mencapai 90,93 persen. Sorotan ini menjadi cukup menarik mengingat kelompok 16-18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami stagnansi

partisipasi dibawah 80 persen sejak tahun 2017. Penduduk kelompok umur 16-18 tahun di Kabupaten Manggarai Barat banyak yang tidak melanjutkan ke tingkat lanjut atau putus sekolah. Beban ekonomi bagi laki-laki untuk membantu menafkahi keluarganya dan adanya stigma bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi pendidikan di kelompok ini.

b. Angka Partisipasi Kasar

Indikator selanjutnya yang juga menggambarkan aksesibilitas pendidikan dan tingkat partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan di suatu daerah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator ini mendefinisikan proporsi siswa sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Capaian angka partisipasi kasar yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi sekolah yang tinggi. Meski demikian, angka tersebut tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Semakin angka partisipasi kasar mendekati atau lebih dari 100 persen, maka semakin banyak penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Di sisi lain, angka partisipasi kasar juga dapat menjelaskan apakah suatu daerah mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari yang ditargetkan.

Tabel 2. 31. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Uraian	Capaian			
	2018	2019	2020	2021
Angka partisipasi kasar SD/MI				
Kabupaten	121,55	120,23	118,69	117,66
Provinsi	116,58	114,95	113,40	113,55
Nasional	108,61	107,46	106,32	106,20
Angka partisipasi kasar SMP/MTs				
Kabupaten	86,43	91,60	95,61	96,92
Provinsi	88,51	87,82	89,85	90,78
Nasional	91,52	90,57	92,06	85,23
Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA				
Kabupaten	57,81	68,42	68,31	70,37
Provinsi	77,81	84,63	84,70	86,36
Nasional	80,68	83,98	84,53	85,23

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2022

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Barat di setiap jenjang pendidikan selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2022. Capaian angka partisipasi kasar Kabupaten Manggarai Barat di tingkat SD/MI dan SMP/MTs cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Meski mengalami peningkatan, capaian Angka Partisipasi Kasar di tingkat SMA/MA/SMK masih tergolong rendah rendah. Tren di tingkat SMA/MA/SMK masih terpaut cukup jauh dengan selisih rata-rata 17,26 persen. Capaian ini juga menunjukkan bahwa masih ada sekitar 30 persen anak-anak usia 16-18 tahun di Kabupaten Manggarai Barat yang belum dapat mengakses layanan pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah letak sekolah SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Manggarai Barat yang tersentralisasi di ibukota kecamatan atau kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang tinggal di luar wilayah pusat aktivitas tersebut harus menempuh perjalanan pulang-pergi yang cukup jauh.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah salah satu indikator yang berpengaruh terhadap akses pendidikan. Jika Angka Partisipasi Kasar (APK) tidak memperhatikan ketepatan usia dan jenjang pendidikan, maka Angka Partisipasi Murni (APM) melihat proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi angka partisipasi murni, maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai peruntukkan usianya di jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2. 32. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021

Jenjang	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
SD/MI	96,78	96,46	96,54	96,50
SMP/MTs	72,14	73,86	74,24	74,65
SMA/MA/SMK	47,80	47,15	47,23	47,33

Sumber: Neraca Pendidikan dan Manggarai Barat dalam Angka Tahun 2022

Secara keseluruhan, Angka Partisipasi Murni Kabupaten Manggarai Barat masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar-nya. Capaian ini memberikan gambaran bahwa banyak siswa yang mengenyam pendidikan,

namun tidak sesuai dengan peruntukkan umurnya. Pada jenjang SMP/MTs, terdapat kurang lebih 22,27 persen siswa yang berumur di bawah 12 tahun atau di atas 15 tahun. Secara teoritis, Angka Partisipasi Murni cenderung selalu lebih rendah mengingat Angka Partisipasi Kasar memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah. Namun, perhatian khusus perlu diberikan pada capaian Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/MA/SMK dengan melihat jaraknya dengan Angka Partisipasi Kasar cukup jauh. Pada jenjang ini, hampir setengah dari keseluruhan siswa SMA/MA/SMK berumur dibawah 16 tahun dan diatas 19 tahun. Rendahnya capaian ini berhubungan dengan banyaknya jumlah siswa yang mengulang kelas.

Tabel 2. 33. Angka Mengulang Kelas tahun 2017-2019 (orang)*

Jenjang	Tahun		
	2017*	2018*	2019**
SD	1.566	1369	1362
SMP	22	19	19
SMA/SMK	N/A	24	24

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud

Keterangan: *Tidak termasuk MI, MTs, dan MA
**keadaan November 2018
** keadaan Juli 2019

Angka Mengulang Kelas di Kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2021 belum dirilis. Data yang tersedia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa siswa yang mengulang berjumlah 1.405 orang, dengan persentase tertinggi pada jenjang SD yaitu 96,9 persen. Banyaknya siswa yang mengulang kelas ini menggambarkan substansi kegiatan belajar mengajar belum mampu diserap dengan baik. Maka dari itu, diperlukan perbaikan sistem belajar mengajar yang memperhatikan kemampuan individu masing-masing.

d. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah indikator penting berikutnya dalam melihat kondisi pendidikan di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan tingkat siswa yang berhenti sekolah sebelum menamatkan pendidikannya. Angka Putus Sekolah diintepretasikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin tinggi juga jumlah siswa yang putus sekolah di suatu daerah.

Tabel 2. 34. Jumlah Siswa Putus Sekolah tahun 2017-2021 (orang)

Jenjang	Tahun									
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
SD	94	0,24	78	0,21	52	0,14	100	0,29	44	0,13
SMP	125	0,69	134	0,73	46	0,25	93	0,44	28	0,15
SMA	82	0,95	59	0,67	23	0,26	44	0,50	33	0,37
SMK	158	4,1	67	1,51	8	0,18	34	0,60	0	0
Jumlah	**459**		**338**		**129**		**271**		**105**	

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2017-2021

Secara akumulatif, jumlah siswa putus sekolah menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2017. Jenjang pendidikan dengan rata-rata siswa putus sekolah tertinggi sepanjang tahun 2017 hingga 2021 adalah jenjang SMP dengan 85 siswa putus sekolah per tahun, dilanjutkan dengan jenjang SD dengan 74 siswa putus sekolah per tahun. Kabupaten Manggarai Barat memiliki capaian terbaik pada tahun 2021, dengan hanya 105 siswa yang putus sekolah. Capaian ini juga merupakan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terdapat 100 siswa SD dan 93 siswa SMP yang putus sekolah pada tahun 2020, namun berkurang hingga lebih dari 50 persen pada tahun 2021. Perkembangan ini harus bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya agar mencegah lahirnya masalah sosial lain yang mungkin timbul.

e. Angka Melanjutkan Sekolah

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dillihat dari angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs maupun SMP/MTs ke tingkat SMA/MA atau SMK. Angka melanjutkan juga menjadi penanda terhadap akses pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 35. Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2015-2019

NO	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Melanjutkan Pendidikan Tingkat SD/MI ke SMP/MTs	93,62	94,57	95,50	96,82	96,78
2	Angka Melanjutkan Pendidikan Tingkat SMP/MTs ke SMA/MA					94,69

Sumber Data: Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Angka melanjutkan pendidikan di Manggarai Barat cenderung fluktuatif. Namun demikian, angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP dalam selama tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin mudahnya akses pendidikan dengan dibangunnya sekolah-sekolah di berbagai wilayah Kabupaten Manggarai Barat menjadi salah satu penyebab peningkatan tersebut.

f. Tenaga Pendidik

Salah satu elemen penting dari sistem pendidikan adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah tokoh sentral dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama untuk mendukung proses proses belajar-mengajar di Kabupaten Manggarai Barat di tengah minimnya akses terhadap sumber belajar lain, seperti buku, surat kabar, dan internet. Oleh karena itu, guru menjadi sumber belajar utama bahkan mungkin satu-satunya.

Jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 5.669 pendidik yang tersebar di seluruh lembaga pendidikan dari PAUD, SMA/SMK, hingga SLB. Jumlah ini harus ditambah secara kontinu untuk memperbaiki akses pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat. Gambaran umum terkait ketersediaan guru di Kabupaten Manggarai Barat akan dibahas di bagian berikut.

1) Rasio Guru Siswa dan Indeks Pemerataan Guru

Ketersediaan guru merupakan salah satu aspek penting dalam melihat tingkat efektivitas pendidikan di suatu daerah. Salah satu indikator yang bisa menggambarkan sasaran tersebut adalah rasio guru-siswa. Rasio ini mengilustrasikan tentang perbandingan antara jumlah peserta didik yang dihadapi oleh seorang guru. Tingginya nilai rasio guru-siswa dalam sebuah sekolah mengindikasikan bahwa seorang guru harus membagi tanggung jawabnya kepada lebih banyak peserta didik. Hal ini mengurangi efektivitas pengawasan peserta didik dan mempengaruhi mutu pengajaran.

Tabel 2. 36. Rasio Guru dan Siswa Kab Manggarai Barat Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD	1:14	1:16	1:14	1:13	1:12
SMP	1:14	1:15	1:12	1:12	1:11

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SMA	1:15	1:15	1:14	1:12	1:12
SMK	1:17	1:21	1:17	1:19	1:18

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2017-2021

Secara keseluruhan, rasio guru dan siswa di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren membaik dari tahun ke tahun. Perubahan secara konsisten terjadi di seluruh jenjang pendidikan. Meski demikian, jenjang SMK masih menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2021. Hal ini mengingat jumlah peserta didik SMK yang menyentuh 6.847 murid. Dengan jumlah peserta didik yang tidak terlampau jauh, rasio guru-siswa SMA bisa menyentuh angka yang cukup baik yaitu 1:12.

Rasio guru dan siswa juga dipengaruhi oleh distribusi guru di suatu daerah. Tidak meratanya guru di suatu daerah akan berdampak pada mutu pengajaran karena seorang guru harus merangkap beberapa mata pelajaran, bahkan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Ketidakmerataan guru secara kuantitatif bisa diilustrasikan melalui sebuah indikator yang disebut Indeks Pemerataan Guru. Indeks yang semakin mendekati nilai nol menggambarkan distribusi guru yang semakin merata.

Grafik 2. 10. Indeks Pemerataan Guru Kelas dan Mapel di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2020

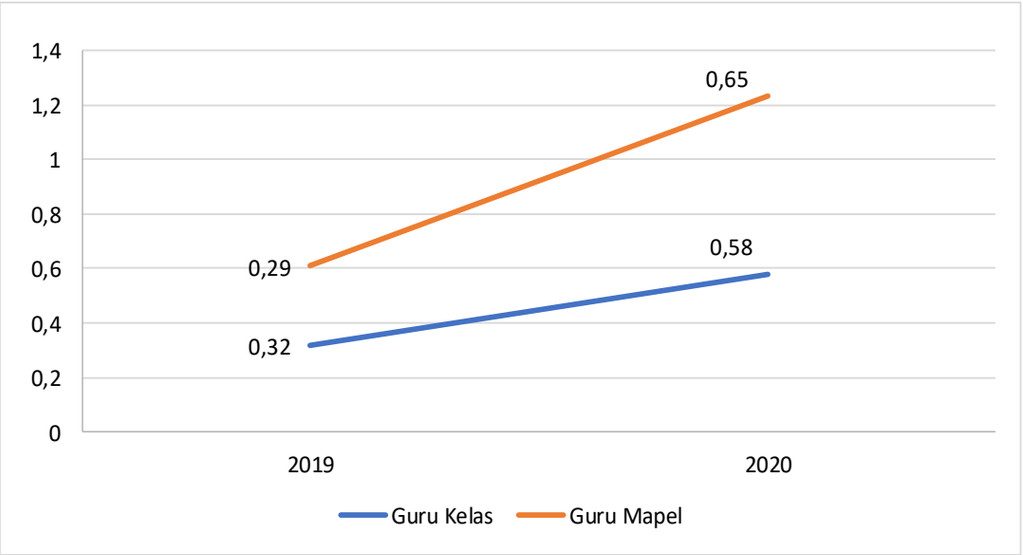

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019-2020

Indeks Pemerataan Guru di Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan semakin menjauh dari nilai nol. Angka ini mengindikasikan

bahwa distribusi guru semakin tidak merata, khususnya guru kelas. Pada tahun 2020, Indeks Pemerataan Guru Kelas justru meningkat sebesar 124,13 persen dari tahun 2021. Indeks Pemerataan Guru Mata Pelajaran juga ikut meningkat sebesar 81,25 persen pada rentang tahun yang sama.

Grafik 2. 11. Indeks Pemerataan Guru UN dan Mapel di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2020

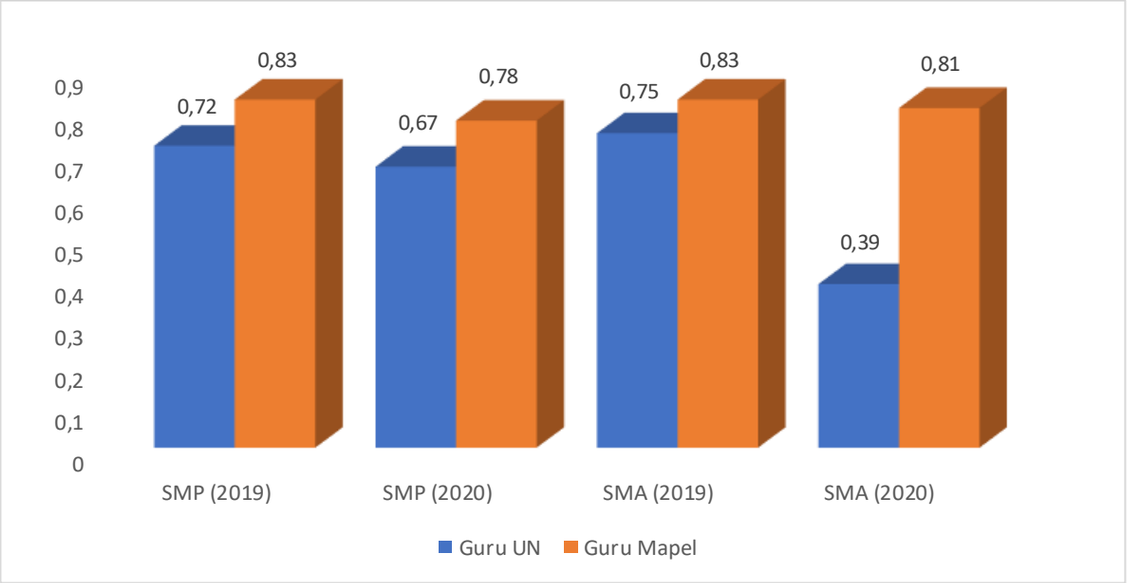

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019-2020

Terlepas dari buruknya capaian secara makro, capaian Indeks Pemerataan Guru di jenjang SMP dan SMA perlu diapresiasi karena perkembangan distribusinya yang semakin merata. Distribusi guru UN pada jenjang SMA menurun tajam hingga 92,30 persen, diikuti dengan guru mata pelajaran jenjang SMA dengan penurunan 2,4 persen. Sementara itu, penurunan Indeks Pemerataan Guru juga terjadi pada jenjang SMP, dengan rata-rata penurunan 6,4 persen baik untuk guru UN dan mata pelajaran. Perubahan yang semakin baik ini perlu disambut dengan dukungan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan guru agar distribusi guru semakin merata di Kabupaten Manggarai Barat.

2) Kualifikasi Pendidikan

Pemerataan pendidikan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan guru saja namun juga tentang kualitas yang dimiliki oleh setiap guru. Indikator kualifikasi pendidikan guru berbicara tentang kualitas seorang guru yang dibuktikan melalui jenjang pendidikan yang ditempuh. Mengacu pada

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi pendidikan guru diperoleh melalui pendidikan tinggi tingkat sarjana atau diploma 4.

Tabel 2. 37. Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2017-2021 (Persen)

Jenjang	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
TK	39,29	65,96	56,25	41,01	45.2
SD	66,20	78,94	80,48	84,95	92.4
SMP	90,18	92,26	93,24	96,09	97.2
SMA	95,93	95,93	95,70	92.4	95.3
SMK	94,25	93,27	93,31	90.6	93

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019-2021, Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Persentase guru berkualifikasi S1 atau diploma 4 pada tahun 2021 sudah menunjukkan capaian yang baik, walaupun tren perkembangannya cukup fluktuatif sejak tahun 2017. Fokus perbaikan perlu diletakkan kepada guru di jenjang TK karena proporsi guru berkualifikasi tidak sampai setengah dari jumlah seluruhnya. Capaian kualifikasi guru TK ini juga cukup kontras jika dibandingkan dengan jenjang lain yang sudah diatas 90 persen. Kualifikasi akademik guru merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan keahlian guru dalam mengajar. Mengingat urgensi tersebut, peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat harus turut serta membuka kesempatan bagi setiap guru untuk memperoleh kenaikan kualifikasi akademik.

3) Guru Tersertifikasi

Peningkatan kualitas guru juga dapat dilakukan dengan mendapatkan sertifikasi. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru untuk memiliki sertifikat pendidik. Selain dengan menempuh jenjang pendidikan sesuai kualifikasi, pemberian sertifikat pendidik bentuk pengakuan negara terhadap guru sebagai pendidik yang tidak hanya memiliki keahlian, namun juga profesional.

Tabel 2. 38. Persentase Guru Tersertifikasi Tahun 2018-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
PAUD	8.5	17.3	8.2	1.4
SD	22.5	27.3	21.4	23.6
SMP	18.3	18.9	16.9	14.3
SMA	17.9	20	19.4	16.7
SMK	13	14.4	15.9	12.4

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2018-2021, Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Tren perkembangan guru tersertifikasi di Kabupaten Manggarai Barat cenderung fluktuatif. Secara keseluruhan, hanya guru jenjang SD yang mengalami peningkatan jumlah guru dengan sertifikat pendidik pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, persentase guru PAUD yang tersertifikasi menurun hingga 91,9 persen pada tahun 2021. Angka ini menandakan penurunan paling drastis tidak hanya di jenjang PAUD, namun juga keseluruhan jenjang secara akumulatif. Secara keseluruhan, rata-rata guru yang tersertifikasi sebesar 13,16 persen. Rendahnya sertifikasi guru ini bisa dipengaruhi oleh masih minimnya kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga perlu menjadi bahan refleksi bagi pihak-pihak terkait.

4) Kompetensi

Selain meningkatkan kualifikasi pendidikan, pemerintah juga menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk menjamin konsistensi kualitas para guru. Perbandingan rata-rata nilai UKG antara Kabupaten Manggarai Barat dengan Kabupaten Manggarai Timur serta Kabupaten Manggarai diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 39. Nilai UKG Manggarai Barat dan Kabupaten Tetangga Tahun 2019

Kabupaten	Nilai Uji Kompetensi Guru				
	SD	SMP	SMA	SMK	Rata-rata
Manggarai	54.33	52.53	55.90	54.70	54.23
Manggarai Barat	50.83	49.48	51.73	50.27	50.66
Manggarai Timur	51.16	50.27	50.94	52.38	50.99

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019

Rata-rata nilai UKG Kabupaten Manggarai Barat lebih tinggi dari Kabupaten Manggarai, namun lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur. Melalui UKG diharapkan setiap guru dapat mengetahui wilayah kompetensi yang perlu ditingkatkan. Bagi pemerintah, hasil dari

kegiatan ini akan membantu memetakan kualitas para guru, sehingga mempermudah pengambilan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

g. Angka Kelulusan

Dampak langsung dari peningkatan mutu pembelajaran di sekolah antara lain adalah tingkat kelulusan yang semakin tinggi. Data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga manyatakan bahwa angka kelulusan siswa di Manggarai Barat sejak tahun 2016 tergolong sangat baik. Berikut adalah rincian datanya.

Tabel 2. 40. Angka Kelulusan SiswaTahun 2016-2020 (Persen)

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	100	99,98	100	100	100

Sumber: Dinas PKO, 2020

Rata-rata angka kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 100% pada tahun 2016 hingga 2020. Sedangkan di jenjang SMP, persentase terendah hanya terjadi pada tahun 2017, di mana pada saat itu terdapat 1 siswa juga yang dinyatakan tidak lulus, karena tidak bersedia mengikuti ujian akhir.

h. Ruang Kelas

Mutu pendidikan tidak hanya berbicara tentang kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan tetapi juga pada aspek pendukungnya. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek pendudkung yang berkontribusi langsung pada kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas, salah satunya, merupakan tempat bagi pengajar dan peserta didik dalam melakukan kegiatan tatap muka dalam proses belajar mengajar. Ruang kelas yang baik akan menciptakan suasana belajar yang kondusif serta berpengaruh pada semangat belajar peserta didik.

Tabel 2. 41. Persentase Kondisi Ruang Kelas Tahun 2019 dan 2020

Jenjang	Kondisi Ruang Kelas (persen)							
	2019				2020			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
SD	20,23	46,19	12,80	20,79	9,06	50,28	23,85	16,81
SMP	31,99	49,04	8,68	10,29	14,68	58,47	15,31	11,54

Jenjang	Kondisi Ruang Kelas (persen)							
	2019				2020			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
SMA	37,41	55,44	2,04	5,10	0	73,02	11,15	15,83
SMK	70,45	12,88	0,00	16,67	2,42	67,27	23,03	7,27

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2020

Rata-rata persentase kondisi ruang kelas yang baik di seluruh jenjang pendidikan adalah 40,02 persen pada tahun 2019, lalu menurun secara drastis hingga 6,54 persen pada tahun 2020. Sebagian besar ruang kelas di sekolah Kabupaten Manggarai Barat berada dalam kondisi rusak. Peningkatan ruang kelas dengan kondisi rusak sangat terlihat di jenjang sekolah SMA. Ruang kelas SMA dengan kondisi baik menurun hingga nol persen pada tahun 2020, diiringi dengan peningkatan sebesar 9,11 persen pada ruang kelas kondisi rusak sedang dan 10,73 persen pada ruang kelas kondisi rusak berat. Sementara itu, ruang kelas dengan kondisi baik pada sekolah jenjang SMK juga mengalami penurunan yang tajam sebesar 96.56 persen. Namun, ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada sekolah jenjang SMK juga ikut menurun dan masuk dalam golongan rusak ringan atau sedang.

Tabel 2. 42. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2016-2020

Kondisi ruang kelas SD	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	267	314	367	395	193
Rusak Ringan	974	888	975	902	1071
Rusak Sedang	215	202	258	250	508
Rusak Berat	222	241	367	406	358
Kondisi ruang kelas SMP	**Tahun**				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Baik	122	154	227	199	117
Rusak Ringan	240	222	277	305	466
Rusak Sedang	44	61	19	54	122
Rusak Berat	46	55	58	64	92

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2020

Ruang kelas dengan kondisi rusak pada jenjang SD dan SMP juga mengalami peningkatan. Adapun persentase ruang kelas dengan kondisi rusak mencapai 90,9 persen pada jenjang SD dan 85,3 persen pada jenjang SMP. Walaupun masih didominasi oleh kerusakan ringan, namun ruang kelas dengan kondisi rusak berat

perlu menjadi perhatian karena angkanya masih cukup tinggi dan terus bertambah. Temuan ini mengindikasikan bahwa rehabilitasi infrastruktur pendidikan harus menjadi urgensi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Rehabilitasi infrastruktur sekolah dapat mendukung serta meningkatkan fungsi pendidikan karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

i. Akreditasi Sekolah

Jaminan kualitas dan mutu dari sebuah sekolah dapat dilihat salah satunya dari akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah dapat menggambarkan kinerja sekolah secara komprehensif yang berhubungan pada mutu pengajaran dan daya saing setiap lulusannya. Sekolah yang tidak terakreditasi tidak bisa menyelengarakan ujian kelulusan siswanya sendiri sehingga harus melakukannya di sekolah lain yang sudah terakreditasi.

Tabel 2. 43. Akreditasi Sekolah Tahun 2020 dan 2021

Jenjang	Akreditasi tahun 2020 (persen)				Akreditasi tahun 2021 (persen)			
	A	B	C	Belum Terakreditasi	A	B	C	Belum Terakreditasi
SD	2.3	37.2	45.6	14.9	1.52	26.62	33.08	38.78
SMP	11.5	42.7	35.4	10.4	9.38	37.5	35.42	17.7
SMA	14.8	48.1	37	0	16.13	41.94	25.81	16.12
SMK	11.1	55.6	33.3	0	7.69	38.46	23.08	30.77

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2020 dan 2021

Persentase sekolah yang belum terakreditasi di Kabupaten Manggarai Barat kembali meningkat pada tahun 2021 dikarenakan jumlah sekolah yang baru dibuka juga ikut meningkat. Adapun akreditasi sekolah secara keseluruhan jenjang didominasi oleh akreditasi B dengan rata-rata angka 36,13 persen, diikuti dengan akreditasi C dengan angka 29,34 persen, dan akreditasi A dengan angka 8,68 persen. Akreditasi suatu sekolah ditentukan oleh banyak standar seperti standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, hingga standar sarana dan prasarana. Maka dari itu, peningkatan mutu pendidikan harus memperhatikan seluruh aspek yang saling berkaitan guna menambah jumlah sekolah yang terakreditasi.

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Indikator yang dapat

digunakan untuk menilai derajat kesehatan suatu masyarakat umumnya menggunakan indikator mortalitas seperti Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kedua indikator ini dapat menggambarkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah.

a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan suatu indikator yang membagi jumlah kematian bayi yang belum mencapai usia satu tahun dengan jumlah kelahiran hidup. Hasil pembagiannya kemudian dikali 1.000 karena Angka Kematian Bayi dihitung per 1.000 kelahiran hidup dalam tujuh hari pertama dalam hidupnya. Sementara itu, Angka Kematian Ibu menghitung banyaknya perempuan yang meninggal dari beberapa penyebab kematian yang terkait dengan kehamilannya dalam kurun waktu 42 hari setelah melahirkan atau yang disebut masa nifas. Penyebab kematian ibu yang terhitung dalam indikator ini meliputi kematian yang disebabkan gangguan kehamilan dan melahirkan yang bukan karena kecelakaan.

Tabel 2. 44. AKB dan AKI Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi (AKB)					
Kabupaten	11,4 per KH	9,3 per KH	10,1 per KH	12,84 per KH	13,7 per KH
Nasional	21,86 per KH	21,12 per KH	16 per KH	n/a	n/a
Angka Kematian Ibu (AKI)					
Kabupaten	144,53 per KH	101,41 per KH	134,4 per KH	134,1 per KH	163,9 per KH
Nasional	n/a	305 per KH	183 per KH	n/a	n/a

Sumber: Dinas Kesehatan Manggarai Barat Tahun, 2023

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2019. Terdapat peningkatan sebesar hampir satu kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Sementara itu pada tahun yang sama, Angka Kematian Ibu secara signifikan meningkat hingga 30 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan yang terburuk sejak lima tahun terakhir, dimana sebelumnya sempat menyentuh 144,53 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018. Statistik ini bukanlah suatu kabar yang menggembirakan bagi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Barat. Diperlukan adanya penguatan kebijakan kesehatan

yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana bagi persalinan dan penanganan komplikasi untuk ibu dan bayi.

b. Rasio Prasarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu faktor determinan yang kontribusinya cukup penting terhadap pelayanan kesehatan di suatu daerah. Hal ini mengingat tujuan dari adanya infrastruktur kesehatan sebagai salah satu langkah peningkatan pelayanan kesehatan. Cakupan ketersediaan prasarana dapat mempengaruhi kapasitas staf dan tenaga kesehatan, jumlah pengunjung yang bisa berkunjung, dan kemampuan menampung pasien rawat inap. Adapun jenis fasilitas kesehatan yang terdapat di suatu daerah antara lain puskesmas, puskesmas pembantu, pondok bersalin desa, klinik kesehatan, dan rumah sakit.

Tabel 2. 45. Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Puskesmas	19	21	22	22	22
Rasio Puskesmas	1: 13.853	1: 13.080	1: 13.080	1 :13.080	1 :13.080
Puskesmas Pembantu	32	31	31	31	32
Rasio Puskesmas Pembantu	1 : 8.407	1 : 8,079	N/A	N/A	N/A
Polindes	18	18	18	19	19
Rasio Polindes	1 : 14.946	1 : 17.168	N/A	N/A	N/A
Klinik/Balai Kesehatan	2	3	2	3	13
Rasio Klinik/Balai Kesehatan	1 : 134.514	1 : 91.563	N/A	N/A	N/A
Rumah Sakit	2	2	2	3	3
Rasio Rumah Sakit	1 : 134.514	1 : 137.344	N/A	1:88.789	1:88.789

Sumber: diolah dari data Dinas Kesehatan Kab Manggarai Barat, 2023

Secara keseluruhan, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat cenderung stabil sejak tahun 2018. Tidak ada fluktuasi yang signifikan kecuali pertambahan klinik kesehatan sejumlah 10 bangunan pada tahun 2022. Stagnansi jumlah fasilitas kesehatan ini bukan merupakan suatu hal yang buruk, melainkan sebuah agenda pembangunan di masa depan. Hal ini memperhatikan rasio dari antara penduduk dan satu fasilitas kesehatan. Sebagai contoh, tercatat satu rumah sakit masih memiliki tanggung jawab cakupan yanng tinggi hingga 88.789 penduduk. Artinya, sepertiga penduduk Kabupaten Manggarai Barat yang

memerlukan pelayanan rumah sakit hanya dapat memilih satu diantara tiga pilihan yang terdekat.

c. Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Selain ketersediaan sarana infrastruktur, kuantitas tenaga kesehatan merupakan salah satu elemen penting lain yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan adalah salah satu unsur masyarakat yang perannya amat penting untuk mencapai pembangunan kesehatan dan sumber daya manusia secara utuh. Pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan harus disertai dengan kapasitas dari tenaga kesehatan yang ada agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi maksimal dan sesuai peruntukkannya.

Tabel 2. 46. Rasio Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2021 dan 2022

No	Tenaga Medis	Jumlah	Rasio terhadap jumlah penduduk	Rasio per 1.000 penduduk
Tahun 2021				
1.	Dokter	94	1 : 2.804	0,357
2.	Keperawatan	518	1 : 509	1,965
3.	Kebidanan	357	1 : 738	1,355
4.	Kefarmasian	54	1 : 4.881	0,205
Tahun 2022				
1.	Dokter	101	1 : 2.637	0,4
2.	Keperawatan	581	1 : 459	2,2
3.	Kebidanan	391	1 : 681	1,5
4.	Kefarmasian	84	1 : 3171	0,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023

Terdapat tren peningkatan rasio tenaga medis Kabupaten Manggarai Barat, walaupun tidak begitu signifikan. Meski demikian, rasio tenaga medis terhadap penduduk Kabupaten Manggarai Barat masih terbilang sedikit. Jika mengacu pada WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1 : 1.000 penduduk. Satu dokter di Kabupaten Manggarai Barat mencakup 2,5 kali lipat dari rasio idealnya. Sama halnya dengan tenaga medis lainnya yaitu kefarmasian dimana ketersediaan terhadap jumlah penduduknya juga masih sangat rendah. Dengan belum maksimalnya ketersediaan tenaga medis ini, pemerintah harus berkomitmen dan menyusun strategi yang tepat guna mendukung pelayanan kesehatan, khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Tabel 2. 47. Capaian Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Posyandu Per 1.000 Balita	20.63	20.77	20.08	21,11	20,86
2	Rasio Puskesmas per 1.000 Penduduk	0,0701	0,0806	0,0834	0,0835	0,08
3	Rasio Poliklinik Per 1000 penduduk	0,0038	0,0038	0,0075	0,0113	0,04
4	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,1208	0,1190	0,1176	0,1176	0,12
5	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,53	0,53	0,53	0,53	0,58
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	0,53	0,53	0,53	60,70%	55,59%
7	Cakupan Pertolongan Persalinan (Orang)	92	94	95	5.049 Orang (95,7%)	4728 orang (73,63%)
8	Cakupan Kunjungan Bayi	5.034	4.939	5.242	5.122	4.731
9	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	82,8%	78,2%	73.5%	79,9	77%
10	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru dan BTA+	57%	50%	80%	90,4%	89%
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	58,00%	53,00%	48,00%	N/A	100%
12	Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	100	100	100%	100	100%
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin	24,78	22,95	0	N/A	N/A
14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	80	80	0	0	100%
15	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	100	100	100	N/A	0.4
16	Rasio Tenaga Medis Persatuan Tenaga Medis	0,1	0,12	0,17	N/A	0.07

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Manggarai Barat, 2023

Beberapa indikator kunci urusan kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan pada tahun 2022. Indikator tersebut antara lain adalah cakupan pertolongan persalinan dan komplikasi kebidanan yang ditangani. Kedua indikator tersebut berhubungan dengan indikator kesehatan makro seperti Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Di sisi lain, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan menyentuh angka 100 persen, dimana pada tahun-tahunnya sebelumnya cenderung stagnan. Infrastuktur pelayanan kesehatan balita juga didukung dengan tingginya rata-rata rasio puskesmas selama lima tahun terakhir, mencapai kurang lebih 21 puskesmas per 1.000 balita. Capaian maksimal ini merupakan suatu upaya yang baik dalam menurunkan tingginya jumlah balita gizi buruk di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingkat keberhasilan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat ditinjau dari beberapa indikator utama yang menggambarkan kondisi ketersediaan dan kualitas. Indikator penting yang merepresentasikan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di antaranya yaitu infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, bangunan dan penataan ruang. Berikut adalah data mengenai kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat.

a. Jalan dan Jembatan

Jalan di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan nasional adalah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jalan provinsi adalah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Panjang jalan nasional di Kabupaten Manggarai Barat tercatat sepanjang 86,88 km. Jalan ini merupakan bagian dari jalan trans-flores yang menghubungkan Labuan Bajo dengan Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai. Sedangkan panjang jalan provinsi tercatat sepanjang 131,94 km yang terdiri dari 4 ruas jalan yang menghubungkan Labuan Bajo, Ruteng dan Reok melalui jalur tengah Flores. Sementara jalan kabupaten, dari tahun 2016 – 2020 tercatat sepanjang 1226,89 km yang terdiri dari 185 ruas dan tersebar di semua kecamatan.

Tabel 2. 48. Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021

Nama Ruas Jalan	Nama Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Rata-rata (M)
JALAN NASIONAL			
Pang Lembor - Malawatar	Lembor	26,41	6,00
Malawatar – Labuan Bajo	Lembor, Welak, Sano Nggoang, Mbeliling, Komodo	60,47	6,00
Total		**86,88**	
JALAN PROVINSI			
Sp. Nggorang – Sp.Wangkung – Lando	Komodo, Boleng	33,30	4,50
Kondo-Sp. Noa-Hita	Pacar, Macang Pacar	34,21	4,50
Hita-Sp. Tiga Kedindi	Macang Pacar	41,06	4,50
Sp. Noa-GoloWelu	Kuwus Barat, Kuwus	23,38	4,50
Total		**131,94**	

Sumber: Bidang Fispra BP4D Kab Manggarai Barat, 2023

Kategori jalan dalam kondisi mantap tercatat mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2016 hingga 2021. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap selalu meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Adanya penurunan persentase kemantapan jalan yang cukup signifikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 disebabkan adanya perbedaan cara penilaian kondisi tipe perkerasan berbutir dan tanah. Sedangkan penurunan persentase kemantapan jalan dari tahun 2019 ke tahun 2021 disebabkan karena konstruksi saat ini masih menggunakan konstruksi lapen yang memiliki umur ketahanan pendek, serta adanya bencana tanah longsor di wilayah kecamatan yang berdampak pada kemantapan jalan.

Grafik 2. 12. Presentase Jalan dalam Kondisi Mantab di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2021

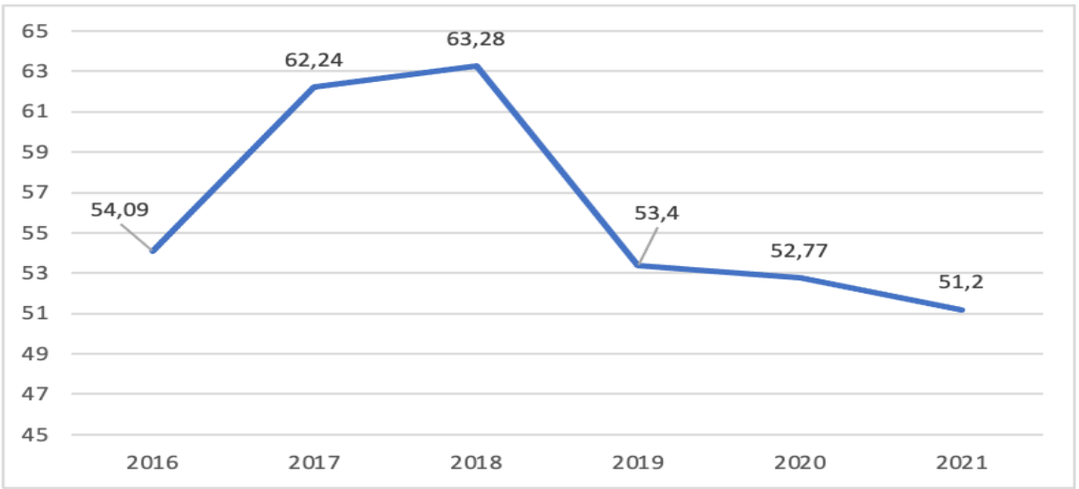

Sumber: Bidang Fispra BP4D Kab Manggarai Barat, 2023

Capaian panjang jalan dalam kondisi baik tertinggi ada pada tahun 2018. Kondisi ini sangat kontradiktif, karena jumlah panjang jalan dalam kondisi rusak berat juga terjadi pada tahun yang sama. Persentase panjang jalan dalam kondisi rusak berat yang tercatat sepanjang tahun 2016 hingga 2018 cukup signifikan, yakni sebesar 1,33%. Kondisi tersebut disebabkan karena dalam pelaksanaan pembangunan jalan terdapat ketidaksesuaian dengan kebutuhan teknis di lapangan ataupun dengan kewenangan. Ketidaksesuaian dengan kebutuhan teknis dibuktikan dengan belum adanya studi khusus pra-pembangunan jalan di Kabupaten Manggarai Barat. Padahal untuk mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi baik dan memiliki tingkat keselamatan yang baik dibutuhkan studi khusus sebelum dilaksanakannya pembangunan jalan, terutama studi tentang tanah dimana jalan akan dibangun. Jenis tanah di Kabupaten Manggarai Barat didominasi struktur yang perlu distabilkan untuk pembangunan jalan. Selain itu pemeliharaan secara berkala terhadap kondisi jalan juga sangat diperlukan. Adapun detail rinci mengenai panjang jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 hingga 2022 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 – 2022 (Km)

Kondisi	2019	2020	2021	2022
Jalan rusak berat	542,97	456,86	452,53	523,62
Jalan rusak ringan	36,44	89,97	146,21	104,52
Jalan sedang	146,54	129	104,52	146,31
Jalan baik	500,95	551,07	523,63	452,43
Total	**1.226,89**	**1.226,89**	**1.226,89**	**1.226,89**

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka, 2023

Data mengenai panjang jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan angka yang fluktuatif selama tahun 2019 hingga 2022. Tren meningkat dialami oleh jalan dengan kondisi rusak ringan, sedangkan tren menurun terjadi pada jalan dengan kondisi baik, sedang dan rusak berat. Secara umum kurang lebih 50 persen kondisi jalan di Kabupaten Manggarai Barat berada dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat. Hal ini tentunya perlu menjadi catatan pemerintah untuk meningkatkan angka jalan dengan kondisi sedang atau bahkan baik.

Jembatan juga menjadi salah satu indikator dalam urusan PUPR. Bidang Fispra BP4D menyebutkan bahwa dari tiga kategori jalan di Kabupaten Manggarai Barat, total terdapat 176 jembatan. Jembatan di ruas jalan nasional sebanyak 32 jembatan, sedangkan jembatan di ruas jalan provinsi sebanyak 39 jembatan dan jembatan di ruas jalan kabupaten sejumlah 105 jembatan. Jembatan di ruas jalan kabupaten memiliki persentase terbesar dibandingkan jembatan di ruas jalan provinsi maupun nasional, yaitu sebesar 59,66%. Sisa persentase sebesar 40,34% merupakan jembatan di ruas jalan provinsi dan nasional.

Tabel 2. 50. Kondisi Prasarana Jembatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019

NO	STATUS JEMBATAN	BAIK		SEDANG		RUSAK		BELUM DIBANGUN		Total
		Jlh (bh)	Bentangan (m)	Jlh (bh)	Bentangan (m)	Jlh (bh)	Bentangan (m)	Jlh (bh)	Bentangan (m)	
1	NEGARA	**32**	**368**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32**
2	PROPINSI	29	435	8	120	2	35	14	360	53
3	KABUPATEN	68	915	15	255	22	405	187	3.083	292
Jumlah		**129**	**1.718**	**23**	**375**	**24**	**440**	**201**	**3.443**	**377**

Sumber: Bidang Fispra BP4D, 2020

Data yang tercatat juga menunjukkan bahwa masih terdapat target pembangunan jembatan yang belum terealisasikan, khususnya untuk jembatan di ruas jalan provinsi dan kabupaten. Sebanyak 13,64% terdapat jembatan di ruas provinsi maupun kabupaten dalam kondisi rusak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian lebih lanjut, guna meningkatkan mobilitas masyarakat.

b. Jaringan Irigasi

Indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selanjutnya yakni ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi. Terdapat tiga kategori pembagian daerah irigasi sesuai kewenangannya. Pembagian daerah irigasi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat menurut kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 51. Daerah Irigasi (DI) sesuai kewenangan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022

No	Uraian	Luas (Ha)		Jumlah DI(Buah)
		Potensial	Fungsional	
1	DI Kewenangan Pusat	8.743	6.795	2
2	DI Kewenangan Provinsi	3.110	2.426	4
3	DI Kewenangan Kabupaten	36.479	15.360	362
Jumlah		**48.332**	**24.581**	**368**

Sumber: Bidang Fispra BP4D, 2023

Daerah irigasi di Kabupaten Manggarai Barat baru memanfaatkan sebesar 50,65 persen dari luasan lahan potensial yang ada sebagai daerah irigasi. Diperlukan adanya peningkatan upaya untuk dapat mengoptimalkan daerah urugasi di Kabupaten Manggarai Barat. Upaya tersebut perlu untuk segera direalisasikan, guna mendukung pertanian yang juga optimal di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 52. Panjang Saluran Irigasi Berdasarkan Kondisi (m) Tahun 2021-2022

Tahun	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
2021	191.867,80	135.881,05
2022	198.942,34	134.531,46

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Panjang saluran irigasi di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021-2022 menunjukkan terjadinya penurunan angka saluran dalam kondisi rusak dan kenaikan angka saluran dalam kondisi baik. Secara umum proporsi panjang saluran irigasi dalam kondisi buruk masih mencapai angka 40 persen dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Perbaikan saluran irigasi diperlukan untuk meningkatkan angka panjang saluran irigasi dalam kondisi baik, mengingat sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan bagi perekonomian Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 53. Luas Irigasi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2021

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2020	2021
1	Luas Irigasi Kabupaten	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479
2	Luas Irigasi yang terairi	18.141	18.375	18.647	18.751	19.286
3	Persentase (persen)	49,73	50,37	51,12	51,40	52,87

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Rata-rata persentase kenaikan irigasi dalam kondisi terairi sebesar 0,95 persen per tahun dari tahun 2015 hingga 2021. Dari angka persentase terkini yang masih di angka 50 persen, upaya untuk meningkatkan luas irigasi yang terairi masih perlu dilakukan untuk kedepannya. Upaya baik secara teknis maupun regulasi perlu untuk dioptimalkan, guna mendukung rehabilitasi irigasi di Kabupaten Manggarai Barat. Peningkatan angka luas irigasi yang terairi sendiri bertujuan untuk mengoptimalkan hasil pertanian yang diperoleh.

c. Penataan Ruang

Urusan pendataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat periode 2012-2032. RTRW tersebut saat ini sedang direvisi sejalan dengan perkembangan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi dan penilaian pada tahun 2017, nilai akhir penilaian peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Manggarai Barat sebesar 62,27 persen, sedangkan rencana rinci tata ruang sampai saat ini yang sudah dibuat dokumen akademisnya adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Labuan Bajo dan sudah mendapat Rekomendasi Gubernur dengan nomor No. BU. 124.3/59/Bappeda/2014.

Aspek yang dapat dinilai dalam bidang urusan penataan ruang dalam mencerminkan pembangunan daerah bagi aspek pelayanan umum salah satunya adalah terlayaninya masyarakat dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah. Berikut merupakan data mengenai jumlah bangunan dengan IMB pada tahun 2017-2022 di Kabupaten Manggarai Barat:

Grafik 2. 13. Jumlah Bangunan ber-IMB di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2022

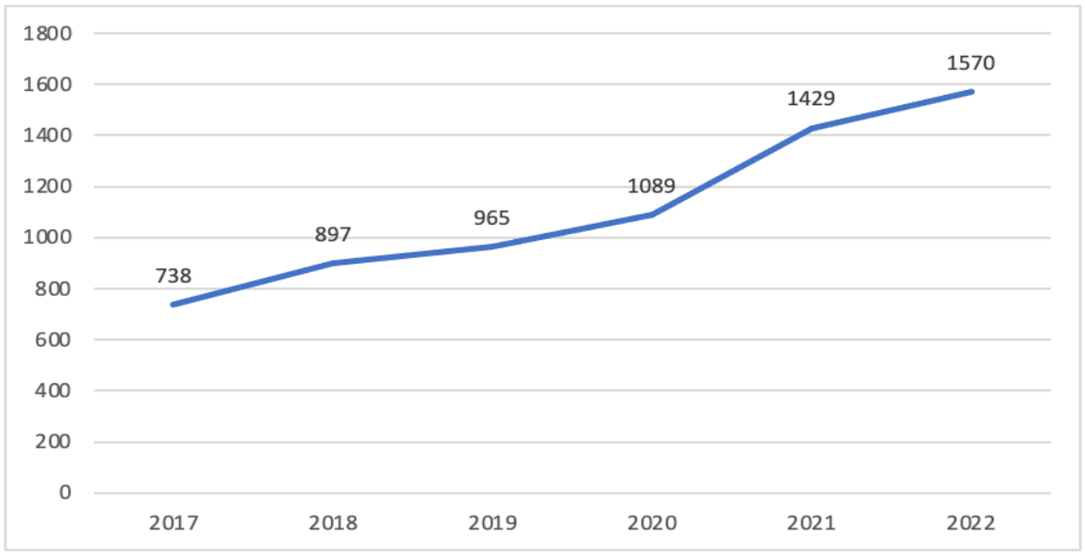

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Izin bangunan dengan IMB selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Secara umum terdapat kenaikan bangunan dengan IMB sebesar 113 persen selama periode tersebut. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa laju pembangunan ataupun alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun selalu bertambah dari tahun 2017 hingga 2022. Oleh karenanya, pengawasan terhadap tata ruang secara teknis maupun regulasi perlu diupayakan secara lebih lanjut.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan dan kawasan permukiman berhubungan dengan pengukuran kualitas dan kelayakan kawasan permukiman demi mewujudkan kawasan tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan dasar layak huni. Komponen indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman yaitu rumah layak huni, drainase, pengolahan limbah, air bersih, dan jalan lingkungan. Urusan ini berkaitan dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana dalam lingkungan permukiman masyarakat yang memenuhi standar kelayakan huni tempat tinggal. Secara lebih lanjut, hasil pengukuran urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Manggarai Barat diuraikan sebagai berikut.

a. Rumah Layak Huni

Karakteristik rumah layak huni adalah bangunan dan lingkungan sekitar rumah yang telah tersedia sarana dan prasarana memadai dari segi kebersihan,

keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Kriteria rumah layak huni antara lain memiliki konstruksi yang kuat dan kokoh, kecukupan ruang dalam luas bangunan, sanitasi yang baik, dan jaringan air bersih yang berfungsi dengan baik.

Grafik 2. 14. Proporsi jumlah rumah layak huni terhadap rumah tidak layak huni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2022

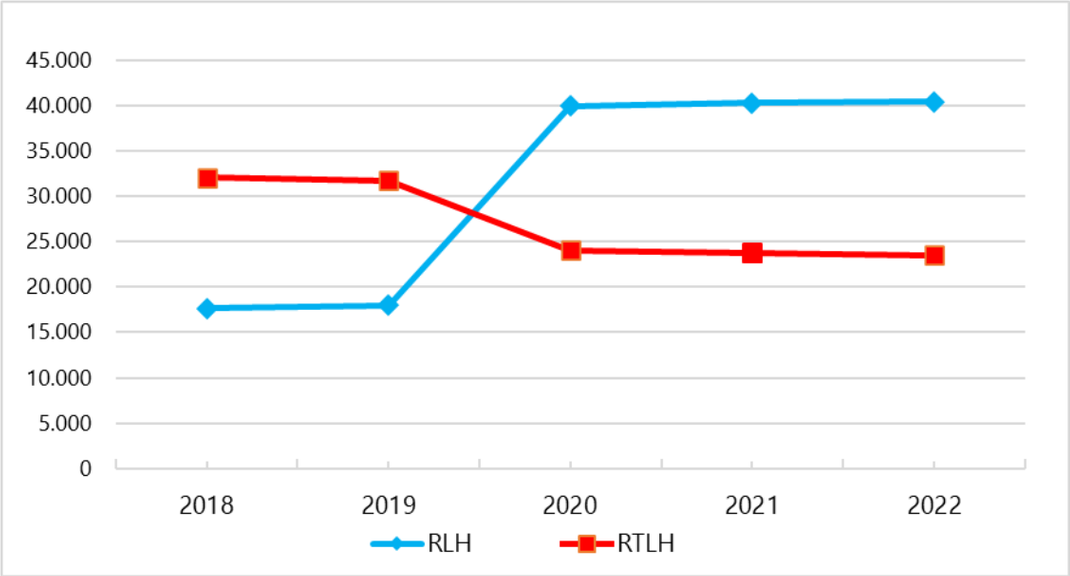

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Proporsi rumah layak huni (RLH) berada dibawah jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2018 dan 2019. Namun dalam tiga tahun terakhir, penanganan RTLH maupun pembangunan RLH baru telah berhasil meningkatkan jumlah RLH 14,56% di Kabupaten Manggarai Barat. Peningkatan RLH tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 14,06%, dengan adanya pembangunan RLH baru yang meningkatkan 9,12% jumlah RLH dan penanganan RTLH telah meningkatkan sebesar 4,94% jumlah RLH di Kabupaten Manggarai Barat. Peningkatan jumlah RLH pada tahun 2021 dan 2022 didukung dengan adanya penanganan RTLH yang meningkatkan 0,21% dan 0,09% jumlah RLH di Kabupaten Manggarai Barat.

Penanganan RTLH di Kabupaten Manggarai Barat masih tergolong rendah sehingga persentase RTLH keseluruhan masih bernilai 36,8% pada tahun 2022. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan teknis dan regulatif untuk segera mengentaskan persoalan RTLH di Kabupaten Manggarai Barat. Rumah yang layak huni akan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penghuninya serta menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari.

Grafik 2. 15. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Maggarai Barat Tahun 2018 – 2022

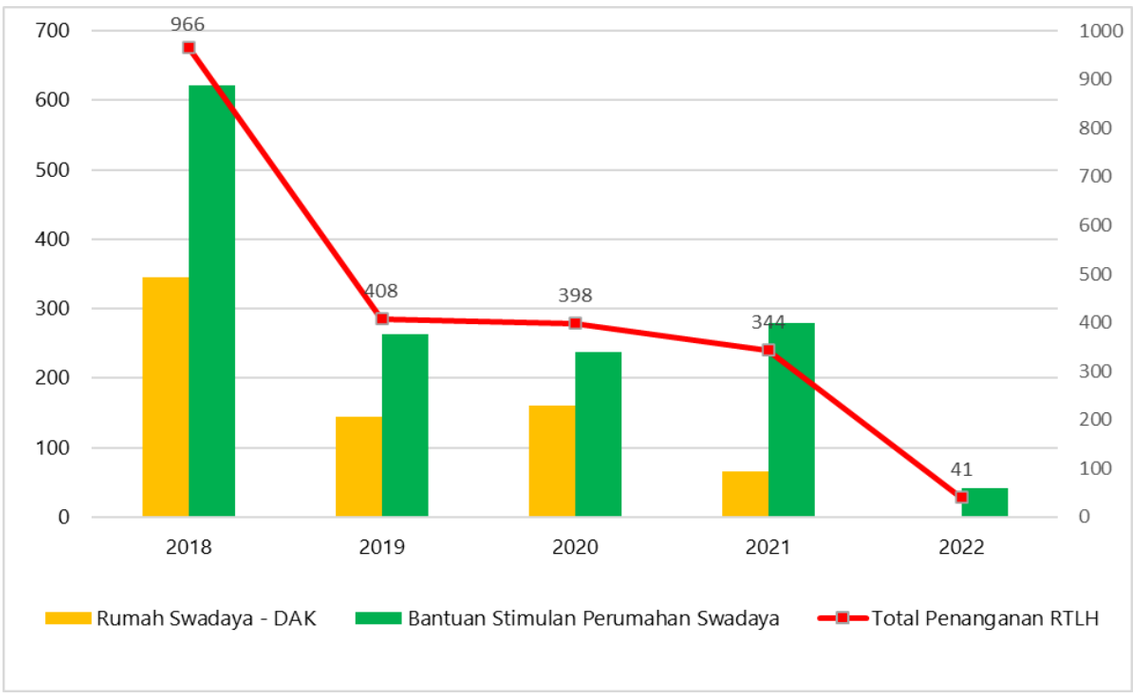

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Penanganan RTLH di Kabupaten Manggarai Barat melalu program Rumah Swadaya (Dana Alokasi Khusus) dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Penanganan RTLH melalui kedua program tersebut menunjukkan tren penurunan jumlah RTLH yang tertangani dalam lima tahun terakhir. Penanganan RTLH dengan jumlah tertinggi adalah pada tahun 2018 dengan total 345 melalui program Rumah Swadaya dan 621 penanganan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Kawasan permukiman yang tidak memenuhi standar layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Penanganan RTLH merupakan salah satu upaya pengentasan kawasan kumuh yang diakibatkan oleh belum tersedianya sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan drainase memadai pada pemanfaatan ruang komunal. Kebijakan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Grafik 2. 16. Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2020

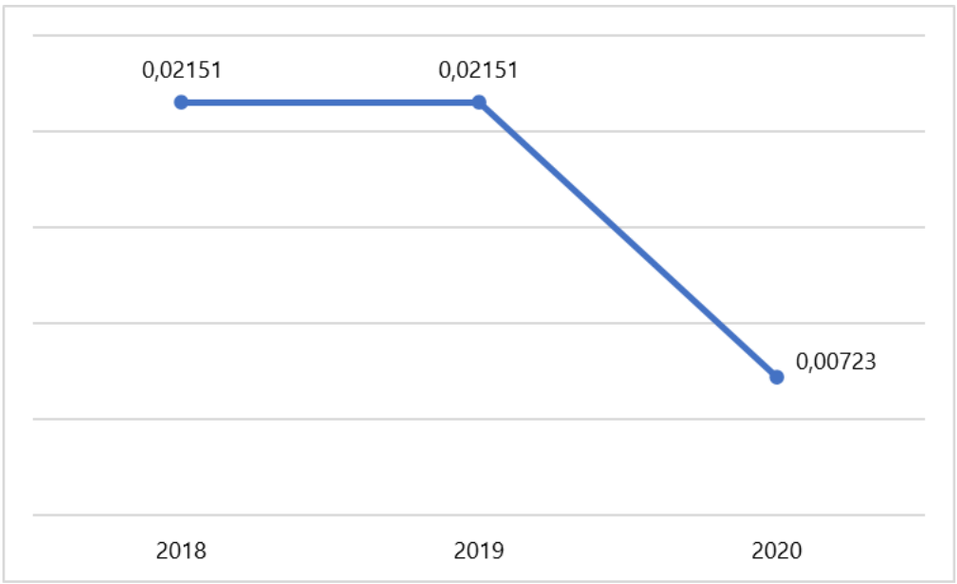

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren penurunan persentase pada tahun 2018 – 2020 sebesar 0,01428%. Pada tahun 2018 dan 2019, persentase kawasan kumuh tidak menunjukkan tren perubahan persentase. Pengentasan kawasan kumuh membutuhkan harmonisasi dan keselarasan target dan tujuan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai pelaku utama. Program penyediaan sarana dan prasarana fisik perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat dalam mengelola lingkungan tempat tinggalnya dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Dalam hal ini dapat diselenggarakan kampanye maupun aksi penerapan pola hidup sehat dan bersih secara langsung dalam ruang komunal.

b. Air Bersih

Air bersih didefinisikan sebagai sumberdaya air yang memenuhi kriteria tidak terkontaminasi zat yang berbahaya bagi tubuh, jernih, dan tidak keruh serta aman dikonsumsi dan digunakan untuk keperluan sanitasi. Akses masyarakat terhadap air bersih dilayani oleh PDAM dan PAMSIMAS. Jumlah sambungan rumah (SR) dan cakupan jiwa yang terlayani merupakan indikator dalam pengukuran capaian kinerja penyediaan air bersih. Sedangkan aspek air bersih untuk konsumsi diukur melalui akses air minum oleh rumah tangga.

Grafik 2. 17. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat akses air minum di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2021

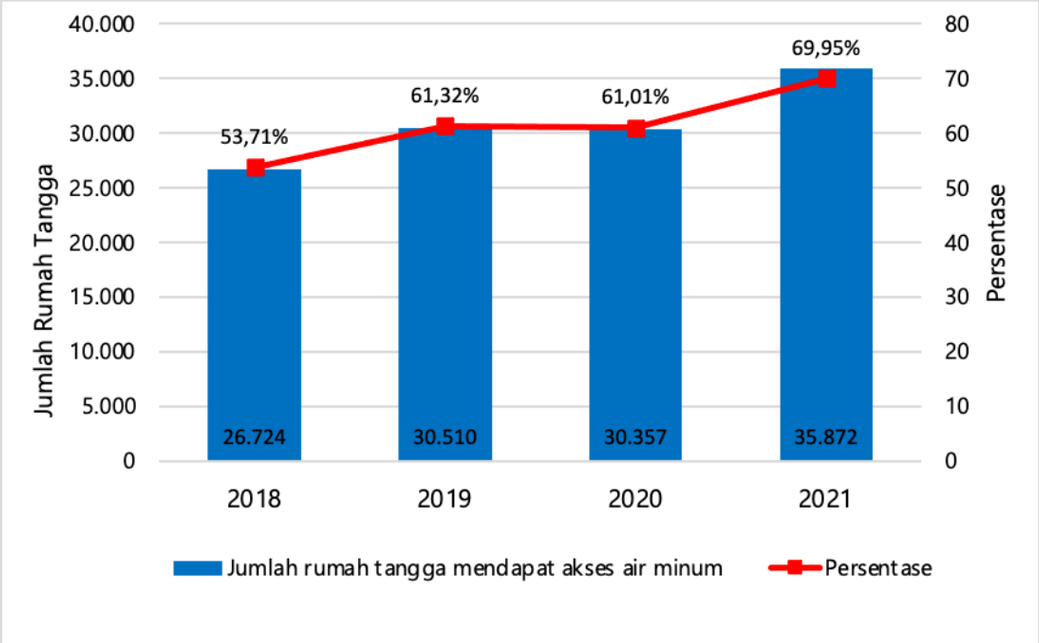

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Data jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2018 – 2021. Artinya jumlah jiwa yang terlayani air bersih telah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Peningkatan jumlah RT pada tahun 2019 dan 2021 merupakan yang tertinggi dengan persentase peningkatan 7,61% dan 8,94%. Peningkatan jumlah RT terhadap akses air minum telah memenuhi 69,95% RT yang terlayani akses air minum di Manggarai Barat pada tahun 2021. Masih terdapat sekitar 30,05% RT yang belum mendapat akses air minum.

Tabel 2. 54. Sambungan Rumah PDAM Mbeliling Tahun 2022

No	Wilayah	SR	
		RT	Jiwa
1	Kota Labuan Bajo	5.956	29.780
2	IKK Lembor	1.939	9.695
3	IKK Lembor Selatan	260	1.300
4	IKK Kuwus	112	560
Jumlah		**8.267**	**41.335**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Program penyediaan air minum oleh PDAM Mbeliling pada tahun 2022 telah beroperasi pada empat wilayah dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya melayani tiga wilayah. Pelanggan terbesar PDAM Mbeliling adalah Kota Labuan

Bajo dengan jumlah RT terlayani adalah 5.956 pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan kondisi 2019 jumlah RT yang bisa terlayani tercatat 6.267 RT, sehingga terdapat peningkatan RT terlayani 2.000 RT pada tahun 2022.

Tabel 2. 55. Cakupan Kegiatan PAMSIMAS Tahun 2021

No	TA	Jumlah Desa	KK	Jumlah Jiwa	Jumlah Dusun Sasaran	KK Akses	Jumlah Jiwa Sasaran Program	Cakupan Layanan (% jiwa)
1	2008	9	3739	16014	14	2442	10187	63,61
2	2009	14	5131	22754	23	2289	9889	43,46
3	2010	14	5382	23000	17	2832	12690	55,17
4	2011	10	3821	16180	17	2325	9728	60,12
5	2012	12	4117	18679	18	2390	10041	53,76
6	2013	12	3950	16078	20	2645	10198	63,43
7	2014	10	2826	11298	26	1933	8052	71,27
8	2015	11	3140	13581	24	2779	12048	88,71
9	2016	0	0	0	0	0	0	0
10	2017	14	3638	15879	20	2266	9770	61,53
11	2018	17	4479	21789	26	2230	10833	49,72
12	2019	18	4986	20567	34	2136	8997	43,74
13	2020	8	1986	8735	16	1257	5495	62,91
14	2021	23	6373	34525	69	1514	7570	21,93
Total		**172**	**53.568**	**239.079**	**324**	**29.038**	**125.498**	**52,81**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Akses air bersih Kabupaten Manggarai Barat dilayani pula oleh program PAMSIMAS dengan cakupan desa terlayani tercatat 172 desa pada tahun 2021. Cakupan layanan yang telah tercapai hingga tahun 2021 tercatat pada persentase 52,81% jiwa yang terlayani. Apabila dibandingkan dengan capaian hingga 2020 yang tercatat pada persentase 57,65%, persentase capaian hingga 2021 mengalami penurunan sebesar 4,83%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kondisi capaian pada tahun 2021 yang hanya mencapai 21,93% dari target yang telah ditetapkan. Capaian jiwa terlayani pada tahun 2021 adalah capaian terendah selama tahun 2008 dengan rata-rata capaian berkisar pada 59,78%. Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat kegiatan pekerjaan maupun penyelesaian target PAMSIMAS di Manggarai Barat.

c. Air Limbah

Air limbah dibagi dalam dua kategori yakni limbah kotoran manusia dan limbah rumah tangga. Pengelolaan limbah kotoran manusia salah satunya direpresentasikan dengan ketersediaan jamban. Secara umum, jumlah rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki jamban dengan kategori baik belum menyeluruh. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakuan BABS atau buang air besar di sembarang tempat. Berikut ini disajikan data terkait kepemilikan jamban di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 56. Kepemilikan Jamban di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	2018		2019		2020	
		Rumah yang Memiliki Jamban	Rumah yang Tidak Memiliki Jamban	Rumah yang Memiliki Jamban	Rumah yang Tidak Memiliki Jamban	Rumah yang Memiliki Jamban	Rumah yang Tidak Memiliki Jamban
1	Komodo	8.566	2.467	8.566	2.467	9.006	2.467
2	Boleng	2.978	1.106	2.978	1.106	2.978	1.106
3	Sano Nggoang	2.556	366	2.748	366	3.013	366
4	Mbeliling	2.293	480	2.389	480	2.573	480
5	Lembor	4.628	1.144	4.628	1.144	4.905	1.144
6	Welak	2.984	1.366	3.235	1.366	3.423	1.366
7	Lembor Selatan	2.210	2.227	2.304	2.227	2.304	2.227
8	Kuwus	2.200	323	2.251	323	2.401	323
9	Ndoso	2.404	1.286	2.500	1.286	2.575	1.286
10	Macang Pacar	1.989	1.107	2.085	1.107	2.394	1.107
11	Pacar	2.614	600	2.614	600	2.614	600
12	Kuwus Barat	1.144	720	1.240	720	1.240	720
Total		**36.566**	**13.192**	**37.538**	**13.192**	**39.426**	**13.192**
Jumlah			**49.758**		**50.730**		**52.618**

Sumber: Dinas PRKPP Kab. Manggarai Barat, 2021

Persentase rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki akses pada jamban mencapai 79,24%. Angka ini mengalami kenaikan terus menerus selama tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sebesar 73,49%.

Grafik 2. 18. Jumlah Kepemilikan Jamban Rumah Tangga Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020

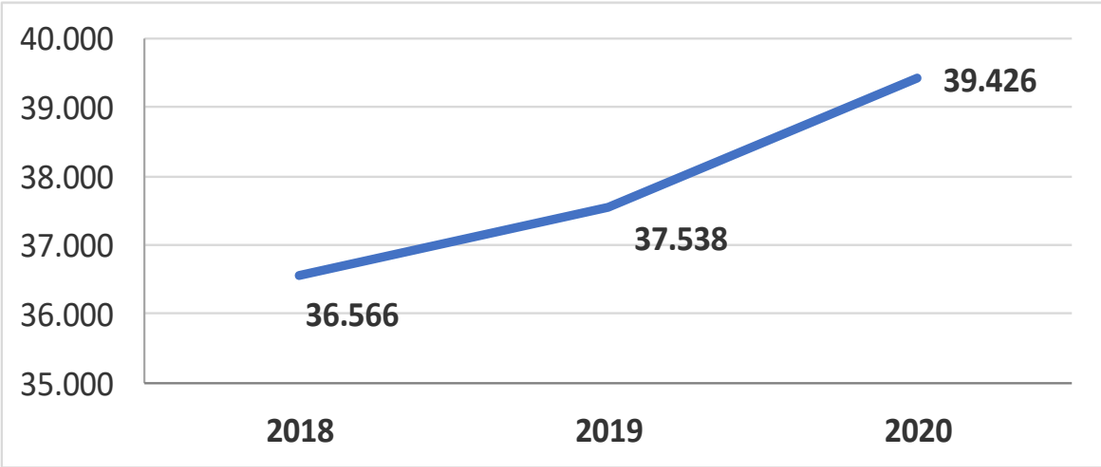

Sumber: Dinas PRKPP Kab. Manggarai Barat 2021

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap kepemilikan jamban dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,8%. Namun demikian, jumlah keluarga di Kabupaten Manggarai Barat yang tidak memiliki jamban dan selanjutnya melakukan buang air besar sembarangan tercatat masih cukup banyak. Tercatat mencapai 20,76% dari total keluarga di Kabupaten Manggarai Barat yang belum memiliki jamban dan terbanyak terdapat di Kecamatan Lembor Selatan dan Komodo. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, persentase ini memang terlihat menurun yakni dari 26,50% pada tahun 2015. Meskipun demikian, angka tersebut perlu untuk semakin diturunkan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal kesehatan, yaitu pola hidup sehat dan bersih.

Komponen selanjutnya dari sistem pengelolaan limbah adalah ketersediaan instalasi pembuangan akhir limbah (IPAL). Sistem pengelolaan limbah kotoran manusia secara *off-site* belum dimiliki oleh rumah tangga Kabupaten Manggarai Barat pada saat ini. Sebagian besar masyarakat masih cenderung membuat *septic tank* baru jika *septic tank* sebelumnya telah penuh. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat merasa bahwa lahan pekarangan masih luas, dan sangat memungkinkan untuk dibangun *septic tank* yang baru. Perkotaan Labuan Bajo menjadi wilayah yang diinisiasikan memiliki beberapa instalasi pengolahan limbah rumah tangga yang memproses limbah rumah tangga untuk dibuang ke laut. Fasilitas ini disediakan pemerintah terutama di kawasan-kawasan padat penduduk di Perkotaan Labuan Bajo.

d. Drainase

Drainase berfungsi sebagai tempat pembuangan massa air permukaan yang berlebih pada suatu wilayah terbangun. Pembangunan drainase di Kabupaten Manggarai Barat masih berfokus pada kawasan perkotaan maupun IKK. Pembangunan drainase masih belum menyasar untuk fokus pada pembangunan drainase primer, sekunder, maupun jaringan drainase lingkungan. Akibatnya masih terdapat beberapa kawasan terbangun yang mudah mengalami penggenangan air pada musim penghujan.

Tabel 2. 57. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase tahun 2017-2022

Tahun	Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase (km)	Panjang Jalan Kabupaten (km)	%
2017	1,9	1226,89	0,16
2018	1,9	1226,89	0,16
2019	1,9	1226,89	0,16
2020	9,6	1226,89	0,78
2021	9,6	1226,89	0,78
2022	9,6	1226,89	0,78

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2023

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase pada tahun 2018 hingga 2019 tidak mengalami perubahan, artinya tidak terdapat pembangunan sistem drainase baru selama 2018-2019 di Kabuapten Manggarai Barat. Pembangunan drainase baru pada tahun 2020 telah meingkatkan 0,62% persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase. Selama tahun 2020 – 2022 tidak ada perubahan angka persentase, artinya tidak terdapat pembangunan sistem drainase baru selama tiga tahun terakhir.

Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase meningkat secara signifikan pada tahun 2020. Persentase peningkatan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sebesar 80,21% dalam kurun waktu 2017 hingga 2020. Meskipun demikian, persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase terhadap panjang total jalan kabupaten di Kabupaten Manggarai Barat masih sangat rendah.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat adalah urusan wajib pelayanan dasar yang perlu disediakan oleh pemerintah. Pemerintah perlu melakukan upaya pembinaan dan penanganan mengenai kasus yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut merupakan data mengenai urusan trantibumlimas di Kabupaten Manggarai Barat.

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja atau bisa disebut sebagai Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tabel 2. 58. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	119	149	164	164	114
2	Jumlah Penduduk	269.029	274.689	256.317	263.554	274.729
3	Jumlah Pol PP per 10.000 Penduduk (%)	4,4	5,4	6,4	6,2	4,1

Sumber: Satpol PP Kab. Manggarai Barat, 2023

Jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang menurun. Apabila mengacu pada standar kepegawaian, rasio yang ideal dikategorikan menjadi tiga, yaitu 1 orang Satpol PP untuk melayani 500 penduduk (1 : 500), kemudian 1 Satpol PP melayani 1.000 penduduk (1:1000) dan 1 Satpol PP melayani 2.000 penduduk (1:2.000). Secara rata-rata dalam kurun waktu lima tahun tersebut, jumlah Satpol PP per 10.000 menunjukkan bahwa 1 Satpol PP masih melayani sekitar 2.000 penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Satpol PP diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Merujuk pada Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota disebutkan bahwa rasio kebutuhan anggota Linmas Kabupaten/Kota adalah satu orang anggota Linmas di satu RT. Dengan demikian, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah RT 49.758, maka anggota Linmas yang dibutuhkan sebanyak 49.758 dan capaian ini sudah berada di angka 100 persen.

c. Penegakan PERDA

Penegakan Perda perlu dilakukan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta meminimalisir pelanggaran terhadap Perda. Penegakan ini merupakan upaya penanganan dalam pelanggaran-pelanggaran terkait aturan dan kebijakan yang diatur dalam Perda. Hal ini penting mengingat ketertiban akan Perda juga merupakan salah satu faktor penentu bagi kondusivitas iklim investasi di suatu daerah.

Grafik 2. 19. Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Maggarai Barat Tahun 2018 - 2022

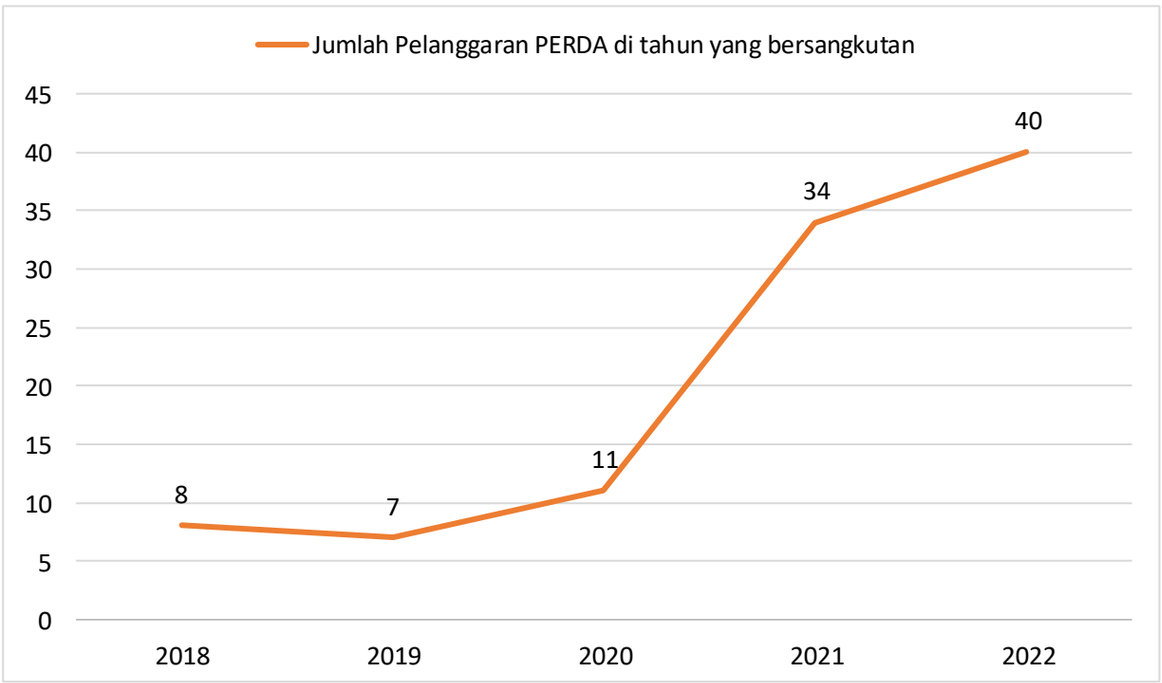

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Manggarai Barat, 2023

Jumlah pelanggaran Perda tahun 2018–2022 di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2022 menjadi tahun dengan angka pelanggaran Perda tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan juga terjadi signifikan semenjak tahun 2021, dengan kenaikan lebih dari

100 persen. Tingginya jumlah pelanggaran Perda disebabkan karena belum optimalnya sosialisasi terkait Perda kepada masyarakat dan masih lemahnya sanksi bagi pelanggar. Selain itu, dari segi internal pemerintah masih terbatasnya jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) juga memengaruhi penegakan perda yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

d. Angka Kriminalitas

Tingkat ketertiban dan keamanan masyarakat di suatu daerah tercermin dari tingkat kriminalitas. Iklim investasi suatu daerah akan lebih baik jika tingkat kejahatannya lebih rendah. Maraknya tindak kriminal disebabkan oleh beberapa persoalan, antara lain kesenjangan sosial, ekonomi, dan pemahaman hukum serta konflik antar golongan.

Grafik 2. 20. Angka Kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2022

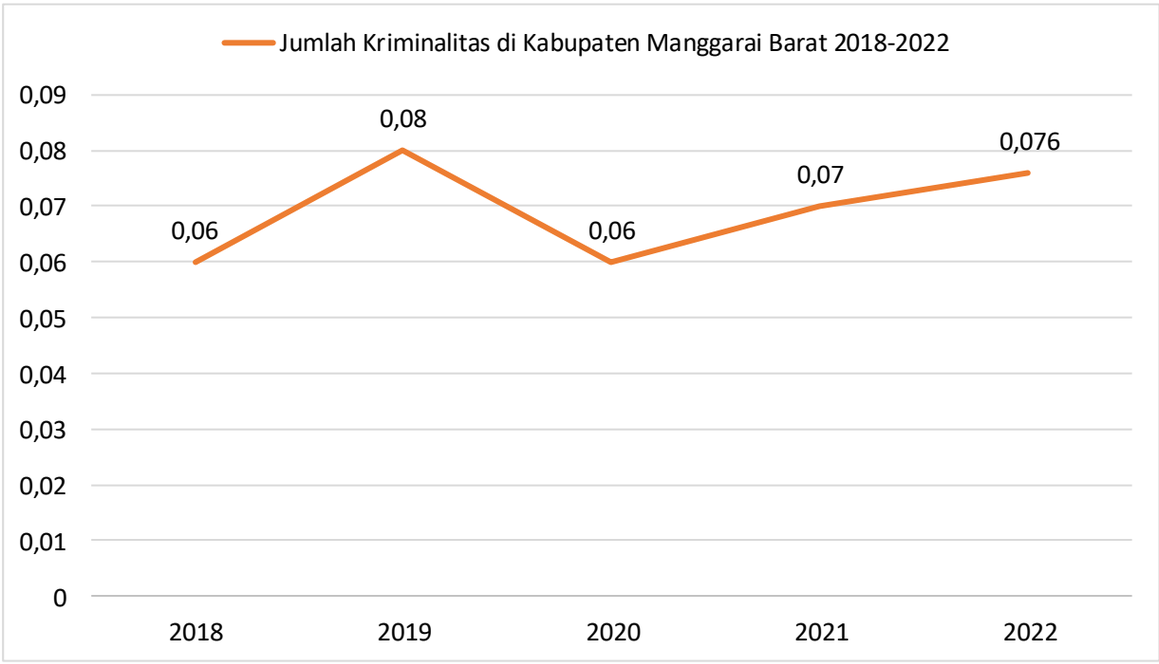

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Manggarai Barat Tahun, 2023

Tren angka kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat cenderung meningkat sejak tahun 2018 hingga 2022. Meskipun sempat menurun pada tahun 2020, angka kriminalitas terus meningkat dengan laju 0,01 persen per tahunnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi seluruh pihak terutama pemerintah daerah untuk menekan angka kriminalitas. Mengingat Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi, menurunkan angka kriminalitas adalah

suatu hal yang harus diprioritaskan untuk kenyamanan dan keamanan wisatawan yang datang.

6. Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan isu-isu yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat umum. Permasalahan atau konflik sosial muncul dalam masyarakat disebabkan oleh adanya interaksi sosial diantara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang individu atau kelompok masyarakat yang karena suatu ancaman, hambatan, tantangan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dan wajar disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Seseorang dengan kondisi PMKS tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti anak telantar, keluarga dengan masalah sosial psikologis, atau penyandang disabilitas.

Tabel 2. 59. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	42.885	50.156	54.026	66.185	72.602
PMKS yang tertangani	62.46%	82.53%	86.96%	87,50%	54,68%

Sumber: Dinas Sosial Manggarai Barat, 2023

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Terhitung efektif sejak tahun 2018 hingga 2022, laju pertumbuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial menyentuh rata-rata 57.170 orang per tahunnya. Tren yang meningkat ini tidak dibarengi dengan tindak lanjut yang memadai. Sejak tahun 2018, persentase PMKS yang tertangani cenderung stabil di sekitar angka 84,75 persen. Capaian baik ini terhenti pada tahun 2022 dimana hanya sekitar setengah dari jumlah PMKS yang tertangani atau sekitar 39.700 orang yang tertangani. Tentu capaian ini terbilang kurang baik mengingat indikator ini menggambarkan kinerja dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

Tabel 2. 60. Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

URAIAN	Tahun (persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	16,47	16,47	68,44	87,50	54,68
Persentase Pelayanan dan Rehabiliitasi Kesejahteraan Sosial	65,83	54,00	7,3	8,99	6,74
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	92,64	92,70	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Manggarai Barat, 2023

Salah satu indikator lain untuk melihat capaian kinerja urusan sosial adalah melalui persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahtearan sosial. Indikator ini merupakan suatu perbandingan antara jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dasar terhadap total jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dari sekitar 54,68 persen penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani pada tahun 2022, hanya sekitar 6,74 persen atau sekitar 2.675 orang yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Capaian yang terbilang relatif rendah jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Penurunan drastis dimulai pada tahun 2020 dengan laju penurunan sebesar 46,7 persen. Meski demikian, seluruh korban bencana selalu menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sejak tahun 2020 hingga 2022. Adanya kesenjangan antara pelayanan dalam rehabilitasi kesejahteraan sosial pada saat bukan masa darurat disebabkan perbedaan aktor serta pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menyebabkan perbedaan efektivitas dan hasil akhir dari jumlah korban penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2.3.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi analisis capaian kinerja pada urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

1. Urusan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi tenaga kerja di suatu daerah adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Suatu daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan berpotensi mempengaruhi penurunan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, tingkat pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat masih perlu mendapatkan perhatian.

Tabel 2. 61. Tingkat Pengangguran di Kab. Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	0,55	2,13	1,19
2019	1,68	3,52	2,42
2020	2,84	4,76	3,72
2021	3,99	6,07	4,94
2022	7,68	1,70	4,91

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2023

Indikator tingkat pengangguran dihitung dengan memperbandingkan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat terus meningkat sejak tahun 2018 hingga 2021, penurunan hanya terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,6% dari tahun sebelumnya. Jika dirata-rata, tingkat pengangguran Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan sebesar 47% per tahun. Adapun proporsi tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin mengalami fluktuasi, pada tahun 2022 tingkat pengangguran laki-laki mengalami peningkatan sebesar 92%, kondisi ini berkebalikan dengan tingkat pengangguran perempuan yang menunjukkan kondisi semakin baik yaitu berkurang hingga 72%.

Tabel 2. 62. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2022 (persen)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	1,19	2,42	3,72	4,94	4,91
Provinsi	3,01	3,35	4,28	3,77	3,54
Nasional	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021 dan 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat provinsi, namun lebih baik jika dibandingkan dengan capaian tingkat nasional. Belum optimalnya serapan tenaga kerja dan persoalan hubungan industrial menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi capaian TPT di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, aspek demografi juga turut mempengaruhi capaian TPT, penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja yang memadai.

Tabel 2. 63. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

Jenis Kelamin	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	81.443	83.342	92.865	94.506	97.287
Perempuan	85.212	86.975	95.445	97.622	99.419
Jumlah	166.655	170.317	188.310	192.128	196.706

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2023

Pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja juga dapat menggambarkan kondisi tenaga kerja di suatu daerah. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Manggarai Barat mengalami rata-rata peningkatan sebesar 4,3% per tahun. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja paling besar terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 10,56% atau mencapai 188.310 jiwa. Proporsi penduduk usia kerja berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan yaitu mencapai 50,54% pada tahun 2022, sedangkan penduduk usia kerja laki-laki mencapai 49,46% dari total penduduk usia kerja. Data jumlah penduduk usia kerja ini mengindikasikan bahwa sekitar 72% penduduk di Kabupaten Manggarai Barat merupakan penduduk usia produktif baik yang bekerja, bersekolah, atau kuliah, sedangkan 28% sisanya merupakan penduduk yang termasuk dalam usia non-produktif, contohnya adalah penduduk yang sudah pensiun atau masih bersekolah di taman kanak-kanak.

Jika dianalisis lebih lanjut, tidak semua penduduk usia kerja di Kabupaten Manggarai Barat merupakan angkatan kerja. Berikut ini merupakan kondisi Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 64. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017-2022

Angkatan Kerja					
Jenis Kelamin	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	67.086	71.248	79.764	76.808	84.924
Perempuan	44.974	52.857	68.095	63.787	73.345
Jumlah	112.060	124.105	147.859	140.595	158.269
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)					
Jenis Kelamin	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	82.37	85.49	85.89	81.27	87.29
Perempuan	52.78	60.77	71.34	65.34	73.77
Jumlah	67.24	72.87	78.52	73.18	80.46

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2023

Jumlah angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Data Angkatan Kerja mencerminkan pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2018 hingga 2022, Angkatan Kerja mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,39% per tahun. Secara lebih lanjut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2022 mencapai 80,46%, artinya 19,54% sisanya merupakan penduduk usia produktif yang bukan termasuk Angkatan Kerja, seperti penduduk yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan non produktif lainnya. Angkatan kerja laki laki secara konsisten menjadi partisipan angkatan kerja terbanyak sejak tahun 2018 hingga 2022. Tren angka kerja perempuan yang cenderung lebih kecil disebabkan oleh mayoritas perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Adanya doktrin tentang perempuan yang tak perlu bekerja turut menjadi salah satu penyebabnya.

Tabel 2. 65. Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi dan Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,12	0,17	0,00	0,21	24,87
Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	0,40	0,50	0,55	0,00	0,00
Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	0,10	0,14	0,00	0,21	24,87

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM, 2023

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi. Proses ini diperlukan untuk menjamin kredibilitas tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. Tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kabupaten Manggarai Barat cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2018, namun pada tahun 2020 data mengenai tenaga kerja yang bersertifikat kompentensi tidak teridentifikasi karena tidak adanya pelatihan sertifikasi untuk tenaga kerja dikarenakan pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi meningkat secara tajam yaitu mencapai 24,87% atau meningkat sebesar 24,66% poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 66. Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2017-2022

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan			Lokasi	Penyerapan di Pasar Kerja
		L	P	JML		
I. TAHUN 2017						
1	Dive Master	3	2	5	Labuan Bajo Kec. Komodo	5
2	Teknik Perbengkelan	5		5	Labuan Bajo Kec. Komodo	5
3	Service Mesin Motor Tempael		10	10	Labuan Bajo Kec. Komodo	10
4	Butcher	7	-	7	Labuan Bajo Kec. Komodo	7
5	Resepcionist	7	8	15	Labuan Bajo Kec. Komodo	15
6	Room Attendent	12	3	15	Labuan Bajo Kec. Komodo	15
7	Walter	27	13	40	Labuan Bajo Kec. Komodo	40
8	Guide/Pramu Wisata	3	12	15	Labuan Bajo Kec. Komodo	15
JUMLAH 2017		**64**	**48**	**112**		
II. TAHUN 2018						
1	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Pasir Putih Kec. Komodo	20
2	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Nangalili Kec. Lembor Selatan	20
3	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Ranggu Kec. Kuwus Barat	20
4	Pengolahan Pangan Lokal	-	11	11	Boleng Kec. Boleng	11
5	Pangkas Rambut	12	-	12	Labuan Bajo Kec. Komodo	12
6	Anyaman Bambu	4	1	5	Labuan Bajo Kec. Komodo	5
7	Pelatihan Menjahit	2	14	16	BBPLK Semarang	16
8	Service Mesin Motor Tempael	10	-	10	BLK Komodo	10
9	Walters	10	-	10	BLK Komodo	10
10	Tukang Batu	5	-	5	BLK Komodo	5
11	Tukakang Kayu	5	-	5	BLK Komodo	5
12	Diving (Advince)	5	-	5	BLK Komodo	5
13	Pariwisata	9	23	32	BBPLK Medan	32
14	IT/ Komputer	10	1	11	BBPLK Cevest Bekasi	11
15	Otomotif	10	-	10	BBPLK Bandung	10
JUMLAH 2018		**82**	**110**	**192**		
III. TAHUN 2019						
1	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Kecamatan Pacar	20

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan			Lokasi	Penyerapan di Pasar Kerja
		L	P	JML		
2	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Kecamatan Macang Pacar	20
3	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Kecamatan Welak	20
4	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Desa Orong Kec. Welak	20
5	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Desa Golo Lujang Kec. Boleng	20
6	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Desa Papagarang Kec. Komodo	20
7	Pariwisata	3	-	3	BBPLK Medan	3
8	Las	10	-	10	BBPLK serang	10
9	Manufactur	20	-	20	BBBPLK Bandung	20
JUMLAH 2019		**33**	**120**	**153**		
IV. TAHUN 2020						
1	Pengolahan Pakan Ternak	20		20	Desa Ngancar	20
2	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Cunca Wulang	20
3	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Siru	20
4	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Poco Rutang	20
5	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Nggorang	20
6	Pelatihan Bengkel	20		20	Desa Golo Ndaring	20
7	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Batu Cermin	20
8	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Kelurahan Nantal	20
JUMLAH 2020		**40**	**120**	**160**		
V. TAHUN 2021						
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Service Sepeda Motor Injeksi (3 Paket)	48	0	48	BLK Komodo	5
2	Kompetensi (PBK) Pemelihataan Dan Perbaikan AC Untuk Rumah Tangga (2 Paket)	32	0	32	BLK Komodo	3
JUMLAH 2021		**80**	**0**	**80**		**8**
VI. TAHUN 2022						
1	Pelatihan Barista	11	5	16	BLK Komodo	7
2	Pelatihan Barista	14	2	16	BLK Komodo	7
3	Pelatihan Pengolahan Kopi	6	10	16	BLK Komodo	5
4	Pelatihan Tour Guide	16	0	16	BLK Komodo	15
5	Pelatihan Tour Guide	15	1	16	BLK Komodo	15
6	Pelatihan Service Motor Injeksi	16	0	16	BLK Komodo	1
7	Pelatihan Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga	16	0	16	BLK Komodo	3
8	Pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi	**16**	**0**	**16**	BLK Komodo	**4**
9	Pelatihan Tata Boga	**0**	**16**	**16**	BLK Komodo	**2**

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan			Lokasi	Penyerapan di Pasar Kerja
		L	P	JML		
10	Pelatihan Food and Beverage Service for Hotel	**2**	**14**	**16**	BLK Komodo	**2**
JUMLAH 2022		**112**	**48**	**160**		**61**
TOTAL 2017-2022		**421**	**446**	**857**		**686**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM, 2023

Jenis pelatihan yang dilakukan untuk standarisasi tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Barat cukup beragam. Mayoritas fokus dari pelatihan berada di kebutuhan industri *hospitality* atau jenis usaha jasa yang berkaitan dengan pelayanan akomodasi seperti penginapan, kuliner, rekreasi dan sebagainya. Pada tahun 2022, terdapat pelatihan yang berkaitan dengan industri kopi seperti pelatihan barista dan juga pengolahan biji kopi. Disamping industri *hospitality,* terdapat juga pelatihan yang berhubungan dengan manufaktur sepertis servis sepeda motor dan pengelasan. Secara keseluruhan, jumlah peserta pelatihan di Kabupaten Manggarai Barat cukup fluktuatif. Penyerapan tenaga kerja dengan pelatihan juga cukup tinggi yaitu mencapai 80 persen dari total peserta dalam rentang tahun 2017 hingga 2022. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja perlu terus dilakukan untuk mengoptimalkan serapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan peran perempuan yang optimal semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya urgensi kebijakan yang ramah gender. Urgensi ini juga penting mengingat bahwa 49,60% penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah perempuan. Dengan demikian, perempuan menjadi salah satu elemen demografi bagi pembangunan yang penting untuk Kabupaten Manggarai Barat. Pemberdayaan perempuan menekankan kesetaraan pada akses yang luas dan terbuka untuk perempuan agar bisa berperan aktif di semua lini kemasyarakatan. Indikator persentase peran serta perempuan dalam pembangunan dapat menjadi gambaran untuk mengetahui sejauh mana peran aktif penduduk perempuan dalam pembangunan Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 67. Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase perempuan dalam lembaga pemerintah	10,23	10,03	4,31	8,50	7,5
Persentase perempuan dalam lembaga legislatif	3,33	3,33	6,6	6,6	6,6
Persentase perempuan dalam lembaga swasta	43,66	45,55	95,66	95,66	80
Persentase partisipasi angkata kerja perempuan	84	85	71,34	71,34	70

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai Barat, 2023

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kurang lebih dua kali lipat pada capaian persentase perempuan dalam lembaga legislatif dan persentase perempuan dalam lembaga swasta. Namun demikian, terjadi penurunan pada capaian persentase perempuan dalam lembaga pemerintah dan partisipasi angkatan kerja perempuan, masing-masing sebesar 57% dan 16%. Pada tahun 2022, penurunan terjadi pada capaian persentase perempuan dalam lembaga pemerintah, persentase perempuan dalam lembaga swasta, dan partisipasi angkatan kerja perempuan, hanya persentase perempuan dalam lembaga legislatif yang cenderung stabil. Secara umum, representasi perempuan paling tinggi terdapat di lembaga swasta, sedangkan representasi yang paling rendah terdapat pada lembaga legislatif. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dapat didukung dengan membuka sistem rekruitmen di lembaga pemerintahan ataupun swasta.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan anak juga dapat dilihat melalui seberapa banyak anak yang bekerja di bawah umur dan penyelesaian pengaduan kekerasan perempuan dan anak. Indikator ini dapat mencerminkan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam menciptakan kota yang aman bagi perempuan dan anak. Diperlukan upaya lebih untuk memastikan perempuan dan anak memperoleh haknya, diberdayakan, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Tabel 2. 68. Persentase Jumlah Pekerja Anak di Bawah Umur dan Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan Tahun 2018-2022

No	Data	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pekerja Anak di bawah	0,13	0,10	0,005	0,005	0,005

No	Data	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	umur					
2.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai Barat 2023

Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani oleh unit pelayanan terpadu menunjukkan capaian yang sempurna sejak tahun 2018 hingga 2022. Capaian ini menjelaskan bahwa seluruh aduan dapat ditangani dengan baik. Capaian yang sama juga dapat dilihat dari indikator seberapa banyak anak berusia 5 hingga 14 tahun yang bekerja di Kabupaten Manggarai Barat. Indikator ini menunjukkan penurunan yang baik sejak tahun 2020, dan dapat dipertahankan hingga tahun 2022. Perlindungan terhadap anak di bawah umur harus selalu menjadi prioritas utama untuk menekan angka pekerja anak di bawah umur.

3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang serta mengembangkan kualitas penduduk dan keluarga. Urusan ini masuk ke dalam kategori urusan wajib bukan pelayanan dasar. Capaian urusan ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 69. Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadi Kabupaten Maggarai Barat Tahun 2018 - 2022

No	Data	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Contraceptive Prevalensi Rate terhadap PUS (peserta KB Aktif)	62,5	68,51	65,15	71,00	61,28
2	Persentase Pengunaan MKJP	31,3	32,73	26,04	59,38	34,10
3	Persentase Unmeet Need	12,5	11,63	11,49	11,05	16,98
4	Angka ASFR (Average Specific Fertility Rate per 1000 WUS	45	42.12	29,47	42,43	25,21

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai Barat 2021

Persentase peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022 terdapat 49.020 pasangan usia subur, dimana 31.350 atau 61,28% diantaranya merupakan peserta KB Aktif. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh PUS di Kabupaten

Manggarai Barat adalah KB suntik yaitu mencapai 16.799 pada tahun 2022. Kondisi ini sejalan dengan tren penggunaan MKJP yang fluktuatif dan cenderung menurun selama periode 2018 hingga 2022. Terdapat 31.350 peserta KB aktif pada tahun 2022 dan hanya 34,10 persen atau sekitar 6.051 PUS yang menggunakan MKJP. Menurunnya jumlah peserta KB aktif pada tahun 2022 menunjukkan perlunya upaya peningkatan KIE terkait pentingnya program KB di masyarakat.

Persentase *Unmeet Need* atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi di Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Peningakatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022, yaitu mencapai 5,93 persen poin. kondisi ini menunjukkan adanya penurunan pelayanan yang diberikan oleh petugas KB. Upaya seperti penambahan jumlah klinik pelayanan KB di masing-masing kecamatan perlu dilakukan guna memenuhi kebutuhan ber KB masyarakat.

Indikator berikutnya adalah ASFR (*Average Specific Fertility Rate*) per 1000 WUS di Kabupaten Manggarai Barat. Indikator ini merupakan perbandingan jumlah kelahiran wanita usia subur usia 15-19 tahun per 1000 wanita usia subur. Angka ASFR dikatakan membaik jika perbandingan kelahiran WUS mengalami penurunan setiap tahunnya. Angka ASFR Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap usia ideal perkawinan.

4. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup menjadi modal dasar bagi upaya pemerintah untuk membangun daerah. Sebaliknya, kerawanan pangan bisa jadi penghambat bahkan awal kegagalan pembangunan. Oleh sebab itu, mewujudkan ketahanan pangan adalah persoalan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Berikut adalah data mengenai indeks ketahanan pangan dan komponen pendukungnya di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 70. Indeks ketahanan pangan dan komponen pembentuknya di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018 -2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks ketahanan pangan	68,09	74,61	71,05	71,92	N/A
Indeks ketersediaan	N/A	95,05	94,06	95,50	N/A
Indeks keterjangkauan	N/A	68,00	62,60	66,54	N/A
Indeks pemanfaatan	N/A	64,24	60,14	58,76	N/A

Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2023

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren kenaikan selama empat tahun terakhir, walaupun sempat mengalami penurunan sebesar 3,56 poin pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Setelah itu, Kabupaten Manggarai Barat berhasil bangkit dan mampu menaikkan skor ketahanan pangan sebesar 0,87 poin menjadi 71,92 pada tahun 2021. Penurunan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan menjadi persoalan yang dihadapi dalam urusan pangan. Ketiga komponen tersebut harus dibenahi agar capaian ketahanan pangan Kabupaten Manggarai Barat semakin meningkat.

Tabel 2. 71. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 (kg/kapita/tahun)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Beras	670,49	593,27	522,93	394,28	482,16
2	Daging	0,22	1,77	0,92	3,25	3,54
3	Telur	0,11	0,15	0,34	2,16	1,07
4	Ikan	175,68	17,19	13,47	27,28	25,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Tren ketersediaan pangan utama di Kabupaten Manggarai Barat cenderung mengalami fluktuasi, kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021, keseluruhan ketersediaan pangan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan mulai kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2022. Sumber protein utama masyarakat Kabupaten Manggarai Barat adalah Ikan, kemudian diikuti oleh daging dan telur. Sedangkan sumber karbohidrat utama masyarakat Kabupaten Manggarai Barat adalah beras. Ketersediaan beras pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 87,88 kg atau mencapai 482,16 kg meskipun demikian capaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan ketersediaan di tahun 2018 – 2020.

Tabel 2. 72. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PPH Ketersediaan	60,02	65,43	74,62	66,19	71,51
2	PPH Konsumsi	75	82	81,80	79,7	N/A

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Indikator dalam ketersediaan pangan utama juga berpengaruh terhadap skor PPH (Pola Pangan Harapan) ketersediaan. Skor PPH ketersediaan Kabupaten Manggarai Barat masih cukup rendah, tren lima tahun terakhir juga menunjukkan fluktuasi tetapi terjadi penurunan terbesar pada tahun 2021 yaitu mencapai 8,43 poin karena efek dari pandemi Covid-19. Kabupaten Manggarai Barat berhasil meningkatkan PPH Ketersediaan pasca covid pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 5,32 poin. Meskipun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan maupun keanekaragaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat belum termasuk dalam kategori baik, khususnya pada keragaman pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Persoalan ini disebabkan oleh belum memadainya stok cadangan pangan dan masih kurangnya lumbung pangan di Kabupaten Manggarai Barat. Namun demikian, skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Manggarai Barat mengalami penurunan sebesar 2,1 poin pada tahun 2021. Penurunan skor ini terindikasi disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

5. Urusan Perhubungan

Layanan urusan perhubungan berkaitan dengan aksebilitas dan kualitas transportasi di suatu daerah. Sasaran utama layanan urusan ini yaitu terwujudnya sistem transportasi yang memadai. Sistem transportasi yang semakin memadai, berimplikasi pada semakin meningkatnya konektivitas antar wilayah.

Tabel 2. 73. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Jumlah prasarana transportasi terbangun	N/A	N/A	18	18
2	Persentase pemasangan rambu-rambu	N/A	N/A	61%	70,86%
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	625	738	865	1018
4	Rasio trayek	N/A	N/A	0,00066	0,00066

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD tahun 2019

Pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Manggarai Barat berkembang dengan baik. Data Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa terdapat pembangunan 18 sarana transportasi di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018 dan 2019. Persentase pemasangan rambu-rambu juga mengalami peningkatan sebesar 16% pada tahun 2019. Data Dinas Perhubungan juga menyebutkan bahwa dari 1.154 kendaraan angkutan umum, terdapat 865 (75%) unit kendaraan umum yang dinyatakan lulus uji KIR pada tahun 2018, jumlah tersebut meningkat menjadi 1.018 unit kendaraan yang lulus uji KIR pada tahun 2019.

Tabel 2. 74. Jumlah Trayek Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Jumlah Trayek	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkutan Darat	2	2	1	1	159
2	Angkutan Laut	7	7	9	11	12

Sumber: Dinas Perhubungan, Kabupaten Manggarai Barat, tahun 2020

Jumlah trayek Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada trayek angkutan darat. Sedangkan trayek angkutan laut juga mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Penambahan jumlah trayek akan meningkatkan akses masyarakat terhadap transportasi darat maupun laut.

Kebutuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas memiliki urgensi yang tinggi dengan pertimbangan kondisi geografis di Kabupaten Manggarai Barat berupa daratan yang bergunung-gunung dan rawan bencana, sehingga kerentanan terhadap kecelakaan lebih tinggi. Data Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa kebutuhan rambu-rambu di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 350 rambu-rambu, akan tetapi hanya 58,57% yang sudah terpenuhi di tahun 2019.

Tabel 2. 75. Prasarana Transportasi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Kecamatan
1.	Dermaga rakyat	13	Komodo, Macang Pacar, Boleng
2.	Terminal	2	Komodo, Lembor

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Prasarana juga menjadi komponen penting untuk membantu mobilitas masyarakat. Prasarana transportasi terbangun terdiri dari dermaga rakyat, terminal umum, maupun moda transportasi yang anggarannya berasal dari APBD maupun APBN. Kabupaten Manggarai Barat telah memiliki 13 dermaga rakyat dan dua terminal. Kondisi Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari kepulauan membuat keberadaan dermaga rakyat menjadi sangat penting dalam meningkatkan akses transportasi.

6. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup berkaitan dengan kualitas unsur ekosistem pada suatu wilayah. Urgensi urusan lingkungan hidup adalah memastikan beban yang ditampung lingkungan tidak melebihi ambang batas daya tampung sehingga tidak menimbulkan degradasi sumberdaya alam. Penilaian kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan beberapa indikator di antaranya indeks kualitas lingkungan hidup, volume sampah, pengawasan izin lingkungan, hingga parameter ruang terbuka hijau.

Tabel 2. 76. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab Manggarai Barat Tahun 2019-2022

No	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Nilai	Bobot	Hasil	Nilai	Bobot	Hasil	Nilai	Bobot	Hasil	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	35	30%	10,5	-	30%	-	0	30%	0	52,11	30%	15,63
2	Indeks Kualitas Udara	98,421	30%	29,526	-	30%	-	83,7	30%	25,11	87,55	30%	26,26
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	87,847	40%	35,139	-	40%	-	70,42	40%	28,17	70,42	40%	28,17
IKLH				**75,165**			**-**			**-**			**70,47**

Sumber: Laporan IKLH Kab Manggarai Barat Tahun 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 menunjukan predikat baik dengan nilai IKLH mencapai 70,47. Meskipun demikian, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 4,69 poin dibandingkan dengan nilai IKLH tahun 2019. Penurunan nilai IKLH dipengaruhi oleh penurunan nilai IKU dan IKTL yang cukup signifikan pada

tahun 2022, yaitu mencapai 10,87 poin untuk IKU dan 17,42 poin untuk IKTL. Sementara nilai IKA yang sebelumnya tergolong rendah telah mengalami peningkatan sebesar 17,11 poin pada tahun 2022.

Nilai IKA pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Manggarai Barat masih dalam kondisi yang buruk. Faktor yang mempengaruhi pencemaran air salah satunya adalah kebiasaan buruk membuang limbah dan sampah rumah tangga langsung ke dalam sungai oleh masyarakat yang bermukim sepanjang bantaran sungai. Penanganan rumah tangga yang tidak tepat akan mengakibatkan partikel koloid mengalangi cahaya masuk ke dalam air dan meningkatkan kekeruhan air.

Kualitas air yang masih rendah merupakan implikasi dari urusan persampahan yang belum optimal. Persampahan merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai efek domino dari kegiatan pariwisata nasional di Kabupaten Manggarai Barat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat belum sepenuhnya dapat mengakomodasi penanganan sampah secara keseluruhan.

Tabel 2. 77. Volume Sampah di Wilayah Kota Labuan Bajo Tahun 2018-2022

No	Uraian	Volume (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Volume Sampah	38.252	38.329,09	37.104,59	37.986,72	38.830,18
2	Volume Sampah yang ditangani	27.924	30.601,6	28.689	28.306,48	27.923,96
3	Volume sampah yang belum ditangani	10.328,04	7.727,49	8.415,59	9.080,24	10.906,22

Sumber: Dinas LH dan Kebersihan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Jumlah produksi sampah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2%. Jumlah produksi sampah yang tercatat pada tahun 2022 merupakan akumulasi tertinggi selama lima tahun terakhir. Sementara itu, volume sampah yang berhasil ditangani terus mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022, dengan persentase penurunan berkisar 2,5-2,8%. Sampah yang tertangani pada tahun 2022 mencapai 71,9% dan sebesar 28,05% sampah tidak berhasil tertangani. Persentase tersebut menunjukkan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat telah terlaksana dengan baik namun masih diperlukan upaya untuk mengoptimalisasi penanganan sampah. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu dapat menjadi pilihan dalam upaya meningkatkan penanganan sampah di Kabupaten Manggarai Barat.

Pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat sebagian besar dilakukan dengan cara dibakar. Penanganan sampah dengan cara dibakar dapat menimbulkan pencemaran lanjutan berupa pencemaran tanah oleh senyawa plastik yang terlarut akibat pembakaran dan polusi udara oleh asap pembakaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi terhadap masyarakat tentang pengelolaan sampah mandiri yang aman dan tepat serta dapat meminimalisasi dampak lingkungan lanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.

Pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup pelaksanan pengawasan, pengendalian, dan pemulihan lingkungan. Kepemilikan dokumen lingkungan oleh pihak perusahaan seperti dokumen AMDAL, UKL, dan UPL merupakan bentuk pemantauan lingkungan hidup terhadap aktivitas industri yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.

Tabel 2. 78. Gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pengawasan izin	Na	32	Na	Na	47
Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	Na	2	Na	Na	5

Sumber: DLH Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Jumlah pengawasan izin pelaksanaan aktivitas industri pada tahun 2022 tercatat sebanyak 47 dokumen. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019 yang berjumlah 32 dokumen. Tercatat lima pengaduan masyarakat yang telah tertangani terkait permasalahan izin lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022.

Tabel 2. 79. Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Tertutup Pepohonan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ruang Terbuka Hijau	765	1391	0	9	9
Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan 124isban foto udara	129.732	129.732	129.732	129.732	129.732
Luas daratan	313.512	313.512	313.512	313.512	313.512

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap daratan	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414

Sumber: DLH Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Kualitas lingkungan ditentukan pula oleh luas dan distribusi kawasan hijau dalam suatu wilayah. Pengukuran komposisi kawasan hijau dapat dilakukan dengan menghitung luas ruang terbuka hijau dalam suatu wilayah atau menghitung luas kawasan tertutup pohon melalui interpretasi citra satelit dan foto udara. Luas kawasan yang tertutup pohon di Kabupaten Manggarai Barat tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018, sehingga rasio antara luas kawasan tertutup pohon dengan luas daratan adalah 0,41 setiap tahunnya. Artinya, saat ini komposisi kawasan yang tertutup pohon di Kabupaten Manggarai Barat masih belum optimal. Kawasan hijau penting untuk menjaga kualitas lingkungan karena mampu menyerap emisi gas pencemar udara, membantu infiltrasi alami limpasan permukaan, dan menjaga stabilitas topografi berlereng. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan cakupan ruang terbuka hijau di Kabupaten Manggarai Barat baik pada ruang publik maupun ruang privat.

7. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan berkaitan dengan legalisasi aset dan pemberdayaan akses masyarakat terhadap tanah. Urusan pertanahan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sementara kewenangan pemerintah daerah terhadap urusan pertanahan termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan yang dimaksud antara lain penetapan objek dan subjek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah, penetapah tanah ulayat, hingga penerbita izin membuka tanah.

Tabel 2. 80. Luas Lahan yang Bersertifikat Tahun 2015-2022

No	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Lahan Bersertifikat di Suatu Daerah	131.973.819 m^2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Uraian	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Luas Lahan yang Seharusnya Bersertifikat di Suatu Daerah	2.974.460.000 m^2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Suatu Daerah	4,44%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Urusan pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat berfokus pada penanganan legalitas objek tanah. Status legalitas tanah menjamin penguasaan dan pemilikan objek tanah terhadap subjek tanah yang diakui secara hukum. Penguasaan dan pemilikan tanah dibedakan menjadi dua yaitu penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat/swasta dan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data pertanahan tahun 2015, tercatat sebesar 95,56% lahan di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki legalitas yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa target pencapaian penyelesaian urusan pertanahan yang masih sangat rendah di Kabupaten Manggarai Barat. Upaya penyelesaian permasalahan pertanahan dan percepatan penetapan status penguasaan maupun pemilikan tanah di Kabupaten Manggarai Barat perlu untuk terus mendapatkan perhatian guna mumutus rantai konflik dan sengketa agraria yang berkepanjangan.

8. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data kependudukan menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai salah satu komponen pertimbangan dalam menyusun perencanaan kebijakan pembangunan sebuah daerah. Data kependudukan yang terinventarisasi dengan baik menjadikan perencanaan pembangunan juga dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan program akan terkelola optimal.

Urgensi yang tinggi terhadap urusan ini menuntut pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan perhatian yang besar dalam pembangunan urusan kependudukan. Berikut ini merupakan capaian terhadap urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 81. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Ber-KTP	80,70	85,44	92,86	93,48	93
Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	88,18	86,71	84,82	84,90	100
Persentase Pasangan Ber-Akta Nikah	22,20	22,57	30	35,21	55,92
Persentase bayi berakte kelahiran	21,62	32,37	41,82	41,82	N/A
Persentase anak berakte kelahiran	74,14	79,56	79,66	83,66	92,44
Persentase kepemilikan akte kematian	7,36	15,97	42,08	28	100
Persentase kepemilikan kartu identitas anak	0	3,71	5,90	13,42	9,51

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Manggarai Barat , 2021

Secara umum data capaian urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan tren yang semakin meningkat. Capaian yang cukup optimal terjadi pada persentase kepemilikikan kartu keluarga dan persentase kepemilikan akte kematian yaitu mencapai 100%. Namun demikian, masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal seperti persentase penduduk ber-KTP dan persentase anak berakte kelahiran yang masih berada di angka 93% dan 92,44%. Artinya, masih terdapat sekitar 7% masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang belum memiliki KTP dan 7,56% anak belum memiliki akte kelahiram hingga tahun 2020. Menurut Dinas Dukcapil, sampai dengan tahun 2019, jumlah masyarakat yang belum memiliki KTP mencapai 159.369 orang. Adapun capaian yang masih cukup kecil adalah persentase pasangan ber-Akta Nikah dan persentase kepemilikan kartu identitas anak yaitu masing-masing mencapai 55,92% dan 9,51% pada tahun 2020. Kondisi-kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kelengkapan identitas diri. Kesadaran masyarakat yang rendah, terutama terjadi pada kelompok umur lanjut usia dan pelajar. Selain itu, sulitnya akses dalam melakukan pengurusan KTP juga diindikasikan menjadi penyebab belum optimalnya capaian kepimilikan identitas

diri. Dengan demikian, peningkatan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai Barat masih perlu ditingkatkan.

9. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Salah satu upaya dalam memberdayakan rakyat kecil dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan kesejahteraan bersama adalah memajukan koperasi dan usaha mikro. Kedua usaha ini berbeda dengan badan usaha lain yang hanya sekedar untuk mencari keuntungan. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja urusan koperasi dan usaha kecil-menengah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 82. Jumlah Koperasi yang Meningkat SHU-nya dan Jumlah Koperasi Sehat di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koperasi yang meningkat SHU-nya	45	47	49	16	N/A
Jumlah koperasi sehat	56	54	54	4	N/A

Sumber: Dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Jumlah koperasi yang meningkat SHU-nya menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2018 hingga 2021. Data untuk tahun 2022 belum dapat ditampilkan. Tren penurunan ini mengindikasikan bahwa kinerja sektor koperasi memerlukan perbaikan. Tren yang sama juga ditunjukkan pada indikator koperasi sehat. Jumlah koperasi sehat terus mengalami penurunan, khususnya pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu mencapai 92,59% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Salah satu penyebab dari penurunan ini adalah belum optimalnya kualitas manajemen koperasi.

Tabel 2. 83. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018-2022

No	Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
1	Koperasi Aktif	114	91	98	76	68
2	Jumlah Koperasi (Unit)	130	132	135	145	147
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	87,6	68,9	72,60	52,41	46,26

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Perkembangan urusan koperasi juga dapat dicermati melalui indikator koperasi aktif. Indikator ini umumnya dilihat dengan sertifikat NIK yang dimiliki koperasi dengan tujuan untuk menilai koperasi produsen dan konsumen. Jumlah koperasi di Kabupaten Manggarai Barat terus bertambah sejak tahun 2018 hingga

tahun 2022. Sebagian besar koperasi-koperasi ini bergerak di bidang jasa simpan pinjam. Meski demikian, jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2022 tidak mencapai setengah dari jumlah koperasi yang ada. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengembangan manajemen koperasi mengingat rendahnya kapasitas sumber daya manusia serta kurang memadainya sarana dan prasarana. Kurangnya akses terhadap bantuan permodalan juga turut berpengaruh terhadap banyaknya koperasi yang tidak aktif yang berakhir tutup atau bubar.

Selain koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) juga merupakan salah satu upaya untuk mendorong produktivitas usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Apabila omzet sebuah UKM tinggi, berarti kualitas dan produktivitas berada dalam angka yang baik. Omzet yang tinggi akan berkontribusi terhadap peningkatan kelas usaha yang berawal dari mikro menjadi kecil. Selain dapat dilihat dari omzet, peningkatan kelas juga berpengaruh pada bertambahnya jumlah karyawan, besaran modal, hingga jenis pajak yang dikenakan.

Tabel 2. 84. Omzet Usaha Mikro dan Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Menjadi Kecil di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Omzet usaha mikro	11.641.816.700	17.070.866.700	19.257.651.500	N/A	34.644.633.904
Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi kecil	17.27	17.27	17.27	N/A	19,71

Sumber: Dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Omzet usaha mikro di Kabupaten Manggarai Barat meningkat cukup pesat sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 capaian omzet usaha mikro meningkat hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Peningkatan omzet tersebut berdampak pada peningkatan kelas usaha mikro menjadi kecil. Kinerja usaha mikro dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti kapasitas produksi, kualitas produk dan pemasaran produk usaha mikro. Peningkatan omzet usaha mikro ini selaras dengan capaian persentase usaha mikro yang menjadi kecil yang semakin meningkat. Meski demikian, peningkatan yang pada tahun 2022 tidak begitu besar yaitu hanya terpaut 2,44 persen poin dari tahun 2021. Namun, peningkatan ini patut diapresiasi

mengingat persentase usaha mikro yang naik kelas cenderung mengalami stagnansi sejak tahun 2018.

Tabel 2. 85. Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Usaha Mikro
1	2018	3.703
2	2019	3.809
3	2020	3.809
4	2021	1.050
5	2022	761

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Terlepas dari meningkatnya omzet dan juga usaha yang naik kelas, jumlah usaha mikro di Kabupaten Manggarai Barat perlu mendapatkan perhatian. Jumlah usaha mikro di Kabupaten Manggarai Barat terus menurun sejak tahun 2021. Tren penurunan yang drastis terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 72 persen. Sebagian besar usaha mikro ini berada di Kecamatan Komodo, secara khusus di kawasan Labuan Bajo. Penempatan usaha mikro ini juga diarahkan untuk menyambut perkembangan daerah perkotaan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikronya.

10. Urusan Penanaman Modal

Berkembang pesatnya pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Keindahan alam dan budaya Kabupaten Manggarai Barat menarik minat para pemilik modal untuk berinvestasi di Manggarai Barat, baik dari investasi berskala kecil hingga *mega investment*; kaki lima hingga hotel berbintang lima.

Perkembangan investasi ini memberikan keuntungan kepada banyak pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat setempat. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan ekspor dan substitusi impor. Selain itu, investasi juga bermanfaat sebagai sarana untuk alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Gambaran umum perkembangan penanaman modal di Kabupaten Manggarai Barat dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyebutkan bahwa hingga tahun 2019 tercatat 229 investor dalam negeri yang berinvestasi di Kabupaten Manggarai Barat. Angka ini meningkat pesat dari tahun 2015. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai jumlah investasi di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 86. Jumlah dan Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 s.d 2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investasi PMDN	66	62	73	95	110	138
Investasi PMA	47	57	75	99	119	133
Jumlah Investasi PMDN & PMA	113	119	148	194	229	271
Nilai Investasi (Rp)		564.392.731.908	893.944.923.908	1.772.554.761.370	7.111.979.482.993	8.369.334.742.222

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Jumlah investasi di Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun 2015 hingga 2020. Peningkatan ini terjadi baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Jika dihitung sejak tahun 2013, pada saat Komodo Sail pertama kali diselenggarakan, terjadi kenaikan 187 investasi di Kabupaten Manggarai Barat dengan total nilai investasi hingga mencapai lebih dari 7 triliun.

Kenaikan investasi ini tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyebutkan tenaga kerja yang terserap dari adanya investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2018 mencapai 1.892 orang. Jumlah ini naik menjadi 2.446 orang tenaga kerja dari jumlah investor sejumlah 35 investor pada tahun 2019. Dengan demikian, jika dihitung rasio daya serap tenaga kerja terhadap investasi di Kabupaten Manggarai Barat, maka akan diperoleh rasio 1:11. Artinya, satu investasi menyerap 11 tenaga kerja. Angka ini tergolong sangat rendah. Ada beberapa hambatan yang dijumpai antara lain seperti masih rendahnya mutu tenaga kerja lokal, sebagian besar belum bersertifikat sebagai tenaga kerja professional dan belum tersedianya tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi PMA yang disetujui pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 47 proyek dengan nilai investasi mencapai US $ 86.324.930 hingga tahun 2015. Angka ini melonjak tajam menjadi 133 proyek pada tahun 2020 dengan nilai investasi mencapai US $ 602 miliar. Berikut adalah tabel realisasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 87. Realisasi Investasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi US$	Jumlah Proyek	Nilai Investasi US$
2017	75	239.219.978	57	61.968.780
2018	99	168.631.619.783	69	82.234.162
2019	119	592.225.898.746	103	432.627.888
2020	133	602.543.899.668	108	442.300.238

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Realisasi nilai PMA lebih kecil dari yang disetuji. Kondisi ini terjadi mulai tahun 2017 hingga 2020. Kondusivitas iklim investasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap realisasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi yang sama juga terjadi untuk indikator realisasi PMDN. Berikut adalah data mengenai realisasi PMDN di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 2. 88. Realisasi Investasi PMDN di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2017	73	3.064.969.868.523	61	91.383.188.908
2018	95	4.592.269.924.962	90	560.285.230.870
2019	110	5.176.894.483.542	100	1.271.502.994.993
2020	138	5.315.386.269.542	128	2.074.119684.792

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Jumlah dan nilai realisasi PMA maupun PMDN di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017 hingga 2020 lebih kecil daripada yang disetujui. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya serta belum terup-datenya data peluang investasi sedikit banyak mempengaruhi hal ini. Persoalan lain

yang dihadapi di urusan penanaman modal seperti belum optimalnya identifikasi, promosi, dan kondusivitas iklim investasi.

Minat investor asing (PMA) untuk menanamkan investasi di Manggarai Barat lebih besar daripada investor dalam negeri dari tahun 2017 hingga 2020. Hal ini dapat disimpulkan dari jumlah investasi yang disetujui maupun realisasinya. Terlihat bahwa realisasi investasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 bisa mencapai 442 juta U.S. dollar atau sekitar 5,8 triliun rupiah, dibanding investasi dalam negeri yang hanya mencapai 2 triliun rupiah pada periode yang sama.

11. Urusan Kebudayaan

Pariwisata memberikan dampak pada banyak sektor di Kabupaten Manggarai Barat, salah satunya pada bidang kebudayaan. Dampak pariwisata pada kebudayaan tampak dari semakin meningkatnya jumlah sanggar budaya milik masyarakat yang aktif dalam berbagai pementasan budaya di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 89. Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase sanggar budaya aktif (%)	67,58	68,25	58,90	58,90	100
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Frekuensi)	3	1	0	0	0
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)	22	23	23	23	22

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Data yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya tren fluktuasi persentase sanggar budaya yang aktif di masyarakat. Persentase sanggar budaya aktif mengalami peningkatan pada rentang tahun 2018-2022, kemudian mengalami penurunan akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai respon dari kehadiran pandemi Covid-19. Setelah pandemi Covid-19 mereda di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sanggar budaya yang aktif di masyarakat.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan pasca pandemi Covid-19 berhasil meningkatkan persentase sanggar aktif hingga 41,10 persen di tahun 2022.

Fluktuasi tren persentase sanggar aktif di Kabupaten Manggarai Barat dipengaruhi oleh jumlah sanggar budaya yang aktif di tahun terkait. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 43 sanggar budaya yang aktif dari total 63 sanggar yang ada di tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan menjadi 76 sanggar aktif dari total 76 sanggar di tahun 2022.

Fenomena naik turunnya jumlah sanggar budaya aktif berkaitan erat dengan berbagai acara yang diselenggarakan di Kabupaten Manggarai Barat. Berbagai acara pada ranah kebudayaan diadakan dalam rangka mendorong kebijakan pariwisata yang dirancang oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Terdapat beberapa acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dimana jumlahnya tergantung pada kebijakan pada tahun terkait dan permintaan wisatawan. Berbagai acara tersebut meliputi Festival Komodo, Festival Florata dan Karnaval Budaya.

Urusan kebudayaan juga tidak terlepas dari pengelolaan cagar budaya. Pasca kehadiran pandemi Covid-19, jumlah benda situs dan cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Manggarai Barat mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat dikarenakan oleh banyak faktor, seperti kerentanan struktur bangunan, unsur biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta unsur abiotik seperti iklim, perubahan kondisi lingkungan, dan bencana alam, maupun unsur politis seperti keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk mengelola situs dan cagar budaya tersebut. Upaya terus dilakukan untuk memelihara situs dan cagar budaya melalui dipekerjakannya Tenaga Penjaga Situs. Hal itu selain bertujuan untuk memelihara benda situs dan cagar budaya, juga diharapkan mampu menarik wisatawan lebih banyak ke Kabupaten Manggarai Barat. Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga perlu meningkatkan upaya promosi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan tersebut.

12. Urusan Kepemudaan

Pelaksanaan kinerja urusan kepemudaan dapat dilihat dari indikator persentase jumlah organisasi pemuda yang aktif dari tahun 2016 hingga 2020. Data

Dinas PKO menyebutkan bahwa jumlah organisasi pemuda lima tahun terakhir cenderung stagnan. Berikut adalah data mengenai jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 90. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	32	32	32	35	54
Jumlah Organisasi Pemuda yang Terdaftar	51	51	51	54	59

Sumber Data: Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Kegiatan kepemudaan adalah salah satu cara untuk memberdayakan generasi muda untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Manggarai Barat sudah cukup banyak, namun sebagian besar tidak aktif. Penting untuk menggerakkan organisasi-organisasi pemuda di Kabupaten Manggarai Barat agar para putra-putri daerahnya dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, melainkan juga terlibat secara aktif sebagai subjek pembangunan. Capaian kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Lembaga Ekonomi Pedesaan

Salah satu penggerak ekonomi desa saat ini adalah lembaga ekonomi termasuk BUMDes dan Posyantekdes. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan bahwa jumlah lembaga ekonomi pedesaan di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2020 adalah sebanyak 130 lembaga. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2018, terlihat bahwa terdapat kenaikan jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang cukup tinggi. Kenaikan ini disebabkan oleh pembentukan lembaga baru terutama BUMDes yang diakomodasi oleh undang-undang. Berikut ini merupakan data sebagian BUMDes yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 91. Bumdes Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

Kecamatan	Nama BUMDes	Jenis Usaha Bumdes
Sano Nggoang	Cunca Rami Lestari	Usaha Perdagangan (Kios), Sanggar budaya
	Wae Kising	Jasa Simpan Pinjam, usaha perdagangan ATK, Foto kopi
	Wae Paku	Suplai pupuk bersubsidi
	Maju Bersama	Produksi Kripik (Pisang, Talas dan Kacang Jambu Mete) dan Pulsa Listrik
	Ca Nai	Jasa Simpan Pinjam, Jual beli hasil Pertanian dan Pengelolaan Bahan Galian C
Mbeliling	Bumdes Bersama Pesona Wisata	Jasa Pariwisata
	Bumdes Rangga watu	Jasa sewa Kursi dan Terop
	Liang Rodak	Jasa sewa Terop
	Bantang Cama	Pengadaan Pupuk, Jual beli sembako
	Lembu Nai	Jasa simpan Pinjam
	Cunca Wulang	Jasa sewa Kursi, terop dan alat musik (keyboard)
	Sumber Makmur	Jasa Simpan Pinjam, Kios Sembako
Welak	Maranatha	-
	Sumber Rejeki	Air Minum
	Taman Eden	Jasa sewa alat musik (Keyboard)
	Wewa Jaya	-
Lembor	Tungku Mose	Jasa keuangan (simpan pinjam)
	Poco Rutang	Jasa sewa Terop dan kursi
Lembor Selatan	Tirta Jaya	Jasa simpan pinjam, jual beli komoditi
	Ca Nai	-
	Benteng Dewa	-
	Satu Hati	Jasa sewa terop
	Kakor Jaya	Pengelolaan air minum bersih dan jasa sewa terop
	Repi Bersatu	Jasa sewa Kursi, Jual beli Komoditi
Boleng	Sepang Jaya	Pengadaan Pupuk
Kuwus	Mekar Jaya	Jasa sewa peralatan pesta, usaha bengkel sepeda motor, bengkel kayu dan BRI Link
	Damai/Watu Telu	Pengadaan Pupuk
	Bintang Muda	Toko Bangunan
Kuwus Barat	Kolarek	Jual beli Gula Merah (Gola Kolang)
	Caritas	Jasa Keuangan (BRI Link), Usaha Perdagangan (Fotokopi, Jual ATK) dan Jasa sewa Kursi
Ndoso	Tesuka	Suplai beras, Pengadaan Pupuk dan obat-obat pertanian
	Harapan Golo Bore	Jual beli hasil pertanian (beras dan komoditi lainya)

Kecamatan	Nama BUMDes	Jenis Usaha Bumdes
	Nderu Wulang	Suplai sembako
Macang Pacar	Timbang Raung	Jasa Transportasi (ada hibah kendaraan mini bus dari Kemenhub)
Komodo	Pongkor Lestari	Jasa Simpan Pinjam
	Kenari Lestari	Jasa Simpan Pinjam

Sumber: Dinas PMD Kab. Manggarai Barat 2021

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan bahwa BUMDes yang terbentuk di Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 130 dengan berbagai bidang usaha terhitung hingga tahun 2020. Namun demikian, dari jumlah tersebut ada beberapa lembaga yang tidak aktif. Data evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan dari total 130 BUMDes di Kabupaten Manggarai Barat hanya 47,69% atau sekitar 62 BUMDes saja yang dinilai aktif. Sisanya tidak aktif karena kendala SDM pengurus dan bidang usaha yang belum disepakati. Berikut uraian data BUMDes aktif di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 2. 92. Persentase Bumdes Aktif di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Bumdes yang Terbentuk	Penyertaan Modal (Rp)	Status BUMDes	
					Jumlah Desa Aktif	Jumlah Desa tidak aktif
1	Komodo	17	15	1.874.991.583	10	4
2	Mbeliling	15	15	1,600.982.445	10	5
3	Sano Nggoang	15	13	863.805.311	3	9
4	Lembor	14	8	698.466.200	4	4
5	Lembor Selatan	15	14	1.068.394.341	7	7
6	Welak	16	9	553.321.700	5	4
7	Kuwus	10	7	490.905.629	4	3
8	Kuwus Barat	10	10	448.878.548	4	6
9	Ndoso	15	14	1.033.350.972	7	7
10	Pacar	13	7	891.139.606	2	5
11	Macang Pacar	13	9	816.000.000	1	8
12	Boleng	11	10	201.947.664	5	5
Total		**164**	**130**	**10.542.183.999**	**62**	**68**

Sumber: Dinas PMD Kab Manggarai Barat, 2021

Komodo, Mbeliling, Lembor Selatan, dan Ndoso merupakan 4 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah desa dan BUMDes terbanyak. Namun demikian, khusus untuk Lembor Selatan dan Ndoso, jumlah BUMDes yang aktif

hanya mencapai 50%. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat agar penyerapan anggaran BUMDes lebih dioptimalkan dengan menjamin keaktifan seluruh desa.

b. Kelompok Binaan PKK

PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang pengelolaannya secara mandiri dikoordinir dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Pembinaan PKK melingkupi pelaksanaan 10 program pokok PKK serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah. Berikut ini merupakan data mengenai PKK di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 2. 93. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020 Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK	179	180	180	180	182
2	Jumlah Kelompok Binaan	587	587	587	587	587
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2

Sumber: DPMPD Kab. Manggarai Barat, 2021

Jumlah kelompok PKK di Kabupaten Manggarai Barat cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah kelompok PKK bertambah hingga 3 kelompok jika dibandingkan dengan tahun 2016. Adapun jumlah kelompok binaan mengalami stagnansi yaitu 587 kelompok. Jika dirata-rata jumlah kelompok binaan PKK mencapai 3 kelompok.

c. Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Di Kabupaten Manggarai Barat terdapat 480 posyandu dan seluruhnya berstatus sebagai posyandu aktif hingga tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah posyandu aktif di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 94. Perkembangan Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	465	465	472	480	480
2	Jumlah Posyandu Aktif	465	465	472	480	480

Sumber: DPMPD Kab. Manggarai Barat, 2021

Jumlah posyandu aktif di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2016 hingga 2020 semakin bertambah. Jika dirata-rata, setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat memiliki 2 hingga 3 posyandu aktif. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki keluarga yang sehat.

14. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yang bertujuan untuk mengelola arsip pemerintah agar dokumen dapat terpelihara dengan baik, mudah dilihat, serta dapat ditemukan dan dipergunakan kembali. Arsip tidak hanya dipahami sebagai hasil atau keluaran dari kegiatan administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari pusat ingatan, sumber informasi, dan sejarah. Oleh karena itu, pengelolaan arsip perlu mendapatkan perhatian. Berikut ini merupakan capaian urusan kearsipan di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 95. Persentase OPD yang Memiliki Tata Kearsipan secara Baik Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah OPD yang Memiliki Tata Kearsipan secara Baik	10	25	0	7	7
Jumlah SKPD	47	54	54	48	48
Persentase OPD yang Memiliki Tata Kearsipan secara Baik	**21,28**	**46,30**	**0**	**14,58**	**14,58**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Manggarai Barat, 2023

Persentase OPD yang memiliki tata kearsipan secara baik mengalami fluktuasi pada tahun 2018-2022. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai angka 46,30%. Namun demikian, terjadi penurunan hingga di angka 0% pada tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan sistem pengarsipan harus melakukan adaptasi. Capaian OPD yang memiliki tata kearsipan secara baik kembali meningkat di tahun 2021 yaitu mencapai 14,58%, artinya masih terdapat 41 OPD di Kabupaten Manggarai Barat yang belum memiliki tata kearsipan yang baik.

Tabel 2. 96. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pembinaan pengelolaan kearsipan daerah	5,6	7,4	0	14,58	22
Jumlah pengelola arsip	67	75	77	110	118

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Manggarai Barat, 2023

Upaya pembangunan urusan kearsipan terus dilakukan salah satunya melalui pembinaan pengelolaan kearsipan daerah dan peningkatan jumlah pengelola arsip. Persentase pembinaan dan pengelolaan kearsipan daerah terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 22%. Kondisi ini selaras dengan jumlah pengelola arsip yang semakin bertambah. Pada tahun 2022, jumlah pengelola arsip mencapai 118 orang, jumlah ini meningkat 76% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Upaya pengembangan urusan kearsipan perlu untuk ditingkatkan guna menjamin kelestarian dan keamanan arsip daerah.

15. Urusan Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di tingkat kabupaten berfokus pembinaan perpustakaan dan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Pembinaan perpustakaan meliputi pengelolaan perpustakaan daerah tingkat kabupaten dan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat. Salah satu tujuan penting dari pelaksanaan urusan ini adalah meningkatnya budaya literasi masyarakat guna mendorong meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Berikut ini merupakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pelaksanaan perpustakaan di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 97. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks literasi	4,19	4,84	6,21	3,38	23,28
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	87.051	95.294	937	884	1.486
Jumlah pengelola perpustakaan	45	55	65	55	190
Jumlah perpustakaan model	10	10	10	30	N/A
Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat	3	3	3	3	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Manggarai Barat, 2023

Indeks literasi di Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi sepanjang 2018 hingga 2022. Capaian paling rendah ditemui pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,38. Adapun peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu mencapai 23,28 atau meningkat sekitar lima kali lipat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Jumlah pengunjung perpustakaan juga mengalami fluktuasi. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 99% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar karena adanya pandemi Covid-19. Sementara itu, jumlah pengelola perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 yaitu mencapai empat kali lipat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018. Tren peningkatan yang cukup besar juga terjadi pada jumlah perpustakaan model pada tahun 2021 yang meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2018 – 2020. Adapun jumlah perpustakaan berbasis masyarakat mengalami stagnasi selama tahun 2018 – 2021. Pelaksanaan urusan perpustakaan perlu untuk terus dikembangkan. Pembelajaran dari adanya pandemi Covid-19 dan semakin pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan dan peluang tersendiri dalam menciptakan layanan yang semakin inovatif dan mudah diakses.

16. Urusan Statistik

Urusan statistik dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja urusan ini ditentukan dari ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi serta ketersediaan buku yang berisi tentang kondisi pembangunan daerah. Capaian layanan urusan Statistik dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 98. Pemenuhan Kebutuhan Data/Statistik Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku Manggarai Barat Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai Barat 2021

Pelaksanaan urusan statistik menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan ketersediaan sistem data dan buku statistik yang sudah tersedia pada tahun 2016 hingga 2020. Meskipun demikian, pengembangan urusan statistik perlu untuk terus dilakukan terutama untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, reliabel, dan terintegrasi dengan baik.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan akan komunikasi dan informasi merupakan hak dasar setiap warga negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 F UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang antara lain menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, komunikasi dan informasi adalah sarana yang penting bagi pemerintah guna mendukung perkembangan sosial ekonomi dan wilayah suatu daerah.

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan berkewajiban menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah agar masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pengetahuan. Berikut adalah data mengenai capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 99. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Desa/Kelurahan yang terakses komunikasi	0	N/A	N/A	63	81
2	Persentase Desa/Kelurahan yang bisa diakses RSPD	39,64	N/A	N/A	71	71
3	Persentase OPD yang menerapkan e-government	14	N/A	N/A	73	100
4	Persentase wilayah kecamatan yang terlayani akses internet	N/A	N/A	N/A	67	75

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai Barat, 2019

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang, mendorong semakin meningkatnya urgensi terhadap akses layanan informasi dan komunikasi. Hal ini perlu direspon pemerintah untuk semakin meningkatkan layanan informasi dan komunikasi. Data capaian kinerja urusan komunikasi dan informasi menunjukkan semakin bertambahnya jumlah desa, kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat mengakses layanan komunikasi, internet dan siaran

radio pemerintah daerah. Data Dinas Infokom juga mencatat bahwa jumlah desa dan kelurahan yang sudah dapat mengakses layanan telekomunikasi dan siaran RSPD di Kabupaten Manggarai Barat semakin meningkat hingga tahun 2019.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan terdiri dari berbagai urusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah. Fokus urusan ini terdiri dari beberapa urusan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian. Beberapa urusan di dalam fokus layanan urusan pilihan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.2.1. Urusan Pertanian

Urusan pertanian merupakan urusan prioritas untuk penguatan perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Hampir 75 persen dari penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah petani. Beberapa wilayah pertanian di Kabupaten Manggarai Barat, seperti Lembor adalah wilayah kantong kemiskinan. Berbasis pada persoalan tersebut, maka pengembangan sektor pertanian patut diperhatikan secara serius. Pada bagian ini akan digambarkan kondisi pertanian di Kabupaten Manggarai Barat pada sejak tahun 2018 hingga 2022.

1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan jenis tanaman yang memiliki karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia. Produk pertanian tanaman pangan yang paling dominan di Kabupaten Manggarai Barat masih didominasi oleh padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Produk tanaman ini cukup umum untuk dikembangbiakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.

Tabel 2. 100. Luas Areal Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Tahun 2022 (Ha)

Kecamatan	Padi		Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)
Komodo	3.630,90	3254,4	445	54	100	182	105	110
Boleng	4.102	3914,1	449	41,20	120	160	60	54

Kecamatan	Padi		Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)
Sano Nggoang	2.534,40	2520,3	631	88,20	135	135	88	78
Mbeliling	2.413,70	2394,4	634	230	130	230	116	115
Lembor	9.101,80	7198,8	185	45,10	105	135	120	125
Welak	2.733,40	2592,1	780	46	105	106	106	95
Lembor Selatan	3.395,70	3000,2	502	85	116	125	125	184
Kuwus	1.828,20	1685,7	201	103	90	31	62	14
Ndoso	1.754,80	1869,9	691	172	240	218	98	87
Kuwus Barat	1.197,40	1319,5	-	105	77	45	71	68
Macang Pacar	1.820,10	1766,5	104	189	148	148	260	110
Pacar	2.355,40	2202,8	1126	1.276,30	469	678	78	382
Jumlah	**36.867,80**	**33.718,70**	**5.748,00**	**2.434,80**	**1.835.00**	**2.193,00**	**1.289,00**	**1.422,00**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Tanaman padi masih menjadi prioritas tanam para petani di Kabupaten Manggarai Barat. Indikasi ini datang dari jumlah luas tanam dan luas panen tanaman padi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Selain untuk konsumsi rumah tangga, hasil panen padi selama ini juga dijual oleh para petani mengingat komoditas yang permintaannya tinggi. Sebaliknya, tanaman pangan lain selain padi umumnya umumnya ditanam hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Luas areal tanaman padi terbesar terdapat di Kecamatan Lembor dengan proporsi sebesar 24,69 persen dari total keseluruhan. Kecamatan Lombor menjadi lumbung padi untuk Kabupaten Manggarai Barat dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, daerah lainnya yang menjadi lumbung padi di Kabupaten Manggarai Barat adalah Kecamatan Komodo dan Sano Nggoang.

Tabel 2. 101. Luas Areal Tanaman Pangan (Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau) Tahun 2022 (Ha)

Kecamatan	Kedelai		Kacang Tanah		Kacang Hijau	
	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)
Komodo	0	0	0	0	9,5	9,5
Boleng	1	0	0	0	53,5	43,5
Sano Nggoang	4	0	0	0	10	10

Kecamatan	Kedelai		Kacang Tanah		Kacang Hijau	
	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)
Mbeliling	0	0	0	0	0	0
Lembor	2	0	50	51	4	9
Welak	0	0	0	0	5	5
Lembor Selatan	0	0	4	150	5	0
Kuwus	0	0	0	0	0	0
Ndoso	0	0	0	0	0	0
Kuwus Barat	0	0	0	0	0	0
Macang Pacar	64	115	0	0	15	23
Pacar	20	0	0	0	18	0
Jumlah	**91**	**115**	**54**	**201**	**120**	**100**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Untuk mendukung penyediaan kebutuhan sektor pariwisata, diperlukan produksi tanaman pangan pertanian selain beras secara berkelanjutan. Luas tanam jagung yang terbesar di Kabupaten Manggarai Barat terdapat di Kecamatan Pacar. Luas areal tanaman kedelai terbesar terdapat di Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Pacar. Sementara itu, luas tanam kacang tanah terbesar di Kabupaten Manggarai Barat terdapat di Kecamatan Lembor Selatan. Luas tanam kacang hijau terbesar terdapat di Kecamatan Boleng dan Macang Pacar.

Indikator lain yang sering digunakan untuk menilai kinerja sektor pertanian adalah produksi dan produktivitas tanaman pangan. Indikator produksi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani Kabupaten Manggarai Barat. Data mengenai produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 102. Jumlah Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2018-2022

Tahun	Padi Sawah		Padi Ladang		Padi Total	
	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2018	49,2	236.292,5	23,8	20.393,3	45,3	256.685,8
2019	54,3	238.699,0	49,4	51.583,0	53,4	290.282,0
2020	5,6	212.313,5	2,3	13.652,8	5,16	225.966,3
2021	5,59	158.763,6	2,65	21.337,8	4,94	180.101,4
2022	6,75	217.891,7	2,52	3.582,39	6,57	221.474,1
Tahun	**Jagung**		**Kedelai**		**Kacang Tanah**	

	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2018	35,6	39.175,0	11,2	2.364,9	16,7	125,4
2019	42,7	41.081,8	8,1	630,3	17,2	630,8
2020	6,16	60.540,9	1,35	411,5	1,2	357,6
2021	5,84	19.395,8	1,35	206,9	2,44	980,2
2022	5,42	13.187,10	1,33	153,38	1,52	305,76
Tahun	Kacang Hijau		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2018	11,55	60	168,34	9.764	43,43	760
2019	5,03	96	128,8	18.164	85,73	4.955
2020	1,59	417,1	10	8640	9,79	5608,3
2021	1,28	340,80	13,89	32.141,46	11,52	14.607,36
2022	1,28	127,75	6,77	14.836	6,13	8.723

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kab Manggarai Barat, 2023

Produksi tanaman pangan utama di Kabupaten Manggarai Barat, berupa padi dan jagung cenderung naik dari tahun 2018 hingga 2020, walaupun produktivitasnya sering fluktuatif. Namun menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020-2021. Gairah pertanian di Kabupaten Manggarai Barat baru mulai tumbuh pada tahun 2022, seiring dengan menurunnnya kasus pandemi Covid-19, penghapusan PPKM, yang berjalan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara produk lain seperti kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar mengalami fluktuasi produksi bahkan kelompok kacang hijau terlihat cenderung menurun produksi dan produktivitasnya. Penurunan ini lebih disebabkan karena perubahan iklim yang ekstrim serta adanya kecenderungan masyarakat untuk memprioritaskan menanam padi dan jagung. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah irigiasi usaha tani dan jalan usaha tani yang kurang memadai, kualitas bibit, obat-obatan dan pupuk yang kurang memadai serta masih adanya serangan hama penyakit.

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, terlihat bahwa produksi lahan pertanian di Kabupaten Manggarai Barat jauh lebih tinggi ketimbang rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data BPS menyebutkan rata-rata produksi padi di level provinsi tahun 2022 mencapai 756.050 ton, sementara

proporsi Kabupaten Manggarai Barat mencapai 29,29 persen atau sekitar 221.474 ton.

2. Tanaman Perkebunan

Kabupaten Manggarai Barat juga dikenal karena produksi tanaman perkebunannya. Tanaman perkebunan dikenal dengan durasi penanaman yang berjangka waktu lama. Karakteristik tanaman pada subsektor perkebunan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman perkebunan dapat menciptakan industri berkebutuhan tinggi seperti kakao, kelapa, teh, kelapa sawit, lada, dan kopi.

Tabel 2. 103. Luas Areal Tanaman Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (Ha)

No	Komoditi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelapa	2.708	2.532	2.354	1.205,50	2.444
2	Jambu Mete	8.259	7.546	7.220	7.221	6.905
3	Kopi	6.571	6.346	6.271	6.280,7	6.281
	- Arabika	691	730	688	689	689
	- Robusta	5.880	5.617	5.583	5.591,70	5.592
4	Kakao	2.497	2.518	2.531	2.539,75	2.540
5	Kemiri	4.259	4.223	4.388	4.389	4.389
6	Kapuk	1.122	990	904	904	904
7	Cengkeh	2.153	2.552	2.761	2.793	2.794
8	Pinang	401	384	365	365	365
9	Vanili	197	204	342	344,25	344,25
10	Lada	51	51	61	62	62
11	Asam	2	2	2	9	9
12	Jarak Pagar	-	-	-	-	-
13	Pala	-	13	82	159	236
14	Kapas	-	-	-	-	-
15	Tembakau	75	45	53	52,50	32
16	Sirih	19	19	19	21	21
17	Lontar	-	2	2	2	2
Total		**28.314**	**27.428**	**33.626**	**32.628**	**27.333**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2023

Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Manggarai Barat cenderung berfluktuasi sejak tahun 2018. Sempat meningkat pada tahun 2020, luas areal tanaman perkebunan kembali menurun sebesar 8,11 persen pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan menjadi areal permukiman atau areal tanam jenis produk pertanian lainnya. Proporsi areal tanaman perkebunan didominasi

oleh Jambu Mete, dan diikuti oleh Kopi, khususnya Kopi Robusta. Sementara itu, asam dan lontar menjadi tanaman hortikultura dengan luas terkecil.

Tabel 2. 104. Jumlah Produksi (Ton) dan Produktivitas (Kg/Ha) Tanaman Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

No	Komoditi	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas
1	Kelapa	508	358	433	311	370	319	370	3.244.078,12	471,30	318
2	Jambu Mete	880	228	1.185	296	1.067	318	1.065	2.710,9	1.044	311
3	Kopi	1.880	503	1.997	505	1732	974	1.738,7	10.535,8	1.210,39	343
	- Arabika	*182*	457	191	502	143	482	144	4.577,8	93,78	316
	- Robusta	*1.698*	509	1.807	506	1.589	492	1.594,7	5.957,9	1.116,61	345
4	Kakao	616	349	564	344	527,54	342	533,24	4.102,46	537,24	348
5	Kemiri	1.278	407	1.246	427	1.227	430	1.227	5.491	1.227	430
6	Kapuk	70	240	68	243	59	263	59	2.722,6	471,30	318
7	Cengkeh	593	441	712	442	669	443	685	5.150,58	1.044	311
8	Pinang	50	287	51	284	52	294	52	3.505	1.210,39	343
9	Vanili	48	300	36	296	37	300	37	3.633,18	93,78	316
10	Lada	5	272	10	321	9	327	9,20	1.691,67	1.116,61	345
11	Asam	4	252	4	1.800	4	1.963	2	700	537,24	348
12	Jarak Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	1.227	430
13	Pala	-	-	-	-	-	-	-	-	59	263
14	Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	443,58	308
15	Tembakau	10	33	33	731	46	879	46	2.901,50	52	295
16	Sirih	5	6	6	917	4	718	2.666,6	4,90	37	298
17	Lontar	-	-	-	-	-	-	-	-	9,20	317
Total			**5.944**	**372**	**6.346**	**392**	**5.802**	**5.887**	**351**	**5.133,47**	**346,80**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2023

Hasil perkebunan di Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tanaman perkebunan cengkeh yang pada tahun 2022. Tanaman cengkeh mengalami peningkatan produksi mencapai 26,20 persen dari tahun sebelumnya. Komoditi andalan seperti kopi awalnya menurun pada tahun 2019. Namun, produksi kopi terus meningkat tiga tahun berturut-turutnya. Meski demikian, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2022 mengalami penurunan secara keseluruhan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor lain yang menyebabkan penurunan produksi tanaman perkebunan antara

lain adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia petani, metode budidaya yang digunakan masih tradisional, sarana perkebunan yang kurang memadai dan masih adanya serangan hama penyakit.

3. Tanaman Hortikultura

Kabupaten Manggarai Barat juga merupakan pangsa pasar hortikultura yang sangat potensial. Dengan perkembangan pariwisata yang demikian pesat, kebutuhan akan jenis tanaman ini juga meningkat pesat. Berikut adalah perkembangan hasil komoditi hortikultura baik jenis buah-buahan maupun sayuran yang dihasilkan petani Manggarai Barat pada periode 2016 hingga 2022.

Tabel 2. 105. Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (Ton)

No.	Komoditi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Alpukat	140,6	149,8	156,6	212,78	224,60
2	Belimbing	0,8	0,9	0,9	0,80	0,80
3	Duku/Langsat	-	-	-	-	-
4	Durian	120,1	167,8	246,6	301,40	316,18
5	Jambu Biji/Kristal	70,4	111,0	115,5	121	114,10
6	Jambu Air	4,9	5,0	5,0	5	5
7	Jeruk Siam	314,8	355,6	334,8	377,13	372.60
8	Jeruk Besar	12,5	12,8	12,8	12,81	12,81
9	Mangga	456,4	668,9	718,3	901,65	932,25
10	Manggis	-	-	-	-	-
11	Nangka	304,0	363,8	359,3	366,03	384,93
12	Nenas	142,4	154,1	185,6	346,93	385,50
13	Pepaya	1.684,7	2.664,4	2.805,2	3.061,71	3,106,80
14	Pisang	2.471,9	4.368,4	4.567,4	6.013,15	5,928,25
15	Rambutan	838,0	1.049,7	1.134,2	1.162,16	1,197,48
16	Salak	32,0	41,8	42,8	43,03	43,03
17	Sawo	66,0	77,2	77,6	77,67	73,01
18	Markisa	-	-	-	-	
19	Sirsak	26,0	30,7	36,8	36,84	34,74
20	Sukun	25,3	26,5	33,7	35,16	32,85
21	Semangka	-	80,0	80,0	150	510
22	Melon	-	60,0	30,0	40	240
23	Melinjo	6,7	6,7	11,4	10,24	10,24
24	Petai	11,3	12,2	12,2	11,57	12,32
25	Jengkol	-	-	-	-	-
	Jumlah	**6.728,7**	**10.407,2**	**10.966,7**	**13.325,8**	**13,898,49**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2023

Produksi buah-buahan di Kabupaten Manggarai Barat terus meningkat secara signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Tercatat buah-buahan seperti pepaya dan pisang memiliki tingkat produksi tertinggi. Pertumbuhan hotel dan usaha lain yang terkait dengan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat telah banyak mendorong peningkatan produksi tanaman hortikultura. Produk dengan daya produksi tinggi akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan daerah lain seperti Kota Denpasar dan Kota Surabaya.

Tabel 2. 106. Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (Ton)

No.	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kacang panjang	372,0	480,0	468,0	1,540	1,407
2	Cabe Besar	125,0	165,0	145,0	36	37,50
3	Cabe Rawit	200,0	225,0	180,0	360	330,75
4	Cabe Keriting	N/A	N/A	N/A	297	320,40
5	Kol/Kubis	25,0	220,0	180,0	390	465
6	Buncis	8,0	60,0	80,0	160	125
7	Bayam	444,0	672,0	720,0	1.940	2,405
8	Petsai/Sawi	252,0	712,0	840,0	192	2,285,60
9	Labu Siam	260,0	580,0	540,0	1.350	1,575
10	Kangkung	480,0	924,0	900,0	1.980	2,330
11	Terung	594,0	792,0	960,0	2.240	2,401
12	Ketimun	72,0	165,0	342,0	930	945
13	Tomat	110,0	160,0	300,0	575	870
14	Bawang Merah	289,0	263,5	127,5	102	342
15	Selada Darat	12,0	24,0	16,0	80	35
16	Kentang	0,0	0,0	0,0	0,0	45
17	Wortel	18,0	28,5	19,0	30	62.50
18	Kembang Kol	10,0	40,0	90,0	60	69
19	Kacang Merah	21,0	33,0	36,0	33	30
20	Lobak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	**3.292,0**	**5.544,0**	**5.943,5**	**9.969**	**16,080,75**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2023

Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Manggarai Barat juga meningkat secara signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Kebutuhan para wisatawan di hotel dan tempat wisata di Perkotaan Labuan Bajo sedikit banyak menggairahkan para petani Kabupaten Manggarai Barat untuk memproduksi jenis tanaman ini. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2022, dengan total peningkatan produksi sebesar 6.111,75 Ton. Kualitas dan kontinuitas produksi harus tetap dijaga agar mampu

memenuhi permintaan dari sektor pariwisata serta memenuhi ketahanan pangan seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

4. Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian

Produktivitas pertanian tentu berkaitan dengan kompetensi petani. Dalam hal ini, petani yang memiliki kompetensi adalah petani yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam mengelola usaha pertanian. Fungsi manajeral tersebut umumnya diurus dalam kelompok-kelompok tani atau yang biasa disingkat sebagai poktan. Kelompok ini melakukan fungsi organisasi dengan tujuan pengaturan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani.

Tabel 2. 107. Jumlah Poktan dan Gapoktan di Kab Manggarai Barat Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	JUMLAH KELOMPOK TANI	1.795	1.806	1.846	1.783
	a. Pemula	799	1.034	1.089	799
	b. Lanjut	577	699	718	742
	c. Madya	4	7	11	26
	d. Utama	N/A	N/A	N/A	N/A
	e. Poktan Baru/ Belum Bersertifikat	415	66	28	33
2	a. Jumlah Gapoktan	133	133	133	133
	b. Jumlah Gapoktan				
	Penerima Dana Puap	117	117	117	117
	c. Jumlah Gapoktan Yang Berkembang Baik	30	30	30	30

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2023

Tercatat ada sekitar 1.783 kelompok tani di Kabupaten Manggarai Barat yang bergerak di berbagai usaha pertanian. Adapun gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang saat ini berjumlah 133 kelompok, walaupun yang aktif tercatat tidak sampai setengahnya. Para petani, poktan, dan gapoktan ini didampingi oleh para penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang terdiri dari pegawai PNS, THL, Kontrak Daerah dan Penyuluh kabupaten. Keberadaan penyuluh sangat membantu untuk memperbaiki kapasitas sumber daya manusia petani dan metode budidaya pertanian. Berikut adalah perkembangan jumlah PPL dari tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 108. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021 (Orang)

No	Penyuluh Pertanian Lapangan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	PNS	35	35	29	28
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	58	53	52	N/A
3	Kontrak Daerah	25	24	26	26
4	Penyuluh Kabupaten	2	3	3	3
5	Penyuluh PPPK	N/A	N/A	N/A	52
Jumlah		**120**	**115**	**110**	**109**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2023

Jumlah PPL di Kabupaten Manggarai Barat terus berkurang dari tahun 2018 hingga 2021. Tren tersebut juga mengindikasikan bahwa hampir 50 persen penyuluh adalah PPL tenaga harian lepas. Adanya kebijakan moratorium pegawai dari Pemerintah Pusat sedikit banyak menyebabkan sejumlah PPL tidak dapat segera diganti oleh pemerintah daerah. Jika PPL dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan (169 kelurahan) yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, maka rasionya cenderung stabil di perbandingan 1 : 1,5. Rasio ini menjelaskan bahwa satu orang PPL di Kabupaten Manggarai Barat harus mendampingi dan membina petani-petani di 1 hingga 2 desa/kelurahan. Akan tetapi pada tahun 2021 ada rekrutmen cukup besar untuk penyuluh PPPK (ASN) yang berjumlah 52 personil. Harapannya formasi ini cukup untuk mendukung tenaga penyuluh yang berkekurangan.

5. Peternakan

Peningkatan produksi dan populasi ternak harus dijalankan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan utama. Pada tingkat yang lebih makro, peningkatan produksi hasil ternak juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Selain itu, sumber daya ternak memiliki manfaat lebih sekedar produksi pangan. Misalnya, kotoran hewan dapat digunakan untuk menyuburkan tanah, dan tenaga hewan dapat digunakan untuk logistik dan membantu petani dalam aktivitas membajak.

Tabel 2. 109. Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (kg)

No	Komoditi	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi	42.670	45.800	44.137	99.598	56.976	203.562
2	Kerbau	7.368	7.168	7.082	3.050	47.724	30.428
3	Babi	107.886	118.536	112.286	81.307	165.607	214.855
4	Ayam	73.577	74.290	74.670	76.807	243.960	247.660

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Babi, ayam, dan sapi adalah komoditas terbesar di Kabupaten Manggarai Barat. Komoditas ini baru mengalami lonjakan produksi yang signifikan pada tahun 2022, dengan lonjakan terbesar ada pada produksi sapi sebesar 146.586 kg. Kondisi peningkatan produksi peternakan ini selaras dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia para peternak, pakan dan bibit unggul yang mulai mudah untuk diakses, serta metode budidaya yang sudah jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 110. Produksi Produk Asal Ternak Tahun 2017-2022

No	Komoditi	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Telur (kg)	27.500	31.400	38.000	27.200	575.752	184.494
2	DOC (ekor)	77.450	78.200	78.600	72.000	203.300	247.660
3	Ayam Olahan (kg)	10.250	11.300	12.700	10.500	189.006	227.704
4	Daging Sapi (kg)	3.055	3.110	3.450	2.750	10.805	4.396
5	Daging Babi (kg)	550	600	825	20	560	432

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Produksi produk asal ternak cenderung meningkat pada periode 2017 sampai dengan 2019. Karena efek dari pandemi covid yang menyebabkan pembatasan mobilitas penduduk, hal ini juga turut berdampak pada produksi produk asal ternak yang terus mengalami tren penurunan dari tahun 2020-2021. Jumlah populasi ternak yang juga menurun pada tahun 2020 juga turut mempengaruhi penurunan ini. Setelah PPKM tidak lagi diberlakukan, sehingga pariwisata mulai berangsur membaik, produksi produk asal ternak juga turut meningkat pada tahun 2022. Kebutuhan pasar dari perkembangan pariwisata yang pesat juga turut mengkatrol produksi peternakan di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini juga didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembibitan ternak, inseminasi buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan

baik bersumber dari dana APBD Kabupaten Manggarai Barat, APBD Provinsi maupun APBN. Produk asal ternak juga dipengaruhi oleh faktor populasi ternak. Berikut adalah data mengenai populasi ternak di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 111. Populasi Ternak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Kerbau	Sapi	Kuda	Babi	Kambing	Ayam	Ternak Lainnya
2018	17.096	15.074	246	37.275	6.845	115.147	1.141
2019	16.202	12.745	227	36.814	6.882	135.012	1.426
2020	17.945	16.762	197	175.439	7.033	146.475	2.229
2021	14.663	17.504	196	165.607	10.377	115.937	999
2022	15.464	18.625	151	143.533	11.489	128.562	3.611

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Populasi ternak di Kabupaten Manggarai Barat cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2018-2022. Terbatasnya populasi jantan produktif akibat perdagangan dan bibit unggul lokal sedikit banyak mempengaruhi penurunan jumlah populasi ternak di Kabupaten Manggarai Barat. Tingkat kelahiran dan kematian ternak juga berpengaruh terhadap populasi ternak di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah data mengenai tingkat kelahiran dan kematian ternak di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 112. Tingkat Kelahiran dan Kematian Ternak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat kelahiran ternak	5.35%	0,24%	22.10%	37.9 %	N/A
Tingkat kematian ternak	507 (0.70%)	172 (0.24%)	1969 (0.90%)	7.804 (2 %)	69 (0,031 %)

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Tingkat kelahiran ternak menunjukan tren yang semakin meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Akan tetapi, kondisi ini diikuti dengan naiknya jumlah kematian ternak pada tahun 2021 sebanyak 5.835 ekor atau 1,1%. Masih adanya beberapa penyakit hewan strategis dan penyakit hewan lainnya mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian ternak di Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.2.2. Urusan Pariwisata

Kemenparekraf telah menetapkan dua lokasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat sebagai 10 Bali Baru di tahun 2022. Hal itu mendorong percepatan perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Perkembangan pariwisata yang terjadi diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi sektor lainnya. Indikator pertumbuhan ekonomi yang terdampak dari kinerja sektor pariwisata dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Berikut merupakan data kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai Barat selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 113. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.80	0.80	0.50	0,79	4,94

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi pada rentang tahun 2018 hingga 2022. Hal itu salah satunya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penutupan tempat wisata dan penurunan jumlah wisatawan. Kedua hal tersebut mengakibatkan penurunan *spend of money* dari wisatawan, sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di tahun 2020-2021 juga mengalami penurunan, walaupun kembali melonjak secara signifikan di tahun 2022.

Fluktuasi partisipasi sektor pariwisata terhadap PDRB tentu berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun 2018 hingga 2022. Kunjungan terbanyak terdapat pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Data jumlah kunjungan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 114. Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2018-2022

No	Jumlah Kunjungan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Wisatawan Manca Negara	91.870	168.814	18.350	3.234	60.770
2	Wisatawan Nusantara	69.343	85.898	26.072	57.205	109.307
3	Wisatawan Lokal	1.841	1.897	83	N/A	277

No	Jumlah Kunjungan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Total		**163.054**	**256.609**	**44.505**	**60.439**	**170.354**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan 63,5 persen pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu disumbang oleh jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Manggarai Barat, kemudian mengalami penurunan drastis di semua jenis wisatawan pada tahun 2020-2021. Peningkatan jumlah wisatawan pasca pandemi hingga selisih 109.915 orang pada tahun 2022 karena ditopang oleh kehadiran wisatawan nusantara.

Manggarai Barat terkenal sebagai salah satu kabupaten yang menyediakan wisata premium melalui Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Hal itu yang menyebabkan didominasinya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Manggarai Barat sebelum adanya pandemi Covid-19. Karakteristik daya tarik wisata alam yang unik dan membutuhkan usaha lebih untuk menikmati keindahan wisata, serta jiwa petualang menjadi faktor yang juga memengaruhi ketertarikan wisatawan mancanegara ke Manggarai Barat. Kunjungan wisatawan nusantara baru mendominasi ketika pasca pemulihan pandemi Covid-19 dan pemerintah menetapkan Manggarai Barat sebagai salah satu Bali Baru di Indonesia. Persebaran kunjungan wisatawan pada lokasi wisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 115. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke ODTW di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

\	Tahun	Wisatawan			
		Wisman	Wisnu	Lokal	Total
Rinca (Loh Buaya)	2018	37.770	30.966	499	69.235
	2019	42.844	31.263	298	74.405
	2020	4.098	6.819	N/A	10.917
	2021	N/A	N/A	N/A	N/A
	2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Komodo (Loh Liang)	2018	39.289	21.597	267	61.153
	2019	46.257	21.781	N/A	68.038
	2020	5.373	10.419	N/A	15.792
	2021	1.365	34.643	N/A	36.008
	2022	28.556	65.629	N/A	94.185
Batu Cermin	2018	5.561	11.800	706	18.067
	2019	6.949	17.980	1.000	25.929
	2020	919	3.558	83	8.471

\	Tahun	Wisatawan			
		Wisman	Wisnu	Lokal	Total
	2021	N/A	N/A	N/A	N/A
	2022	627	3.500	277	4.267
Cunca Wulang	2018	5.583	2.405	39	8.027
	2019	2.902	2.102	99	5.103
	2020	396	1.151	N/A	1.547
	2021	57	1.779	N/A	1.836
	2022	1.627	2.238	N/A	3.865
Gua Rangko	2018	3.501	2.375	205	6.081
	2019	166	200	125	491
	2019	5.707	7.416	500	13.623
	2020	994	3.000	N/A	3.994
	2021	233	8.308	N/A	8.541
	2022	3.990	13.371	N/A	17.361
Cunca Rami	2018	166	200	125	491
	2019	N/A	N/A	N/A	N/A
	2020	N/A	N/A	N/A	N/A
	2021	N/A	N/A	N/A	N/A
	2022	N/A	N/A	N/A	N/A
Total 2018		**91.870**	**69.343**	**1.841**	**163.054**
Total 2019		**104.659**	**80.542**	**1.897**	**187.098**
Total 2020		**11.780**	**24.947**	**83**	**40.721**
Total 2021		**3.234**	**57.205**	**N/A**	**60.439**
Total 2022		**60.770**	**109.307**	**277**	**170.354**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Pulau Rinca (Loh buaya) dan Pulau Komodo (Loh liang) masih menjadi tujuan utama wisatawan saat berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2022. Kedua pulau tersebut merupakan tempat tinggal Komodo sebagai salah satu binatang purba. Keberadaan Komodo sebagai binatang purba disertai dengan adanya keindahan alam, serta panorama bawah laut di sekitar kedua pulau ini menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Sementara lokasi wisata lain masih memerlukan upaya tambahan dari pemerintah agar lebih dikenal dan menjadi daya tarik wisata alternatif di Kabupaten Manggarai Barat.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian juga tampak pada persentase pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi sektor pariwisata terhadap daerah merupakan salah satu indikator pendukung kinerja utama perencanaan jangka panjang Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu pengaruh terbesar terhadap peningkatan jumlah PAD yang diperoleh suatu daerah adalah

rata-rata lama tinggal para wisatawan di Kabupaten Manggarai Barat. Angka rata-rata tersebut tidak tersebar merata di setiap bulan, melainkan terdapat bulan-bulan tertentu dimana terjadi lonjakan kunjungan.

Tabel 2. 116. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

No	Tahun	PAD Sektor Pariwisata (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
1	2018	8.340.637.840	103.347.460.591	8,07
2	2019	18.456.451.878	169.954.164.787	10,85
3	2020	2.692.490.000	99.340.732.323,62	2,71
4	2021	2.496.720.000	145.400.072.597,00	1,71
5	2022	9.436.060.000	190.819.870.963	4,94

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren yang fluktuatif. Sempat mencapai 10,85 persen pada tahun 2019, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD menurun sebesar 8,14 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan ini sangatlah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat, mengingat pariwisata adalah salah satu industri yang rentan goyah. Meski demikian, kontribusinya mulai merangkak naik lagi pada tahun 2022. Sektor pariwisata memiliki misi dan target besar dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Manggarai Barat. Maka dari itu, pengelolaan pariwisata harus bermanfaat sebaik mungkin dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.3.2.3. Urusan Perikanan

Sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai Barat memiliki profesi sebagai nelayan, mengingat wilayah pesisir yang cukup luas serta terdiri dari 146 pulau. Hasil tangkap ikan tangkap di Kabupaten Manggarai Barat juga sangat beragam jenisnya dan mengundang wisatawan. Maka dari itu, urusan perikanan menjadi salah satu industri yang membawa manfaat baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. 117. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2022 (Ton)

Kecamatan	Tahun		
	2020	2021	2022
Komodo	2.888	6.484	5.989
Macang Pacar	150,6	248	311

Kecamatan	Tahun		
	2020	2021	2022
Boleng	89,2	186	133
Lembor Selatan	395	233	318
Jumlah	**3.519**	**7.150**	**6.751**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Tren produksi perikanan tangkap di Kabupaten Manggarai Barat cenderung berfluktuasi. Sempat meningkat sebesar 113,4 persen pada tahun 2021, produksi perikanan kembali menurun walau tidak begitu signifikan pada tahun 2022. Meski demikian, tren ini merupakan suatu hal yang baik mengingat produksi perikanan yang jatuh, dimana sebelumnya selalu konsisten diatas 10.000 ton. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang membatasi mobilitas dalam aktivitas. Selain itu, ada tren pergeseran fungsi kapal yang dulu digunakan sebagai kapal nelayan menjadi kapal pengangkut wisatawan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung wilayah Komodo yang menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh pemerintah pusat, sehingga banyak masyarakat yang beralih profesi. Keterbatasan akses terhadap bantuan permodalan serta sarana penangkapan masih bersifat tradisional juga menjadi beberapa faktor dalam penurunan produksi perikanan ini.

Grafik 2. 21. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2022 (Ton)

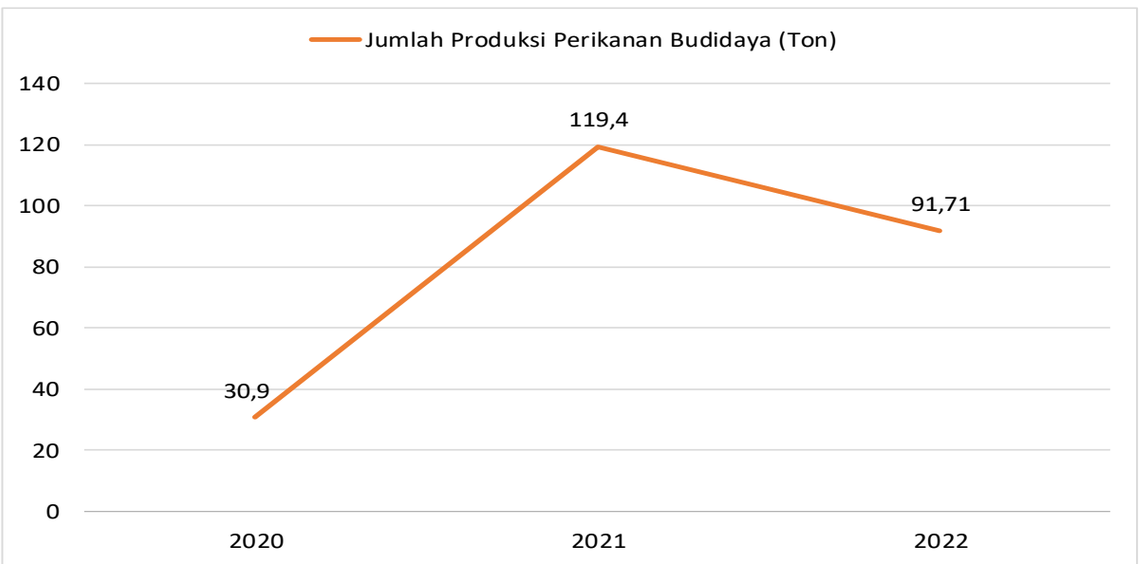

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, 2023

Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan yang cukup pesat sebesar 88.5 ton pada tahun 2022. Capaian ini mendongkrak produksi perikanan budidaya Kabupaten Manggarai Barat yang sebelumnya selalu

menurun sejak tahun 2015. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada seluruh destinasi wisata membuat banyak masyarakat yang kembali lagi menjadi nelayan. Meski demikian, angka ini kembali turun pada tahun 2022 sebesar 23,19 persen mengingat banyaknya destinasi pariwisata yang sudah dibuka sehingga masyarakat kembali bekerja di industri pariwisata.

2.3.2.4. Urusan Perdagangan

Ruang lingkup urusan perdagangan adalah mengembangkan perdagangan dengan memperluas jaringan pemasaran, memperlancar distribusi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja sektor perdagangan adalah tingkat kelancaran distribusi barang. Berikut adalah data mengenai tingkat kelancaran distribusi barang di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 118. Tingkat kelancaran distribusi barang di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat kelancaran distribusi barang	70%	75%	75%	80%	85%

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Tingkat kelancaran distribusi barang menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat stabilitas ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting perdagangan. Faktor lain yang berpengaruh berhubungan dengan sarana dan prasarana. Data tersebut dapat dicermati dari data mengenai jumlah pasar daerah, toko, kios dan sarana perdagangan lainnya.

Tabel 2. 119. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Pasar/Market	N/A	N/A	N/A
2	Toko/Store	11	16	8
3	Kios	3	20	16
4	Warung	42	9	30
5	Total	56	45	54

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Data mengenai sarana perdagangan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, kios merupakan sarana perdagangan yang mengalami peningkatan, sedangkan Toko dan Warung mengalami penurunan. Penurunan secara umum terjadi pada tahun 2020, dimana pandemi Covid-19 terjadi dan membawa kondisi krisis.

2.3.2.5. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian mengemban tugas untuk mengembangkan sektor industri dalam rangka mengurangi pengangguran serta menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Catatan Dinas Perindagkop, ada sekitar 2.263 industri di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2019. Namun semuanya dalam kategori industri kecil dan rumah tangga. Walau demikian, serapan tenaga kerjanya bisa mencapai 3.659 orang. Berikut data tentang perkembangan sektor industri di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 2. 120. Perkembangan Industri di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Kecil (Formal)	367	380	386	391	443
2	Industri Kecil (non- Formal)	322	322	342	642	747
3	Industri Rumah Tangga	1474	1475	1493	1230	1336

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Sektor industri di Kabupaten Manggarai Barat masih didominasi oleh industri rumah tangga dengan jenis dan kapasitas produksi yang tentunya sangat kecil. Umumnya industri-industri ini bergerak di bidang produksi makanan ringan, tenunan, souvenir, dan olahan hasil pertanian seperti kopi tepung. Berikut adalah nilai kapasitas produksi IKM di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 121. Nilai produksi IKM dan jumlah produk IKM yang bersertifikasi di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai produksi IKM	N/A	N/A	32.408.700.000	3.359.985.000	1.179.640.000
Jumlah produk IKM yang bersertifikasi	28	55	100	124	168

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Nilai produksi IKM menunjukan tren yang semakin menurun pada tahun 2018 hingga 2020. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa persoalan seperti ketersediaan bahan baku yang tidak kontinu, kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM masih belum memadai, sarana produksi yang masih kurang dan akses terhadap bantuan permodalan yang kurang memadai. Berbeda dengan nilai produksi IKM yang semakin menurun, jumlah produk IKM yang bersertifikat justru meningkat. Standarisasi pengolahan produk IKM harus tetap ditingkatkan untuk menjaga kualitas produk secara berkesinambungan.

2.3.3. Fokus Fungsi Penunjang

Penunjang urusan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah di suatu daerah. Gambaran mengenai kondisi penunjang urusan dapat dilihat dari beberapa unsur, seperti perencanaan pembangunan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; pengawasan; penelitian dan pengembangan; sekretariat dewan; dan pemerintahan umum daerah.

2.3.3.1. Perencanaan

Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Urusan perencanaan menjadi fondasi utama pelaksanaan pembangunan. Secara umum capaian urusan perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 122. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan dokumen perencanaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran	100%	98%	100%	95,91%	98,34%
3	Ketersediaan dokumen evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Cakupan program/ kegiatan mitra pembangunan yang tersinkronisasi dan terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan SDM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan hukum dan pemerintahan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan fisik prasarana wilayah dan tata ruang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Ketersediaan dokumen hasil kelitbangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber Data: BP4D Kab. Manggarai Barat, 2021

2.3.3.2. Keuangan

Tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan *good governance.* Audit rutin tata kelola keuangan dilaksanakan setiap akhir pelaksanaan pembangunan. Hasil audit BPK akan menghasilkan opini dalam pelaporan kinerja pemerintah daerah kabupaten. Berikut adalah perkembangan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 123. Opini BPK terhadap LKPD Kab. Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2021

Terlihat bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2017, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selalu mencapai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebelum akhirnya pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan status sejalan dengan adanya perbaikan dari sisi Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap undang-undang, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia.

Pada aspek lain, indikator kinerja keuangan dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Berikut adalah data realiasi PAD terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

Grafik 2. 22. Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2020.

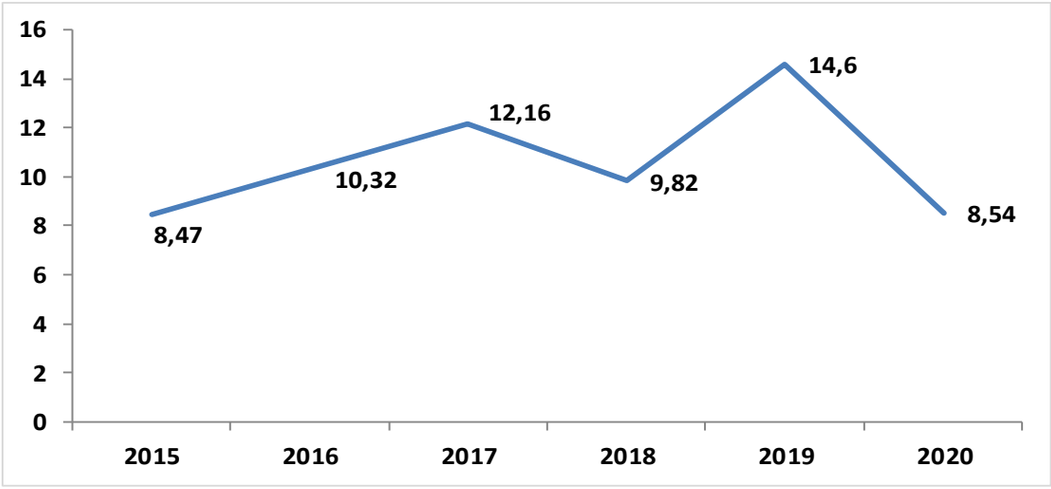

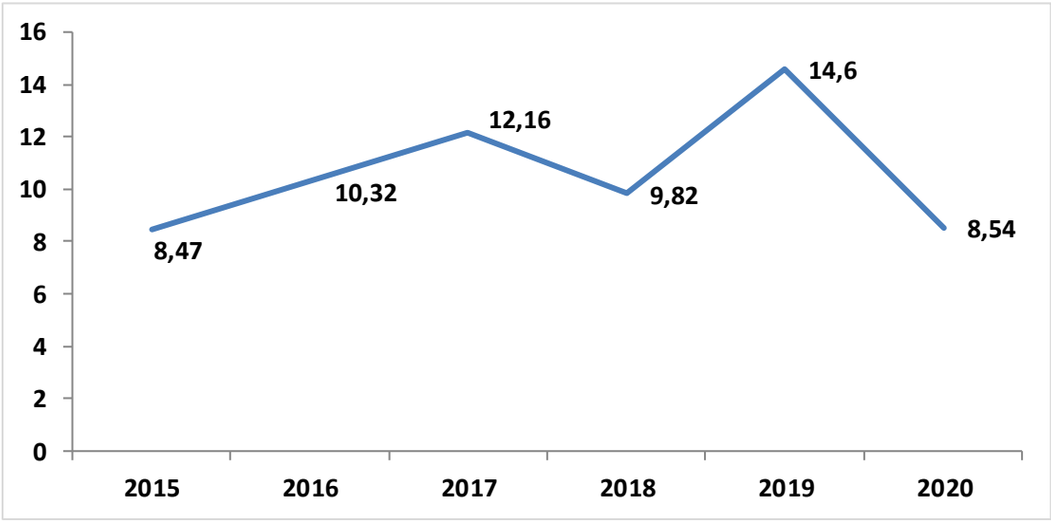

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2021

Persentase realiasi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2019 merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir. Data terakhir pada tahun 2019 menunjukan kenaikan yang cukup siginifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,78%, walaupun menurun pada tahun 2020 karena pandemic Covid19. Hal tersebut dapat terjadi karena dilakukan perbaikan dalam pengelolaan PAD termasuk optimalisasi potensi PAD yang ada di Kabupaten Manggarai Barat

2.3.3.3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian adalah fungsi-fungsi pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik. Urusan ini diselenggarakan dalam rangka untuk mendukung kualitas manajemen kepegawaian seperti meningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Manajemen kepegawaian yang berkualitas akan mendorong tingkat profesionalitas ASN dalam hal penguasaan teori dan keterampilan terhadap persoalan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1. Jumlah ASN

Urusan kepegawaian dilaksanakan sebagai bentuk kerangka kerja untuk melengkapi komponen terpenting bagi organisasi pemerintahan yang berperan sebagai penggerak utama dalam mencapai visi, misi, dan tujuan. Mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan yang sangat besar dalam kelancaran birokrasi pemerintahan, maka urusan ini tidak bisa dilepaskan dari peranan dan keikutsertaan pegawai negeri di suatu daerah. Hal ini bisa dilihat melalui variabel deskriptif seperti jumlah, sebaran menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, ataupun jabatan.

Tabel 2. 124. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kab. Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Jumlah Pegawai Negeri Sipil					
Tahun	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
2018	2139	56,56	1643	43,44	3782
2019	2173	55,63	1733	44,37	3906
2020	2087	55	1707	45	3794
2021	2028	53,21	1783	46,79	3811
2022	1933	57,78	1800	48,21	3733

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2023

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Manggarai Barat menurun pada tahun 2022 namun tidak begitu signifikan. Meski demikian, tren jumlah pegawai negeri sipil memang cenderung stagnan sejak tahun 2018 dengan rata-rata 3.805 orang. Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin laki-laki secara konsisten selalu lebih banyak dari perempuan selama lima tahun terakhir. Namun, jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin perempuan selalu meningkat, berbeda dengan laki-laki yang cenderung fluktuatif.

Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 adalah 1:72 atau 1,45 persen. Rasio ini mengindikasikan

bahwa hanya tersedia satu hingga dua PNS dalam melayani 100 penduduk Kabupaten Manggarai Barat. Rendahnya rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk akan memengaruhi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan adanya penggiatan promosi rekrutmen di Kabupaten Manggarai Barat mengingat persentase ideal dari jumlah PNS adalah dua atau tiga persen dari jumlah penduduk.

2. Tingkat Pendidikan ASN

Selain akumulasi jumlah secara keseluruhan, tingkat pendidikan adalah salah satu indikator lain untuk melihat kualitas ASN di suatu daerah. Hal ini mengigat pengukuran tingkat profesionalitas ASN juga diukur melalui dimensi kualifikasi dan kompetensi. Indikator ini juga bisa digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat prestasi kerja ASN dan pendidikan dan pelatihan yang diikuti atau diperoleh.

Tabel 2. 125. Tingkat Pendidikan PNS tahun 2020-2022

Tingkat pendidikan	2020	2021	2022
Sampai dengan SD	6	6	4
SLTP	20	19	16
SLTA	809	757	641
Diploma I	35	31	21
Diploma II	145	132	106
Diploma III	784	778	775
Diploma IV	61	61	71
S1/Sarjana	1963	1996	2063
S2	28	31	36
Total	**3851**	**3811**	**3733**

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2023

Tingkat pendidikan ASN di Kabupaten Manggarai Barat cenderung didominasi oleh Sarjana 1 (S1) sejak tahun 2020, dengan proporsi selalu diatas 50 persen. Tidak hanya S1, namun peningkatan juga terjadi dengan formasi Magister (S2) pada tahun 2022 walaupun hanya bertambah 10 personil. Di samping itu, ASN dengan lulusan sekolah menengah atas (SLTA/SLTP) juga semakin berkurang, diiringi dengan peningkatan ASN dengan lulusan diploma. Peningkatan ini dapat diapresiasi mengingat harapan akan peningkatan kompetensi pendidikan ASN yang dapat menjawab tuntutan perubahan dan kebutuhan reformasi dan transformasi birokrasi.

Tabel 2. 126. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak tahun 2022

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	9	1	10
SLTP	29	10	39
SLTA	455	306	761
Diploma I dan II	14	39	53
Diploma III	102	261	363
S1/S2/S3	578	590	1168
Total	**1.187**	**1.207**	**2.394**

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2021

Sementara itu, ASN dengan kontrak kerja, atau yang biasa disebut tenaga kontrak, juga didominasi dengan lulusan pendidikan sarjana (S1/S2/S3) pada tahun 2022. Meski demikian, penambahan ASN berlatarbelakang lulusan SLTA juga bertambah hingga 2,5 kali lipat. Peningkatan ini merupakan jawaban atas dibukanya peluang menjadi aparatur sipil negara berbasis kontrak bagi pemilik ijazah SMA/SMK sederajat pada seleksi CPNS tahun 2021.

Tabel 2. 127. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2022

Tingkat pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
Sampai dengan SD	11	9	7	6	4
SLTP	28	26	21	19	16
SLTA	1040	923	856	757	641
Diploma I	37	36	34	31	21
Diploma II	229	186	157	132	106
Diploma III	753	772	761	778	775
Diploma IV	46	57	56	61	71
S1	1614	1866	1874	1996	2063
S2	24	31	28	31	36

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2023

Secara keseluruhan, tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Manggarai Barat semakin lebih baik jika dilihat perkembangannya dari tahun 2018 hingga 2022. Adapun persentase ASN berpendidikan SLTA ke bawah terus berkurang, sedangkan komposisi ASN berpendidikan sarjana dan magister terus meningkat. Bagi sektor pelayanan publik, hal ini merupakan capaian yang baik mengingat adanya dukungan dari bonus demografi yang memiliki harapan besar untuk menciptakan generasi penerus yang lebih berkompeten.

Tabel 2. 128. Perkembangan Jumlah PNS yang Melanjutkan Studi Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PNS yang tugas belajar	13	11	5	29	11

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2023

Salah satu kesempatan yang dianggarkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi para PNS adalah dengan melakukan tugas belajar. Tugas belajar adalah perintah formal kepada PNS untuk meninggalkan tugasnya dan mengikuti pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Bentuk umum dari tugas belajar PNS adalah ekstensi S1 dan juga S2. Kesempatan ini memiliki manfaat yang besar dengan membangun karakter para PNS melalui nilai positif dari daerah atau negara yang didatangi. Harapannya kesempatan menimba ilmu dan belajar dari negara lain ini akan membuka wawasan dari setiap PNS yang berangkat melakukan tugas belajar.

Jumlah PNS Kabupaten Manggarai Barat yang diberangkatkan untuk melakukan tugas belajar sejak tahun 2018 adalah 69 orang. Tren jumlah PNS yang berangkat tugas belajar cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Keberangkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021, sementara tahun 2020 menjadi yang terendah mengingat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, jumlah PNS yang melakukan tugas belajar menurun sebesar 31 persen. Peningkatan jumlah PNS yang berangkat tugas belajar ini perlu menjadi agenda kedepan mengingat globalisasi yang kian mendunia.

3. Jabatan Struktural dan Diklat PIM

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan kodrat profesionalisme yang berhubungan dengan kompetensi dan juga prestasi kerja dari setiap aparatur. Aspek tersebut juga digunakan untuk penentuan penempatan jabatan struktural di suatu pemerintah daerah. Contoh jabatan struktural dalam PNS tingkat daerah yaitu kepala kantor kedinasan, kepala bagian kantor daerah, kepala camat, dan lurah.

Tabel 2. 129. Persentase Jabatan Struktural yang Terisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Jabatan Struktural yang Terisi	618	587	574	353	348
Jumlah Jabatan Struktural yang Ada	649	610	612	366	399
Persentase (%)	95,22	96,23	93,79	96,44	87,21

Sumber: BKPPD Kab. Manggarai Barat, 2021

Persentase jabatan struktural yang terisi di Kabupaten Manggarai Barat cenderung berfluktuasi sejak tahun 2018 dan kembali menurun pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN yang memiliki kualifikasi terhadap jabatan struktural yang ada semakin sedikit sehingga menyebabkan kendala dalam pengisian lowongan jabatan. Kendala lain yang mungkin terjadi adalah kesulitan dalam mendeteksi apakah dalam pengisian jabatan struktural sudah memenuhi peraturan yang berlaku.

Tabel 2. 130. Persentase Pejabat Eselon II, III dan IV yang Telah Mengikuti PIM Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pejabat yang telah Mengikuti PIM II (%)	76,67	69,70	25,93	33,33	N/A
2	Persentase Pejabat yang telah Mengikuti PIM III (%)	71,17	72,56	31,06	50,31	N/A
3	Persentase Pejabat yang telah Mengikuti PIM IV (%)	27,91	25,84	1,81	1,60	N/A

Sumber: BKPPD Kab. Manggarai Barat, 2021

Salah satu kewajiban khusus PNS sebagai syarat pemenuhan jabatan struktural adalah partisipasi di Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan atau selanjutnya disebut Diklatpim. Diklatpim adalah Diklat PNS yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural. Dalam hal ini, pembentukan kompetensi pemangku jabatan struktural eselon III dan IV memerlukan penyaringan melalui beberapa tahap seleksi untuk mendapatkan calon pengisi jabatan struktural yang diperlukan.

Persentase pejabat Kabupaten Manggarai Barat yang telah mengikuti Diklatpim terus meningkat sejak tahun 2018 hingga 2021. Pejabat eselon II dan III

yang mengikuti Diklatpim bertambah masing-masing 7,40 persen dan 19,25 persen. Capaian pada pejabat eselon IV justru berbanding terbalik, dimana pada tahun 2020 menurun cukup drastis sebesar 24,03 persen. Sehubungan dengan kembali menurunnya partisipasi Diklatpim untuk pejabat eselon IV pada tahun 2022, maka partisipasi pejabat dalam Diklatpim harus semakin digiatkan guna mendukung pengisian jabatan struktural di pemerintah daerah.

4. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu indikator kuantitatif yang dicetuskan oleh Kementerian PAN-RB untuk menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan tiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Indikator ini dapat menjadi acuan dalam melihat produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Indeks Profesionalitas ASN dikelompokkan berdasarkan kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Tabel 2. 131. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kab. Manggarai Barat Tahun 2019-2022

No	Dimensi	2019	2020	2021	2022
1.	Kualifikasi	11,0	10,86	11,86	11,94
2.	Kompetensi	15,0	15,19	8,77	8,47
3.	Kinerja	23,0	25,08	6,47	14,38
4.	Disiplin	5,0	5,00	4,99	4,99
Nilai Keseluruhan		**54,0**	**56,13**	**32,09**	**39,78**
Kategori		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

Sumber: BPPKD Kab. Manggarai Barat, 2023

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai Barat menurun drastis sejak tahun 2021. Meski demikian, capaian ini kembali meningkat pada tahun 2022. Namun, peningkatan ini belum bisa mendekati raihan angka tahun 2019 dan 2020 dimana sempat mencapai nilai diatas 50. Dimensi profesionalitas yang perlu menjadi perhatian adalah kinerja dan kompetensi. Kedua dimensi tersebut sangat mempengaruhi nilai akhir dari Indeks Profesionalitas ASN karena dimensi lain seperti kualifikasi dan kedisiplinan masih berfluktuasi di angka yang wajar. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi dari ASN adalah dengan meningkatkan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan serta studi banding.

2.3.3.4. Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif merupakan salah satu perwujudan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi tentu menjadi bahan pengawasan pemerintah untuk dibenahi. Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun organisasi inspektorat membutuhkan sejumlah aparatur, yakni auditor yang memiliki kompetensi pembinaan dan pengawasan.

Tabel 2. 132. Jumlah dan Persentase Auditor Kab. Manggarai Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Auditor	17	17	17	19	21
2	Jumlah Kebutuhan	40	40	40	40	52
3	Persentase (%)	43	43	43	48	40,38

Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai Barat, 2023

Kebutuhan auditor di Kabupaten Manggarai Barat yang direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sejumlah 40. Kebutuhan ini belum bisa dicapai sejak tahun 2018, dimana maksimal hanya 19 auditor atau 48 persen dari kebutuhan. Terjadi peningkatan jumlah kebutuhan auditor pada tahun 2022. Walaupun jumlah auditor meningkat, namun persentasenya berkurang disebabkan kebutuhannya yang juga ikut meningkat.

Indikator berikutnya untuk menilai urusan pengawasan adalah dari jumlah temuan aparat pengawas baik dari eksternal maupun internal. Melalui temuan dalam proses pengawasan ini, kualitas dari pengawasan dapat digambarkan. Semakin tinggi jumlah temuan pengawasan, maka temuan atau bagian temuan audit yang berindikasi adanya tindak pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga semakin tinggi.

Tabel 2. 133. Jumlah Temuan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Temuan Aparat Pengawas Eksternal (BPK)	8	6	14	8	13
Temuan Aparat Pengawas Internal (BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten)	250	234	131	147	89
Jumlah	**258**	**240**	**145**	**155**	**102**

Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai Barat, 2023

Tren jumlah temuan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat cenderung berfluktuasi sejak tahun 2018 hingga 2022. Secara keseluruhan jumlah temuan aparat penagwas semakin menurun hingga tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan dan pengawasan internal terus berlangsung dengan baik. Dalam menentukan sejauh mana kualitas temuan aparat pengawas di Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya dapat dilihat melalui berapa banyak temuan yang ditindaklanjuti.

Tabel 2. 134. Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Lembaga Pemeriksa	Temuan	Tindak Lanjut Temuan	Sisa	% Tindak Lanjut
1.	2018	BPK RI	11.499.947.027,33	8.424.336.708,62	3.075.610.318,71	73,26
		BPKP	1.993.645.602,30	1.171.826.945,90	821.818.656,40	58,78
		INSPEKTORAT PROV. NTT	421.326.758,00	401.826.758,23	19.499.999,77	95,37
		INSPEKTORAT KAB. MABAR	1.070.619.281,13	739.987.167,04	330.632.114,09	69,12
		JUMLAH 1	**14.985.538.668,76**	**10.737.977.579,79**	**4.247.561.088,97**	**71,66**
2.	2019	BPK RI	8.893.102.056,59	7.398.955.649,69	1.494.146.406,90	83,20
		BPKP	1.843.412.784,30	1.071.094.127,90	772.318.656,40	58,10
		INSPEKTORAT PROV.NTT	410.991.758,00	401.826.758,23	9.164.999,77	97,77
		INSPEKTORAT KAB. MABAR	921.809.700,13	699.090.690,04	222.719.010,09	75,84
		JUMLAH 2	**12.069.316.299,02**	**9.570.967.225,86**	**2.498.349.073,16**	**79,30**
3.	2020	BPK RI	9.290.387.777,23	7.102.309.394,73	2.188.078.382,50	76,45
		BPKP	1.993.645.602,30	1.184.326.945,90	809.318.656,40	59,41
		INSPEKTORAT PROV. NTT	433.825.906,00	414.325.906,23	19.499.999,77	95,51
		INSPEKTORAT KAB. MABAR	1.001.550.042,13	760.168.621,49	241.381.420,64	75,90
		JUMLAH 3	**12.719.409.327,66**	**9.461.130.868,35**	**3.258.278.459,31**	**74,38**
4.	2021	BPK RI	9.309.867.777,23	7.409.032.606,72	1.900.835.170,51	79,58

No.	Tahun	Lembaga Pemeriksa	Temuan	Tindak Lanjut Temuan	Sisa	% Tindak Lanjut
		BPKP	1.993.645.602,30	1.071.094.127,9	922.551.474,4	53,73
		INSPEKTORAT PROV. NTT	433.825.906,00	401.826.758.23	31.999.147.77	92,62
		INSPEKTORAT KAB. MABAR	1.001.550.042,13	781.562.140,49	219.987.901,64	78,04
		JUMLAH 4	**12.738.889.327,66**	**9.663.515.633,34**	**3.075.373.694,32**	**75,86**
5.	2022	BPK RI	10.744.344.616,12	8.484.781.750,82	2.259.562.865,30	78,97
		BPKP	1.110.282.312	734.067.897	376.214.414	66,12
		INSPEKTORAT PROV. NTT	2.685.335.044	2.303.600.769	381.734.275	85,78
		INSPEKTORAT KAB. MABAR	6.233.288.394,55	4.233.355.479,20	1.999.932.915,35	67,92
		JUMLAH 5	**20.773.250.366,67**	**15.755.805.896,02**	**5.017.444.470,65**	**74,70**

Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai Barat, 2023

Capaian penindaklanjutan temuan pengawas eksternal dan internal di Kabupaten Manggarai Barat masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian rata-rata lima tahun yang hanya sekitar 75,18 persen. Adapun capaian pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian mengingat temuan pada tahun tersebut meningkat secara nominal rupiah hingga 31,5 persen ketimbang satu tahun sebelumnya. Peningkatan temuan ini memerlukan intervensi tindak lanjut yang jauh lebih baik mengingat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah akan lebih besar.

2.3.3.5. Sekretariat Daerah

Organisasi pendukung berikutnya adalah sekretariat daerah. Organisasi ini memiliki fungsi koordinatif dan pelayanan administratsi dalam mendukung upaya pencapaian kinerja daerah. Berikut adalah perkembangan pencapaian kinerja daerah sejak tahun 2016-2020.

Tabel 2. 135. Capaian Kinerja Daerah Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai AKIP	48,34 (C)	51,54 (CC)	60,17 (B)	60,25 (B)	63,12 (B)	61,60 (B)
Nilai LPPD	N/A	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	N/A
Dinas PMPTSP	N/A	1,66 (D)	1,66 (D)	1,66 (D)	2,48 (C-)	2,48
Dukcapil	N/A	1,66 (D)	1,66 (D)	1,66 (D)	2,44 (C-)	2,92
RSUD	N/A	1,77 (D)	1,77 (D)	1,77 (D)	2,66 (C+)	0
Indeks Kepatuhan	N/A	40 (E)	50 (E)	50 (E)	68,45 (C)	0

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan Publik						
Indeks Reformasi Birokrasi	XX	XX	XX	53,76 (CC)	XX	52,31 (CC)

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Manggarai Barat, 2021

Keterangan :
XX : belum dievaluasi oleh Kemenpan RB
0 : Tidak dievaluasi/Covid
LPPD : Belum dinilai oleh Kemendagri RI

Capaian kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Manggarai Barat masih belum maksimal. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 memiliki nilai 52,31 dengan predikat CC. Capaian tersebut tentunya menunjukan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat belum optimal. Selain itu, indikator capaian SAKIP dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, walaupun sedikit menurun di tahun 2020, tetapi tidak signifikan dengan predikat yang stagnan yaitu B. Hal tersebut diakibatkan oleh masih belum konsistennya akuntabilitas perencanaan dan pelaporan.

Dari segi kualitas pelayanan publik yang diukur di 3 perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukan nilai yang masih rendah dengan rata-rata nilai 2,52 dengan predikat C. Survei Kepuasan Masyarakat belum dilaksanakan secara keseluruhan di setiap perangkat daerah, masih terbatas hanya di 3 perangkat daerah. Hal tersebut terjadi karena tingkat kesadaran perangkat daerah dalam melaksanakan SKM masih rendah sehingga tidak dapat menggambarkan pelayanan publik secara keseluruhan.

2.3.4. Fokus Urusan Pemerintahan Umum

Urusan ini diselenggarakan dalam rangka membina dan menjamin kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Urusan ini sangat erat berkaitan dengan upaya pembinaan ideologi negara dan penanganan kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut adalah data yang mampu menggambarkan capaian urusan ini.

Tabel 2. 136. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kasus Kantibmas di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 Kali	1 Kali	2 Kali	3 Kali	N/A
2	Kegiatan Pembinaan Partai Politik	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	N/A
3	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditangani	N/A	N/A	46	23	N/A

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Manggarai Barat, 2020

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP, dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung meningkat, sedangkan pembinaan terhadap partai politik cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Pembinaan diharapkan dapat meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam membina wawasan ideologi kebangsaan dan mendorong pemahaman masyarakat terhadap politik.

Data jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditangani pada tahun 2019 turun sebanyak 23 kasus. Penurunan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut merupakan hal yang positif bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat maupun bagi pengunjung yang datang sehingga dapat semakin mendorong Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata prioritas yang ramah terhadap wisatawan.

Aspek daya saing daerah adalah kondisi kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Berikut adalah deskripsi tentang fokus kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.5. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah terkait bagaimana kapasitas ekonomi daerah tersebut bisa menjadi daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di daerah tersebut maupun yang akan masuk. Daya tarik ini diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Aspek kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya untuk memicu daya saing daerah antara lain dapat dilihat melalui perkembangan pengeluaran

konsumsi rumah tangga perkapita dan nilai tukar petani. Berikut adalah deskripsi data mengenai pengeluaran rumah tangga per kapita dan nilai tukar petani di Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.5.1. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Indikator ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan. Adapun angka konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 137. Angka Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019
Total Pengeluaran Rumah Tangga (Rp)	692.602	839.763	914.129
Jumlah Rumah Tangga (KK)	56.422	57.699	62.964
Rasio	12,3	14,6	14,5

Sumber: Manggarai Barat dalam Angka 2017 hingga 2020

Sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, angka konsumsi rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat pun juga terus meningkat pada tahun 2016 hingga 2019. Namun demikian, data BPS menyebutkan bahwa persentase terbesar pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat itu terdapat pada konsumsi makanan yang mencapai 54,27% pada tahun 2019. Sementara sisanya terdapat pada konsumsi non-makanan seperti keperluan perumahan dan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat belum baik. Semakin tinggi persentase pengeluaran rumah tangga pada komponen makanan, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah persentase pengeluaran pada komponen makanan, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Rata-rata pengeluaran per kapita harus dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan nasional. Hal ini harus dijalankan untuk mengetahui posisi pengeluaran per kapita Kabupaten Manggarai Barat. Jika rata-rata pengeluaran per

kapita Kabupaten Manggarai Barat dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan nasional, maka diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 2. 138. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)

Wilayah	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Manggarai Barat	Kelompok makanan	395.427	473.819	496.097	494.270
	Kelompok non makanan	297.175	365.944	418.033	406.136
Provinsi NTT	Kelompok makanan	399.251	402.922	429.498	442.700
	Kelompok non makanan	282.232	331.786	321.195	351.661
Nasional	Kelompok makanan	527.956	556.899	572.551	603.236
	Kelompok non makanan	508.541	567.818	592.690	622.449

Sumber: Manggarai Barat dalam Angka 2017-2020 dan BPS, 2021

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat terus membaik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata, kondisi pengeluaran per kapita Kabupaten Manggarai Barat terlihat masih sangat jauh. Peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara umum harus tetap dijalankan secara berkesinambungan untuk memperbaiki kondisi ini.

2.3.5.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima dan dibayarkan petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar. Sebaliknya, jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2. 139. Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
NTP	101,07	102,18	105,86	106,17	96,24

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
NTP menurut sub-sektor:					
Tanaman pangan	103,43	104,84	108,24	107,85	95,02
Hortikultura	98,78	101,24	102,56	103,06	100,34
Perkebunan	95,10	95,45	103,76	103,02	95,65
Peternakan	105,95	106,18	107,14	109,28	102,60
Perikanan	103,67	105,67	109,43	108,47	93,10

Sumber: Balai Pusat Statistik NTT, 2021

Nilai tukar petani di Provinsi NTT termasuk di Kabupaten Manggarai Barat terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2019, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemampuan tukar produk-produk pertanian di Provinsi NTT serta daya beli para petaninya terus meningkat. Terlihat bahwa di semua sub-sektor, NTP-nya berada di atas 100. Ini menunjukkan bahwa daya beli para petani selama tahun 2016 hingga 2019 relatif lebih baik jika dibandingkan dengan periode tahun 2012.

2.3.6. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

Kondisi daya saing suatu daerah dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur berpengaruh pada berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi misalnya tentu berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap aspek ini sangat membantu perkembangan produktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Berikut adalah perkembangan infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai Barat dalam selama tahun 2015 hingga 2020.

2.3.6.1. Transportasi

Aspek transportasi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat hingga saat ini masih difokuskan pada pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur transportasi darat, laut dan udara sebagai konsekuensi dari bentuk morfologis wilayah yang terdiri dari daratan dan perairan. Di aspek transportasi darat, Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 1018 unit. Jika dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.226,89 km, maka akan diperoleh rasio sebagai berikut.

Tabel 2. 140. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2019

Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
1.226,89 km	1018 unit	1,21

Sumber: Bidang Fispra BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2019 mencapai 1:1,21. Artinya 1 kendaraan untuk 1,21 km jalan. Rasio ini termasuk dalam kategori baik, namun ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian pada tahun-tahun mendatang, antara lain seperti:

1. Masih kurangnya perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal dan jembatan timbang;
2. Belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda yang menyebabkan kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas.

Walaupun demikian, jumlah pergerakan orang dan barang di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2015 hingga 2020 semakin meningkat, baik pergerakan ke luar Kabupaten Manggarai Barat, maupun pergerakan dari ibukota kabupaten ke ibu kota kecamatan, antar kecamatan, serta menuju sentra produksi dan tempat-tempat wisata. Berikut adalah tabel mengenai jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 141. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penumpang Darat (orang)	871.620
2.	Jumlah penumpang Laut (orang)	219.000
3.	Jumlah penumpang Udara (orang)	73.000
	Total	**1.163.620**
4.	Barang bawaan Penumpang angkutan darat (kg)	8.716.200
5.	Barang bawaan Penumpang angkutan laut (kg)	8.760.000
6.	Barang bawaan Penumpang angkutan udara (kg)	1.460.000
	Total	**18.936.200**

Sumber: Bidang Fispra BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Arus penumpang yang masuk dan keluar dari Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 mencapai 1.163.620 orang, dengan porsi terbanyak pada angkutan darat antar kecamatan maupun antar kabupaten di Pulau Flores.

Sedangkan total barang bawaan para penumpang ini diperkirakan mencapai 18.936.200 kg.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki satu Bandar Udara, yakni Bandar Udara Komodo. Ringkasan Eksekutif Ranwal RPJMD Mabar Kapasitas terminal bandara ini bisa menampung hingga 1,5 juta penumpang pada saat ini. Sedangkan panjang landasan pacunya (runway) berukuran 2250 x 40 meter dan dapat didarati pesawat kelas menengah jenis Airbus A320 atau Boeing 737-800.

Bandara Komodo akan dikelola oleh sebuah konsorsium bernama PT Cinta Airport Flores (CAF) yang antara lain terdiri dari perusahaan Changi Airports International Pte Ltd dan PT Cardig Aero Service. Dalam perencanaannya, Bandara Komodo akan dikembangkan menjadi salah satu Bandar udara internasional di Provinsi NTT. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 dimulai usaha perpanjangan dan pelebaran landasan pacu, sehingga nanti mampu melayani penerbangan internasional dengan menggunakan pesawat berbadan lebar.

Beberapa maskapai yang saat ini sudah melayani penerbangan dari dan ke Bandar Udara Komodo adalah Garuda Indonesia, Batik Air, Indonesia Air Asia, NAM Air, Citilink, Wings Air, Trans Nusa, dan Susi Air. Adapun rute penerbangannya antara lain penerbangan langsung dari dan menuju Jakarta, Surabaya, Bali, Kupang, Makassar dan beberapa kota kabupaten di Provinsi NTT seperti Bajawa, Ende, dan Maumere.

Di aspek transportasi laut, Kabupaten Manggarai Barat memiliki satu buah pelabuhan penumpang yang bisa disandari Kapal Penumpang PELNI, dan satu buah pelabuhan penyeberangan. Pembangunan pelabuhan multipurpose yang terletak di Wae Kelambu, Labuan Bajo sudah dimulai pada tahun 2020. Pelabuhan ini diharapkan dapat melayani arus lalu lintas logistik, bongkat muat container, kargo dan curah cair.

2.3.6.2. Hotel dan Restauran

Ketersediaan akomodasi untuk tempat tinggal sementara sekaligus berperan sebagai objek wisata untuk meningkatkan daya tarik tujuan wisata daerah. Ketersediaan restaurant melengkapi sarana akomodasi untuk menunjang

kebutuhan pokok masyarakat pendatang. Jumlah ketersediaan dan keterisian akomodasi hotel akan berbanding lurus dengan jumlah permintaan pasar, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam menilai daya saing suatu daerah. Berikut ini diuraikan perkembangan jumlah akomodasi hotel dari tahun 2016 hingga 2021.

Tabel 2. 142. Perkembangan Jumlah Akomodasi Hotel di Manggarai Barat Tahun 2016-2021

Akomodasi Hotel	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Hotel	50	72	97	97	116	78
Jumlah Kamar	801	1.272	1.691	1.698	1.978	1.825
Jumlah Tempat Tidur	1.292	2.660	3.579	3.605	4.299	2.928

Sumber: BPS dan Dinas Pariwisata Kab Manggarai Barat, 2022

Jumlah ketersediaan akomodasi hotel, kamar, dan tempat tidur terus mengalami peningkatan selama periode 2016 – 2020. Artinya terdapat perminataan pasar yang tinggi terhadap ketersediaan sarana akomodasi hotel di Kabupaten Manggarai Barat dalam periode 2016 – 2020. Peningkatan ini kemudian diikuti dengan penurunan jumlah hotel, kamar, dan tempat tidur pada tahun 2021. Penurunan jumlah hotel mencapai 32,7%, sementara penurunan jumlah kamar adalah 7,73%, dan penurunan jumlah tempat tidur mencapai 31,89% dalam kurun waktu 1 tahun. Pemberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat skala besar pada masa pandemi yang dimulai pada awal tahun 2020 telah mempengaruhi penurunan jumlah kunjungan wisata nasional maupun daerah. Kunjungan wisata yang menurun selama kurun waktu 2020 hingga 2021 menyebabkan sejumlah hotel terpaksa tutup.

Tabel 2. 143. Jumlah Hotel Berdasarkan Klasifikasi dan Jumlah Tenaga Kerjanya Tahun 2019

Klasifikasi	Jumlah	
	Hotel	Tenaga Kerja
Homestay	1	2
Wisma/penginapan	20	100
Nonbintang	67	953
Bintang 1	5	149
Bintang 2	1	80
Bintang 3	5	348
Bintang 4	2	285
Jumlah	**101**	**1.915**

Sumber: Dinas Pariwisata Kab Manggarai Barat, 2020

Data Dinas Pariwisata menyebutkan bahwa hingga 2019 jumlah restauran dan rumah makan di Manggarai Barat sebanyak 109 buah. Dari jumlah itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 731 orang yang terdiri dari 192 orang laki-laki dan 539 orang perempuan. Serapan tenaga kerja lokal untuk hotel dan restaurant harus ditingkatkan secara berkesinambungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.6.3. Telekomunikasi

Daya saing daerah juga dapat dilihat dari ketersediaan jaringan telekomunikasi. Data Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa dari total wilayah Manggarai Barat 9.450 km^2, luas wilayah yang sudah tercover jaringan telekomunikasi mencapai 90%. Berikut adalah data mengenai cakupan dan pengguna layanan telekomunikasi di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 144. Cakupan dan Pengguna Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020

Luas Wilayah Yang Tercoverage (Km2)	Luas Wilayah Keseluruhan (km2)	Cakupan Layanan Telekomunikasi
8.505,00	9.450	90,00%
Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	**Jumlah penduduk**	**Persentase penduduk yang menggunakan HP**
219.751	274.689	80
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	**Jumlah rumah tangga**	**Proporsi rumah tangga dengan akses internet**
49.621	57.699	86
Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	**Jumlah Rumah Tangga**	**Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi**
8.655	57.699	15

Sumber: Dinas Kominfo Kab Manggarai Barat, 2021

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang sudah mencapai 90% dari luas wilayah kabupaten. Kondisi ini mendukung masyarakat Manggarai Barat untuk melakukan komunikasi dan meningkatkan produktivitasnya. Hal ini terlihat dari

persentase dan proporsi masyarakat yang memiliki alat-alat komunikasi seperti HP, internet, dan komputer.

2.3.6.4. Tata Ruang

Kebijakan perencanaan spasial tertuang dalam dokumen tata ruang yang memuat rincian dan kebijakan rencana struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah. Dokumen tata ruang memuat ketentuan pemanaatan dan peruntukan ruang dalam konteks perencanaan. Pemanaatan dan peruntukan ruang harus memperhatikan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai ruang berinteraksi. Sehingga dalam dokumen rencana tata ruang berisi arahan dalam pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan kondisi nyaman, produktif, dan lestari (berkelanjutan).

Kebijakan tata ruang di Kabupaten Manggarai Barat tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 - 2041 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021. Arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Manggarai Barat terbagi menjadi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang berkaitan dengan pengaturan susunan sistem pusat kegiatan atau pusat permukiman dengan sistem jaringan sarana dan prasrana yang direncanakan untuk mengintegrasikan dan melayani kegiatan sosial ekonomi suatu wilayah. Pusat kegiatan diintegrasikan dengan sistem jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, maupun jaringan prasarana lainnya antar pusat permukiman sehingga terjadi interaksi fungsional antar daerah. Adapun struktur ruang Kabupaten Manggarai Barat dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

A. Sistem Pusat Permukiman

Sistem pusat permukiman Kabupaten Manggarai Barat merupakan simpul jaringan yang melayani berbagai kegiatan sosial, budaya, ekonomi, maupun administrasi di masing-masing daerah. Rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Manggarai Barat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang ditetapkan di Kawasan Labuan Bajo diarahkan memiliki fungsi pusat perdagangan dan jasa, pendidikan,

kesehatan, pengembangan permukiman perkotaan, pariwisata, serta pelayanan sosial ekonomi

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan di Wae Nakeng, Kecamatan Lembor
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan di Perkotaan Bari, Perkotaan Werang, Perkotaan Terang, dan Perkotaan Orong
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan di Pacar, Kecamatan Pacar; Lengkong Cepang, Kecamatan Lembor Selatan; Wersawe, Kecamatan Mbeliling; Tanjung Belong, Kecamatan Boleng; Benteng di Kecamatan Komodo; Ranggu di Kecamatan Kuwus Barat; Datak di Kawasan Welak; Maras di Kecamatan Lembor; Rekas di Kecamatan Mbeliling.

B. Sistem Jaringan Prasarana

Jaringan prasarana mengintegrasikan antara pusat permukiman dengan sektor kegiatan ekonomi daerah. Aksesbilitas yang baik akan meningkatkan arus pergerakan barang dan jasa antar simpul pusat kegiatan daerah. Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi jaringan transportasi yang berperan sebagai prasarana utama, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.

a) Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat meliputi lintasan perjalanan yang mengintegrasikan antar simpul kegiatan maupun antara simpul kegiatan dengan kawasan lain disekitarnya. Interaksi wilayah penting untuk menciptakan keterpaduan dan keselarasan aktivitas ekonomi antar wilayah. Sistem jaringan transportasi darat dikembangkan melalui jaringan jalan yang terkelaskan berdasarkan fungsinya, kelas jalan yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat antara lain sebagai berikut:

1. Jalan arteri primer, diarahkan untuk melayani pergerakan dengan kriteria sebagai berikut:
   - Menghubungkan antar PKN serta antar PKN dan PKW
   - Menghubungkan PKN dan PKW dengan pusat layanan primer/sekunder/tersier
   - Melayani angkutan utama
   - Melayani perjalanan dengan jarak tempuh jauh

- Lalu-lintas berkecepatan rata-rata tinggi

2. Jalan kolektor primer, diarahkan untuk melayani kriteria pergerakan sebagai berikut:
   - Menghubungkan antar PKW serta antara PKW dengan PKL
   - Melayani angkutan pengumpul
   - Melayani perjalanan dengan jarak tempuh sedang
   - Kecepatan lalu-lintar rata-rata sedang
3. Jalan lokal primer, diarahkan untuk melayani pergerakan dengan kriteria sebagai berikut:
   - Menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan; ibukota kabupaten dengan PKL dan PPL; serta antar menghubungkan antar ibukota kecamatan
   - Menghubungkan PKW dengan PPK dan PPL
   - Menghubungkan PPK dengan PPL
   - Menghubungkan antar PPL
   - Melayani angkutan setempat
   - Melayani perjalanan dengan jarak tempuh dekat
   - Kecepatan lalu-lintas rata-rata rendah
4. Jalan strategis kabupaten, dikembangkan untuk:
   - Menghubungkan pusat kegitan dengan lokasi wisata
   - Menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, lokasi wisata, dan sarana kesehatan
   - Melayani perjalanan jarak dekat
   - Rata-rata kecepatan rendah

Trayek transportasi darat disertai dengan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang menjadi pusat pengumpul penumpang dan pertukaran moda transportasi. Jaringan LLAJ di Kabupaten Manggarai Barat adalah terminal tipe C yang tersebar pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Lembor, Kecamatan Sanonggoang, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Mbeliling, dan Kecamatan Boleng. Terminal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat berlokasi di kawasan PPL yang merupakan pusat permukiman skala pedesaan. Artinya sebaran terminal direncanakan untuk melayani angkutan pada level pedesaan dan antar Kawasan PPL.

b) Sistem Jaringan Transportasi Air

Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan, transportasi air diandalkan untuk menjamin keberlangsungan pergerakan barang dan jasa antar kawasan dalam regional provinsi. Sistem jaringan transportasi air mencakup tata pelabuhan sebagai simpul pengumpul penumpang dan barang serta mencakup jalur pelayaran/penyeberangan sebagai lintasan perjalanan. Jalur lintasan transportasi air dapat melalui sungai, danau, dan laut/selat. Sistem jaringan transportasi untuk kepentingan angkutan melalui sungai dan danau belum tersedia di Kabupaten Manggarai Barat. Sarana lalu lintas penyeberangan antar provinsi di Kabupaten Manggarai Barat dilayani oleh Pelabuhan ASDP Labuan Bajo, sedangkan penyeberangan lintas kabupaten/kota dilayani oleh Pelabuhan Labuan Bajo. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran perlintasan perairan, Kabupaten Manggarai Barat memberlakukan tiga jenis alur pelayaran yang berbeda. Alur pelayaran di Kabupaten Manggarai Barat terbagi atas:

1. Alur pelayaran umum dan perlintasan, yaitu terdiri dari:
   - Alur pelayaran dan perlintasan Labuan Bajo
   - Alur pelayaran dan perlintasan Wae Kelambu
   - Alur pelayaran dan perlintasan Pulau Komodo
2. Alur pelayaran masuk Pelabuhan, terdiri dari:
   - Pelabuhan Labuan Bajo
   - Pelabuhan Wae Kelambu
3. Alur pelayaran wisata, terdiri dari:
   - Labuan Bajo
   - Labuan Bajo-Rinca-Komodo dan sekitarnya
   - Labuan Bajo-Boleng dan sekitarnya
   - Labuan Bajo-Tana Mori
   - Labuan Bajo-Tana Naga

c) Rencana Sistem Transportasi Udara

Bandar udara (bandara) merupakan sarana transportasi udara yang memfasilitasi perpindahan barang dan jasa maupun sebagai tempat transit intra dan antarmoda transportasi. Sarana transportasi udara yang dimiliki Kabupaten Manggarai Barat adalah Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo.

C. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi menyalurkan energi untuk menunjang kebutuhan energi masyarakat maupun energi yang dibutuhkan dalam cakupan kawasan. Sistem jaringan infrastruktur energi listrik di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari sarana pembangkit dan sarana transmisi tenaga listrik. Jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik yang dimiliki Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 145. Sebaran Sistem Jaringan Pembangkit Tenaga Listrik di Manggarai Barat tahun 2020

Kecamatan	PLTD	PLTMG	PLTMH	PLTS	PLTP	PLTB	PLTAL	PLTSa
Boleng	1	1	0	2	0	0	0	0
Komodo	3	0	0	3	0	0	1	1
Kuwus	1	0	0	0	0	0	0	0
Lembor	1	0	0	0	0	0	0	0
Sano Nggoang	0	0	0	0	1	0	0	0
Welak	0	0	1	0	0	0	0	0
Mbeliling	0	0	1	0	0	0	0	0
Macang Pacar	0	0	0	1	0	0	0	0
Lembor Selatan	0	0	0	1	0	1	0	0
Total	**6**	**1**	**2**	**7**	**1**	**1**	**1**	**1**

Sumber: PLN ULPP Labuan Bajo, 2021

Infrastruktur pembangkit tenaga listrik hanya dimiliki 9 kecamatan dari 11 kecamatan yang di Kabupaten Manggarai Barat. Jenis pembangkit tenaga listrik yang dominan terdapat di Kabupaten Manggarai Barat adalah PLTD dan PLTS.

2. Pola Ruang

Pola ruang berisi rencana kebijakan alokasi ruang untuk memberikan batasan kegiatan dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan. Alokasi ruang ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung dan daya tampung suatu kawasan. Pola ruang terdiri dari kawasan lindung yang berperan melindungi kawasan dengan fungsi ekologis penting dan kawasan budidaya yang diarahkan sebagai ruang untuk dibudidayakan. Rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Manggarai Barat diuraikan sebagai berikut ini:

a) Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas kawasan lindung badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya, kawasan lindung setempat, kawasan konservasi, dan kawasan ekosistem mangrove. Rincian luas kawasan lindung menurut jenis kawasannya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 146. Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

Kawasan Lindung	Luas Kawasan (Ha)
Kawasan Konservasi	59.561
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	53.858
Kawasan Perlindungan Setempat	14.001
Kawasan Ekosistem Mangrove	2.132
Badan Air	1.340
Total Luas	**130.892**

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No 11/2021

Kawasan Lindung membentang seluas 130.892 Ha atau meliputi 41,83% dari wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan lindung difungsikan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup wilayah melalui upaya konservasi dan zonasi. Kawasan dengan area terluas adalah Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yang meliputi dan Kawasan Konservasi dengan rincian cakupan 17,21% dan 19,03% dari luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan Konservasi di Kabupaten Mangdi Kecamatan Komodo merupakan satu-satunya kawasan lindung dengan fungsi konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (KSA) yaitu Cagar Alam Wae Wuul dan kawasan pelestarian alam (KPA) yaitu Taman Nasional Komodo dan Kawasan Taman Buru.

Kawasan dengan fungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berperan untuk menaungi ekosistem lingkungan kawasan hutan lindung. Secara geografis, kawasan hutan lindung berada pada morfologi perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng rata-rata 8^{o} – 55^{o}. Penetapan pola ruang kawasan ini penting untuk mencegah erosi, menjaga stabilitas lereng, dan dapat menjaga fungsi ekologis sebagai area tangkapan air serta menjaga siklus nutrisi tanah.

Kawasan perlindungan setempat meliputi 4,47% luasan yang difungsikan untuk menjaga kelestarian situs sumber-sumber air. Kawasan ini mengalokasikan ruang disekitarnya untuk dijadikan kawasan perlindungan yang bertujuan untuk

menjaga fungsi ekologis alami perairan. Sehingga ditetapkan kebijakan ruang sempadan dalam radius tertentu di sekitar objek sumber air. Pemanfaatan lahan dalam ruang sempadan hanya diperuntukan bagi kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pengendalian.

Kawasan ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai penyimpan cadangan karbon dan melindungi pesisir dari abrasi serta ancaman bahaya tsunami Kawasan ekosistem mangrove meliputi area seluas 0,68% dari wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan ekosistem mangrove meliputi area seluas 0,68% dari wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Secara geomorfologis, Kabupaten Manggarai Barat didominasi bentuk lahan vulkanik sehingga rata-rata garis pantai berbentuk tebing terjal (*cliff*).

b) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari kawasan hutan produksi, permukiman, pertanian, perikanan, pertambangan energi, peruntukan industri, dan transportasi. Kawasan budidaya mencakup luasan 181.978 Ha atau 58,16% dari wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Rincian luasan masing-masing kawasan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 147. Kawasan Budidaya Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

Kawasan Budidaya	Luas Kawasan (Ha)
Kawasan Hutan Produksi	17.614
Kawasan Pertanian	141824
Kawasan Perikanan	102
Kawasan Pertambangan dan Energi	186
Kawasan Peruntukan Industri	608
Kawasan Pariwisata	8.651
Kawasan Permukiman	12853
Kawasan Transportasi	140
Total Luas	**181.978**

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No 11/2021

Jenis Kawasan budidaya dengan liputan area terluas adalah kawasan pertanan dengan persentase luasan mencapai 45,33% dari wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan pertanian Kabupaten Manggarai Barat dibagi menjadi empat jenis kawasan yaitu kawasan tanaman pangan seluas 19.119 Ha; kawasan hortikultura seluas 47.727 Ha; kawasan perkebunan seluas 71.546 Ha; dan kawasan peternakan

3.432 Ha. Kawasan pertanian tersebar di seluruh kecamatan dengan cakupan luasan terbesar ada di Kecamatan Lembor Selatan.

Kawasan peruntukan permukiman hanya mencakup persentase luasan 4,1%. Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan seluas 7.333 Ha dan permukiman perdesaan seluas 5.520 Ha. Luas kawasan permukiman yang rendah menandakan masih rendahnya pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta masih tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur fisik.

Kawasan hutan produksi memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan baik berupa hasil kayu maupun non-kayu. Persentase Kawasan ini hanya meliputi 5,6% dari wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan hutan produksi hanya berada di lima kecamatan yaitu Kecamatan Komodo, Boleng, Welak, Mbeliling, dan Pacar dengan cakupan terluas berada di Kecamatan Boleng.

Kawasan pertambangan dan energi bersumber dari panas bumi, minyak dan gas, serta tenaga surya. Kawasan ini berlokasi spesifik dan menduduki 0,05% wilayah. Sedangkan area kawasan industri menduduki 0,19% wilayah. Sebagai wilayah kepulauan, hasil perikanan merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan perikanan memiliki fungsi utama untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya perikanan dan kelautan. Kawasan perikanan memiliki persentase luasan terendah yaitu 0,03% serta hanya berada di Kecamatan Komodo dan Kecamatan Lembor Selatan. Selain hasil laut, karakteristik wilayah Manggarai Barat diperuntukan sebagai destinasi wisata alam dan buatan dengan persentase luasan 2,7% wilayah.

2.3.7. Fokus Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu strategi yang selalu diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Strategi ini berfokus pada meningkatkan daya saing regional yang menekankan pada produktivitas setiap penduduknya. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan pengaruh yang meluas pada terhadap pembangunan suatu daerah.

Tabel 2. 148. Kondisi Sumber Daya Manusia Kab Manggarai Barat Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk	269.029	274.689	264.437	266.522	273.729
2.	Jumlah penduduk miskin	48.530	49.230	49.400	51.150	49.950
3.	Tingkat pengangguran terbuka	1,19	2,42	3,72	4,94	4,91
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	62,58	63,50	63,89	64,17	64,92

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2023

Jumlah penduduk yang cukup tinggi mengggambarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Barat terus meningkat sejak tahun 2018 hingga 2022 seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang fluktuatif. Capaian IPM secara makro juga diikuti dengan dengan penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran walaupun tidak begitu signifikan. Tercatat jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka menurun pada tahun 2022, masing-masing sebesar 1,17 persen dan 0,03 persen. Peningkatan jumlah penduduk perlu dipertahankan dengan aspek kesejahteran masyarakat terkait karena pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi angka kemiskinan dan pengangguran.

2.3.7.1. Rasio Ketergantungan

Kualitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memberikan kemampuan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah cukup tinggi, maka tanggungan masyarakat angkatan kerja produktif cukup besar. Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat ketergantungan produktivitas masyarakat. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk tidak produktif dan jumlah penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan di suatu daerah, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif.

Tabel 2. 149. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021

No	Kecamatan	0-14	15-64	>=65	Dependency Ratio
1	Macang Pacar	4706	11105	594	47.7
2	Kuwus	3762	9577	812	47.8
3	Lembor	9896	23347	1278	47.9
4	Sanonggoang	3748	10204	838	44.9
5	Komodo	16691	37140	1755	49.7
6	Boleng	5453	13312	794	46.9
7	Welak	6528	15303	980	49.1
8	Ndoso	5630	13994	956	47.1
9	Lembor Selatan	7246	17019	1046	48.7
10	Mbeliling	3802	9752	770	46.9
11	Pacar	5127	11631	653	49.7
12	Kuwus Barat	3081	7363	629	50.4
	T o t a l	75.67	179.747	11.105	48.3

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Manggarai Barat 2022

Terdapat peningkatan rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Barat yang semula 47,8 pada tahun 2020 menjadi 48.3 pada tahun 2021. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa seratus orang yang tergolong dalam usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 48 orang yang tergolong non-produktif. Kuwus Barat menjadi kecamatan dengan tingkat ketergantungan tertinggi, sedangkan Sanonggoang menjadi kecamatan dengan tingkat ketergantungan paling rendah. Meski demikian, produktivitas dari angkatan kerja juga dapat dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan. Angkatan kerja lulusan SD ke bawah mengambil proporsi terbesar hingga 51 persen, dilanjutkan lulusan SMA dengan 20 persen, lulusan SMP 18 persen, dan lulusan universitas 11 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa tidak seluruh penduduk usia produktif mampu secara efektif menanggung kebutuhan penduduk yang tergolong non-produktif mengingat daya saing yang cukup rendah.

2.3.7.2. Angka Kriminalitas

Kriminalitas merupakan salah satu masalah sosial yang timbul akibat kualitas sumber daya manusia yang rendah. Tindak kejahatan secara umum dimulai dari angka pengangguran yang tinggi. Penduduk yang tidak bekerja cenderung tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya sehari hari. Tidak hanya karena aspek

ekonomi, rendahnya pendidikan juga berpengaruh pada tingginya angka kriminalitas karena tidak dibekalinya pelaku dengan pemahaman terkait moral dan hukum. Angka kriminalitas di suatu daerah menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan keamanan dalam bermasyarakat.

Tabel 2. 150. Tindak Kriminal di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan	157	215	178	204	203
2	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	129	153	134	125	92
3	Jumlah penduduk	263.207	269.029	274.689	264.437	266.522
4	Angka kriminalitas	0,06	0,08	0,06	0,07	0,076

Sumber: Manggarai Barat Dalam Angka, 2022

Tren angka kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat cenderung fluktuatif sejak tahun 2017 hingga 2021. Dalam rentang waktu yang sama, rata-rata jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan mencapai 191 laporan per tahunnya. Angka ini merupakan suatu capaian yang buruk mengingat penyelesaian laporan tindak kejahatan juga terus ikut menurun. Penyelesaian tindak kejahatan hanya sebesar 45 persen pada tahun 2021, mengingat dua tahun sebelumnya tingkat penyelesaiannya masih di angka 75 persen. Walaupun angka kriminalitas terbilang kecil dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan, namun upaya preventif harus tetap dilakukan untuk mencegah lonjakan yang terjadi pada tahun 2018. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pengembangan sumber daya manusia seperti pembinaan keterampilan dan sosialisasi tentang aturan yang berlaku.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi analisis keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun 2018-2022 dan menyusun perubahan kerangka pendanaan untuk tahun 2024-2026. Hasil analisis digunakan sebagai basis perhitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024-2026. Data yang digunakan pada bab ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2021.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Capaian tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk periode 2024-2026.

3.1.1. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah

Analisis kesehatan fiskal daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kinerja keuangan daerah masa lalu. Analisis ini menggambarkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kesehatan fiskal daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat diketahui pada bagian berikut.

3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

Realisasi PAD terhadap pendapatan daerah merupakan instrumen untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin baik tingkat kemandirian daerah. Proporsi realisasi PAD terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 1 Proporsi realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%)

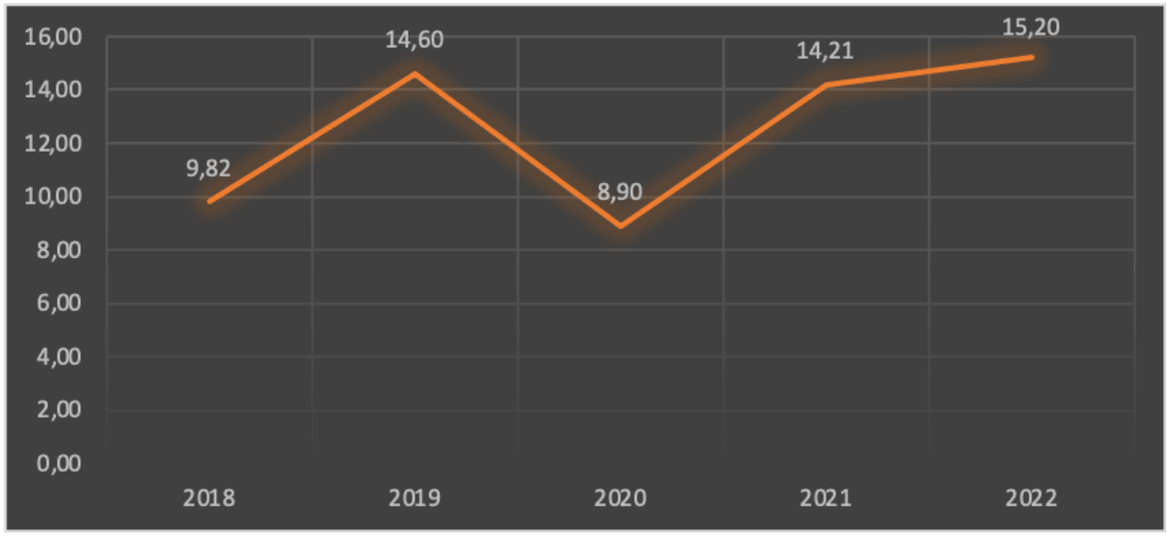

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Proporsi realisasi PAD terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat. Peningkatan proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah paling tinggi yaitu sebesar 5,31% pada tahun 2021, sedangkan proporsi turun paling drastis sebesar -5,7% pada tahun 2020.

3.1.1.2. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Proporsi realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah merupakan indikator untuk mengukur laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi laju pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semakin baik kinerja keuangan suatu daerah. Proporsi realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 2 Proporsi Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%)

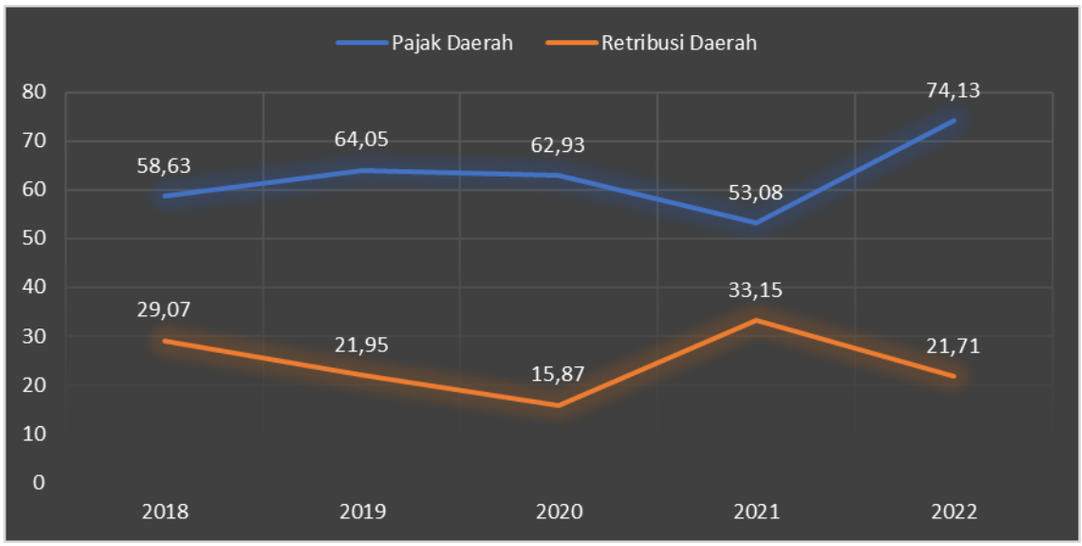

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Pajak Daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Daerah lebih besar dibandingkan dengan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022, terutama pada tahun 2018-2020, di mana selisih kontribusinya cukup jauh (sekitar 39%-47%). Namun demikian, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah lebih tinggi sekitar 20% jika dibandingkan dengan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2022 Pajak Daerah memberikan kontribusi hampir 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam konteks meningkatkan Pendapatan Daerah melalui ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama tahun 2018-2022.

3.1.1.3. Realisasi total Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Realisasi total Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Realisasi total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap realisasi total belanja daerah dan pembiayaan daerah berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam merealisasikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Hal ini digunakan untuk mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Semakin tinggi tingkat realisasinya, maka semakin baik

kemampuan keuangan daerah. Dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat, kondisi ini dapat diketahui melalui grafik berikut.

Grafik 3. 3 Proporsi Realisasi Total Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Realisasi Total Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%)

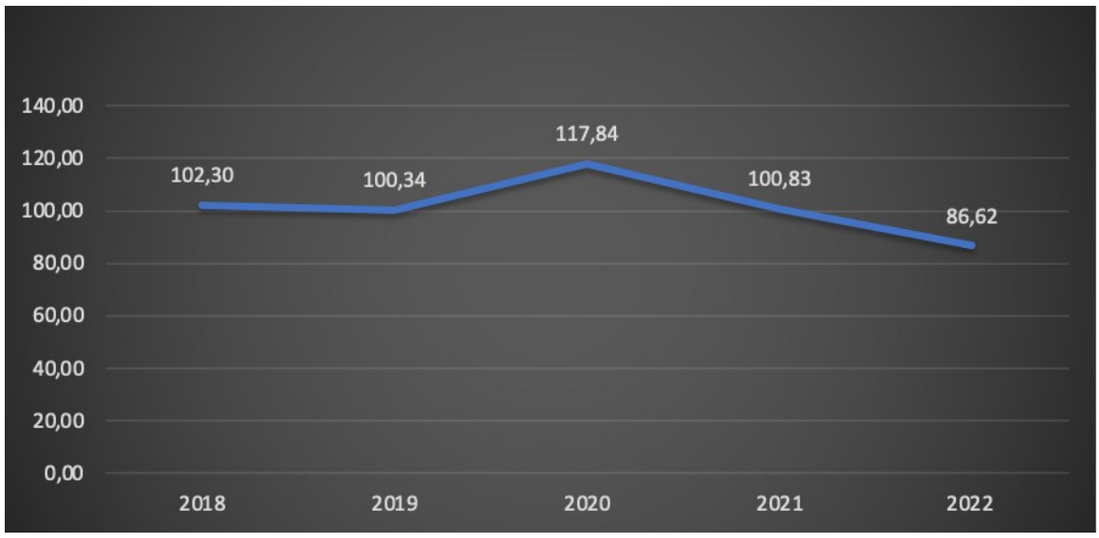

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Secara umum, proporsi total Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan terhadap total Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 cenderung turun, meskipun sempat meningkat pada tahun 2019-2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan dalam kemampuan mendanai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan terutama pada tahun 2020-2021 dan 2021-2022.

3.1.1.4. Realisasi Belanja Modal terhadap Realisasi total Belanja

Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja merupakan indikator untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Semakin tinggi realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah maka semakin baik. Proporsi realisasi Belanja Modal terhadap realisasi total Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 4 Proporsi realisasi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

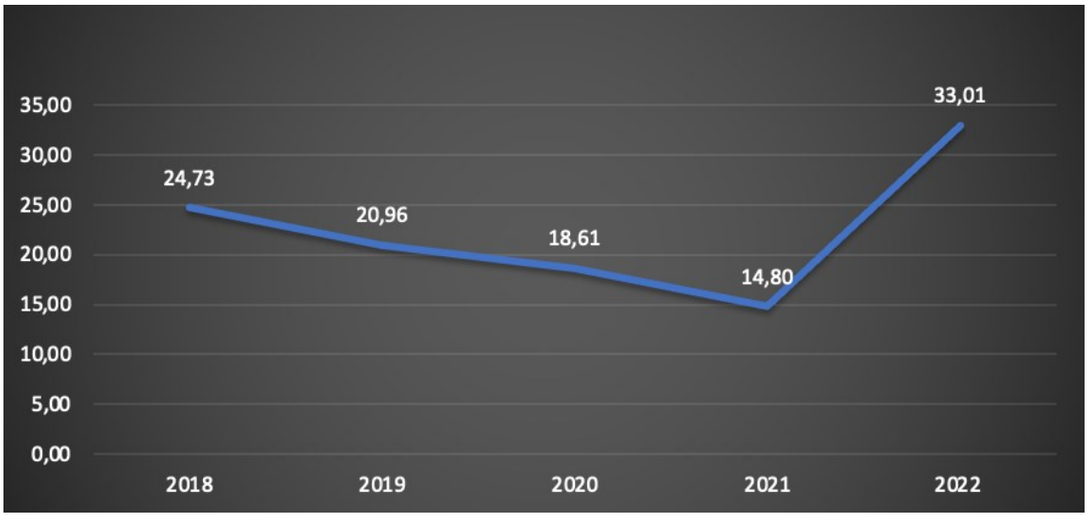

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2021 mengalami penurunan, namun proporsinya meningkat secara drastis sebesar 18,21% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengalokasikan anggaran Belanja Daerah sebagian besar untuk Belanja Modal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.1.5. Realisasi Belanja Pegawai terhadap Realisasi total Belanja Daerah

Analisis realisasi Belanja Pegawai terhadap realisasi total Belanja Daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi belanja pegawai terhadap total belanja di suatu daerah. Semakin tinggi proporsi belanja pegawai, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah tersebut semakin buruk. Jika kondisi ini terjadi, maka belanja untuk kebutuhan masyarakat semakin berkurang. Proporsi realisasi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat diketahui melalui grafik berikut.

Grafik 3. 5 Proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%)

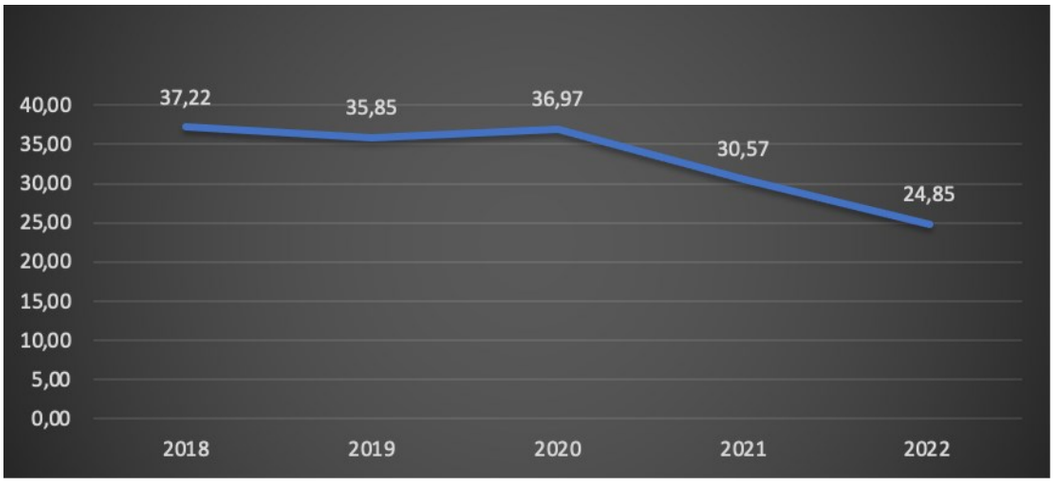

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 mengalami tren cenderung turun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan belanja di Kabupaten Manggarai Barat semakin baik terutama pada tahun 2021 dan 2022. Berkurangnya proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah pada tahun tersebut dapat mengindikasikan bahwa alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk belanja kebutuhan masyarakat semakin meningkat atau semakin besar.

3.1.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini berisi analisis kinerja pelaksanaan APBD berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022. Analisis dilakukan sesuai struktur APBD yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Hasil analisis ini digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan APBD periode 2024-2026.

3.1.2.1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 6 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 (%)

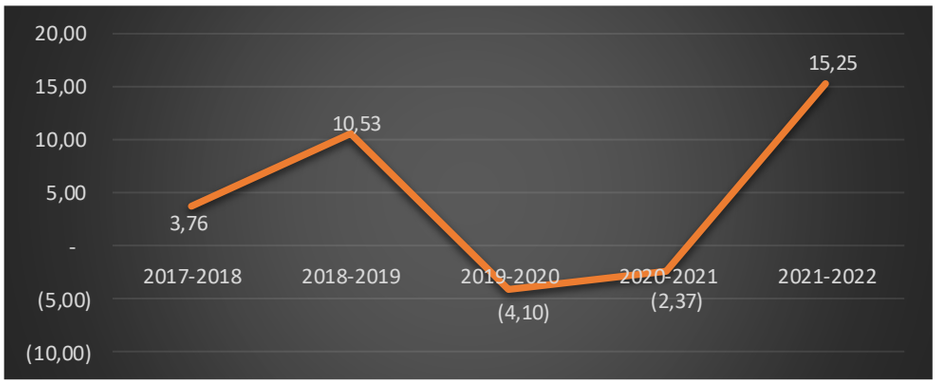

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 14,63% pada tahun 2019-2020, namun dapat tumbuh perlahan sebesar 1,73% pada tahun 2020-2021. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID yang menghantam perekonomian hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Manggarai Barat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi meningkat secara drastis sebesar 17,62% pada tahun 2021-2022.

Analisis kinerja pendapatan daerah juga dapat dilihat dari kontribusi tiap komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Rata-rata pertumbuhan tiap komponen Pendapatan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 1 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**1.052.883.489.640**	**1.163.705.988.098**	**1.115.988.697.972**	**1.089.504.348.685**	**1.255.655.721.052**	**4,83**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**103.347.460.592**	**169.954.164.787**	**99.269.779.027**	**154.767.294.152**	**190.819.869.482**	**25,51**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	60.588.917.361	108.858.742.225	62.467.994.295	82.144.344.494	141.461.757.404	35,19
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	30.046.209.951	37.298.311.570	15.756.120.455	51.310.800.176	41.421.000.264	43,19
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.439.744.275	4.168.713.839	3.809.587.236	4.012.182.992	2.720.173.212	(10,40)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.272.589.005	19.628.397.153	17.236.077.041	17.299.966.490	5.216.938.603	13,90
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**915.035.837.421**	**932.282.238.110**	**946.692.676.409**	**868.022.860.854**	**1.004.830.794.004**	**2,72**
1.2.1	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN**	**766.724.359.546**	**757.465.726.320**	**722.956.058.622**	**677.704.075.749**	**834.424.885.187**	**2,78**
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.705.767.005	7.696.544.335	8.395.261.296	13.263.365.170	11.177.907.051	9,94

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan (%)
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum	506.495.526.000	532.878.109.000	498.893.859.000	495.133.465.000	495.899.733.992	(0,44)
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	176.979.649.072	131.714.524.602	128.938.198.426	169.307.245.579	257.974.030.469	14,00
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	74.543.417.469	85.176.548.383	86.728.739.900	0	69.373.213.675	(27,97)
1.2.2	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA**	**127.893.447.000**	**147.987.069.000**	**200.488.106.000**	**171.176.377.000**	**145.840.976.000**	**5,44**
1.2.1.01.05	Dana Desa	127.893.447.000	147.987.069.000	200.488.106.000	171.176.377.000	145.840.976.000	5,44
1.3	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**20.418.030.875**	**26.829.442.790**	**23.248.511.787**	**19.142.408.105**	**24.564.932.817**	**7,18**
1.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	20.418.030.875	26.829.442.790	23.248.511.787	19.142.408.105	24.564.932.817	7,18
1.4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**68.697.966.851**	**88.299.027.991**	**70.026.242.535**	**66.714.193.679**	**60.005.057.566**	**(1,74)**
1.4.1	Pendapatan Hibah	34.500.191.627	61.469.585.201	26.626.188.237	27.742.144.046	14.536.876.920	(5,48)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan (%)
1.4.2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**34.197.775.224**	**26.829.442.790**	**43.400.054.298**	**38.972.049.633**	**45.468.180.646**	**11,67**

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 yaitu sebesar 4,83%. Komponen Pendapatan Daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,51% dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 12,54% pada tahun 2018-2022. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,18%, sedangkan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer hanya sebesar 2,72% pada tahun yang sama. Meskipun pertumbuhan Pendapatan Transfer selama tahun 2018-2022 tergolong rendah, Pendapatan Transfer memiliki rata-rata proporsi (kontribusi) terhadap total Pendapatan Daerah tertinggi dibandingkan dengan komponen lainnya yaitu sebesar 82,31%. Komponen Pendapatan Daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling rendah yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (-1,74%).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari ketiga komponen pembentuk Pendapatan Daerah, PAD memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Kondisi ini didukung oleh adanya kontribusi (proporsi) dari masing-masing komponen pembentuk PAD. Rincian proporsi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Manggarai Barat dapat diketahui pada gambar berikut.

Grafik 3. 7 Proporsi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

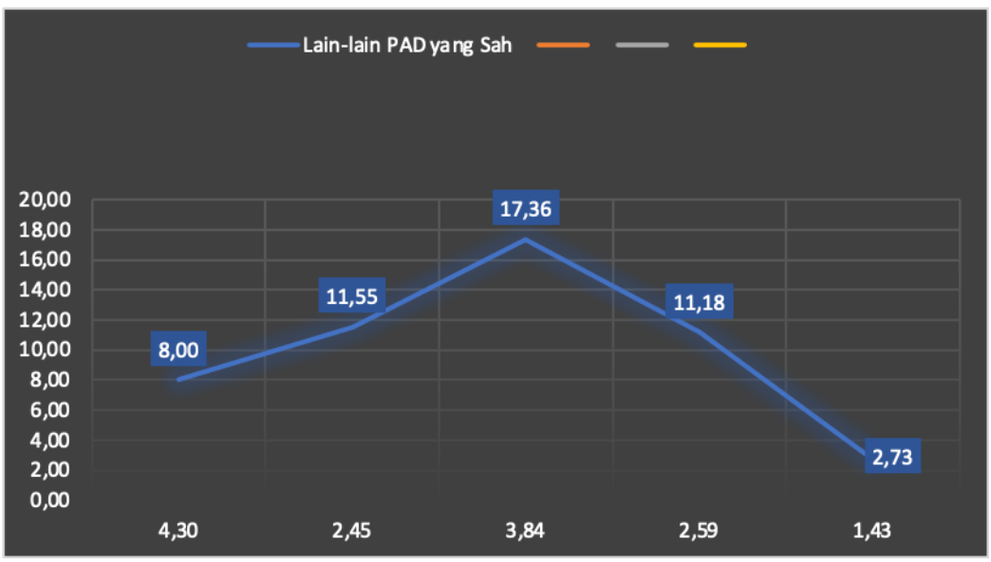

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Secara umum, proporsi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Manggarai Barat memiliki tren pertumbuhan fluktuatif cenderung turun pada tahun

2018-2022, kecuali Pajak Daerah yang pertumbuhannya naik di tahun 2022. Dari keempat komponen PAD tersebut, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi paling besar terhadap total PAD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022. Namun demikian, proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD cenderung turun. Hal ini disebabkan oleh minimnya data sumber-sumber PAD terutama Retribusi Daerah, sehingga ekstensifikasi dan intensifikasi sumber PAD ini belum dapat dicapai secara optimal. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah menempati posisi ketiga dalam memberikan kontribusi terhadap total PAD, sedangkan komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling sedikit terhadap total PAD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih berpengaruh terhadap kapasitas keuangand daerah Kabupaten Manggarai Barat pada periode tersebut. Proporsi atau kontribusi masing-masing komponen Dana Perimbangan terhadap total Dana Perimbangan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat diketahui pada grafik berikut.

Grafik 3. 8 Proporsi komponen Dana Perimbangan terhadap total Dana Perimbangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

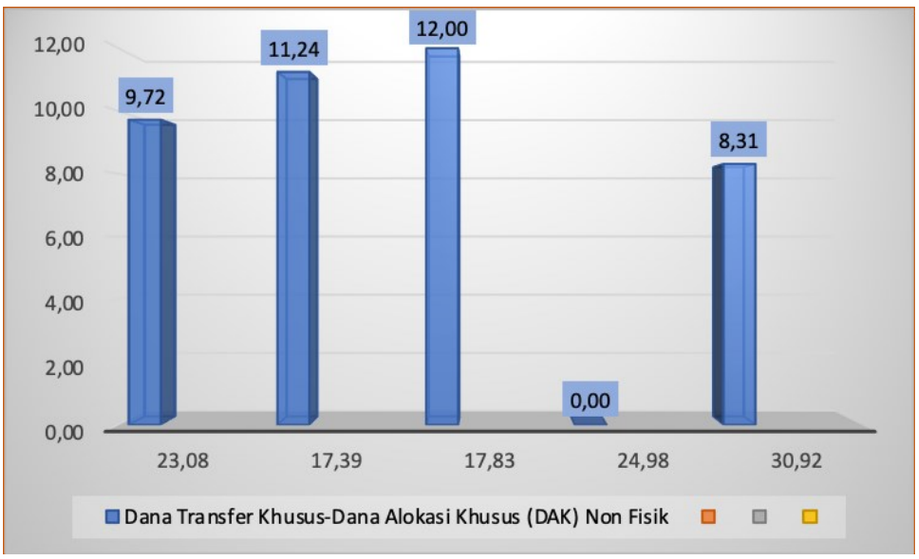

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Komponen Dana Perimbangan yang memiliki kontribusi paling besar terhadap total Dana Perimbangan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), kemudian diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK non Fisik. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki kontribusi paling kecil terhadap total Dana Perimbangan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022. DAU berkontribusi paling tinggi terhadap total Dana Perimbangan yaitu sebesar 73,06% pada tahun 2021, sedangkan DAK Fisik memberikan kontribusi terhadap total Dana Perimbangan paling tinggi sebesar 30,92% pada tahun 2022. Sementara itu, DAK non Fisik memiliki kontribusi terhadap total Dana Perimbangan tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,00%, sedangkan DBH berkontribusi paling besar terhadap total Dana Perimbangan sebesar 1,96% pada tahun 2021.

DAK Fisik tahun 2022 (reguler dan penugasan) terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Konektivitas, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Irigasi, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peningkatan proporsi DAK pada tahun 2022 bertujuan untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai satu dari lima lokus Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Salah satu mandat pemerintah pusat dalam bidang kesehatan adalah peningkatan infrastruktur kesehatan melalui pembangunan RSUD Komodo yang merupakan agenda prioritas dalam transformasi layanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Kontribusi komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. 9 Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Secara umum, komponen yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap total Lain-lain Pendapatan yang Sah di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 yaitu Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali tahun 2019 di mana Pendapatan Hibah memiliki kontribusi terhadap total Lain-lain Pendapatan yang Sah lebih besar dibandingkan dengan komponen Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 69,92%. Jika dilihat dari tren proporsi kedua komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah, Pendapatan Hibah memiliki tren cenderung turun, sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan cenderung naik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Lain-lain Pendapatan yang Sah belum stabil.

3.1.2.2. Belanja Daerah

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Gambaran kondisi pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan (%)
2	**BELANJA**	**1.027.576.085.842**	**1.159.526.877.711**	**940.229.166.238**	**1.099.242.832.552**	**1.494.257.748.969**	11,69
2.1	**BELANJA OPERASI**	**611.401.964.379**	**702.877.169.616**	**734.780.828.142**	**720.906.686.316**	**789.393.833.826**	6,78
2.1.1	Belanja Pegawai	382.412.718.423	415.668.489.132	347.603.587.058	336.092.253.190	371.273.510.538	(0,13)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	216.191.676.662	274.059.110.984	329.233.684.605	374.782.619.166	392.897.335.453	16,39
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	7.038.707.835	
2.1.4	Belanja Hibah	6.188.569.294	10.438.627.000	56.359.425.801	10.031.813.960	18.184.280.000	126,91
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.609.000.000	2.710.942.500	1.584.130.677	0	0	(66,85)
2.2	**BELANJA MODAL**	**254.087.794.413**	**242.995.865.618**	**174.969.249.200**	**162.697.188.838**	**493.263.439.543**	40,95
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.354.440.000	1.630.903.683	213.846.175	0	0	(55,49)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Bangunan	40.914.711.000	37.237.191.150	35.549.809.923	26.156.043.181	38.845.232.335	2,14
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.920.516.786	60.860.526.487	56.870.290.347	43.703.403.403	159.623.544.220	58,07
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi	142.830.247.385	137.809.246.154	78.103.701.205	89.642.030.454	292.362.220.356	48,52
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.067.879.242	5.457.998.144	4.231.601.550	3.195.711.800	2.432.442.632	(20,22)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan (%)
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.282.916.845**	**2.292.267.099**	**30.479.088.896**	**3.890.479.982**	**3.173.879.600**	269,38
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.282.916.845	2.292.267.099	30.479.088.896	3.890.479.982	3.173.879.600	269,38
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**188.967.731.143,00**	**211.361.575.378,00**	**210.815.854.117**	**211.748.477.416**	**208.426.596.000**	2,62
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.705.767.005,00	8.561.116.800,00	9.828.222.917	11.948.845.980	12.067.494.600	8,93
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	180.261.964.138,00	202.800.458.578,00	200.987.631.200	199.799.631.436	196.359.101.400	2,32
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**70.700.990.881**	**73.609.541.746**	**72.798.534.633**	**18.766.015.547**	**251.560.815.272**	292,33
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**70.700.990.881**	**73.609.541.746**	**77.798.534.633**	**37.766.015.547**	**256.560.815.272**	134,42
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (penggunaan SiLPA)	70.700.990.881	73.549.840.746	77.788.652.133	37.766.015.547	9.027.531.680	
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	59.701.000	9.882.500	0	247.533.283.592	(91,72)
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**19.000.000.000**	**5.000.000.000**	35,44
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0	0	5.000.000.000	19.000.000.000	5.000.000.000	35,44
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Secara umum, pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 mengalami tren fluktuatif cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,69%. Belanja Daerah turun secara drastis sebesar 18,91% pada tahun 2020-2021, namun kembali melonjak tajam sebesar 16,91% pada tahun 2021-2022. Kondisi ini disebabkan adanya lonjakan pengeluaran Belanja Modal sebesar 203,18% pada tahun 2022 terutama untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

3.1.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang wajib dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis terhadap pembiayaan daerah digunakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun sebelumnya terhadap surplus maupun defisit belanja daerah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan daerah di masa mendatang. Gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan (%)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**70.700.990.881**	**73.609.541.746**	**72.798.534.633**	**18.766.015.547**	**251.560.815.272**	**226.97**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**70.700.990.881**	**73.609.541.746**	**77.798.534.633**	**37.766.015.547**	**256.560.815.272**	**100.18**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (penggunaan SiLPA)	70.700.990.881	73.549.840.746	77.788.652.133	37.766.015.547	9.027.531.680	
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	59.701.000	9.882.500	0	247.533.283.592	

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata pertumbuhan (%)
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**19.000.000.000**	**5.000.000.000**	**35.44**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0	0	5.000.000.000	19.000.000.000	5.000.000.000	**35.44**
3.2.2	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Sumber: LRA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 memiliki tren fluktuatif cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 226,97%. Kondisi ini disebabkan karena adanya lonjakan Penerimaan Pinjaman Daerah hingga mencapai Rp247,5 Miliar pada tahun 2022.

3.1.3. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan gambaran posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan dana ekuiditas. Analisis Neraca Daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas. Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4. Rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	**ASET**						
2	**ASET LANCAR**						
3	Kas di Kas Daerah	67.268.988.625,77	70.444.829.845,81	67.171.323.425,00	31.727.119.006,67	7.186.468.649,34	-32,51
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	50.000,00	1.882.500,00	191.854.525,00	20.800.873,00	0,00	4555,77
5	Kas di Bendahara Penerimaan	170.077.468,00	380.459.090,00	822.932.503,00	149.160.225,22	392.513.405,32	80,32
6	Kas JKN	1.639.447.811,00	1.635.283.761,00	437.357.451,00	1.443.017.482,43	450.031.592,17	21,90
7	Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.898.539.502,96	1.271.749.907,91	9.486.514.693,95	4.745.852.163,20	1.110.657.121,08	121,59
8	Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00	20.187.583.213,00	0,00	135.252.000,00	
9	Piutang Pajak Daerah	7.014.889.818,84	11.727.757.550,84	17.803.580.364,70	23.589.196.104,01	26.797.708.169,72	41,27
10	Penyisihan Piutang Pajak	(1.707.134.308,57)	(3.110.324.557,39)	(4.978.681.507,54)	(7.634.614.037,73)	(9.813.002.254,71)	56,04
11	Piutang Pajak Netto	5.307.755.510,27	8.617.432.993,45	12.824.898.857,16	15.954.582.066,28	16.984.705.915,01	35,51
12	Piutang Retribusi Daerah	1.304.211.193,00	635.910.064,00	2.353.449.733,00	1.739.129.293,00	2.686.592.293,00	61,81
13	Penyisihan Piutang Retribusi	(280.452.245,50)	(309.709.483,00)	(349.912.645,50)	(532.005.135,50)	(581.022.648,00)	21,17
14	Piutang Retribusi Netto	1.023.758.947,50	326.200.581,00	2.003.537.087,50	1.207.124.157,50	2.105.569.645,00	120,19
15	Piutang Lainnya	3.340.452.124,88	347.632.350,00	2.062.688.321,12	6.728.532.289,00	41.409.797.738,00	286,35
16	Penyisihan Piutang Lainnya	(107.902.737,50)	(214.526.350,00)	(310.338.600,00)	(388.493.638,00)	(478.623.695,50)	47,97
17	Piutang Lainnya Netto	3.232.549.387,38	133.106.000,00	1.752.349.721,12	6.340.038.651,00	40.931.174.042,50	482,01
18	Beban Dibayar Dimuka	65.970.833,00	77.262.500,00	89.575.000,00	84.916.666,67	82.583.333,33	6,28
19	Persediaan	29.131.309.073,61	37.994.916.075,64	32.646.319.183,93	33.568.943.768,53	60.760.955.146,10	25,04
20	**Jumlah Aset Lancar**	109.738.447.159,49	120.883.123.254,81	147.614.245.660,66	95.241.555.060,50	130.139.910.849,85	8,36
21	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
22	**Investasi Non Permanen**						
23	Investasi Non Permanen Lainnya	937.458.336,00	937.458.336,00	877.757.336,00	867.874.836,00	867.874.836,00	-3,75
24	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(738.699.711,00)	(839.910.711,00)	(789.639.086,00)	(825.396.836,00)	(867.874.836,00)	4,35
25	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	198.758.625,00	97.547.625,00	88.118.250,00	42.478.000,00	0,00	-53,10
26	Investasi Jangka Panjang Permanen						

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan (%)
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	71.500.357.572,00	69.920.794.147,00	75.933.809.487,00	81.367.496.451,00	103.062.114.863,00	10,05
28	**Jumlah Investasi Permanen Lainnya**	71.500.357.572,00	69.920.794.147,00	75.933.809.487,00	81.367.496.451,00	103.062.114.863,00	10,05
29	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**	71.699.116.197,00	70.018.341.772,00	76.021.927.737,00	81.409.974.451,00	103.062.114.863,00	9,98
30	**ASET TETAP**						
31	Tanah	185.782.092.141,00	222.572.721.841,00	230.850.948.321,00	241.113.498.321,00	242.923.171.329,00	7,18
32	Peralatan dan Mesin	173.280.440.391,00	202.134.809.980,00	248.077.637.338,00	290.998.093.458,00	318.642.210.874,00	16,55
33	Gedung dan Bangunan	559.454.963.448,00	597.985.256.656,00	642.171.740.875,00	687.358.335.573,00	763.596.751.733,00	8,10
34	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.213.336.421.190,00	1.348.318.246.594,00	1.479.087.414.443,00	1.572.733.451.476,00	1.654.943.313.600,00	8,10
35	Aset Tetap Lainnya	2.352.221.400,00	1.241.509.000,00	1.151.934.200,00	1.173.884.200,00	2.337.010.110,00	11,64
36	Konstruksi dalam Pengerjaan	10.429.639.336,00	20.953.642.453,00	26.079.644.829,00	30.302.396.653,00	3.746.862.145,00	13,48
37	Akumulasi Penyusutan	(506.794.915.200,00)	(660.181.056.127,00)	(847.501.796.703,00)	(895.757.859.656,00)	(1.040.836.255.946,00)	20,13
38	**Jumlah Aset Tetap**	1.637.840.862.706,00	1.733.025.130.397,00	1.779.917.523.303,00	1.927.921.800.025,00	1.945.353.063.845,00	4,43
39	**ASET LAINNYA**						
40	Tuntutan Ganti Rugi	1.546.481.871,89	1.735.330.950,51	1.736.472.999,14	1.677.352.999,14	1.880.720.125,14	5,25
41	Aset Tak Berwujud	789.808.806,00	1.602.443.285,00	5.406.007.967,00	5.599.457.967,00	5.766.447.367,00	86,70
42	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	(69.772.543,00)	(467.777.411,00)	(1.014.826.540,00)	(1.577.141.220,00)	247,60
43	Aset Tak Berwujud Neto	0,00	1.532.670.742,00	4.938.230.556,00	4.584.631.427,00	4.189.306.147,00	68,80
44	Aset Lain-Lain	54.841.942.484,00	73.717.549.676,00	34.503.102.190,00	27.296.916.046,00	26.294.092.507,00	-10,83
45	**Jumlah Aset Lainnya**	57.178.233.161,89	76.985.551.368,51	41.177.805.745,14	33.558.900.472,14	32.364.118.779,14	-8,48
46	**JUMLAH ASET**	1.876.456.659.224,38	2.000.912.146.792,32	2.044.731.502.445,80	2.138.132.230.008,64	2.210.919.208.336,99	4,20
47	**KEWAJIBAN**						
48	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	276.032.969,96	184.364.358,55	321.330.464,59	319.934.203,50	247.391.088,36	4,49
50	Pendapatan Diterima Dimuka	13.387.500,00	194.528.254,17	104.459.753,00	184.088.154,17	109.419.404,17	335,61
51	Utang Beban	44.352.125,00	280.775.301,00	104.459.753,00	1.672.652.695,00	416.593.301,00	474,10
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	948.395.900,00	9.615.900,00	24.553.046.444,23	31.439.900,00	9.826.000,00	63742,60

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan (%)
53	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.282.168.494,96	669.283.813,72	25.237.593.565,99	2.208.114.952,67	783.229.793,53	866,81
54	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
55	JUMLAH KEWAJIBAN	1.282.168.494,96	669.283.813,72	25.237.593.565,99	2.208.114.952,67	783.229.793,53	866,81
56	EKUITAS DANA						
57	JUMLAH EKUITAS DANA	1.875.174.490.729,42	2.000.242.862.978,60	2.019.493.908.879,81	2.135.924.115.055,97	2.210.135.978.543,46	4,22
58	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.876.456.659.224,38	2.000.912.146.792,32	2.044.731.502.445,80	2.138.132.230.008,64	2.210.919.208.336,99	4,20

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2017-2021

Pertumbuhan Aset Kabupaten Manggarai Barat memiliki tren naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,20% pada tahun 2017-2021. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan Aset Lancar sebesar 8,36%, sedangkan Aset Tetap tumbuh rata-rata sebesar 4,43%.

Selain melakukan analisis Neraca Daerah, diperlukan juga analisis Rasio Keuangan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan posisi keuangan Kabupaten Manggarai Barat dari satu periode ke periode berikutnya. Perhitungan Rasio Keuangan meliputi Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas.

3.1.3.1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar/*current ratio* dan rasio cepat/*ratio quick.* Berikut ini adalah ulasan terkait rasio lancar dan rasio cepat.

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar atau aset lancar. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan apakah Pemda memiliki aset yang cukup untuk melunasi hutangnya. Adapun rumus rasio lancar adalah membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar atau dapat dituliskan sebagai berikut: **Rasio Lancar = Aktiva Lancar / Hutang Lancar.**

Tabel 3. 5 Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021 (%)

No.	Tahun	Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek/Hutang Lancar	Rasio Lancar
1	2017	109.738.447.159,49	1.282.168.494,96	85,59
2	2018	120.883.123.254,81	669.283.813,72	180,62
3	2019	147.614.245.660,66	25.237.593.565,99	5,85
4	2020	95.241.555.060,50	2.208.114.952,67	43,13
5	2021	130.139.910.849,85	783.229.793,53	166,16

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2017-2021

Rasio Lancar Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2021 menunjukkan tren fluktuatif cenderung naik. Rasio lancar paling rendah sebesar 5,85% pada tahun 2019, di mana terjadi penurunan sangat tajam sebesar -174,77 poin dari

tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan Hutang Lancar secara drastis sebesar 3670,84% pada tahun 2019. Sementara itu, Rasio Lancar naik menjadi 166,16% pada tahun 2021 disebabkan karena Aktiva Lancar meningkat sebesar 36,64%, sedangkan Hutang Lancar turun sebesar 64,53%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat melakukan pelunasan Hutang Jangka Pendek menggunakan Aset Lancar.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat adalah ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Rasio ini menunjukkan kekuatan atau kelemahan finansial pemerintah daerah, di mana dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak utang jangka pendek pemerintah daerah yang dapat dipenuhi dengan menjual semua aset likuid pemerintah daerah dalam waktu yang paling singkat. Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin baik. Adapun rumus rasio cepat adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar atau dapat dituliskan sebagai berikut: **Rasio Cepat = (Aktiva Lancar – Persediaan)/Kewajiban jangka pendek.**

Tabel 3. 6 Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021

No	Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Cepat
1	2017	109.738.447.159,49	29.131.309.073,61	1.282.168.494,96	62,87
2	2018	120.883.123.254,81	37.994.916.075,64	669.283.813,72	123,85
3	2019	147.614.245.660,66	32.646.319.183,93	25.237.593.565,99	4,56
4	2020	95.241.555.060,50	33.568.943.768,53	2.208.114.952,67	27,93
5	2021	130.139.910.849,85	60.760.955.146,10	783.229.793,53	88,58

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2017-2021

Rasio Cepat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2021 mengalami tren fluktuatif cenderung turun. Rasio Cepat meningkat paling drastis sebesar 60.98 poin pada tahun 2018. Sementara itu, secara kontras, Rasio Cepat turun secara tajam sebesar 119,29 poin pada tahun 2019 yang menyebabkan Rasio Cepat pada tahun tersebut menjadi yang paling rendah (4,56%). Namun demikian, Rasio Cepat naik sebesar 23,37 poin pada tahun 2019 dan naik kembali sebesar 60,65 poin pada tahun 2021.

Rasio Cepat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2021 dapat dikategorikan baik karena nilainya lebih besar dari 1,00 (>1,00). Hal ini

menunjukkan bahwa Aset Lancar Kabupaten Manggarai Barat lebih besar dibandingkan dengan Aktiva Lancar. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat melunasi Hutang Jangka Pendek menggunakan pencairan Aset Lancar.

3.1.3.2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan dalam rasio solvabilitas, yaitu rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal.

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini mengukur seberapa besar pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Hutang yang dimaksudkan adalah utang jangka pendek dan jangka panjang pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan seberapa besar utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik tingkat keamanannya. Adapun rumus rasio total hutang terhadap aset adalah total hutang dibagi dengan total aset atau dapat dituliskan sebagai berikut: **Rasio Hutang Terhadap Total Aset = Total Hutang/Total Aset**.

Tabel 3. 7 Rasio Hutang terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Total Hutang	Total Aset	Rasio Hutang Terhadap Total Aset
1	2017	1.282.168.494,96	1.876.456.659.224,38	0,0007
2	2018	669.283.813,72	2.000.912.146.792,32	0,0003
3	2019	25.237.593.565,99	2.044.731.502.445,80	0,0123
4	2020	2.208.114.952,67	2.138.132.230.008,64	0,0010
5	2021	783.229.793,53	2.210.919.208.336,99	0,0004

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2017-2021

Rasio total Hutang terhadap total Aset Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2021 mengalami tren fluktuatif cenderung turun, kecuali tahun 2019 di mana rasio ini tumbuh sebesar 0,0120. Hal ini disebabkan karena total Hutang pada tahun 2019 melonjak drastis sebesar 3.670,84 poin dibandingkan dengan tahun 2018, sedangkan total Aset hanya tumbuh sebesar 2,19 poin di mana merupakan

pertumbuhan total Aset paling rendah selama tahun 2017-2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu mengantisipasi adanya lonjakan Hutang pada masa mendatang dan mengupayakan adanya peningkatan aset secara optimal. Hal ini untuk memastikan agar kondisi solvabilitas keuangan daerah tetap terjaga dengan baik, di mana Aset daerah dapat digunakan untuk menutup hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.

2. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rasio ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kesehatan keuangan daerah saat pemeriksaan. Semakin kecil nilainya, maka menunjukkan semakin mandiri keuangan daerah atau dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak tergantung oleh pembiayaan dari hutang. Adapun rumus rasio hutang terhadap modal adalah total hutang dibagi dengan modal (ekuitas) atau dapat dituliskan sebagai berikut: **Rasio Hutang terhadap Modal = Total Hutang/Modal.**

Tabel 3. 8 Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Manggarai Barat Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Total Hutang	Total Modal (Ekuitas)	Rasio Hutang terhadap Total Modal
1	2017	1.282.168.494,96	1.875.174.490.729,42	0,0007
2	2018	669.283.813,72	2.000.242.862.978,60	0,0003
3	2019	25.237.593.565,99	2.019.493.908.879,81	0,0125
4	2020	2.208.114.952,67	2.135.924.115.055,97	0,0010
5	2021	783.229.793,53	2.210.135.978.543,46	0,0004

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2017-2021

Rasio total Hutang terhadap total Modal Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2021 mengalami tren fluktuatif cenderung turun, kecuali pada tahun 2019 di mana rasio ini meningkat sebesar 0,0122 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio total Hutang terhadap total Modal pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya. Hal ini disebabkan oleh total Hutang yang melonjak secara drastis sebesar 3.679,84 poin dari tahun 2018. Sementara itu, pertumbuhan total Modal pada tahun 2019 hanya naik sebesar 0,96 poin di mana merupakan pertumbuhan total Modal paling rendah pada kurun waktu 2017-2021. Meskipun demikian, rasio total Hutang terhadap total Modal

Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2021 lebih kecil dari 1,00 (<1,00), di mana menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam kondisi baik untuk memenuhi seluruh kewajiban.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Analisis ini memfokuskan pada realisasi kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk pembangunan daerah.

3.2.1. Kontribusi Penggunaan Anggaran

Analisis kontribusi penggunaan anggaran bertujuan untuk menyajikan data analisis terkait kontribusi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, kontribusi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, dan analisis pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran pada periode ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis kontribusi penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Manggari Barat.

3.2.1.1. Kontribusi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Kontribusi realisasi belanja terhadap anggaran belanja diperoleh dari perhitungan perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tiap tahun. Gambaran mengenai tingkat realisasi tiap komponen Belanja, rata-rata proporsi komponen Belanja terhadap total Belanja, dan rata-rata pertumbuhan tiap komponen Belanja Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 9 Tingkat realisasi Belanja, rata-rata proporsi komponen Belanja terhadap total Belanja, dan rata-rata pertumbuhan tiap komponen Belanja Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022

No.	Komponen	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
		2018			2019			2020		
5	**BELANJA**	**1.150.034.580.283,26**	**1.050.034.639.774,24**	**91,30**	**1.243.553.895.053,41**	**1.159.526.877.711,00**	**93,24**	**1.024.791.155.298,01**	**940.229.166.237,51**	**91,75**
5.1	**Belanja Operasi**	**675.042.188.778,80**	**611.401.964.378,64**	**90,57**	**755.494.966.617,39**	**702.877.169.616,00**	**93,04**	**783.937.886.848,70**	**734.780.828.141,51**	**93,73**
5.1.1	Belanja Pegawai	408.566.523.770,50	382.412.718.423,00	93,60	432.034.801.022,24	415.668.489.132,00	96,21	367.204.415.958,94	347.603.587.058,16	94,66
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	252.886.915.007,30	216.191.676.661,64	85,49	309.333.657.888,15	274.059.110.984,00	88,60	361.756.990.012,76	329.233.684.605,35	91,01
5.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5.1.5	Belanja Hibah	6.693.750.001,00	6.188.569.294,00	92,45	11.149.007.707,00	10.438.627.000,00	93,63	53.301.941.000,00	56.359.425.801,00	105,74
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.895.000.000,00	6.609.000.000,00	95,85	2.977.500.000,00	2.710.942.500,00	91,05	1.674.539.877,00	1.584.130.677,00	94,60
5.2	**Belanja Modal**	**281.839.897.785,46**	**254.087.794.412,60**	**90,15**	**257.362.438.252,02**	**242.991.065.618,00**	**94,42**	**202.804.454.653,94**	**174.969.249.200,00**	**86,27**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.698.020.000,00	1.354.440.000,00	79,77	1.650.317.000,00	1.630.903.683,00	98,82	213.846.176,63	213.846.175,00	100,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.176.236.954,00	40.914.710.999,60	86,73	23.468.009.201,00	37.232.391.150,00	158,65	37.666.286.357,65	35.549.809.923,00	94,38
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.887.409.860,00	62.920.516.786,00	87,53	67.615.789.267,02	60.860.526.487,00	90,01	75.092.905.263,00	56.870.290.347,00	75,73
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.697.600.753,46	142.830.247.385,00	92,33	156.421.072.784,00	137.809.246.154,00	88,10	85.279.085.698,66	78.103.701.205,00	91,59

No.	Komponen	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
		2018			2019			2020		
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.380.630.218,00	6.067.879.242,00	95,10	8.207.250.000,00	5.457.998.144,00	66,50	4.552.331.158,00	4.231.601.550,00	92,95
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**7.500.000.000,00**	**4.282.916.845,00**	**57,11**	**3.571.625.654,00**	**2.292.267.099,00**	**64,18**	**38.048.813.795,37**	**30.479.088.896,00**	**80,11**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	7.500.000.000,00	4.282.916.845,00	57,11	3.571.625.654,00	2.292.267.099,00	64,18	38.048.813.795,37	30.479.088.896,00	80,11
6	**Transfer**	**196.275.046.819,00**	**188.967.731.143,00**	**96,28**	**211.994.145.530,00**	**211.361.575.378,00**	**99,70**	**210.828.553.144,00**	**210.815.854.117,00**	**99,99**
6.1	**Belanja Transfer**	**10.622.553.100,00**	**8.705.767.005,00**	**81,96**	**9.058.355.000,00**	**8.561.116.800,00**	**94,51**	**9.840.921.944,00**	**9.840.921.944,00**	**100,00**
6.1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah	10.622.553.100,00	8.705.767.005,00	81,96	6.053.743.800,00	6.028.536.000,00	99,58	6.836.310.744,00	6.836.310.744,00	100,00
6.1.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0	3.004.611.200,00	2.532.580.800,00	84,29	3.004.611.200,00	3.004.611.200,00	100,00
6.2	**Bantuan Keuangan**	**185.652.493.719,00**	**180.261.964.138,00**	**97,10**	**202.935.790.530,00**	**202.800.458.578,00**	**99,93**	**200.987.631.200,00**	**200.987.631.200,00**	**100,00**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat, 2018-2022

Lanjutan **Tabel ... Tingkat realisasi Belanja, rata-rata proporsi komponen Belanja terhadap total Belanja dan rata-rata pertumbuhan tiap komponen Belanja Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022**

No.	Komponen	2021			2022			Rata-rata pertumbuhan (%)	Rata-rata proporsi komponen Belanja terhadap total Belanja (%)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
5	**BELANJA**	**1.191.842.873.759,00**	**887.494.355.136,24**	**74,46**	**1.581.873.367.077,00**	**1.494.257.748.969,32**	**94,46**	**10,86**	
5.1	**Belanja Operasi**	**766.026.293.837,00**	**720.906.686.316,24**	**94,11**	**832.858.131.339,00**	**789.393.833.826,32**	**94,78**	**6,78**	**62,99**
5.1.1	Belanja Pegawai	347.284.675.287,00	336.092.253.190,25	96,78	428.254.387.848,00	392.897.335.453,32	91,74	(0,13)	52,53
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	407.178.416.832,00	374.782.619.165,99	92,04	8.471.765.932,00	7.038.707.835,00	83,08	16,39	44,18
5.1.3	Belanja Bunga	1.121.937.500,00	0,00	0,00	18.575.402.050,00	18.184.280.000,00	97,89		
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	832.858.131.339,00	789.393.833.826,32	94,78		
5.1.5	Belanja Hibah	10.441.264.218,00	10.031.813.960,00	96,08	0,00	0,00	0,00	126,91	2,77
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	532.747.431.197,00	493.263.439.543,00	92,59	(66,85)	62,99
5.2	**Belanja Modal**	**419.492.313.899,00**	**162.697.188.838,00**	**38,78**	**532.747.431.197,00**	**493.263.439.543,00**	**92,59**	**40,95**	**22,28**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55,49)	0,27
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.712.308.304,00	26.156.043.181,00	77,59	40.000.245.404,00	38.845.232.335,00	97,11	2,14	15,14
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.161.169.488,00	43.703.403.403,00	96,77	161.980.290.249,00	159.623.544.220,00	98,55	58,07	28,31
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	337.135.476.835,00	89.642.030.454,00	26,59	328.417.976.752,00	292.362.220.356,00	89,02	48,52	54,39
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.483.359.272,00	3.195.711.800,00	91,74	2.348.918.792,00	2.432.442.632,00	103,56	(20,22)	1,90
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**6.324.266.023,00**	**3.890.479.982,00**	**61,52**	**5.979.104.141,00**	**3.173.879.600,00**	**53,08**	**269,38**	**0,88**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	6.324.266.023,00	3.890.479.982,00	61,52	5.979.104.141,00	3.173.879.600,00	53,08	269,38	0,88

No.	Komponen	2021			2022			Rata-rata pertumbuhan (%)	Rata-rata proporsi komponen Belanja terhadap total Belanja (%)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
6	**Transfer**	**211.748.477.416,00**	**211.748.477.416,00**	**100,00**	**210.288.700.400,00**	**208.426.596.000,00**	**99,11**	**2,62**	**18,34**
6.1	**Belanja Transfer**	**11.948.845.980,00**	**11.948.845.980,00**	**100,00**	**13.929.599.000,00**	**12.067.494.600,00**	**86,63**	**10,45**	**18,34**
6.1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah	9.333.743.800,00	9.333.743.800,00	100,00	13.929.599.000,00	12.067.494.600,00	86,63	8,93	4,95
6.1.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2615102180	2615102180	100,00	0,00	0,00	0,00	2,84	
6.2	**Bantuan Keuangan**	**199.799.631.436,00**	**199.799.631.436,00**	**100,00**	**196.359.101.400,00**	**196.359.101.400,00**	**100,00**	**2,32**	**95,05**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat, 2018-2022

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target pada tiap komponen Belanja Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 mengalami tren fluktuatif cenderung turun, kecuali pada komponen Belanja Operasi. Tingkat realisasi Belanja Operasi tahun 2018-2022 meningkat perlahan sebesar 4,21% hingga mencapai 94,78% pada tahun 2022. Sementara itu, tingkat realisasi Belanja Tak Terduga mengalami tren turun kecuali pada tahun 2020 di mana tingkat realisasinya mencapai 80,11%. Namun demikian, tingkat realisasi komponen ini turun cukup drastis sebesar 18,59 poin menjadi 61,52% pada tahun 2021. Setelah itu, tingkat realisasi kembali turun sebesar 8,43 poin hingga mencapai 53,08%, di mana merupakan tingkat realisasi Belanja Tak Terduga paling rendah selama kurun waktu 2018-2022.

Tingkat realisasi terhadap target pada komponen Belanja Modal mengalami tren fluktuatif cenderung turun, kecuali pada tahun 2022 di mana tingkat realisasi mencapai 92,59% yang merupakan tingkat realisasi tertinggi dalam kurun waktu 2018-2022. Tingkat realisasi Belanja Modal paling rendah sebesar 38,78% pada tahun 2021, di mana kondisi ini turun sebesar 47,69 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Meskipun demikian, tingkat realisasi komponen ini naik secara drastis sebesar 53,80 poin hingga mencapai 92,59% pada tahun 2022.

Penting juga untuk menganalisis tingkat realisasi terhadap target pada komponen Belanja Transfer dan Belanja Bantuan Keuangan selama tahun 2018-2022 yang memiliki tren naik. Tingkat realisasi Belanja Transfer mencapai 100% pada tahun 2020 dan 2021, namun turun sebesar 13,37 poin pada tahun 2022 hingga menjadi 86,63%. Sementara itu, tingkat realisasi Belanja Bantuan Keuangan mencapai 100% pada tahun 2020-2022.

3.2.1.2. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya. Gambaran belanja wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 10. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Operasi**	**611.401.964.378,64**	**702.877.169.616,00**	**734.780.828.141,51**	**720.906.686.316,24**	**789.393.833.826,32**	**6,78**
B	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000.000,00**	**19.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**292,33**
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00	19.000.000.000,00	5.000.000.000,00	103,16
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL (A+B)		**611.401.964.378,64**	**702.877.169.616,00**	**739.780.828.141,51**	**739.906.686.316,24**	**794.393.833.826,32**	**6,90**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat, 2018-2022

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 mengalami tren naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,90%. Belanja Operasi yang mencakup Belanja Gaji Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, dan Belanja Hibah mengalami tren fluktuatif cenderung naik selama kurun waktu 2018-2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,78%. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat paling banyak dialokasikan untuk komponen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp19 Miliar pada tahun 2021 atau melonjak drastis sebesar 280% dari tahun 2020.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun sebelumnya atau periode sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dilakukan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa akan datang dan untuk menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan salah satunya dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil.

3.2.2.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan APBD ke depan. Hasil analisis sumber penutup defisit riil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 11 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	1.052.883.489.639,64	1.163.705.988.098,19	1.115.988.697.971,74	1.089.504.348.684,77	1.255.655.721.052,39
	Dikurangi:					
2	Belanja Daerah	1.058.740.406.779,24	1.159.526.877.711,00	940.229.166.237,51	1.099.242.832.552,24	1.494.257.748.969,32
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	5.000.000.000,00	19.000.000.000,00	5.000.000.000,00
A	**Defisit Riil**	**(5.856.917.139,60)**	**4.179.110.387,19**	**170.759.531.734,23**	**(28.738.483.867,47)**	**(243.602.027.916,93)**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	70.700.990.880,77	73.549.840.746,17	77.788.652.133,36	37.766.015.547,02	9.027.531.679,55
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	247.533.283.592,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	59.701.000,00	9.882.500,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	70.700.990.880,77	73.609.541.746,17	77.798.534.633,36	37.766.015.547,02	256.560.815.271,55
(A-B)	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	**64.844.073.741,17**	**77.788.652.133,36**	**92.960.997.100,87**	**9.027.531.679,55**	**12.958.787.354,62**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat, 2018-2022

Penutup defisit riil Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-2022 bersumber dari SiLPA dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024-2026. Kerangka pendanaan ini dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, baik dalam konteks kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Manggarai Barat

Proyeksi APBD Kabupaten Manggarai Barat selama 1 (satu) periode ke depan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 mempertimbangkan beberapa kondisi. *Pertama*, tren rata-rata pertumbuhan dan tingkat realisasi tiap komponen APBD pada periode 2018-2022. *Kedua,* mempertimbangkan potensi perkembangan perekonomian baik dari tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, serta perubahan regulasi keuangan daerah yang berimplikasi pada APBD. Adapun proyeksi APBD dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026, difokuskan pada tahun 2024 hingga 2026 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2022	Penetapan 2023	Proyeksi				Rata-rata Pertumbuhan (%)
				2023	2024	2025	2026	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.255.655.721.052**	**1.576.868.095.541**	**1.481.400.972.068**	**1.574.342.327.817**	**1.665.832.176.154**	**1.765.358.796.390**	**6.02**
04.01.00	**PAD**	**190.819.869.483**	**333.985.000.000**	**251.517.876.527**	**333.615.482.136**	**414.044.705.330**	**502.289.487.920**	**26.02**
04.01.01	Pajak Daerah	141.461.757.404	225.373.232.000	181.067.460.343	245.391.590.936	306.097.585.955	368.689.527.055	26.90
04.01.02	Retribusi Daerah	41.421.000.264	77.852.500.000	60.132.168.900	76.859.297.775	94.529.081.706	117.431.720.909	25.01
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan	2.720.173.212	4.500.000.000	3.536.225.176	4.243.470.211	5.940.858.295	8.317.201.613	33.33
04.01.04	Lain-lain PAD yang sah	5.216.938.603	26.259.268.000	6.782.022.108	7.121.123.214	7.477.179.374	7.851.038.343	5.00
04.02.00	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.004.830.794.004**	**1.228.703.071.541**	**1.215.703.071.541**	**1.226.546.821.681**	**1.237.607.446.824**	**1.248.889.284.469**	**0.90**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.187.669.964.280	1.187.669.964.280	1.198.513.714.420	1.209.574.339.563	1.220.856.177.208	**0.92**
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		41.033.107.261	28.033.107.261	28.033.107.261	28.033.107.261	28.033.107.261	**-**
04.03.00	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**60.005.057.566**	**14.180.024.000**	**14.180.024.000**	**14.180.024.000,00**	**14.180.024.000,00**	**14.180.024.000,00**	-
5	**BELANJA**	**1.494.257.748.969**	**1.573.546.028.632**	**1.499.497.567.443**	**1.529.812.492.608**	**1.616.650.284.158**	**1.716.176.904.393**	**4.62**
05.01.00	**Belanja operasi**	**789.393.833.826**	**932.524.102.470**	**832.106.608.081**	**841.915.344.646**	**924.511.461.602**	**935.092.089.519**	**4.04**
05.01.01	Belanja pegawai	371.273.510.538	485.088.864.361	485.345.164.361	486.612.422.579	522.352.733.143	535.411.551.472	**3,37**
05.01.02	Belanja barang dan jasa	392.897.335.453	412.074.999.245	310.568.554.856	314.213.658.767	359.811.465.159	357.333.274.747	**5,00**
05.01.03	Belanja bunga	7.038.707.835	15.490.190.780	15.490.190.780	20.386.565.216	21.644.565.216	21.644.565.216	**12,59**
05.01.04	Belanja subsidi	0	0	0	0	0	0	**-**
05.01.05	Belanja hibah	18.184.280.000	19.870.048.084	20.702.698.084	20.702.698.084	20.702.698.084	20.702.698.084	-
05.01.06	Belanja bantuan sosial	0	0	0	0	0	0	**-**
05.02.00	**Belanja modal**	**493.263.439.543**	**429.240.405.347**	**461.119.787.605**	**472.647.782.295**	**472.813.699.100**	**557.638.778.474**	**6.82**
05.02.01	Belanja Modal	493.263.439.543	429.240.405.347	461.119.787.605	472.647.782.295	472.831.699.100	557.638.778.474	
05.03.00	**Belanja tidak terduga**	**3.173.879.600**	**12.871.825.315**	**7.361.476.257**	**12.361.476.257,00**	**12.361.476.257,00**	**12.361.476.257,00**	22.64
05.03.01	Belanja tidak terduga	3.173.879.600	12.871.825.315	7.361.476.257	12.361.476.257,00	12.361.476.257,00	12.361.476.257,00	
05.04.00	**Belanja transfer**	**208.426.596.000**	**198.909.695.500**	**198.909.695.500**	**202.887.889.410,00**	**206.945.647.199**	**211.084.560.143**	**2.00**
05.04.01	Belanja bagi hasil pendapatan	12.067.494.600,00	10.529.599.000	10.529.599.000	10.740.190.980	10.954.994.800	11.174.094.696	

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2022	Penetapan 2023	Proyeksi				Rata-rata Pertumbuhan (%)
				2023	2024	2025	2026	
05.04.02	Belanja bantuan keuangan	196.359.101.400,00	188.380.096.500	188.380.096.500	192.147.698.430	195.990.652.399	199.910.465.447	
Surplus/Defisit		**-238.602.027.917**	**-3.321.966.908**	**18.096.595.375**	**-44.529.835.209**	**-49.181.891.996**	**-49.181.891.996**	
6	**Pembiayaan Daerah**	**251.560.815.272**	**-29.707.768.300**	**18.096.595.375**	**44.529.835.209**	**49.181.891.996**	**49.181.891.996**	**52.17**
06.01.00	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**256.560.815.272**	**29.707.768.300**	**12.933.239.834**	**-**	**-**	**-**	
06.01.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah Tahun Sebelumnya	9.027.531.680	29.707.768.300	12.933.239.834	-	-	-	
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Penerimaan Piutang Daerah	247.533.283.592	0	0	0	0	0	
06.02.00	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**5.000.000.000**	**33.029.835.209**	**31.029.835.209**	**44.529.835.209**	**49.181.891.996**	**49.181.891.996**	17.98
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	
06.02.02	Penyertaan Modal daerah pada BUMD	5.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000	6.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	**51.60**
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		27.029.835.209	27.029.835.209	38.029.835.209	36.681.891.996	36.681.891.996	**12.38**
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	
06.02.05	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	

Sumber: Hasil analisis, 2023

Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,02%. Dari tiga komponen pendapatan daerah, PAD diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 26,02 persen, diikuti oleh pendapatan transfer sebesar 0,90 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0 persen. Tingginya pertumbuhan PAD dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, dan pajak daerah. Dari sisi nominal, pajak daerah dan retribusi daerah penyumbang besar PAD Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya pembangunan yang masif di sektor perhotelan dan diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2023. Selain itu, pelaksanaan ASEAN SUMMIT 2023 yang diselenggarakan di Labuan Bajo juga diproyeksi turut andil dalam peningkatan PAD karena acara tersebut juga digunakan sebagai bagian untuk mempromosikan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh pemerintah pusat. Selain itu, peraturan tentang hubungan keuangan pusat daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 yang diterbitkan pada tahun 2022, juga menjadi peluang dalam peningkatan PAD karena adanya kebijakan opsen pajak tentang tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kabupaten/Kota sebesar 66 persen. Selain kebijakan opsen, salah satu peluang bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan UU tersebut adalah "keleluasan" dalam menarik pajak daerah terutama di sektor unggulan Kabupaten Manggarai Barat, seperti sektor pariwisata.

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan transfer hanya sebesar 0,90 persen. Kontribusi komponen pendapatan transfer masih berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan rata-rata stagnan pertumbuhannya selama 1 periode. Meskipun demikian, secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat masih bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan daerah di atas, maka kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan PAD harus dilakukan secara memadai melalui strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi sektor unggulan, terutama terkait industri pariwisata berupa sektor perhotelan, restoran, dan hiburan.
2. Peningkatan kinerja dan kemitraan Perumda dalam pengelolaan potensi pariwisata.

3. Peningkatan pengawasan dan update data pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah penghasil retribusi.
5. Pemanfaatan peluang dari implementasi UU HKPD melalui kolaborasi dan kerjasama dengan Provinsi.

Belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,62%, di mana komponen belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 6,82 persen, diikuti dengan belanja transfer, dan belanja operasional. Persentase peningkatan belanja modal diproyeksi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja operasi menunjukkan bahwa adanya fokus pembangunan untuk masyarakat dan infrastruktur penunjang pengembangan perekonomian daerah. Untuk belanja operasi, rata-rata pengeluaran tertinggi, yaitu belanja bunga untuk pembayaran cicilan hutang, diikuti belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengedepankan belanja daerah yang menyasar langsung permasalahan riil Kabupaten Manggarai Barat seperti kemiskinan dan ketimpangan.
2. Mengedepankan belanja yang dapat mengangkat sector-sektor unggulan seperti sektor pariwisata dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
3. Memenuhi program-program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan capaian SPM sesuai ketentuan;
4. Mengoptimalkan alokasi belanja yang sesuai mandatori berdasarkan peraturan, seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
5. Mengoptimalkan alokasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024;
6. Penganggaran disusun berdasarkan prinsip *money follows priority program*s dalam rangka pencapaian visi-misi RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah di atas, maka APBD Kabupaten Manggarai Barat diproyeksikan mengalami defisit. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode ke depan dikeluarkan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pembahasan sub bab ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya dalam 1 (satu) periode ke depan. Dalam menghitung kepasitas riil kemampuan daerah, terlebih dahulu perlu dilakukan proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat. Berikut ini adalah proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Manggarai Barat.

3.3.2.1. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Perhitungan proyeksi belanja wajib dan mengikat digunakan sebagai dasar menyusun kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah mencukupi untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan misalnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Proyeksi Belanja Mengikat Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 13 Proyeksi Belanja Mengikat Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026

No.	Uraian	2023	Proyeksi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2024	2025	2026	
A	**Belanja Mengikat**	**546.900.114.247,75**	**545.203.421.956,75**	**583.701.736.717,25**	**596.388.826.483,60**	**0,03**
1	Belanja Pegawai	485.088.864.361,00	509.612.422.579,00	522.352.733.144,00	535.411.551.472,00	0,03
2	Belanja Barang dan Jasa*	61.811.249.886,75	35.590.999.377,75	61.349.003.573,25	60.977.275.011,60	0,10
B	**Belanja Wajib**	**720.472.413.223,50**	**734.328.835.254,90**	**764.662.532.021,30**	**796.035.095.670,71**	**0,03**
1	Pendidikan	314.709.205.726,40	323.774.432.605,20	343.002.813.630,00	362.908.137.677,20	0,05
2	Kesehatan	108.845.716.427,10	110.925.974.044,70	119.266.133.500,60	127.912.913.691,40	0,06
3	Infrastruktur	296.917.491.070,00	299.628.428.605,00	302.393.584.890,70	305.214.044.302,11	0,01
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**27.029.835.209**	**38.029.835.209**	**36.681.891.996**	**36.681.891.996**	**0,12**
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	27.029.835.209	38.029.835.209	36.681.891.996	36.681.891.996	0,12
Total Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat		**1.294.402.362.680,25**	**1.317.562.092.420,65**	**1.385.046.160.734,55**	**1.429.105.814.150,31**	**0,82**

Sumber: Hasil analisis, 2023

Keterangan:

*Belanja operasional rutin = 15% dari belanja barang dan jasa

Hasil proyeksi belanja wajib dan mengikat Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,82%. Belanja wajib dan mengikat sama-sama memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,03 persen. Belanja mengikat terdiri dari komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sementara belanja wajib dihitung hanya untuk belanja pendidikan sebesar 20 persen, belanja kesehatan 10 persen, dan belanja infrastruktur, yaitu sebesar 25 persen.

3.3.2.2. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai pembanguan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari hasil pengurangan total penerimaan daerah dengan belanja wajib dan mengikat. Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 14 Proyeksi Perhitungan Kapasitas Riil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023-2026

No	Uraian	2023	Proyeksi		
			2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.576.868.095.541,00	1.574.342.327.817,00	1.665.832.176.154,00	1.765.358.796.390,00
2	Pencairan Dana Cadangan				
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	29.707.768.300,00			
	Total Penerimaan	1.606.575.863.841,00	1.574.342.327.817,00	1.665.832.176.154,00	1.765.358.796.390,00
	Dikurangi:				
4	Pengeluaran Wajib dan Mengikat	1.294.402.362.680,25	1.317.562.092.420,65	1.385.046.160.734,55	1.429.105.814.150,31
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**312.173.501.160,75**	**256.780.235.396,35**	**280.786.015.419,45**	**336.252.982.239,69**

Sumber: Hasil analisis, 2023

Kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 diproyeksikan lebih rendah dari tahun berjalan atau tahun 2023 karena dipengaruhi adanya SiLPA dan pendapatan daerah yang lebih tinggi pada tahun 2023. Meskipun demikian, kapasitas riil keuangan daerah tahun 2024 hingga 2026 diproyeksikan selalu meningkat setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan kapasitas riil keuangan daerah diperkirakan sebesar 0,38 persen. Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan daerah ke depan di luar belanja wajib dan mengikat. Komponen perhitungan kapasitas riil saat ini mengalami perubahan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tidak ada lagi komponen belanja tidak langsung sebagai pengurang total penerimaan.

3.3.3. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan rencana penggunaan kapasitas riil kapasitas keuangan daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) prioritas penggunaan anggaran. Berikut ini adalah tabel rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026.

Tabel 3. 15 Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2024-2026

Uraian	2023	Proyeksi		
		2024	2025	2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.606.575.863.841,00**	**1.574.342.327.817,00**	**1.665.832.176.154,00**	**1.765.358.796.390,00**
Prioritas I	1.294.402.362.680,25	1.317.562.092.420,65	1.385.046.160.734,55	1.429.105.814.150,31
Prioritas II dan III	312.173.501.160,75	256.780.235.396,35	280.786.015.419,45	336.252.982.239,69

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok prioritas. Prioritas I dialokasikan untuk pengeluaran/belanja wajib dan mengikat dan pemenuhan pelayanan dasar. Sementara itu, prioritas II dan III dialokasikan untuk belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah dan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan gambaran umum tentang capaian pembangunan Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2022. Dari gambaran tersebut secara global terlihat ada sejumlah keberhasilan yang telah ditorehkan pemerintah dan masyarakat Manggarai Barat. Namun di sisi lain terdeteksi pula sejumlah permasalahan baik secara makro maupun per urusan yang menuntut perhatian semua stakeholder di tahun-tahun mendatang. Berikut adalah uraian tentang analisis terhadap persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam lima tahun terakhir.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan yang terjadi antara realisasi dengan target yang direncanakan. Seperti yang sudah dijabarkan dalam Bab II, kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah cukup baik, kondisi tersebut ditunjukkan dengan tercaainya beberapa target indikator. Namun demikian, hasil tersebut masih perlu untuk ditingkatkan, terutama beberapa urusan yang masih belum memenuhi target. Belum tercapainya beberapa indikator yang direncakan disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian dirumuskan dalam sebuah pemetaan dengan metode analisis pohon masalah. Metode ini mengkalsifikasikan maslaah ke dalam tiga level, yaitu, masalah pokok, masalah dan akar masalah. Pemetaan ini dilakukan untuk memberikan gambaran dalam merumuskan intervensi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

4.1.1. Tinjauan Terhadap Struktur Perekonomian Daerah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat Manggarai Barat hidup dari pertanian. Hal ini antara lain tergambar pula dari sumbangan sektor pertanian ini (termasuk kehutanan dan perikanan) terhadap

total PDRB Kabupaten Manggarai Barat yang mencapai 41,05%; tertinggi dari semua sektor. Namun demikian, jika dilihat perkembangannya dalam 5 tahun terakhir terlihat bahwa pertumbuhan sektor ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara di lain pihak, sektor-sektor tertier seperti sektor akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan kecenderungan tersebut, dengan memanfaatkan analisis *location quotient* diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4. 1. Kategori Sektor PDRB Berdasarkan Analisis Location Quotient

Kode	Lapangan Usaha	Kategori
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	Basis
B	Pertambangan dan penggalian	Basis
C	Industri pengolahan	Non Basis
D	Pengadaan listrik dan gas	Non Basis
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	Non Basis
F	Konstruksi	Basis
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Non Basis
H	Transportasi dan pergudangan	Non Basis
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Basis
J	Informasi dan komunikasi	Non Basis
K	Jasa keuangan dan asuransi	Non Basis
L	Real estate	Basis
M, N	Jasa perusahaan	Basis
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	Basis
P	Jasa pendidikan	Non Basis
Q	Jasa lesehatan dan kegiatan sosial	Non Basis
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Non Basis

Sumber: Hasil Olahan BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Sektor pertanian merupakan sektor basis dalam struktur perekonomian Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini bisa dipahami karena sumbangan sektor ini terhadap PDRB yang cukup dominan, di samping kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Manggarai Barat hidup dari pertanian. Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini, terdapat 6 sektor lainnya yang juga menjadi sektor basis dalam struktur PDRB Kabupaten Manggarai Barat, termasuk sektor akomodasi

dan makan minum yang menjadi representasi sektor pariwisata. Ini artinya bahwa ketujuh sektor ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai *leading sektor* yang bisa menjadi tumpuan ekspor dan daya tarik daerah; tentu karena sumbangannya yang besar terhadap pembentukan PDRB maupun karena tren pertumbuhannya yang menjanjikan. Sementara kesepuluh sektor lainnya dinilai tidak memiliki potensi untuk itu.

Namun lebih dalam lagi, dengan menggunakan analisis *shift share* diperoleh juga data bahwa dari ketujuh sektor basis yang telah disebutkan di atas, tidak semuanya memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing yang juga tinggi. Berikut data hasil analisis shift share terhadap sumbangan komponen PDRB dalam dua periode pembangunan terakhir.

Tabel 4. 2. Kategori Sektor PDRB Berdasarkan Analisis Shift Share

Kode	Lapangan Usaha	Shift Share		
		Makna Nilai PS (Mij)	Makna Nilai Ds (Cij)	Posisi Relatif Suatu Sektor
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Rendah	Terbelakang
B	Pertambangan dan penggalian	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
C	Industri pengolahan	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang
D	Pengadaan listrik dan gas	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Rendah	Terbelakang
F	Konstruksi	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
H	Transportasi dan pergudangan	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
J	Informasi dan komunikasi	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang
K	Jasa keuangan dan asuransi	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang
L	Real estate	Pertumbuhan	Daya Saing Tinggi	Cendrung

Kode	Lapangan Usaha	Shift Share		
		Makna Nilai PS (Mij)	Makna Nilai Ds (Cij)	Posisi Relatif Suatu Sektor
		lambat		Berpotensi
M, N	Jasa perusahaan	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
P	Jasa pendidikan	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Rendah	Terbelakang
Q	Jasa lesehatan dan kegiatan sosial	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat

Sumber: Hasil Olahan BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Tabel 4. 3. Posisi Relatif Sektor Basis pada PDRB Kab Manggarai Barat Berdasarkan Analisis *Shift Share*

Kode	Lapangan Usaha	Kategori Sektor	Shift Share		
			Makna Nilai PS (Mij)	Makna Nilai Ds (Cij)	Posisi Relatif Suatu Sektor
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	Basis	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Rendah	Terbelakang
B	Pertambangan dan penggalian	Basis	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
F	Konstruksi	Basis	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Basis	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
L	Real estate	Basis	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
M, N	Jasa perusahaan	Basis	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	Basis	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat

Sumber: Hasil Olahan BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Terlihat bahwa dari ketujuh sektor basis dalam struktur perekonomian Kabupaten Manggarai Barat, hanya ada tiga sektor yang memiliki pertumbuhan cepat dengan daya saing yang tinggi menurut analisis *shift share*, yakni sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sementara satu sektor lainnya yang bukan merupakan sektor basis namun memiliki pertumbuhan yang pesat adalah sektor perdagangan.

Bila ditelisik lebih dalam, keempat sektor ini sebetulnya memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat dalam 10 tahun terakhir ini. Penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas di Indonesia mendorong pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana prasarana pendukung di kota ini baik jalan, bandara, pelabuhan sampai dengan pusat kreasi dan pusat kuliner. Inilah yang menyebabkan sektor konstruksi bertumbuh dengan baik dalam 10 tahun terakhir. Perkembangan ini juga akhirnya menjadi pemicu bertumbuhnya sektor akomodasi hotel dan restaurant serta berbagai aktivitas perdagangan di Manggarai Barat.

Di lain pihak terlihat bahwa sektor pertanian yang merupakan sektor basis dan digeluti hampir sebagian besar masyarakat Manggarai Barat memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang rendah sehingga masuk dalam kategori terbelakang menurut analisis shift share ini. Sementara sektor lain seperti pertambangan, real estate, dan jasa perusahaan terlihat memiliki kecenderungan berpotensi karena daya saingnya yang tinggi walaupun pertumbuhannya dinilai lambat.

4.1.2. Tinjauan Terhadap Aspek Kesejahteraan Sosial

Aspek kesehateraan sosial merupakan bagian penting dalam mengukur tingkat kemajuan suatu daerah. Fokus kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai Barat diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualiats sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat.

Secara umum, IPM Kabupaten Manggarai Barat mengalami kenaikan selama rentang tahun 2018 hingga 2022. Namun, capaian tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan capaian rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Manggarai Barat 64,92, sedangkan Provinsi NTT 65,90 dan Nasional 72,91. Adapun penyebab rendahnya nilai IPM Kabupaten Manggarai Barat yaitu

masih cukup rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,80 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,31. Dengan demikian, fokus utama dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Manggarai Barat ditekankan pada komponen RLS dan HLS.

Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 tergolong tinggi pada angka 17,15%. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding angka provinsi NTT sebesar 20,05%. Namun, lebih besar jika dibandingkan dengan angka nasional sebesar 9,54%. Jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Lembor dan Kecamatan Komodo. Kedua kecamatan tersebut didominasi oleh petani dan nelayan yang memiliki tingkat produktivitas dan diversifikasi produk yang tergolong kurang. Selain itu, petani di Kecamatan Lembor paling banyak buruh tani bukan pemilik sawah. Dengan demikian, tingkat kemiskinan disebabkan kurangnya kesejahteraan petani.

Selain itu, dilihat dari persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Manggarai Barat cenderung naik setiap tahun. Pada tahun 2022, TPT Kabupaten Manggarai Barat 4,91%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi NTT, namun lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Dengan demikian, TPT tetap harus ditekan dengan mengoptimalkan penyerapan angkatan kerja pada semua sektor. Hal tersebut karena TPT berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin rendah TPT, maka tingkat kemiskinan juga akan semakin menurun

4.1.3. Tinjauan Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

4.1.3.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat masih menjadi maslah pokok dalam urusan pendidikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, tata kelola pendidikan yang belum optimal, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik yang masih terbatas, penyelenggaraan PAUD yang masih belum optimal, serta masih terbatasnya daya saing siswa di Kabupaten

Manggarai Barat. Pemetaan masalah urusan pendidikan dirumuskan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4. Pemetaan Permasalahan Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan kualitas pendiidkan	belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana tingkat SD dan SMP	masih terbatasnya sarana dan prasaranana pendukung pembelajaran
	Belum optimalnya tata kelola/manajemen pendidikan	belum optimalnya pengelolaan Dapodik
		SOP pelayanan pendidikan belum tersedia
		belum optimalnya sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana pendiidikan
		belum optimalnya monitoring pengelolaan sistem pendidikan
	Masih terbatasnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	masih rendahnya ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi standar
		belum optimalnya pengembangan keprofesian guru
		terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan
	Masih rendahnya daya saing siswa	Belum terpenuhinya standar isi, standar proses, standar evaluasi, dan standar kelulusan di tingkat satuan pendidikan
	belum optimalnya penyelenggaraan PAUD	kesadaran masyarakatnya masih rendah (APK rendah)
		kualitas guru dan pengelola paud masih terbatas
		belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD

2. Kesehatan

Kondisi kesahatan masyarakat merupakan salah satu fokus wajib dari pemerintah daerah. pembangunan daerah dalam urusan kesehatan turut menentukan keberhasilan pembangunan manusia secara umum. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat masih menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemenuhan UKP dan UKM yang masih belum optimal, pemberdayaan masyarakat dalam urusan kesehatan yang masih terbatas, pelayanan kesehatan yang masih belum optimal, dan pengawasan makanan lokal

serta pemenuhan gizi masyarakat yang masih terbatas. Belum optimalnya beberapa faktor tersebut, salah satunya berimplikasi terhadap masih tingginya angka gizi buruk dan prevalensi stunting di Kabupaten manggarai Barat. Permaslahan gizi buruk dan stunting perlu menjadi salah satu prioritas karena merupakan amanat nasional yang perlu diselesaikan bersama mulai dari level daerah, provinsi hingga nasional. Berikut adalah rumusan permaslahan dalam urusan kesehatan:

Tabel 4. 5. Pemetaan Permasalahan Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya derajat kesehatan masayarakat	Belum optimalnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM)	Fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas
		Penyediaan layanan dan manajemen kesehatan belum maksimal
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Kesediaan tenaga untuk melakukan kegiatan masih terbatas
		pemberdayaan di bidang kesehatan masih minim
		minimnya kesadaran masyarakat untuk merubah prilaku secara mandiri
	belum optimalnya pelayanan di fasilitas kesehatan	Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan
		Belum optimalnya fasilitas kesehatan
		Masih terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia
	Masih tingginya prevalensi stunting dan balita gizi buruk	belum optimalnya pemenuhan gizi
		masih rendhnya pemahaman terhadap pemenuhan gizi
		belum optimalnya surveilensi gizi
	masih tingginya produk pangan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar	masih rendahnya sertifikasi pangan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki beberapa permasalahan pokok. Tercatat berdasarkan hasil pemetaan masalah masih terdapat tiga permasalahan pokok, diantaranya yaitu rendahnya kemantapan infrastruktur jalan, permasalahan tata

ruang dan juga irigasi. Kemantapan infrastruktur jalan yang masih rendah disebabkan karena proses dalam pembangunan jalan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan teknis dan kewenangan. Kondisi tata ruang di Kabupaten Manggarai Barat juga masih menjadi permasalahan karena masih belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsi peruntukannya. Keterbatasan irigasi menjadi permasalahan berikutnya yang juga muncul karena dalam pengembangan dan pengelolaannya yang belum optimal sehingga menyebabkan distribusi air di area persawahan menjadi kurang maksimal. Selain itu, pengelolaan air limbah masyarakat juga belum terkelola optimal, ditambah bula terkait distribusi air bersih ke area permukiman yang belum optimal walaupun keberadaan Permasalahan pokok tersebut terpetakan dalam pemetaan masalah sebagi berikut.

Tabel 4. 6.Pemetaan Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kemantapan infrastruktur jalan kabupaten	Pembangunan jalan tidak sesuai dengan kebutuhan teknis dan kewenangan	Minimnya kajian perencanaan pembangunan jalan
		Banyak kegiatan pekerjaan jalan yang dilaksanakan di luar kewenangan SK jalan
		Minimnya pembangunan jalan yang disertai dengan bangunan pelengkap jalan
		Belum optimalnya pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap
		Rendahnya pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan konstruksi jalan
		Rendahnya kualifikasi rekanan penyedia jasa konstruksi
Rendahnya ketaatan terhadap tata ruang	Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Minimnya regulasi umum dan rinci yang mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang
	Belum optimalnya pengawasan pembangunan gedung	Ketaatan pembuatan IMB masih rendah
Belum optimalnya pelayanan akses air bersih	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak	Belum optimalnya pengelolaan saluran air bersih
Belum optimalnya kualitas layanan limbah domestik	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik yang layak	Belum optimalnya sosialisasi tentang kepedulian masyarakat terhadap penanganan air limbah
		Belum tersedianya IPAL Komunal masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih terbatasnya lahan pertanian yang teraliri irigasi	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan irigasi daerah	Banyaknya saluran irigasi yang rusak
		Masih banyak irigasi yang menggunakan saluran tanah / non permanen
		Masih banyak daerah irigasi yang belum memiliki infrastruktur irigasi
Belum optimalnya ketersediaan banguann pengendali bencana	Belum optimalnya identifikasi kawasan rawan bencana	Masih banyak kawasan rawan bencana yang belum dilengkapi infrastruktur pengaman

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Manggarai Barat dalam urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman masih dihadapkan dengan permasalahan pokok berupa rendahnya akses rumah layak huni dan permukiman layak huni. Meskipun data dalam Dinas Perumahan mencatat bahwa jumlah rumah dan permukiman layak huni mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2020, namun jumlah tersebut masih berada jauh dibawah jumlah rumah dan pemukiman tidak layak huni. Dengan demikian, penyelesaian permasalahan tersebut diantaranya dengan melakukan pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 4. 7. Pemetaan Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya akses rumah layak huni dan permukiman layak huni	Belum optimalnya penyelenggaraan PSU dalam kawasan permukiman	Belum tersedianya masterplan drainase permukiman
		Sistem drainase jalan lingkungan belum terintegrasi
		Minimnya koordinasi terkait lokasi pembangunan jalan lingkungan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa
		Minimnya fasilitas prasarana pendukung pemeliharaan PSU
		Rendahnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih
		Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang meiliki akses sanitasi layak
		Belum adanya prasarana penunjang layanan sanitasi seperti IPLT, IPAL, SPAL

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Rendahnya akses kepemilikan rumah layak huni	Belum tersedianya baseline data jumlah rumah tidak layak huni yang valid
		Rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi pembangunan dan korban bencana

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Manggarai Barat, diperlukan peningkatan upaya penegakan peraturan daerah, keamanan, ketertiban, dan keindahan. Selain itu, upaya peningkatan kualitas demokrasi, pendidikan politik serta penanggulangan bencana juga menjadi fokus dalam menjaga stabilitas dan perlindungan sosial masyarakat. Secara umum, upaya perlindungan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat masih terkendala pada terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penegak serta masih rendahnya kepatuhan masyarakat. Selain itu, Kabupaten Manggarai Barat memiliki tingkat risiko terhadap bencana alam yang tinggi, sebagai dampak dari posisinya secara geografis dan geologis. Belum optimalnya dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi aksi pra bencana, Ketika bencana dan paska bencana menjadi permasalahan yang menyebabkan Kabupaten Manggarai Barat memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Ketentraman Ketertiban Umum di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 8. Pemetaan Permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat atas peraturan daerah dan Perkada	Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah pada masyarakat
		Masih lemahnya sanksi bagi pelanggar perda
	Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penegak peraturan	Rasio jumlah anggota Satpol PP dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) belum terpenuhi
		Masih terbatasnya keikutsertaan dalam pendidikan berjenjang pada Satpol PP
		Kurangnya integrasi dan sinkronisasi antar OPD
Belum optimalnya penanganan	Terbatasnya cakupan layanan penanganan	Terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
kebakaran	kebakaran	Masih terbatasnya jumlah WMK
		Masih terbatasnya personil yang terlatih
Masih adanya ancaman dan gangguan stabilitas sosial masyarakat	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan dini gangguan stabilitas wilayah	Belum optimalnya FK Ormas, FK-UB, FPK serta FKDM
		Pengembangan nilai-nilai kebangsaaan dan multikulturalisme yang belum efektif
		Belum optimalnya pengawasan terhadap lembaga asing dan tenaga kerja asing
		Keterbatasan kewenangan dalam penanganan konflik pertanahan
Masih perlunya peningkatan kesadaran kehidupan berpolitik di masyarakat	Masih perlunya peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Masih perlunya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat
		Masih perlunya sosialiasi kegiatan pemilu
		Belum optimalnya pemanfaatan bantuan politik untuk pendidikan politik
Masih tingginya risiko bencana	Belum optimalnya penanggulangan kebencanaan	Kurangnya sosialisasi dan simulasi/ gladi penanggulangan risiko bencana
		Hirarki dokumen pencegahan penanggulangan bencana belum lengkap
		Kurangnya penyebarluasan informasi tentang ancaman, potensi, dan dampak bencana
		Belum adanya keberadaan Desa Tangguh Bencana
		Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
		Belum optimalnya penggunaan peralatan pendeteksi kebencanaan
		Belum Terbentuknya Relawan Tanggap Bencana
		Belum Terbentuknya Tim Reaksi Cepat untuk Penanganan Bencana

6. Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Urusan kesejahteraan sosial terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, keempat pilar tersebut sudah dilaksanakan, namun perlu untuk ditingkatkan. Kendala umum dalam penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Manggarai Barat yaitu belum optimalnya tata kelola penanganan PPKS dan terbatasnya kerjasama dengan

lembaga kesejahteraan sosial. Adapun jenis PPKS yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yaitu fakir miskin, disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, dan korban bencana. Kelompok fakir miskin menjadi salah satu prioritas utama yang perlu diselesaikan. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan sosial di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 9. Pemetaan Permasalahan Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penanganan PPKS	Belum optimalnya tata kelola penanganan PPKS	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan PMKS berkebutuhan khusus
		Terbatasnya kapasitas shelter sosial dalam menampung PPKS
		Belum optimalnya pengelolaan data PMKS (Fakir miskin, disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, korban bencana)
		Belum optimalnya verifikasi dan validasi DTKS
		Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait dalam verifikasi data dan penegakan regulasi urusan sosial
		Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (swasta, organisasi masyarakat, panti, LSM, TKSK, Peksos, PKH, Tagana)	Belum adanya kontrak kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial
		Belum optimalnya peran wahana kesejahteraan masyarakat
		Belum optimalnya peran dan pembinaan pada organisasi sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial
		Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kesejahteraan sosial

4.1.3.2. Layanan Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Meningkatnya pengangguran merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor tenaga kerja. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor tenaga kerja:

Tabel 4. 10. Pemetaan Permasalahan Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Meningkatnya pengangguran	Minimnya kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Belum optimalnya peran BLK
		Terbatasnya kerjasama dengan BLK lain
		Belum tersedianya perencanaan ketenagakerjaan
	Belum optimalnya penempatan kerja	Terbatasnya kontrak kerjasama dengan lembaga pemberi kerja
		Belum adanya data based pencari kerja yang berkompetensi
	Masih adanya permasalahan hubungan industrial	Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan oleh pemberi kerja maupun tenaga kerja
		Kurangnya sosialisasi regulasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja
		Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan peraturan perusahaan
		Belum optimalnya perlindungan ketenagakerjaan sektor formal dan informal

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan serta masih ditemukannya tindak kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah pokok diselesaikan di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi ini berdampak terhadap keberdayaan perempuan secara umum. Berikut merupakan pemetaan masalah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 4. 11. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif
		Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan sektor lainnya
		Terbatasnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
Masih adanya tindakan kekerasan terhadap	Belum optimalnya advokasi dan pendampingan	Belum optimalnya pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
perempuan	layanan kebijakan perlindungan perempuan	Belum optimalnya kapasitas lembaga dan sumber daya manusia penyedia layanan perlindungan perempuan
		Minimnya kesadaran masyarakat untuk melindungi perempuan
Belum terpenuhinya hak anak	Minimnya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Belum optimalnya layanan pengaduan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan
		Belum optimalnya kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak

3. Pangan

Menurunnya ketahanan pangan merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pangan. Persoalan ini berdampak pada laju inflasi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pangan:

Tabel 4. 12. Pemetaan Permasalahan Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya ketahanan pangan	Menurunnya ketersediaan pangan	Stok cadangan pangan daerah masih kurang
		Lumbung pangan dan sarana pendukungnya masih terbatas
	Menurunnya keterjangkauan pangan	Pendistribusian pangan belum merata
		Informasi pangan masih kurang
	Menurunnya pemanfaatan pangan	Diversifikasi konsumsi pangan lokal selain beras masih kurang
	Keamanan pangan masih kurang	Beberapa jenis pangan masih menggunakan bahan kimia di luar ambang batas

4. Pertanahan

Pada urusan pertanahan, masalah utama yang dihadapi antara lain masih tingginya konflik kepemilikan lahan di Kabupaten Manggarai Barat. Masih banyaknya klaim tanah ulayat oleh masyarakat karena belum ada regulasi yang mengatur terkait penetapan tanah ulayat, selain itu tanah terdampak

pembangunan pemerintah juga belum optimal dalam penanganannya. Berikut pemetaan selengkapnya.

Tabel 4. 13. Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya konflik terhadap kepemilikan lahan	Rendahnya proses penyelesaian pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	Belum adanya regulasi sebagai dasar penyelesaian tanah terdampak pembangunan
		Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penetapan tanah ulayat

5. Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan yaitu sebuah proses memajukan suatu daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan merupakan misi dan tujuan dari setiap daerah. Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan predikat baik untuk indeks kualitas lingkungan hidup di tahun 2019. Meskipun demikian, bukan berarti Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki permasalahan dalam urusan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut diantaranya kualitas air, udara dan tutupan lahan yang semakin menurun, serta rendahnya sistem persampahan di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut disajikan secara lebih terperinci permasalahan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 14. Pemetaan Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya kualitas air	Minimnya pengolahan limbah cair domestik
		Belum optimalnya penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
		Tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian
		Rendahnya pengelolaan limbah B3 non medis
		Belum optimalnya konservasi sumber mata air
	Menurunnya kualitas udara	Keberadaan aktivitas industri
		Peningkatan emisi gas kendaraan
		Tingginya aktivitas pembangunan perkotaan
	Menurunnya kualitas keanekaragaman hayati	Belum adanya penetapan lokasi RTH publik
		Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati
		Kurangnya sosialisasi dan publikasi terkait

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		informasi pentingnya menjaga lingkungan (sungai, mataair, hutan laut)
		Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup
	Rendahnya pengelolaan persampahan	Tingginya aktivitas pembakaran sampah
		Minimnya sarana dan prasarana penanganan sampah (TPS, kendaraan sampah)
		Rendahnya cakupan wilayah pelayanan sampah
		Belum adanya rencana induk pengelolaan sampah
		Belum optimalnya tempat pengelolaan sampah 3R

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aministrasi dan kependudukan merupakan salah satu urusan yang berkaitan dengan penyediaan data kependudukan di suatu daerah. urusan ini menjadi penting karena merupakan salah stau basis yang digunakan untuk menentukan arah pembangunan. Belum optimalnya cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data penduduk yang masih belum optimal dalam penentuan arah pembangunan menjadi hal yang harus diselesaikan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pelayanan kependudukan yang belum optimal serta tindak lanjut pemanfaatan data yang masih terbatas. Secara rinci pemetaan permasalahan dalam urusan administrasi kependududkan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15. Pemetaan Permasalahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
masih terbatasnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan Adminduk yang masih terpusat di Dinas Dukcapil belum sampai ke kecamatan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
		Masih terbatasnya kompetensi dan kualifikasi SDM
Rendahnya pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya tindak lanjut pemanfaatan data kependudukan	Masih ada OPD yang belum melakukan perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data kependudukan
		Belum optimalnya ketersediaan jaringan internet dalam akses pemanfaatan data

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya sosialisasi kepada OPD terkait pentingnya pemanfaatan data

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa (masyarakat dan aparatur desa) dalam berpartisipasi aktif pada pembangunan. Urusan tersebut terdiri dari upaya penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan administrasi desa serta pemberdayaan kelembagaan desa. Permasalahan umum urusan desa di Kabupaten Manggarai Barat yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari capaian Indeks Desa Membangun pada tahun 2020, status desa tertinggi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yaitu desa maju sebanyak 2 desa dari 164 desa. Masih sedikitnya desa yang memiliki status maju mengindikasikan bahwa perlu berbagai intervensi untuk membangun desa. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 16. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya kalender pembangunan desa	Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan desa
		Belum optimalnya pendampingan dan pengawasan dalam pembanguna desa
		Updating profil desa belum tepat waktu
	Belum optimalnya penataan desa	Belum tersedianya peta batas desa wilayah desa sesuai dengan regulasi
		Belum optimalnya penataan aset desa
		Belum semua desa memiliki peraturan desa terkait kewenangan lokal skala desa
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya pengelolaan potensi desa	Kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kelompok masyarakat secara transparan
		Kurangnya pendampingan dan pengawasan dalam pembentukan BUMDes (sekedar monitoring)
		Belum adanya kajian studi potensi desa
		Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola BUMDes

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
		Belum optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan
		Terbatasnya infrastruktur desa
	Belum optimalnya peran lembaga desa dalam mendukung perencanaan dan pembangunan desa (tokoh adat, tenaga pengajar, posyandu, pemuda, dll)	Belum optimalnya pembinaan lembaga desa
		Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu program nasional yang diturunkan dalam pelaksanaan program KB. Belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai Barat menjadi salah satu maslah pokok yang harus diselesaikan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyelenggaraan program KB yang belum optimal, tingkat kesadaran masyarakat terhadap KB yang masih terbatas, serta belum adanya pemetaan terkait pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah rumusan permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB):

Tabel 4. 17. Pemetaan Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Belum optimalnya penyelenggaraan program KB	Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi masih terbatas
		Masih Terbatasnya cakupan layanan KB
		masih adanya kasus pernikahan dini
	Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB	Belum optimalnya penyelnngaraan Komunikasi Infornasi dan Edukasi (KIE) tentang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
		Terbatasnya kompetensi tenaga penyuluh KB
		Keterlibatan/kesadaran kaum pria untuk menjadi peserta KB sangat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		rendah
	Belum terlaksananya pemetaan pengedalian penduduk	belum optimlanya pemanfaatan data kependudukan
		belum adanya kajian kependudukan
	belum optimalnya ketahanan keluarga	belum optimalnya pembinaan keluarga sejahtera dan pra sejahtera

9. Perhubungan

Penyelenggaraan dan pelayanan dalam urusan perhubungan bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keselamatan dalam transportasi. Kurang optimalnya dalam pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten Manggarai Barat masih menjadi permasalahan utama. Terdapat dua permasalahan turunan yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan pokok tersebut, yaitu masih belum optimalnya tingkat kenyamanan dan keselamatan dalam transportasi serta masih minimnya penyelenggaraan lalu lintas perhubungan laut. Detail permasalahan dalam urusan perhubungan di Kabupaten Manggarai Barat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. 18. Pemetaan Permasalahan Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kualitas pelayanan bidang perhubungan	Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya regulasi yang mengatur aktivitas lalu lintas angkutan jalan
		Minimnya kelengkapan perlengkapan jalan
		Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan (rambu-rambu)
	Kurangnya kecepatan layanan uji kendaraan bermotor	Rendahnya fungsi peralatan layanan pengujian kendaraan bermotor
		Belum tersedianya dokumen layanan angkutan jalan
	Belum optimalnya pengelolaan parkir	Belum tersedianya lahan parkir yang memadai
	Belum optimalnya pengelolaan angkutan	Belum tersedianya terminal pengurai angkutan umum
	Rendahnya penyelenggaraan lalu lintas perhubungan laut	Minimnya ketersediaan dermaga rakyat
		Minimnya sosialisasi keselamatan pelayaran pada aktivitas angkutan laut
		Belum adanya fasilitas galangan kapal

10. Komunikasi dan Informatika

Berkembangnya era digital, menjadi tantangan baru dari setiap urusan pembangunan. Komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang memiliki tantangan terhadap kemajuan era digital. Setiap urusan dituntut untuk mengembangkan ke arah digitalisasi, termasuk dalam sistem pemerintahan. Kabupaten Mangggarai Barat masih memiliki kapasitas yang rendah dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Permasalahan pokok tersebut disebabkan karena masih belum optimalnya dalam penyelenggaraan *E–government* dan juga tergolong masih rendahnya masyarakat publik dalam mengakses informasi. Penjabaran dari kedua permasalahan tersebut tersajikan pada pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 4. 19. Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	Belum optimalnya penyelenggaraan E-government	Minimnya sarana prasarana pendukung penerapan SPBE
		Rendahnya tata kelola dan layanan SPBE
		Belum memadainya kapasitas SDM bidang IT
		Minimnya regulasi yang mengatur tata kelola dan layanan SPBE
		Masih rendahnya penyelenggaraan keamanan informasi
		Minimnya perangkat daerah yang menggunakan persandian dalam komunikasi
	Masih rendahnya akses informasi publik	Belum optimalnya pemberdayaan dan peran aktif masyarakat / KIM dalam penyebarluasan informasi
		Kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu belum optimal
		Minimnya prasarana penunjang layanan RSPD
		Rendahnya kualitas dan kuantitas konten siaran RSPD
		Rendahnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik
		Masih adanya wilayah yang belum terjangkau telekomunikasi
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan statistik sektoral

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian belum optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor koperasi dan UKM. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor koperasi dan UKM:

Tabel 4. 20. Pemetaan Permasalahan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian belum optimal	Belum optimalnya kualitas manajemen koperasi	Kapasitas SDM pengurus koperasi masih terbatas
		Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Sarana koperasi belum memadai
	Omzet usaha mikro masih rendah	Kapasitas produksi belum optimal
		Kualitas produk masih kurang
		Kapasitas pemasaran belum optimal

12. Penanaman Modal

Rendahnya realisasi nilai investasi dibanding rencana investasi merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor penanaman modal. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor penanaman modal:

Tabel 4. 21. Pemetaan Permasalahan Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya realisasi nilai investasi dibanding rencana investasi	Daya tarik investasi perlu ditingkatkan	Identifikasi potensi dan peluang investasi belum optimal
		Promosi potensi investasi belum memadai
		Kondusivitas iklim investasi belum memadai
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal	Kurangnya kepatuhan investor untuk melaporkan perkembangan usahanya
	Kualitas pelayanan perizinan belum optimal	Standar pelayanan dan SOP belum dilaksanakan

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kualitas pemuda di suatu daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah karena turut berkontribusi dalam menentukan pembangunan manusia. Kontribusi pemuda dalam pembangunan yang masih belum optimal serta prestasi olahraga daerah yang masih rendah perlu menjadi

perhatian khusus dari pemerintah. Beberapa masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas organisasi kepemudaan yang masih terbatas, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi yang masi rendah serta dukungan pemerintah terhadap kegiatan keolahragaan yang belum optimal. Berikut adalah rumusan rinci terkait rumusan masalah dalam urusna kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 4. 22. Pemetaan Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	belum optimalnya kualitas organisasi kepemudaan	belum optimalnya Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
		Banyak pemuda yang belum terdaftar dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
		Belum optimalnya organisasi kepramukaan
	belum optimalnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	masih terbatasnya kompetensi pemuda
		belum optimalnya Pembinaan terhadap kelompok pemuda untuk bergerak di sektor ekonomi
Masih minimnya Prestasi Olahraga	Belum optimalnya dukungan terhadap kegiatan keolahragaan	Belum optimalnya pembinaan olahraga secara berjenjang sejak usia dini
		belum optimalnya serifikasi pelatih
		belum optimalnya kapasitas wasit
		Belum memadainya Sarana prasarana olahraga
		belum optimalnya manajemen pengelolaan olahraga daerah

14. Statistik

Urusan statistik erat kaitannya dengan penggunaan dan pemanfaatan data sektoral dalam penyelenggaraan pembangunan. Permasalahan urusan statistik di Kabupaten Manggarai Barat secara umum yaitu masih rendahnya penggunaan data statistik sektoral untuk penyelenggaraan pembangunan yang diakibatkan oleh data statistik yang belum tersedia secara terintegrasi.

Tabel 4. 23. Pemetaan Permasalahan Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Minimnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyelenggaraan	Belum optimalnya ketersediaan data dan statistik	Rendahnya kepatuhan OPD dalam penyediaan data statistik sektoral

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pembangunan	sektoral yang terintegrasi	Belum adanya regulasi terkait tata kelola statistik sektoral
		Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi data

15. Kebudayaan

Terkait sektor kebudayaan, masalah utama yang dihadapi masyarakat Manggarai Barat adalah masih rendahnya usaha memajukan kebudayaan daerah. Hal ini antara lain terjadi karena pengelolaan kebudayaan yang masih rendah dan pelestarian cagar budaya yang belum maksimal. Berikut uraian selengkapnya.

Tabel 4. 24. Pemetaan Permasalahan Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya usaha pemajuan kebudayaan daerah	Belum optimalnya upaya pelestarian kebudayaan local	Kesadaran kelompok atau pelaku budaya masih rendah
		Pengetahuan tentang kebudayaan masih rendah
		Bergesernya nilai budaya karena dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK
		Belum dilakukan pendataan manuskrip
	Rendahnya upaya pelestarian cagar budaya	Status tanah masih milik masyarakat
		Belum ada pembebasan lahan
		Belum adanya pagar pengamanan situs
		Sebagian compang ada di tengah kampung, sebagian ada di tanah milik pribadi dan ada juga di hutan tutupan

16. Perpustakaan

Pengembangan urusan perpustakaan di tingkat daerah merupakan salah satu hal yang penting. Hingga saat ini, permasalahan utama yang dihadapi terkait urusan perpustakaan adalah terkait minat baca masyarakat yang masih rendah. Terdapat berapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, diantaranya adalah pengelolaan perpustakaan yang belum optimal dan kesadaran masyarakat tentang literasi yang masih terbatas. Berikut merupakan pemetaan rinci terkait permasalahan dalam urusan perpustakaan di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 4. 25. Pemetaan Permasalahan Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya minat baca masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan perpstakaan	Ketersediaan fasilitas perpustakaan belum memadai
		Koleksi buku dalam perpustakaan masih terbatas
		Pelestarian naskah sejarah milik Daerah belum optimal.
		Pengelola perpustakaan masih terbatas
		Cakupan layanan perpustakaan masih terbatas
		masih terbatasnya SDM pengelola Perpustakaan
	Masih rendahnya Kesadaran masyarakat tentang literasi	Pembudayaan gemar membaca belum optimal
		Pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi masih minim

17. Kearsipan

Urusan kearsipan di suatu daerah diarahkan untuk melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah. kinerja layanan kearsipan dapat dilihat dari cakupan layanan kearsipan serta persentase OPD yang mengelola arsip secara baku. Belum optimalnya penyelamatan dn pemeliharaan arsip daerah masih menjadi permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Manggarai Barat. Sistem pengelolaan arsip daerah menjadi salah satu hal yang perlu untuk diintervensi. Berikut adalah pemetaan masalah dalam urusan kearsipan:

Tabel 4. 26. Pemetaan Permasalahan Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
belum optimalnya penyelamatan dan pemeliharaan arsip daerah	Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah	Kualitas dan kuantitas pengelola arsip (arsiparis) masih terbatas
		Pemahaman perangkat daerah terkait pentingnya pengelolaan arsip masih rendah
		Belum adanya SOP terkait penghapusan arsip
		Mekanisme alih media arsip belum berjalan maksimal
		Sarana prasarana kearsipan belum memadai
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola arsip

18. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Manggarai Barat secara umum masih belum optimalnya pelayanan persandian bagi Perangkat Daerah akibat rendahnya pemahaman terkait kemanfaatan persandian untuk keamanan informasi serta minimnya penggunaan persandian dalam pelaksanaan pemerintahan.

Tabel 4. 27. Pemetaan Permasalahan Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya jaminan keamanan data dan informasi	Belum optimalnya layanan persandian	Rendahnya pemahaman aparatur di bidang persandian untuk keamanan informasi
		Belum adanya regulasi terkait tata kelola keamanan informasi
		Rendahnya Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung persandian

4.1.3.3. Urusan Pilihan

1. Perikanan

Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perikanan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor perikanan:

Tabel 4. 28. Pemetaan Permasalahan Urusan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Menurunnya produksi perikanan tangkap	Nelayan beralih profesi ke jasa pariwisata
		Akses terhadap bantuan permodalan masih terbatas
		Sarana penangkapan masih bersifat tradisional/berskala kecil
		Rendahnya kapasitas SDM nelayan
		Rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok nelayan
	Produksi perikanan budidaya belum optimal	Pakan sangat mahal
		Terbatasnya persediaan Bibit unggul

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Akses terhadap bantuan permodalan masih terbatas
		Teknologi budidaya masih tradisional
		Sistem budidaya masih tradisional
		Minat masyarakat untuk membudidayakan ikan masih rendah
		Rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok perikanan budidaya
	Kualitas produk perikanan belum memadai	Standarisasi mutu produk perikanan belum pernah dilaksanakan

2. Perindustrian

Rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perindustrian. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor perindustrian:

Tabel 4. 29. Pemetaan Permasalahan Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Nilai produksi IKM masih rendah	Ketersediaan bahan baku yang tidak kontinu
		Kapasitas SDM pelaku IKM kurang memadai
		Sarana produksi kurang memadai
		Akses terhadap bantuan permodalan kurang memadai
	Daya saing produk IKM masih rendah	Standarisasi pengolahan produk IKM belum memadai

3. Pariwisata

Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pariwisata. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pariwisata:

Tabel 4. 30. Pemetaan Permasalahan Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan belum optimal	Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan belum optimal
		Pemanfaatan ekonomi pariwisata untuk masyarakat lokal belum optimal
		Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung masih kurang
		Pelestarian lingkungan belum optimal
	Pemasaran destinasi wisata belum optimal	Promosi langsung masih kurang
		Promosi tidak langsung (luring dan daring) belum optimal
	Belum optimalnya kelembagaan pariwisata	Integrasi kerjasama dengan sektor-sektor terkait belum optimal
		Lembaga pariwisata berbasis masyarakat masih lemah
		Kerjasama Pemda dengan Pemerintah Pusat masih perlu ditingkatkan terutama dalam menetapkan Labuan Bajo dan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata super premium
	Perkembangan industri lokal penopang pariwisata masih lemah	Lemahnya kapasitas SDM pelaku industri pariwisata
		Intergrasi pariwisata dengan Pokdarwis, Bumdes, BUMD dan lembaga usaha lainnya belum optimal
Pelestarian budaya belum optimal	Pelestarian budaya benda dan bukan benda belum optimal	Penelitian/ identifikasi budaya belum memadai
		Perencanaan dan upaya perlindungan budaya belum dilakukan secara komprehensif
		Pemeliharaan budaya lokal kurang maksimal
		Pemanfaatan budaya belum optimal
		Pengawasan budaya belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya perekonomian sub sektor ekonomi kreatif	Kapasitas produksi ekonomi kreatif belum optimal	Kapasitas SDM pelaku Ekraf belum memadai
		Kualitas sarana / teknologi belum memadai
		Kemudahan terhadap akses bantuan permodalan belum optimal
		Ketersediaan bahan baku produksi masih terbatas
		Metode produksi belum berorientasi bisnis
	Kualitas produk ekonomi kreatif belum memadai	Penerapan standar sertifikasi belum optimal
	Kapasitas pemasaran produk ekonomi kreatif masih rendah	Penerapan metode marketing-mix belum memadai

4. Pertanian

Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pertanian. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pertanian:

Tabel 4. 31. Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Fluktuasi produktivitas tanaman pangan dan produksi tanaman hortikultura	Irigasi usaha tani kurang memadai
		Jalan usaha tani kurang memadai
		Kualitas bibit dan benih yang tersedia kurang memadai
		Akses pupuk dan obat-obatan kurang memadai
		Terbatasnya sarana penunjang produksi pertanian
		Serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim
		Metode pertanian masih konvensional
		Meningkatnya alih fungsi lahan
	Produksi tanaman	Metode budidaya masih konvensional

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	perkebunan menurun	Kapasitas SDM petani kurang memadai
		Ketersediaan tanaman produktif sudah menurun
		Sarana produksi masih kurang memadai
		Serangan hama penyakit
	Kualitas produk pertanian kurang memadai	Penerapan *good handling practices* masih kurang
	Produksi hasil ternak menurun	Kapasitas SDM peternak belum memadai
		Metode budidaya masih konvensional
		Ketersediaan pakan ternak kurang memadai
		Bibit unggul kurang memadai
		Penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan penyakit zoonosis lainnya masih terjadi
	Kualitas produk hasil peternakan belum memadai	Standarisasi penanganan produk masih kurang
	Populasi ternak menurun	Tingkat kelahiran ternak cenderung menurun
		Tingkat kematian ternak cenderung naik

5. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian belum optimal dan harga pasar yang tidak stabil merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perdagangan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor perdagangan:

Tabel 4. 32. Pemetaan Permasalahan Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian belum optimal	Kapasitas pemasaran produk pertanian, perikanan dan produk lokal lainnya belum optimal	Penerapan metode marketing-mix belum optimal
	Revitalisasi pasar tradisional belum optimal	Sarana pasar belum memadai
		Kapasitas SDM pedagang kurang memadai

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Belum optimalnya pengembangan pasar tertib ukur
Harga pasar yang tidak stabil	Tingkat kelancaran distribusi barang belum optimal	Stabilitas harga barang kurang terjaga
		Stabilitas ketersediaan barang kurang terjaga

4.1.3.4. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan

1. Perencanaan

Pelaksanaan urusan perencanaan dalam lima tahun terakhir masih memiliki beberapa permasalahan. Diantaranya yaitu masih rendahnya kualitas kinerja perencanaan daerah/ Hal tersebut diakibatkan oleh masih rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan, penyusunan dokumen yang tidak tepat waktu, serta rendahnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4. 33. Pemetaan Permasalahan Urusan Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya pemahaman OPD terkait perencanaan strategis
		Belum tersedianya tenaga fungsional perencana
		Belum optimalnya rumusan indikator kinerja
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak tepat waktu
		Rendahnya ketersediaan data sebagai basis perencanaan
		Masih kurangnya kualitas dan kapasitas SDM
	Rendahnya pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Rendahnya ketersediaan data kinerja pembangunan daerah
		Rendahnya pemahaman perangkat daerah dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan
		Belum adanya *reward and punishment*

2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan pendapatan, masih terdapat tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi. Di kabupaten Manggarai Barat, masih ada beberapa potensi keobocoran pajak serta potensi sumber-sumber pendapatan yang belum teridentifikasi secara maksimal.

Tabel 4. 34. Pemetaan Permasalahan Urusan Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya peningkatan tata kelola keuangan daerah	Belum terintegrasinya sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	Pelaporan keuangan yang belum tepat waktu dan sesuai SAP
		Inventarisasi aset belum optimal
	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan aset disetiap Perangkat Daerah
Belum optimalnya penerimaan pajak daerah	Belum optimalnya pelayanan pajak	Masih adanya potensi kebocoran pajak
		Sarana dan prasarana pembayaran pajak belum optimal (penggunaan e-pendapatan)
		Belum berjalannya kerjasama terkait pelayanan perpajakan daerah
	Masih rendahnya kesadaran wajib pajak	Belum optimalnya penerapan *reward* dan *punishment*
		Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak
Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah	Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan	Belum optimalnya sarana dan prasarana retribusi kurang
		Belum optimalnya pendataan sumber-sumber retribusi

3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia pada suatu organisasi pemerintah. Di Kabupaten Manggarai Barat, masih terdapat beberapa permasalahan baik dari sisi kualitas

ASN, kuantitas ASN, serta masih adanya pelanggaran disiplin serta jabatan yang tidak terisi baik itu struktural maupun fungsional.

Tabel 4. 35. Pemetaan Permasalahan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kualifikasi ASN	Belum optimalnya upaya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN	Penerimaan ASN masih didasarkan pada tingkat dan kualifikasi pendidikan yang rendah. (Yang melalui K2)
		Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal
Belum optimalnya kualitas manajemen ASN	Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi pegawai	Rendahnya jumlah pejabat struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
		Belum terpenuhinya kebutuhan diklat fungsional
	Masih adanya jabatan struktural yang belum terisi	Belum terdatanya SDM aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong
		Belum tersedianya standar kompetensi dan pola karir aparatur yang jelas
	Masih tingginya pelanggaran disipilin ASN	Belum adanya pemberian sanksi dan penghargaan secara konsisten
	Belum adanya pemberian hukuman dan penghargaan secara konsisten	Belum tersedianya pemberian tunjangan berbasis kinerja
		belum tersedianya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		Belum diterapkan peraturan disiplin di setiap OPD sebagaimana peraturan yang berlaku

4. Penelitian dan Pengembangan

Hasil dan pemanfaatan dari kinerja penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat masih belum maksimal. Hal tersebut karena masih ada beberapa hasil dari penelitian dan pengembangan yang belum ditindaklanjuti.

Tabel 4. 36. Pemetaan Permasalahan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penelitian dan	Rendahnya tindak lanjut pemanfaatan hasil	Kurangnya sosialisasi dan diseminasi terhadap hasil-hasil penelitian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pengembangan dalam pembangunan	penelitian sebagai basis perencanaan pembangunan	Rendahnya koordinasi Perangkat Daerah dalam pemanfaatan hasil penelitian

5. Pengawasan

Urusan pengawasan merupakan urusan yang dilaksanakan leh inspektorat kabupaten. Setidaknya terdapat tiga masalah pokok yang masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan urusan pengawasan di Kabupaten Manggarai Barat. Permasalahan tersebut akan dipaparkan dalam pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 4. 37. Pemetaan Permasalahan Urusan Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih terdapat temuan administrasi dan temuan KN/KD pada LHP internal dan eksternal	Rendahnya kecukupan dan kompetensi APIP	Belum proporsionalnya jumlah dan kualitas APIP terhadap objek pemeriksaan
		Minimnya pelatihan APIP
		Masih rendahnya APIP yang bersertifikat
	Rendahnya implementasi SPIP di SKPD	Pemahaman terhadap SPIP masih rendah
		Belum adanya daftar risiko program/kegiatan di OPD
		Belum adanya monev terhadap RTL Daftar Risiko
	Masih terdapat temuan yang berulang	Belum optimalnya pemantauan kinerja dan keuangan
		Belum optimalnya reviu kinerja dan keuangan
		Belum optimalnya asistensi dan pendampingan
Rendahnya tindak lanjut temuan administrasi dan temuan kerugian negara, kerugian daerah atas LHP internal dan eksternal	Belum optimalnya kinerja tim tindak lanjut kerugian negara/daerah	Beluma danya kertas kerja tim pemantauan tindak lanjut
		Belum optimalnya monev secara berkala oleh pimpinan
Rendahnya tindaklanjut pengaduan	Koordinasi tindak lanjut pengaduan	Belum tersedianya SOP terkait koordinasi pengaduan masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
masyarakat/kasus khusus	masyarakat tidak optimal	Belum tersedianya tim yang menangani tindak lanjut pengaduan masyarakat secara terintegrasi
		Terbatasnya kuantitas dan kualitas APIP

6. Sekretariat Dewan

DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DRPD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Secara umum, Sekretariat Dewan dalam pelaksanaan tugas fasilitasnya masih memiliki beberapa permasalahan yang akan diuraikan dalam pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 4. 38. Pemetaan Permasalahan Urusan Sekretariat Dewan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti e-risalah dan e-notulen
		Belum optimalnya penyediaan informasi berbasis online
	Masih rendahnya penyelesaian pembentukan Perda	Belum tersedianya SOP pengajuan RANPERDA
		Kajian akademis belum sinkron dengan aturan yang lebih tinggi
	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan pemanfaatan sarana dan prasarana Pimpinan DPRD	Rendahnya Kepatuhan DPRD terhadap penyelesaian administrasi keuangan
		Rendahnya komitmen terhadap pemanfaatan aset

7. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kebijakan kepala daerah. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang masih belum

optimal, serta nilai IKM yang masih rendah dan belum terlaksana di seluruh OPD. Berikut adalah tantangan atau permasalahan Sekretariat Daerah.

Tabel 4. 39. Pemetaan Permasalahan Urusan Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Masih kurangnya orientasi perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis *outcome*	Masih kurangnya ketersediaan data dalam pengukuran kinerja di setiap OPD
		Masih kurangnya kapasitas OPD dalam penyusunan laporan kinerja
		Rilis data dari BPS yang terlambat sehingga mempengaruhi proses penyusunan laporan kinerja
		Rendahnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
Belum optimalnya fungsi pengendalian kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk akuntabilitas sosial	Masih belum terlaksananya SP dan SOP pada Perangkat Daerah
		SKM masih terbatas hanya pada 3 OPD
		Masih rendahnya kesadaran SKPD dalam pelaksanaan SKM
	Belum efektifnya fungsi pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan daerah	Belum adanya instrumen pengendali dan pengukur keberhasilan kebijakan
		Belum efektifnya koordinasi implementasi kebijakan
		Belum tersedianya pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa
		Masih kurangnya identifikasi resiko dan potensi sosial dalam pemberian bansos
		Belum optimalnya peran/fungsi desiminasi informasi pembangunan dan kebijakan daerah (media informasi belum tersedia)
		Belum optimalnya tindak lanjut kebijakan pusat maupun provinsi
		Belum optimalnya tindak lanjut kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga
		Masih banyak OPD yang tidak melaksanakan Raperda

8. Pemerintahan Umum

Pada urusan pemerintahan umum khususnya dalam hal pembinaan kesatuan politik, permasalahan utama yang dihadapi antara lain rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Berikut uraian selengkapnya.

Tabel 4. 40. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemerintahan Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya peningkatan kesadaran kehidupan berpolitik di masyarakat	Masih perlunya peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Masih perlunya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat
		Masih perlunya sosialiasi kegiatan pemilu
		Belum optimalnya pemanfaatan bantuan politik untuk pendidikan politik

4.1.4. Tinjauan Terhadap Lingkungan Strategis

4.1.4.1. Penelaahan Isu Internasional

Isu internasional merupakan isu besar yang memiliki dampak secara global dan perlu direspon baik oleh pemerintah pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat beberapa isu internasional yang saat ini sedang hangat, antara lain adalah berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan respon dari isu *Sustainable Development Goals* (SDG's). pada level nasional, isu tersebut direspon dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, isu global lain yang terus berhembus adalah terkait revolusi industri 4.0. isu ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat maupun pemerintah. Digitalisasi guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi menjadi fokus perhatian dalam isu revolusi industri 4.0 . isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah terkait penanganan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat penting dalam merespon isu ini agar penanganan dan pemulihan ekonomi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan global sebagai tindak lanjut dari *Milennium Development Goals. Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sustainable Development Goals (SDGs) memuat 17 tujuan pembangunan yang meliputi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari empat pilar yaitu:

a. Pembangunan Sosial;
b. Pembangunan Ekonomi;
c. Pembangunan Lingkungan;
d. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Tujuh belas tujuan *SDGs* dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target *SDGs* tersebut menjadi mandat internasional yang bukan hanya harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, evaluasi mengenai pencapaian target-target *SDGs* perlu dilakukan secara berkala.

2. Revolusi Industri 4.0

Hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan tantangan baru bagi sektor-sektor publik terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. salah satu poin paling krusial dari revolusi industri 4.0 adalah proses digitalisasi. Proses digitalisasi termasuk penggunaan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, perizinan, pariwisata dan sektor lainnya.

Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa tingkat inovasi dan digitalisasi Indonesia pada akhir tahun 2020 hanya sebesar 0,08, jauh di bawah Thailand dan Vietman yang masing-masing berada pada angka 0,62 dan 0,44. Lebih dari itu, peringkat Indonesia juga masih berada di bawah negara ASEAN lainnya yaitu Filipina sebesar 0,14 dan Kamboja sebesar 0,12. Karena itu, proses digitalisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah menuju ke arah yang lebih baik. Data lain juga menunjukkan bahwa berdasarkan *E-Government Survey* 2020 yang dilakukan oleh United Nations mencatat bahwa tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia berada pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa dari sisi daya saing penyelenggaraan *e-government* di Indonesia masih berada di bawah negara-negara lain di ASEAN.

Kebijakan transformasi digital di Indonesia diarahkan pada dua sektor prioritas yaitu pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Transformasi digital dalam pelayanan publik bersinggungan dengan kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan publik berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai *E-Government.* Kebijakan pemerintah berbasis elektronik sudah digulirkan jauh sebelum isu digititaliasi di Indonesia muncul menjadi agenda publik. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government.* Pengembangan *E-Goverment* ini mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Pada level daerah, digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi ekonomi juga memberikan tantangan dan peluang. Pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan perizinan. Namun demikian, tantangan pada sisi infrastruktur dan kesiapan SDM menjadi hal yang harus lebih dulu diintervensi. Demikian halnya dengan peluang ekonomi digital yang terus tumbuh di daerah. Problem terbesar yang dihadapi adalah kualitas SDM dan infrastruktur yang belum mendukung dan merata di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, isu ini harus menjadi pedoman bagi daerah dalam perumusan isu dan kebijakan strategis di masa yang akan datang.

3. Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19

Pada awal Maret tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai suatu pandemi yag harus direspon dan ditangani secara serius oleh seluruh dunia. Pandemi Covid-19 ini turut berdampak terhadap seluruh aktivitas masyarakat di Indonesia, pada semester I tahun 2020 kebijakan pembatasan fisik dan pembatasan sosial mulai diberlakukan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian secara nasional.

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi tentunya akan menyebabkan berbagai permasalahan lain yang saling berkaitan

seperti peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat, peningkatan tingkat inflasi, dan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut tentunya perlu kebijakan khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang sifatnya preventif dan responsif sehingga berbagai dampak negatif dari pandemi Covid-19 bisa lebih diminimalkan.

Dengan demikian, Covid-19 merupakan isu krusial yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dokumen perencanaan hingga lima tahun ke depan. Keberadaan pandemi ini mendorong pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut berlaku bagi pelaksanaan program pembangunan di seluruh sektor termasuk pariwisata yang menjadi sektor paling terpukul dengan adanya Covid-19.

Saat ini berbagai negara telah memulai membuka kembali destinasi wisata. Pencegahan Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi termasuk di sektor pariwisata menjadi isu global yang dilakukan oleh berbagai negara. Dalam upaya membuka kembali pariwisata di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan program CHSE *(Cleanlliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability)*. Program ini diluncurkan sebagai upaya dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan terutama di sektor usaha pariwisata. Pemberian sertifikasi ini merupakan upaya pencegahan Covid-19 yang yang harus ditindaklanjuti hingga level daerah dan destinasi wisata. Oleh karena itu, sertifikasi CHSE harus menjadi spirit dan juga prosedur pencegahan Covid-19 yang dilakukan di setiap destinasi wisata. Hal itu juga merupakan adaptasi kebiasaan baru dalam berbagai sektor seperti pariwisata.

4. Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah konsep penyelenggaraan pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa kini maupun di masa yang akan datang; dengan memperhatikan kebutuhan pengunjung, industri pariwisata, lingkungan, dan masyarakat sekitar (UNWTO & UNEP, 2005). Pengembangan pariwisata berkelanjutan beserta praktek pengelolaannya dapat diterapkan pada semua tipe wisata dan tujuan. Konsep ini berguna untuk memastikan bahwa penyelenggaraan

pariwisata tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan lingkup sosio-kultural di sekitarnya.

Secara lebih sederhana, pariwisata berkelanjutan tidak hanya memperhatikan kebutuhan para wisatawan serta daerah dan masyarakat sekitar, namun juga harus melindungi dan mengembangkan pariwisata tersebut untuk masa yang akan datang. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika objek wisata sembari mempertahankan integritas kultural, proses ekologi, dan keanekaragaman hayati. Penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan harus dapat menekan dampak negatif terhadap lingkungan dan kebudayaan lokal dengan tetap meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, pariwisata berkelanjutan adalah rangkaian aktivitas pariwisata yang sensitif terhadap ekologi dan budaya setempat.

Berikut adalah sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan:

a. Pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan elemen utama dari pembangunan kepariwisataan secara optimal serta terjaganya keutuhan ekologi dengan mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
b. Penghormatan terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan turut serta dalam pelestarian warisan budaya dan nilai-nilai tradisi dengan berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi.
c. Terjaminnya keberlanjutan usaha yang menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang terdistribusikan secara merata bagi para pemangku kepentingan; yang termasuk berupa kesempatan kerja, kesempatan untuk memperoleh penghasilan, tersedianya pelayanan dan fasilitas umum yang baik bagi masyarakat lokal serta kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

4.1.4.2. Penelaahan Isu Nasional

Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional di daerah, sehingga diharapkan akan tercapai keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Secara spesifik, pemerintah telah menetapkan Manggarai Barat (Labuan Bajo) sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan dan melaksanakan sejumlah program pembangunan di Manggarai Barat mulai dari membentuk Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo-Flores, pengembangan Bandar Udara Komodo dan pelabuhan *multipurpose*, serta pengembangan KEK Golomori untuk mendukung kebijakan tersebut. Pemerintah juga menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2023 di Labuan Bajo. Penyelenggaraan agenda kenegaraan di level internasional tersebut telah membawa dampak percepatan pembangunan Manggarai Barat, antara lain dalam bentuk peningkatan akses atau konektivitas wilayah ke kawasan Golomori. Peluang besar ke depan akan tercipta dengan semakin dikenalnya Labuan Bajo atau Manggarai Barat secara umum di dunia internasional, sehingga diharapkan dapat meningkatan industri pariwisata yang membawa dampak multiganda berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan nasional di wilayah Manggarai Barat dapat ditelaah dari dokumen RPJMN 2020-2024. Prioritas pembangunan dalam RPJMN di wilayah NTT termasuk Kabupaten Manggarai Barat adalah percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:

KORIDOR PERTUMBUHAN	KORIDOR PEMERATAAN
1. Kab. Manggarai Barat	1. Kab. Sumba Timur
2. Kab. Manggarai	2. Kab. Sumba Tengah
3. Kab. Manggarai Timur	3. Kab. Sumba Barat
4. Kab. Ngada	4. Kab. Sumba Barat Daya
5. Kab. Nagekeo	5. Kab. Timor Tengah Selatan
6. Kab. Ende	6. Kab. Timor Tengah Utara

KORIDOR PERTUMBUHAN	KORIDOR PEMERATAAN
7. Kab. Sikka	7. Kab. Malaka
8. Kab. Kupang	8. Kab. Belu
9. Kota Kupang	

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk wilayah NTT, antara lain:

1. **Pengembangan sektor unggulan**

   Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

   a. Pengembangan komoditas unggulan wilayah Nusa Tenggara yaitu kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap dengan fokus komoditas yaitu kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam dan perikanan budidaya.
   b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
   c. Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT/WPP

2. **Pengembangan kawasan strategis**

   Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

   a. Destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi local melalui sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo
   b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan jalan lingkar/trans pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, jalan akses DPP Labuan Bajo, jalan parallel

perbatasan, pengembangan pelabuhan Labuan Bajo dan Bandara Labuan Bajo

c. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi
d. Peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan Kerja

3. Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan

a. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah, percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan layanan dasar, pengembangan ekonomi local, pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal
b. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019 selama maksimal 3 tahun, yaitu Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan TTU
c. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan asset desa, pemberdayaan masyarakat adat dan penguatan pendamping desa, penataan ruang dan penetapan batas desa serta peningkatan peran BUMDes.
d. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditi unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur
e. Penanganan stunting dengan lokus pada 21 kabupaten

f. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 15,69% di NTT
g. Pengarusutamaan penanggulanan bencana dan adaptasi perubahan iklim

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

a. Percepatan penerapan SPM di daerah
b. Percepatan kemudahan berusaha dan reformasi pelayanan perizinan terutama investasi
c. Penataan lembaga dan organisasi pemda yang lebih efisien dan efektif
d. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
e. Peningkatan riset dan inovasi daerah
f. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
g. Peningkatan kualitas belanja daerah
h. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan
i. Pengembangan kerja sama antardaerah
j. Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak
k. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan
l. Penataan ruang dan lahan
m. Pemenuhan SPM kebencanaan melalui:
    - Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan.
    - Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal.
    - Peningkatan investasi mitigasi structural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana.
n. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
    - Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi.

- Optimalisasi potensi sumber energy baru terbarukan.
- Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam.
- Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci serta perlindungan kawasan hutan.
- Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang.
- Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwsata.
- Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu.
- Pengembangan sarana dan prasarana transportasi masal.
- Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untu mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.

4. **Labuan Bajo bagian dari *major project* 10 destinasi pariwisata prioritas di dalam RPJMN 2020-2024**

   Peningkatan nilai tambah pada 10 destinasi pariwisata prioritas difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. *Major project* tersebut diharapkan membawa manfaat:

   - Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD pada 2024.
   - Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan pada 2024.

4.1.4.3. Penelaahan Isu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat memiliki momentum yang tepat untuk memperkuat sinergi perencanaan dengan Provinsi Nusa Tenggara

Timur (NTT). Provinsi NTT pada tahun 2023 telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Penyusunan RPD digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi Pj. Gubernur NTT. Perubahan RPJMD Manggarai Barat, dengan demikian perlu mengintegrasikan RPD Provinsi NTT. RPD tidak memiliki visi dan misi, sehingga acuan bagi perubahan RPJMD Manggarai Barat, terutama terdapat pada rumusan isu strategis, tujuan, dan sasaran RPD. Isu strategis RPD Provinsi NTT yang perlu direspon oleh Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

1. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
2. Produktivitas dan daya saing ekonomi petani, peternak, dan nelayan yang berkelanjutan.
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial.
4. Penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
5. Peningkatan kualitas hidup masyarkat NTT.
6. Reformasi birokrasi
7. Dampak Covid-19

Isu strategis Provinsi NTT telah komprehensif yang secara makro mengadopsi konsep pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan berbasis pada produktivitas dan daya saing sektor unggulan, terutama memiliki orientasi jelas pada pelaku sektor unggulan, yakni petani, peternak, dan nelayan. Pemerataan akan dicapai antara lain melalui penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis RPD tersebut juga berupaya merespon pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta respon terhadap perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Pandemi Covid-19 masih menjadi isu yang harus diangkat NTT, terutama terkait percepatan upaya pemulihan dampak ekonomi. Isu yang tidak kalah penting dan menopang kinerja pemerintah daerah, yakni reformasi birokrasi. Isu reformasi birokrasi yang akan direspon, terutama terkait implementasi rangkaian kebijakan penyederhanaan dan upaya membentuk birokrasi yang *right-sizing* dan lincah.

4.1.4.4. Penelaahan Isu Daerah Sekitar

Kabupaten Manggarai Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai. Perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat harus memperhatikan arah pembangunan Kabupaten Manggarai. Berbasis pada narasi tersebut, maka sub-bab ini disusun dengan tujuan mengatur sinergitas arah pembangunan dengan kabupaten sekitar pada periode perencanaan pembangunan yang sama. Berikut adalah penelaahan RPJMD Kabupaten Manggarai:

1. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

Kabupaten Manggarai dipilih karena dua alasan, yaitu: 1) Kabupaten Manggarai merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai Barat. 2) Kabupaten Manggarai memiliki periode perencanaan yang sama dengan Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten Manggarai pada periode RPJMD tahun 2021-2026 memiliki visi "Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing". Visi tersebut didukung oleh beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. Meningkatkan mutu lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Keempat misi tersebut dirumuskan untuk merespon beberapa isu strategis, seperti: 1) masih rendahnya kesejahteraan sosial, 2) belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, 3) masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4) belum optimalnya infrastruktur dasar yang berkelanjutan, dan 5) belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Isu Strategis Kabupaten Manggarai direspon dengan tujuan dan sasaran di dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebuah kondisi yang ingin

dicapai selama periode perencanaan. Berikut adalah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026:

Tabel 4. 41. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan
		Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan
		Meningkatnya pemberdayaan potensi budaya
2.	Meningkatnya Keberdayaan sosial	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
		Menurunnya ketimpangan gender
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatnya keberdayaan desa
3.	Meningkatnya ketahanan sosial	Meningkatnya ketertiban umum
		Menurunnya gangguan kohesivitas sosial
		Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana
4.	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian
		Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian
		Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian
		Meningkatnya realisasi penanaman modal
		Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan
		Meningkatnya kualitas perhubungan
		Meningkatnya ketahahan pangan
		Meningkatnya stabilitas harga barang
5.	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian
6.	Menurunnya kemiskinan	Menurunnya pengangguran
		Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman

No.	Tujuan	Sasaran
7.	Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang
8.	Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana
9.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air
		Meningkatnya kualitas udara
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan
		Meningkatnya pengelolaan persampahan
10.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya integritas pemerintah daerah
		Meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintahan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya kualitas pemerintahan berbasis elektronik

Kabupaten Manggarai memiliki konsen yang besar terhadap persoalan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan. Berbagai persoalan tersebut yang menjadi fondasi untuk menyusun perencanaan pembangunan pada saat ini. Isu strategis Kabupaten Manggarai memiliki karakteristik yang sama dengan Kabupaten Manggarai Barat periode saat ini.

4.1.4.5. Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

Hasil penjaringan isu pada kajian lingkungan hidup strategis menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, terdapat 13 isu strategis di Kabupaten Manggarai Barat yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Tabel di bawah ini menunjukkan daftar permaslahan dan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 42. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
Sosial	Kemiskinan	Angka Kemiskinan terancam naik
	Ketahanan Pangan	Perlunya Peningkatan Ketahanan Pangan karena kewaspadaan terhadap konversi lahan pertanian yang semakin tinggi dan penurunan keanekaragaman hayati
	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Kesadaran hidup sehat masyarakat masih rendah
		Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat
	Tingkat Pendidikan	Perlunya Peningkatan Kualitas, Akses dan mutu Pendidikan yang Adil dan Merata
	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	Menurunnya nilai sosial terhadap perempuan dan anak
Ekonomi	Akses energi terjangkau dan berkelanjutan	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk energi terbarukan
		Emisi Gas Rumah Kaca
	Pengembangan ekonomi lokal, industri, dan penurunan pengangguran	Menurunnya kemandirian ekonomi daerah
	Penguatan kemitraan global	Penguatan desa mandiri
		Penguatan penggunaan teknologi
Lingkungan	Pengelolaan air bersih dan sanitasi	Rencahnya pengelolaan potensi sumber air yang tinggi
		Minimnya infrastruktur untuk distribusi air dari sumber mata air ke permukiman masyarakat
	permukiman yang inklusif. Aman, dan berkelanjutan	Ancaman Bencana semakin tinggi baik alam maupun non alam
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah Belum Optimal
	Dampak perubahan iklim	Perubahan Iklim semakin mengkhawatirkan: - kualitas iklim semakin menurun - Ancaman penurunan supply air tanah
	Konservasi sumberdaya laut dan darat	Perubahan fungsi lahan dan tutupan lahan di Manggarai Barat
Hukum dan Tata Kelola	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Sumber : Analisis, 2021

1. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB Pilar Sosial

Terdapat 5 (lima) isu dalam pilar sosial di Kabupaten Manggarai Barat yaitu kemiskinan, ketahanan pangan, tingkat Kesehatan masyarakat, pendidikan, serta menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat. Kemiskinan dan Kesehatan masyarakat terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Kecukupan pangan menjadi isu strategis karena Manggarai Barat merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi NTT. Jika dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka pilar sosial di Kabupaten Manggarai Barat mencakup kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Berikut merupakan rumusan isu strategsi TPB pilar sosial di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 4. 43. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Sosial

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
Kemiskinan	• Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan baik secara total maupun menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan • Imunisasi dasar anak umur 12-23 bulan • peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan • Peserta program keluarga harapan • akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan • Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social • Pendampingan psikososial korban bencana social • penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas • penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran • Akses sumber energi listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan • penguatan pengurangan risiko bencana daerah • Alokasi secara langsung sumberdaya untuk program	• Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim wilayah yang berada pada kategori cukup rentan • Pemanfaatan sumber daya alam • Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama jasa ekosistem penyedia air • Peningkatan dampak dan risiko lingkungan hidup

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
	pengentasan kemiskinan • Permukiman kumuh perkotaan • Risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan	
Ketahanan Pangan	• Kejadian stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta • malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun • Ketidakcukupan konsumsi pangan • ASI eksklusif • Pola pangan harapan dan tingkat konsumsi ikan • Kerawanan pangan • Nilai tambah pertanian • Penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	• Penurunan lahan pertanian mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan • Penurunan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Tingkat Kesehatan Masyarakat	• Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di tolong oleh tenaga Kesehatan terlatih • Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup • Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup • Prevelensi tekanan darah tinggi • Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan • Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun • *Total Fertlity Rate (TFR)* • *Unmet need* pelayanan Kesehatan • penyalahgunaan narkoba • Penduduk merokok pada penduduk umur ≤18 tahun • Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir • Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang cara modern	-

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
Tingkat Pendidikan	• Akreditasi SD/MI dan SMP/MTs • Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat • Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat; • Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun masih rendah • Angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun • Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi • Akses listrik, internet, komputer, sanitasi dasar dan fasilitas cuci tangan bagi sekolah • Jumlah guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik.	-
Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	• kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan • korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif • kekerasan terhadap anak perempuan • tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi perempuan • Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet need* KB) • perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir • Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun • Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	-

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

2. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB Pilar Ekonomi

Isu strategis di pilar ekonomi mencakup 3 (tiga) yaitu akses energi terjangkau dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi local, industri, dan penurunan pengangguran, serta penguatan kemitraan global. Tekanan perkembangan perkotaan dicerminkan oleh indikator persentase rumah tangga perkumuhan perkotaan. Tabel di bawah menunjukkan keterkaitan isu strategis dengan indikator TPB Pilar Ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 44. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Ekonomi

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
Akses energi terjangkau dan berkelanjutan	• Peningkatan bauran energi terbarukan	• Peningkatan emisi GRK dari sektor energi baik untuk pembangkit listrik dan penggunaan energi untuk transportasi • Pemanfaatan sumber daya alam • Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan • Peningkatan dampak dan risiko lingkungan hidup • Penurunan kinerja layanan atau jasa ekosistem
Pengembangan ekonomi lokal, industri, dan penurunan pengangguran	• Peningkatan laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita dan PDRB per tenaga kerja • Peningkatan jumlah devisa sektor pariwisata • Peningkatan jumlah pekerja pada industri pariwisata • Pekerja informal sektor pertanian dan non pertanian • Peningkatan jumlah tenaga kerja formal • Rata-rata upah pekerja per jam • Angka pengangguran tinggi • Akses UMKM ke layanan keuangan • Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit • Akses kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa dan jarak lembaga	• Menurunnya kemandirian ekonomi daerah

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
	keuangan • Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan pertumbuhan PDRB • Jumlah tenaga kerja pada sektor industri manufaktur • Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri • Penduduk yang terlayani *mobile broadband* • Anggaran riset pemerintah terhadap PDRB • Industri kecil dengan pinjaman atau kredit	
Penguatan kemitraan global	• Peningkatan desa mandiri • Penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional • Indeks Kebebasan Sipil • Pelayanan teknologi melalui peningkatan akses pitalebar • Tota pendapatan pemerintah termasuk rasio penerimaan pajak sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya • Indikator SDGs yang terpilah dengan target • Data registrasi terkait kelahiran dan kematian • Anggaran domestik yang didanai pajak domestik	• Menurunnya kemandirian ekonomi daerah

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

3. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB Pilar Lingkungan

Indikator pilar lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat memiliki isu strategis sebanyak 5 (lima) isu strategis. Empat isu strategis tersebut yaitu pengelolaan air bersih dan sanitasi, permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, pengelolaan sampah, dampak perubahan iklim, serta konservasi sumberdaya laut dan darat. Lebih lengkapnya keterkaitan isu strategis dengan TPB Pilar Lingkungan akan ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4. 45. Tabel Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Lingkungan

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
Pengelolaan air bersih dan sanitasi	• Cakupan akses layanan sumber air minum layak, aman dan berkelanjutan • Cakupan akses sanitasi layak, dengan meningkatkan desa/ kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Peningkatan prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri • fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air • penghematan air pertanian/perkebunan dan industri • penataan kelembagaan sumber daya air • sistem pengelolaan air limbah terpusat • sistem pengelolaan lumpur tinja • Sumber air baku	• Kabupaten Manggarai Barat memiliki kemampuan jasa penyediaan air relatif sedang. Dari total luas kabupaten terdapat 174.507,88 ha (55,98%) memiliki jasa penyediaan air kategori sedang. Jasa penyediaan air bekategori tinggi melingkupi wilayah seluas 14.290,48 ha (4,59%). • Jumlah rata-rata total aliran permukaan seluruh wilayah Manggarai Barat adalah 2.008,25 juta m^3/tahun. Secara spasial, jumlah rata-rata aliran permukaan dengan nilai >200 m^3/tahun mendominasi dan menyebar di wilayah dataran rendah, sedangkan di wilayah perbukitan dan pegunungan lebih didominasi oleh aliran permukaan dengan nila <200 m^3/tahun. Wilayah yang memiliki curah hujan tahunan tinggi adalah Kecamatan Macang Pacar, Kuwus, dan Ndoso. • Ketersediaan air permukaan seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 2.008,25 juta m^3/tahun, sementara berdasarkan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat (2019) kebutuhan air total sebesar 879 juta m^3/tahun, mengalami surplus sebesar 1.129,24 juta m^3/tahun. • Secara administrasi, Kecamatan Lembor Selatan

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
		adalah wilayah administrasi yang paling tinggi memiliki ketersediaan air yaitu 323,44 juta m^3/tahun dan Kecamatan Kuwus Barat hanya memiliki ketersediaan air paling rendah yaitu 38,40 juta m^3/tahun. • Jasa ekosistem pengatur iklim mayoritas berada dalam kategori sedang dengan rincian: berkategori sangat rendah seluas 49,13 ha (0,02%), berkategori rendah seluas 46.009,19 ha (14,76%), berkategori sedang seluas 217.254,39 ha (69,69%), berkategori tinggi seluas 48.422,50 ha (15,53%).
Permukiman yang inklusif. Aman, dan berkelanjutan	• Ketersediaan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan • kerugian ekonomi langsung akibat bencana • Indeks Risiko Bencana (IRB)	• Kabupaten Manggarai Barat termasuk daerah yang memiliki ancaman bencana berkategori **tinggi** dengan nilai indeks risiko bencana 163.57 pada tahun 2020. Risiko bencana banjir, kekeringan, dan gunung berapi masuk dalam kategori **sedang,** sedangkan bencana tanah longsor, tsunami, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan termasuk dalam kategori berisiko **tinggi.** • Ancaman bencana tanah longsor dan kebakaran hutan serta lahan memiliki risiko bencana paling tinggi dengan skor yang sama yaitu 36, sedangkan gunung berapi dan banjir memiliki skor risiko paling rendah yaitu 7.
Pengelolaan sampah	• Daur ulang sampah dan pengelolaan limbah B3	• Jumlah timbulan sampah di Manggarai Barat tahun 2019 sebanyak 10.594,125 ton yang didominasi sampah yang

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
		berada di Kota Labuan Bajo. Jumlah sampah yang tertangani sekitar 10.220 ton atau 96,47%
Dampak perubahan iklim	• Mengurangi korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana iklim • Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam	• Kabupaten Manggarai Barat memiliki 63 desa rentan terhadap perubahan iklim dari 2.966 desa rentan di NTT. • Kecamatan Welak merupakan wilayah yang cukup rentan terhadap ketahanan pangan dan gizi akibat perubahan iklim • Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Kuwus, dan Macang Pacar merupakan wilayah yang cukup tahan terhadap perubahan iklim, • sementara wilayah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki ketahanan pangan dan gizi paling tinggi terhadap perubahan iklim adalah Kecamatan lembor dan Lembor Selatan
Konservasi sumberdaya laut dan darat	• Pemulihan dan rehabilitasi kawasan konservasi terdegadrasi dan lahan kritis • Kerangka legisasi, administrasi, dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata • Penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	• Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer seluas 93.212,46 ha (36,02%), diikuti Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 35.877,78 ha (13,87%). Sebagian Hutan lahan kering primer dan sekunder secara spasial tersebar hampir di seluruh kecamatan.

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

4. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Isu strategis untuk pilar hukum dan tata kelola di Kabupaten Manggarai Barat adalah reformasi birokrasi. Aspek pemerintahan dan kelembagaan di

Kabupaten Manggarai Barat menjadi isu strategis yang perlu ditindaklanjuti, selain itu kepemilikan administasi masyarakat juga terkait isu strategis seperti persentase anak yang memiliki akta kelahiran atau proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat lembaga pencatatan sipil.

Tabel 4. 46. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
Reformasi Birokrasi	• Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) • pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui • Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan • keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) • anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil • Peningkatan kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah • Penurunan jumlah anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh • Kekerasan terhadap anak	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

4.1.4.6. Penelaahan RTRW Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD diantaranya mengacu pada tujuan RTRW Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032, yaitu mewujudkan ruang daerah yang produktif dan berwawasan lingkungan sebagai pusat distribusi barang dan jasa sesuai ruang peruntukan. Pengaturan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan fungsinya menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Aspek struktur dan pola ruang merupakan pokok dari

penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut rencana struktur ruang wilayah di Kabupaten Manggarai Barat.

1. Sistem jaringan Pusat Kegiatan

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat, maka sistem jaringan pusat kegiatan ini terdiri dari:

Tabel 4. 47. Sistem Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

Hierarki	Struktur Wilayah Perkotaan	Kecamatan	Desa
I	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kecamatan Komodo	Kota Labuan Bajo (Ibukota Kabupaten)
II	Pusat Kegiatan Kawasan (PPK).	Ibukota Kecamatan	1. Perkotaan Bari 2. Perkotaan Golo Wulu 3. Perkotaan Wae Nakeng 4. Perkotaan Werang 5. Perkotaan Terang 6. Perkotaan Orong 7. Perkotaan Tentang 8. Perkotaan Lengkong Cepang 9. Perkotaan Warsawe 10. Perkotaan Pacar 11. Perkotaan Landong
III	Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL).	Ibukota Desa	1. Boleng Darat di Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng; 2. Lando di Desa Mbuit Kecamatan Boleng; 3. Benteng di Desa Golo Pongkor Kecamatan Komodo; 4. Noa di Desa Compang Kecamatan Pacar; 5. Nangalili di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan; 6. Ranggu di Desa Ranggu di Kecamatan Kuwus; 7. Rego di Desa Rego Kecamatan Macang Pacar; 8. Datak di Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak; 9. Maras di Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor; 10. Rekas di Desa Kempo di Kecamatan Mbeliling.

Sumber : RTRW Kabupaten Manggarai Barat 2012-2032

2. Sistem jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama terdiri dari:

a. Sistem jaringan transportasi darat
b. Sistem jaringan transportasi laut
c. Sistem jaringan transportasi udara

Berikut rincian rencana pola struktur ruang sistem jaringan prasarana utama untuk transportasi darat, laut dan udara.

Tabel 4. 48. Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Utama untuk Transportasi Darat, Laut Dan Udara

No	Rencana Struktur Ruang	Waktu Pelaksanaan
		2021-2025
Transportasi Darat		
1	Transportasi Jalan	Peningkatan kapasitas jalan pada jalan arteri primer yang menghubungkan Labuan Bajo - Manggarai Barat – Ngada – Nagekeo – Ende – Sikka – Flores Timur.
2	Transportasi Penyebrangan	Pengembangan trayek transportasi penyeberangan untuk mengantisipasi beban lalu lintas di jalan raya serta kondisi topografi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, antara lain:
		a. trayek Bolok – Naikliu – Teluk Gurita; b. trayek Labuan Bajo – Aimere; c. trayek Labuan Bajo- Marapokot;
Transportasi Laut		
1	Transportasi Laut	1. Pembangunan pelabuhan laut dan terminal peti kemas di kawasan Rangko/Ketentang Manggarai Barat. 2. Pengembangan prasarana pelabuhan serta jalan akses ke pelabuhan laut
Transportasi Udara		
1	Transportasi Udara	1. Pengembangan trayek transportasi udara untuk mendukung sektor pariwisata Labuan Bajo – Tambolaka, Labuan Bajo – Maumere, Labuan Bajo – Lombok, Labuan Bajo – Surabaya, Labuan Bajo – Jakarta dan Labuan Bajo – Makasar; 2. Peningkatan fasilitas bandar udara Komodo meliputi fasilitas Bandar udara, run way, taxiway, apron dan fasilitas keselamatan penerbangan; 3. Peningkatan kelas bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat menjadi bandar udara pengumpul skala tersier sesuai dengan peningkatan jumlah penumpang dan kapasitas pelayanan.
2	Transportasi Udara	Studi lokasi

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

3. Sistem jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

a. Sistem jaringan energi

Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dikarenakan belum adanya kajian dan penelitian mengenai potensi minyak dan gas bumi di kabupaten ini.

b. Sistem jaringan ketenagalistrikan

Tabel 4. 49. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	PLTD	PLTMG	PLTMH	PLTS	PLTP	PLTB	PLTAL	PLTSa
1	Boleng	1	1		2				
2	Komodo	3			3			1	1
3	Kuwus	1							
4	Lembor	1							
5	Sano Nggoang					1			
6	Welak			1					
7	Mbeliling			1					
8	Macang Pacar				1				
9	Lembor Selatan				1		1		
Jumlah		**6**	**1**	**2**	**7**	**1**	**1**	**1**	**1**

Sumber : RTRW Kabupaten Manggarai Barat 2012-2032

c. Sistem jaringan telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap. Jaringan telekomunikasi tetap difungsikan untuk telekomunikasi publik dan sirkit sewa. Jaringan tetap terdiri atas Jaringan mikro analog dan Jaringan mikro digital terdiri atas jaringan serat optik Telkom dan jaringan serat optik Palapa Ring yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat.

Operator Seluler telah menggelar layanan 4G LTE di sebagian wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperlancar akses komunikasi masyarakat. Pembangunan menara telekomunikasi perlu ditambah agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mengeluhkan buruknya jaringan operator di sebagian wilayah lainnya. Pembangunan menara telekomunikasi juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui usulan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bagian dari

komitmen pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan telekomunikasi dan dalam rangka membangun dari daerah pinggiran.

d. Sistem jaringan sumber daya air

Sumber air permukaan lainnya di Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas; embung di seluruh Kabupaten Manggarai Barat; waduk Wae Dongkong di Kecamatan Komodo dan waduk Wae Mese di Kecamatan Mbeliling; dan sumber air permukaan yang lain di setiap Kecamatan.

Air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten, terdiri atas:

- CAT Ruteng yang merupakan CAT lintas kabupaten dengan luas 3.724 Km2 yang terletak pada titik koordinat BT 119º 50'12.45" – 120º 22'35.4", dan LS 08º 32'14.19" -08º 57' 34.56";
- CAT Labuan Bajo yang merupakan CAT dalam satu kabupaten Manggarai Barat dengan luas 413 Km2, terletak pada koordinat BT 1190 47'52.8" – 1200 04'32.63" dan LS 080 25'15.82' – 080 47'44.72";
- CAT Lempe yang merupakan CAT lintas kabupaten dengan luas 398 Km2, yang terletak pada titik koordinat BT 1200 03'58.98" –1200 27'15.73" dan LS -080 17'51.01" – 080 31'10.40".

Adapun prasarana sumber daya air, terdiri atas:

- Sistem jaringan irigasi adalah jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder, di setiap Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat;
- Sistem pengendalian banjir, terdapat di Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Sanonggoang dan Kecamatan Macang Pacar serta Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
- Jaringan air baku untuk air bersih, terdapat di seluruh desa di Kabupaten Manggarai Barat;
- Jaringan air bersih ke kelompok pengguna, terdiri atas:
  - Embung Cumbi di Kecamatan Komodo;
  - Embung Wol di Kecamatan Welak;
  - Embung Wae Wako, Siru di Kecamatan Lembor; dan
  - Embung Amba di Kecamatan Lembor Selatan.

Adapun rencana pola ruang wilayah menurut dokumen RTRW tahun 2012 - 2032 Kabupaten Manggarai Barat meliputi:

1. **Kawasan lindung**
   a. **Kawasan hutan lindung,** memiliki luasan kurang lebih 54.059,13 Ha yang tersebar di semua kecamatan;
   b. **Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,** terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air;
   c. **Kawasan perlindungan setempat,** meliputi:
      1) Kawasan sempadan sungai, terdiri atas:
         a) Kawasan sempadan sungai di kawasan non permukiman yang berjarak antara 50 meter hingga 100 meter di kiri dan kanan tepi sungai terdapat di Kecamatan Komodo, Lembor, Ndoso, Lembor Selatan, Macang Pacar dan Boleng;
         b) Kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman yang berjarak sekurang-kurangnya 10 meter kiri dan kanan tepi sungai terdapat di seluruh kecamatan.
      2) Kawasan sempadan pantai meliputi jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, berada pada Kecamatan Lembor Selatan, Komodo, Boleng, dan Macang Pacar.
      3) Kawasan sempadan mata air, yang memiliki luas 200 meter jari – jari yang diukur dari mata air dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
      4) Kawasan sempadan waduk / danau; berjarak antara 50 meter hingga 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi danau/waduk Kecamatan Sano Nggoang.
      5) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, ditandai dengan keberadaan situs peninggalan sejarah di kabupaten Manggarai Barat. Kecamatan Komodo dan Kecamatan Boleng memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal berupa peninggalan batu balok. Kecamatan Lembor memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di Desa Wae Bangka dan Desa Ponto Ara. Desa Wae Bangka memiliki kearifan lokal berupa Compang Watu Manggar sedangkan Desa Ponto Ara memiliki kearifan lokal berupa Compang Lale Lombong. Kecamatan Welak memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di Desa

Pong Welak berupa Watu Pong Welak. Kecamatan Kuwus memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di Desa Suka Kiong berupa Situs Altar Compang. Kecamatan Pacar memiliki kawasan linding spiritual hampir disemua desa dengan kearifan lokal berupa Compang dan Mbaru Gendang. Kecamatan Pacar memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di Desa Pacar berupa Compang Pacar dan Mbaru Gendang.

6) Ruang terbuka hijau, terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luas lebih kurang 60%.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri atas:

1) Kawasan cagar alam meliputi kawasan suaka alam rawa Wae Wul terdapat di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih1.484,84 Ha.
2) Kawasan pantai berhutan bakau yang tersebar di beberapa kecamatan berupa Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Manggarai Barat;
3) kawasan taman nasional dan taman nasional laut, terdiri atas:
    1. Kawasan taman nasional satwa terdapat di Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca, pulau Gilimotang, Pulau Kambing Rinca, Pulau Kalong Rinca, Pulau Kalong Komodo, Batu Bolong, Pulau Papa Garang, Gili Lawa Laut, dan beberapa pulau kecil lainnya dengan luas kurang lebih132.572 Ha
    2. Kawasan taman nasional laut perairan laut Sawu terdapat di wilayah selatan kabupaten Manggarai Barat yang terdiri atas 6 (enam) desa
4) kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut terdiri atas:
    1. Kawasan Pegunungan Mbeliling terdapat kecamatan Sano Nggoang dan Kawasan hutan Nggorang Bowosie yang terdapat didalamnya Air Terjun Cunca Wulang dengan luas kurang lebih 23.000 Ha.
    2. Kawasan taman wisata alam Taman Nasional Komodo terdapat di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca, pulau Gilimotang, Pulau Kambing Rinca, Pulau Kalong Rinca, Pulau Kalong Komodo, Batu Bolong, Pulau Papa Garang, Gili Lawa Laut, dan beberapa pulau kecil lainnya dengan luas kurang lebih 173.300 Ha.
5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas:

1) Desa adat dengan luas kurang lebih 500 Ha terdapat di dusun Tado Desa Nampar Macing kecamatan Sano Nggoang, desa Pacar kecamatan Macang Pacar, dan desa lain;
2) situs-situs purbakala dengan luas kurang lebih 100 Ha; dan
3) Taman Nasional dengan luas kurang lebih 173.300 Ha.

Berikut rincian luas kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat di setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 50. Luas Kawasan Hutan Lindung Per Kecamatan Di Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya			Kawasan Perlindungan Setempat			Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
			Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Resapan Air	Total	Sempadan Sungai	Sempadan Pantai	Sekitar Danau/ Waduk	Hutan bakau
1	Macang Pacar	8.066,00	8.066,00	3.049,69	11.115,69	525,04	331,25	-	577,79
2	Kuwus	1.126,27	1.126,27	-	1.126,27	132,68	-	-	-
3	Lembor	1.853,34	1.853,34	-	1.853,34	2.360,09	-	-	-
4	Sano Nggoang	10.070,07	10.070,07	1.011,60	11.081,67	1.103,41	-	96,41	-
5	Komodo	14.998,80	14.998,80	990	15.988,80	1.215,39	662,07	-	584,7
6	Boleng	2.670,97	2.670,97	2.104,20	4.775,17	716,28	353,83	-	864,79
7	Welak	231,01	231,01	1.657,19	1.888,20	1.300,14	-	-	-
8	Ndoso	279,54	279,54	-	279,54	557,84	-	-	-
9	Lembor Selatan	9.846,59	9.846,59	185,39	10.031,98	3.186,12	283,38	-	293,21
10	Mbeliling	2.771,32	2.771,32	182,72	2.954,04	718,03	-	-	-
11	Pacar	2.123,96	2.123,96	930,76	3.054,72	250,93	-	-	-
12	Kuwus Barat	21,26	21,26	-	21,26	267,91	-	-	-
TOTAL		**54.059,13**	**54.059,13**	**10.111,55**	**64.170,68**	**12.333,86**	**1.630,53**	**96,41**	**2.320,49**

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

e. Kawasan rawan bencana, meliputi:

1) Kawasan rawan tsunami, yang terdiri dari tiga kelas
2) Kawasan rawan tanah longsor; terdiri atas:
   1.Kecamatan Sano Nggoang terdapat di Kampung Loha, Desa Golo Mbu, Lara (Desa Golo Kempo) dan Desa Golo Ndoal, Desa Watu Wangka, Wae Lolos, Golo Desat, Liang Dara, desa Kempo;
   2.Kecamatan Kuwus terdapat di Kelurahan Nantal, Desa Suka Kiong, Golo Ruu, Kolang, Lewur;
   3.Kecamatan Macang Pacar terdapat di Desa Golo Lajang, Desa kombo, Desa Nanga Kantor dan Desa Rokap;
   4.Kecamatan Ndoso terdapat di Waning, Tentang, Golo Poleng, Momol, Ndoso, Wae Buka;
   5.Kecamatan Lembor terdapat di Wae Bangka; dan
   6.Kecamatan Welak terdapat di desa Semang, Pengka, Dunta, dan Lawe.
3) Kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh kecamatan;
4) Kawasan rawan banjir, terdiri atas:
   1.Kecamatan Macang Pacar terdapat di Desa Nggilat dan Desa Bari;
   2.Kecamatan Lembor Selatan terdapat di Desa Nanga Lili (lokasi pertemuan Sungai Wae Kanta, Wae Longge dan Wae Ara);
   3.Kecamatan Komodo terdapat di Desa Gorontalo dan Desa Macang Tanggar; dan
   4.Kecamatan Boleng terdapat di Desa Golo Sepang
5) Kawasan rawan gelombang pasang dan arus vortex dan/atau arus leher botol, yang selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya abrasi terdapat di Kecamatan Komodo, Boleng, Macang Pacar, Sano Nggoang dan Lembor Selatan. Arus vortex terdapat di selat Batu Tiga kawasan Taman Nasional Komodo dan arus laut yang sangat kuat di selat Molo.
6) Kawasan rawan bencana kekeringan, semua Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat kecuali Kecamatan Kuwus Barat.

Berikut rincian luas Kawasan rawan bencana dari setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 51. Luas Kawasan Rawan Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Kerawanan Tsunami			Kerawanan Longsor			Kerawanan Gempa Bumi			Kerawanan Banjir			Kerawanan Abrasi			Kerawanan Gempa Bumi		
		KRB I Tsunami	KRB II Tsunami	KRB III Tsunami	KRB I Longsor	KRB II Longsor	KRB III Longsor	KRB I Gempa Bumi	KRB II Gempa Bumi	KRB III Gempa Bumi	KRB I Banjir	KRB II Banjir	KRB III Banjir	KRB I Abrasi	KRB II Abrasi	KRB III Abrasi	KRB I Kekeringan	KRB II Kekeringan	KRB III Kekeringan
1	Boleng	290,04	123,37	2504,77			18215	23369	5568,55	1045,3	1611	1793	257,88		1898			11743,84	18240,85
2	Komodo	194,54	133,08	12157,9	6325,84	41060	12395	92479	8329,05	340,14	4099	1821	84,18		15160			38339,12	62826,3
3	Kuwus						4892	5580,8										2186,52	3394,25
4	Kuwus Barat						4024,4	4547,1	63,23										4610,35
5	Lembor				1960,08	4188,4	2304,2	19032	1069,73		3059	928,8	29,55					13814,19	6287,91
6	Lembor Selatan	47,27	31,22	1422,62	5244,85	13514	1903	36252	916,5		5792	743,4	10,05		1498			25217,5	11950,57
7	Macang Pacar	88,39	55,7	1594,04		2445,3	13047	20702	6300,19	56,89	1170	376,5	9,32		1067			26440,65	618,17
8	Mbeliling				3853,9	779,07	10870	21334	2,37		320,8	15,43						62,3	21273,64
9	Ndoso						10411	11732	447,92									9949,39	2230,57
10	Pacar						9489,8	13857	2835,9	3,54	556,8	51,36			72,95			1918,1	14778,63
11	Sano Nggoang			35,21	6928,19	1079,3	10919	28010	629,32		1704	501,7	491,91					17669,41	10970,28
12	Welak				193,34	1432,3	9176,3	15580	140,14		551,2	10,65						6090,17	9630,25
TOTAL		**620,23**	**343,37**	**17715**	**24506**	**64498**	**100000**	**300000**	**26303**	**1446**	**18864**	**6242**	**882,9**		**19696**			**153431,18**	**166811,79**

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

f. Kawasan lindung geologi meliputi:

1) Kawasan cagar alam geologi, terdiri atas:

a) Kawasan keunikan batuan dan fosil, seperti Batu menyerupai balok yang terdapat di Desa Rinca, batu menyerupai balok dan meja di Desa Warloka, fosil kayu di kenari, batu menyerupai balok di Nggorang dan Merombok di Kecamatan Komodo, batu menyerupai balok di Desa Pota Wangka dan fosil kayu di Desa Tebedo Kecamatan Boleng, batu menyerupai balok di Desa Watu Umpu Kecamatan Welak, batuan menyerupai perahu dan jembatan di Wae Jare Kecamatan Mbeliling, dan batuan dasar/geoheritage yang terdapat di sekeliling Danau Sano Nggoang serta semua lokasi yang memiliki keragaman batuan, batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil), batuan yang memiliki nilai antropologi dan arkeologi dan batuan yang merupakan jejak struktur geologi masa lampau yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Manggarai Barat;

b) Kawasan Keunikan bentang alam, antara lain gua batu cermin di Kecamatan Komodo, gua Liang Rodak di Kecamatan Mbeliling, gua ular (istana ular) di Kecamatan Welak dan semua gua yang berada dalam kabupaten Manggarai Barat. Air terjun Cunca Wulang, Cunca Rami, Cunca Lolos dan Cunca Polo dan semua air terjun yang ada tersebar di Kabupaten Manggarai Barat. Keindahan gugusan pulau-pulau (kecil dan besar) yang terdapat di dalam kawasan atau di luar kawasan Taman Nasional Komodo, Danau Sano Nggoang, kawasan Gunung mbeliling menerus sampai Sesok. Gugusan pegunungan dan bukit serta bentang alam karst yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

c) Kawasan Keunikan Proses Geologi, kawasan ini terdapat pada Danau Sano Nggoang (mataair panas Wae Nggerengguk) dan seluruh kawasan dengan kemunculan solfatura, fumarola dan semua lokasi yang memiliki keunikan proses geologi.

2) Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas:

a) Kawasan rawan letusan gunung berapi, terdapat di Danau Sano Nggoang (danau vulkanik) kecamatan Sano Nggoang;
b) Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di seluruh wilayah kabupaten Manggarai Barat;
c) Kawasan rawan abrasi; terdapat di seluruh wilayah pesisir kabupaten Manggarai Barat;
d) Kawasan rawan bahaya gas beracun, terdapat di danau Sano Nggoang kecamatan Sano Nggoang; dan
e) Kawasan rawan bencana gerakan tanah; terdapat diseluruh wilayah kabupaten Manggarai Barat.

3) Kawasan perlindungan terhadap air tanah, yang terdiri atas:
a) Kawasan imbuhan air tanah pada Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT), terdiri atas CAT Ruteng yang merupakan CAT lintas kabupaten (termasuk yang berada di Wilayah Kabupaten Manggarai) dengan luas 3.724 $Km^{2,}$ yang terletak pada titik koordinat BT 119º 50'12.45" – 120º 22'35.4", dan LS 08º 32'14.19" - 08º 57' 34.56", CAT Labuan Bajo seluas kurang lebih 413 KM^2 terletak pada koordinat BT 119^0 47'52.8" – 120^0 04'32.63" dan LS 08^0 25'15.82' – 08^0 47'44.72" dan CAT Lempe seluas kurang lebih 398 KM^2 (termasuk yang berada di Wilayah Kabupaten Manggarai) yang terletak pada titik koordinat BT 120^0 03'58.98" –120^0 27'15.73" dan LS -08^0 17'51.01" – 08^0 31'10.40".
b) Kawasan sempadan mata air seluas kurang lebih 518,36 Ha, tersebar di seluruh Kecamatan. Kawasan sempadan mata air merupakan kawasan letaknya paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air, yang mana kawasan ini dibatasi oleh garis sempadan mata air. Adapun mata air yang terdapat di Kecamatan Komodo antara lain Wae Cumpe, di Kecamatan Mbeliling antara lain adalah Wae Kaca, Wae Mbaru, Wae Cecer, Wae Moto, Wae Mbaru, di Kecamatan Lembor antara lain Wae Mowol, dan lain-lain.

4) Kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
a) Kawasan cagar biosfer, meliputi Kawasan Taman Nasional Komodo di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 40.728 Ha

b) Kawasan perlindungan plasma nutfah adalah Kawasan Taman Nasional Komodo di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 40.728 Ha, dan kawasan hutan Mbeliling seluas 25.793,55 Ha.

c) Kawasan perlindungan satwa, terdiri atas:
   - Kawasan pulau Komodo di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih17.500 Ha;
   - Kawasan pulau Padar di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 7.600 Ha;
   - Kawasan pulau Rinca di kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 15.628 Ha;
   - Kawasan hutan Mbeliling seluas 25.793,55 Ha; dan
   - Kawasan konservasi sumber daya alam Wae Wul di Kecamatan Komodo.

d) Kawasan terumbu karang meliputi Kawasan Perairan laut Kabupaten Manggarai Barat di Kecamatan Macang Pacar, Boleng, Komodo, Lembor Selatan dengan luas kurang lebih 15.000 Ha.

2. Kawasan budidaya

Berikut rincian Luas Kawasan Budidaya peruntukan hutan produksi, peruntukan hutan rakyat, dan Kawasan peruntukan pertanian, Industri, Pariwisata, dan Permukiman di setiap kecamatan, Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 52. Luas Kawasan Budidaya Per Kecamatan, Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukan Pertanian				Kawasan peruntukan industri		Kawasan Pariwisata	Kawasan Peruntukan Permukiman		
				Kawasan Tanaman Pangan	Kawasan Hortikultura	Kawasan Perkebunan	Kawasan Peternakan	Industri Kecil	Industri Rumah Tangga		Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman Perdesaan	Total
1	Macang Pacar	-	4.531,73	1.112,45	5.357,02	417,8	4,99	28	178	-	423,95	359,57	783,52
2	Kuwus	-	173,99	791,61	301,07	44,54	-	16	143	-	38,7	180,07	218,77
3	Lembor	-	4.042,23	2.958,02	6.877,61	257,83	-	114	243	-	328,71	725,7	1.054,41
4	Sano Nggoang	-	9.556,15	1.146,04	2.412,90	1.206,27	-	36	108	11,15	138,69	581,3	719,99
5	Komodo	2.989,76	3.927,44	1.768,31	2.901,47	314,69	592,12	105	369	5.249,70	2.618,44	439,12	3.057,56
6	Boleng	10.220,69	4.643,47	2.372,58	518,9	763,28	3,71	50	32	107,28	857,38	256,69	1.114,07
7	Welak	591,08	13,5	1.541,29	8.676,37	671,45	-	17	12		151,3	399,86	551,16
8	Ndoso	-	1.994,93	1.401,08	2.219,73	53,69	-	-	-	-	76,06	473,66	549,72
9	Lembor Selatan	-	1.859,51	2.513,03	10.654,35	2.423,72	2.000,33	0	12	818,52	308,98	528,43	837,41
10	Mbeliling	1.740,33	7.055,89	1.226,53	2.841,42	44,91	72,42	0	73	1.996,51	52,28	531,87	584,15
11	Pacar	2.270,68	2.865,02	1.578,63	2.604,38	283,97	-	-	-	-	146,27	264,23	410,5
12	Kuwus Barat	-	563	749,07	304,09	154,54	-	-	-	-	89,6	134,09	223,69
TOTAL		**17.812,54**	**41.226,86**	**19.158,64**	**45.669,31**	**6.636,69**	**2.673,57**	**366**	**1170**	**8183,16**	**5.230,36**	**4.874,59**	**10.104,95**

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

4.2. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Manggarai Barat

Dari kondisi pembangunan dan permasalahan yang dihadapi serta mencermati lingkungan eksternal baik regional maupun nasional, maka dapat ditarik beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat. Isu-isu strategis ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah, yang akan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa yang akan datang. Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Manggarai Barat itu antara lain sebagai berikut.

4.2.1. Manggarai Barat sebagai destinasi wisata super prioritas

Sejalan dengan kebijakan nasional yang menetapkan Manggarai Barat terutama Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas nasional, maka pariwisata merupakan isu penting dalam perencanaan pembangunan ke depan. Pemerintah pusat telah membentuk Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Kehadiran BOPLBF merupakan representasi pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Oleh karena itu, pariwisata merupakan sektor strategis yang bisa menjadi katalisator pembangunan di Kabupaten Manggara Barat.

Namun demikian, pengembangan pariwisata membutuhkan upaya lintas sektor. Pembangunan pariwisata tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas destinasi wisata dan juga objek wisata tapi membutuhkan upaya komprehensif di berbagai sektor. Pengambangan pariwisata harus didukung oleh penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang hingga saat ini belum memadai. Data angka partisipasi murni selama tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di jenjang sekolah menengah atas masih rendah, dengan rata-rata lama sekolah hanya 7,80 tahun. Pada saat yang sama, pengembangan pariwisata juga membutuhkan intervensi yang massif pada sektor infrastruktur yang hingga saat ini masih menjadi isu besar. Peningkatan akses ke destinasi wisata sudah menujukkan perkembangan yang massif, namun demikian hal itu belum

sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur dasar lainnya seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan.

Dari sisi tatakelola, penetapan Kawasan Komodo dan Labuhan Bajo sebagai kawasan super prioritas dalam pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membawa tantangan tersendiri. Tantangan berupa sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, Provinsi NTT, dan Kabupaten Manggarai Barat. Kebijakan daerah di satu sisi perlu sinkron untuk menopang prioritas pembangunan nasional, namun di sisi lain kebijakan nasional juga perlu memperhatikan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat lokal dan tata ruang wilayah.

Tingginya intensitas pembangunan pariwisata juga berimplikasi tidak hanya pada peningkatan perekonomian daerah, sekaligus membawa tantangan sosial. Gencarnya pembangunan di Manggarai Barat mulai memunculkan potensi konfik, terutama berupa sengketa tanah. Pembangunan pariwisata yang pesat juga masih memiliki tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa dampak multiganda. Berdasarkan data kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020, jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat pada Kecamatan Komodo dan Kecamatan Lembor. Kedua kecamatan tersebut justru merupakan daerah pusat pariwisata dan pusat pertanian. Artinya, potensi ekonomi yang tinggi belum disertai dengan tingkat kesejahteraan pada masyarakat setempat. Para pelaku wisata baik pada sektor formal maupun informal masih didominasi oleh masyarakat luar Manggarai Barat. Sedangkan pada pertanian, masih belum terintegrasinya aspek pertanian dengan pariwisata.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka tantangan terbesar dalam pembangunan pariwisata di Manggarai Barat adalah aspek keberlanjutan. Hingga saat ini konsen pemangku kepentingan masih bertumpu pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pengeluaran wisatawan. Namun pada saat yang sama, aspek keberlanjutan baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan belum menjadi prioritas. Berkembangnya pariwisata berpotensi menimbulkan efek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar mulai dari makin besarnya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu,

pembangunan pariwisata harus diintervensi dengan cara komprehensif dan bertumpu pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Hal lain yang juga krusial dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan wisata di masa pandemi adalah penerapan protokol kesehatan. Saat ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menentukan standar penerapan pariwisata di masa pandemi dengan sebutan CHSE atau kebersihan (Cleanliness), kesehatan (Health), Keamanan (Safety), dan Kelestarian Lingkungan (Environmental Sustainability. Hal ini merupakan isu yang sangat strategis dalam masa pemulihan pasca Covid-19. Harapannya, peningkatan kegiatan wisata selaras dengan upaya pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19.

4.2.2. Manggarai Barat sebagai wilayah pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor terbesar yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Manggarai Barat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang meningkat selama tahun 2020-2022. Pertumbuhan ini berkorelasi terhadap kesejahteraan petani dan upaya penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, seperti produksi tanaman pangan dan hortikultura yang optimal, kualitas produk pertanian yang baik, meningkatnya nilai tambah produk-produk pertanian, hingga kondisi sarana prasarana pertanian yang memadai.

Kempat faktor ini harus diintervensi dengan baik untuk menjaga pertumbuhan sektor pertanian serta agar pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dapat memberikan *multiplier effect* yang baik bagi sektor pertanian. Jaringan kerjasama (*linkage*) antara sektor pariwisata dan pertanian harus dipererat. Kualitas produk-produk pertanian harus ditingkatkan agar mampu mensuplasi kebutuhan makan dan minum sektor pariwisata. Selain itu, ragam produk-produk olahan hasil pertanian juga harus ditingkatkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan

petani di Kabupaten Manggarai Barat. Upaya ini juga dapat dijalankan untuk mendukung penurunan tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, terutama di beberapa wilayah pusat pertanian yang manjadi kantong kemiskinan.

4.2.3. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu tujuan utama dalam upaya pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia seringkali dijakdikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah. pada level global, target pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara eksplisit menyasar pembangunan sosial yang meliputi pengembangan SDM. Melihat kebijakan nasional, pembangunan manusia juga menjadi salah satu dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pada level dareah, RPJMD Provisnsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 menempatkan isu SDM sebagai salah satu fokus pembangunan. Isu strategis yang beriaktan dengan SDM di level Provinsi lebih berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan terhadap semua penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SDM menjadi salah satu pilar utama yang menunjang pada pembangunan di sektor lainnya.

Pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah dapat diukur dengan cara melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM menunjukkan pembangunan manusia berdasarakan tiga urusan besar, yaitu pendidikan, kesehatan dan tingkat kehidupan layak. Capaian IPM Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang meningkat sejak 2018 hingga 2022. Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Manggarai Barat setiap tahunnya adalah 0,468. Meskipun mengalami tren yang positif, capaian tersebut masih perlu untuk ditingkatkan karena masih berada di bawah rata-rata Provinsi NTT dan Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Barat, terutama berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak masyarakatnya.

4.2.4. Stabilitas ekonomi serta pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

Isu strategis di rumpun urusan ekonomi terkait dengan persoalan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi di sektor unggulan dan potensial. Pertumbuhan ekonomi di sektor unggulan terakit dengan beberapa urusan, seperti pertanian, konstruksi dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi pada beberapa sektor tersebut mampu memimpin pertumbuhan ekonomi, namun tren pertumbuhan di beberapa sektor tersebut mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Persoalan pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan perminataan dan penawaran, sehingga selama tahun 2019 hingga 2021 tren kapasitas produksi cenderung mengalami penurunan. Tren peningkatan kapasitas terjadi selama kurun waktu 2022 seiring dengan pemulihan pasca pandemi yang semakin membaik.

Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian juga dipengaruhi oleh beberapa persoalan mendasar, seperti kapasitas sumber daya manusia petani yang kurang memadai, belum optimalnya penerapan metode pertanian berorientasi agribisnis dan kurangnya ketersediaan sarana serta prasarana pertanian. Pertumbuhan ekonomi yang melambat di sektor pertanian berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani yang semakin menurun dan diikuti oleh pertumbuhan yang besar di sektor ekonomi tersier, menyebabkan perbedaan pendapatan antar sektor dan antar kelas ekonomi. Kondisi ini berpengaruh terhadap menurunnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat juga terkait dengan kinerja sektor koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang bekerja dan menggantungkan mata pencahariannya di sektor UKM. Jika sektor ini dikelola dengan baik, maka kinerja ekonomi sektor ini akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kecil dan menengah. Kondisi ini dapat memperkecil kesenjangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Persoalan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan yang belum berjalan dengan optimal. Kemiskinan dengan pendekatan *basic need approach* sangat terkait dengan pendapatan masyarakat. Faktor tersebut memiliki korelasi dengan

kekuatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Jika pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian meningkat dan diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan petani, maka upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik. Peningkatan produksi dan kapasitas pemasaran produk-produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat. Kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan juga harus ditingkatkan dan dihubungkan secara berkesinambungan dengan pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini sangat penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan *multiplier effect* yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

4.2.5. Infrastruktur dasar untuk menopang perekonomian yang berkelanjutan

Infrastruktur merupakan faktor pendukung di semua sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah. Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai Barat masih perlu untuk ditingkatkan, karena dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih belum optimal. Infrastruktur dasar jaringan jalan menjadi hal utama permasalahan wilayah, seperti kualitas jaringan jalan kabupaten maupun jalan lingkungan yang masih belum baik. Kurang lebih 50% jalan di Kabupaten Manggarai Barat berada dalam kondisi rusak berat maupu rusak ringan. Walaupun konektivitas seluruh wilayah di Kabupaten Manggarai Barat sudah terhubung jaringan jalan, namun aksesibilitasnya masih kurang dengan kondisi kualitas jalan yang belum baik. Selain perhubungan darat, hal lain yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah tentang perhubungan laut, dengan kondisi wisata utama di Manggarai Barat adalah wisata laut, permasalahan perhubungan laut menjadi penting untuk diperhatikan.

Sumber daya air di Kabupaten Manggarai Barat tergolong melimpah, kondisi mata air tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten. Namun Sebagian besar masyarakat masih belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih karena masih belum optimalnya upaya penyaluran sumber air bersih menuju kawasan permukiman masyarakat. Upaya pengadaan saluran air besih masih belum menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Selain akses terhadap air bersih, masyarakat juga masih sulit untuk mengakses saluran air

limbah yang memadai. Pertanian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Manggarai Barat, namun kondisi persawahan belum didukung dengan jaringan irigasi yang memadai. Kondisi jaringan irigasi yang belum baik menyebabkan aliran air menuju persawahan menjadi kurang optimal, sehingga menyebabkan hasil produksi pertanian kurang maksimal.

Hal lain yang seringkali ditemui dalam pembangunan yaitu kesesuaian dengan rencana tata ruang dan pilihan antara kepentingan ekonomi atau lingkungan hidup. Pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus mempedomani rencana tata ruang, baik struktur maupun pola ruang. Selain itu, pembangunan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam pembangunan terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur wilayah.

4.2.6. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan pelayanan publik yang prima

Perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terhadap pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat sangatlah tinggi. Namun hal itu belum didukung oleh kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Koordinasi lintas sektoral serta akuntabilitas aparatur di Kabupaten Manggarai Barat masih tergolong lemah serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik juga masih belum berjalan optimal sehingga pelayanan publik masih terkesan lamban dan berbelit

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat yang sejauh ini belum berjalan secara optimal dapat erlihat dari masih rendahnya Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Reformasi Birokrasi. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 sebesar 52,31 dengan predikat CC. Kondisi tersebut menuntut pelembagaan reformasi birokrasi yang sinergis diseluruh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian komponen pengungkit maupun komponen hasil dari reformasi birokrasi. Dari sisi aspek pengawasan, Kabupaten Manggarai Barat memiliki Maturitas SPIP sebesar 2,77. Sedangkan dari sisi

akuntabilitas keuangan sudah menunjukan capaian kinerja yang baik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun dengan beberapa catatan.

Hal lain yang menunjukan kinerja tata kelola pemerintahan yang masih rendah adalah masih belum optimalnya capaian SAKIP (61,60/B) yang erat kaitannya dengan keterpaduan antara perencanaan dan akuntabilitas pemerintahan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan serta terciptanya manajemen kinerja berupa pembagian kinerja yang sinergis antara kepala daerah dengan struktur perangkat daerah.

Selain itu, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat juga masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang hanya dilakukan di 3 perangkat daetrah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan rata-rata nilai sebesar 2,52. Pelaksanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di seluruh Perangkat Daerah sifatnya menjadi penting untuk melihat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat secara menyeluruh dari sisi pengguna yaitu masyarakat.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi mencerminkan kondisi yang akan dicapai di akhir periode perencanaan, sedangkan misi merupakan rumusan umum sebagai upaya untuk mencapai visi. Visi dan misi diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang merujuk kepada RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025 dan mempertimbangkan pemetaan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang berkembang dan menentukan arah pembangunan.

5.1. Visi

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan dan isu strategis pembangunan daerah yang harus direspon. Rumusan visi dan misi didasarkan pula pada RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025, yang pada periode terakhir pembangunan jangka panjang ini memiliki tema pembangunan berupa "Pengelolaan Pertumbuhan Ekonomi, Dunia Pariwisata, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pendapatan, Mobilisasi Investasi dan Kerjasama antar Daerah". Berangkat dari berbagai dasar tersebut, visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, yaitu:

Visi:

"MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP".

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut :

1. **Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata "Bangkit" mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih

kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata "Bangkit" dimaknai sebagai berikut:

- **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk *"bangun dari tidurnya"* dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.
- **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi.** Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.

2. **MANTAP** merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.
    - **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimisme untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.
    - **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui Mabar Mantap, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu

mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.

- **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

3. **Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap** menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh dan Populer**.

5.2. Misi

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan untuk mencapai visi. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: **Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi**

Kabupaten Manggarai Barat memiliki karakteristik pariwisata yang unik dan memiliki keuanggulan komparatif. Karakteristik tersebut ditopang dengan perhatian pemerintah pusat yang besar bagi pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Pembangunan pariwisata Manggarai Barat perlu dikerangkai dalam konsep pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan pariwisata yang inklusif tidak hanya digerakkan dan menggerakkan sektor pariwisata sendiri, melainkan juga menjadi lokomotif utama atau pemicu (*trigger*) bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan pariwisata yang inklusif digerakkan oleh lintas sektor dan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Berpijak dari pembangunan yang inklusif, pembangunan pariwisata berkelanjutan juga dapat dijalankan, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah, sekaligus

mampu diterima dan diwarnai oleh budaya lokal dan membawa kesejahteraan masyarakat, serta tidak kalah penting tetap membawa manfaat bagi kelestarian lingkungan.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Misi ini juga diarahkan untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat *dalam* mendapatkan pelayanan dasar yang tanggap, cepat dan layak sehingga mampu memberikan jaminan berupa kesejahteraan dan rasa aman. Selain itu, Misi 2 juga menjadi upaya untuk menjalankan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga tidak terdapat ketimpangan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

Potensi ekonomi Manggarai Barat yang melimpah, antara lain berupa pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dioptimalkan untuk membangun daya saing daerah. Pembangunan daya saing yang berbasis potensi *lokal* diharapkan semakin memperkokoh struktur perekonomian daerah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Perekonomian daerah yang kokoh juga ditopang oleh pelaku UMKM yang mampu menjaga eksistensi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, Manggarai Barat sebagai prioritas pembangunan nasional, terutama di bidang pariwisata, perlu direspon dengan membangun iklim investasi yang kondusif. Peningkatan investasi tetap diarahkan agar mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga gerak perekonomian Manggarai Barat yang semakin meningkat, beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran

berbagai aktivitas perekonomian, serta membuka aksesibilitas daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolir. Pembangunan infrastruktur dalam Misi 4 juga terkait peningkatan kelayakhunian, yang sekaligus memiliki sasaran khusus untuk ikut menjalankan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni. Tidak kalah penting, Misi 4 juga mengarahkan derap pembangunan infrastruktur yang menopang aktivitas perekonomian tetap mampu menjaga kesesuaian dengan kebijakan tata ruang wilayah, menjaga daya dukung dan daya dukung lingkungan hidup, serta meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani

Kebijakan utama dalam menjalankan Misi 5 adalah penerapan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penerapan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan di dalam Misi 5 juga terkait implementasi prinsip partisipasi publik dalam pembangunan yang semakin meningkat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Efektvitas pembangunan daerah juga ditopang dengan peningkatan keberdayaan desa. Oleh karena itu, Misi 5 juga memiliki prioritas untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan optimalisasi *pembangunan* desa melalui kelembagaan masyarakat desa yang kuat dalam mengelola potensi lokal desa.

Kelima rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 perlu memiliki keterkaitan dengan misi pembangunan nasional dan tujuan RPD Provinsi NTT. Keterkaitan tersebut memberikan kerangka umum adanya sinergi perencanaan pembangunan antar level pemerintahan. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Tujuan RPD Provinsi NTT dan Misi RPJMN sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Keterkaitan Anatara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Visi dan Misi RPJMN dan Tujuan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026	RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026
Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing **Misi 5:** Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	**Misi 1:** Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi	**Tujuan 1:** Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial
Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	**Misi 2:** Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	**Tujuan 2:** Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing	**Misi 3**: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	**Tujuan 1:** Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial
Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan **Misi 4:** Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	**Misi 4:** Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	**Tujuan 3:** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayahan, dan Mitigasi Bencana
Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya **Misi 7:** Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Bagi pada Seluruh Warga **Misi 8:** Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya **Misi 9:** Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	**Misi 5:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani	**Tujuan 4:** Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam setiap tujuan memiliki rumusan sasaran sebagai kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan di dalam dokumen Perubahan

RPJMD memiliki keterkaitan secara substansi dengan rumusan tujuan RPD Provinsi NTT sebagai berikut:

Tabel 5. 2. Keterkaitan antara Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Tujuan RPD Provinsi NTT

Tujuan RPD Provinsi NTT 2024-2026	Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial.	Meningkatnya pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
	Meningkatnya kesetaraan gender
	Meningkatnya kemandirian desa
Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah
	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
	Menurunnya risiko bencana
Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis

Tujuan dan sasaran sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan. Indikator tujuan dan sasaran memiliki sifat *impact* dan *outcome*. Rumusan tujuan Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

Tabel 5. 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

Visi: "MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP"

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah									
Meningkatnya Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan		Indikator Tujuan: Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	58.2	62,5	65	67,5	70	70
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Indikator Sasaran: Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	6.1	6,3	6,5	6,7	6,9	6,9
		Indikator Sasaran: Persentase Kunjungan Wisatawan (Target kunjungan 2022-2026 sebesar 2,5 juta kunjungan)	Persen	4.16	15	45	70	100	100
		Indikator Sasaran: Spend of money	USD/hari	USD 135.01	USD 128,12	USD 137,36	USD 141,79	USD 152,17	USD 152,17
	Meningkatnya kelestarian budaya daerah	Indikator Sasaran: Persentasi budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kondusivitas sosial masyarakat	Indikator Sasaran: Angka Konflik Sosial	Angka	3	2	2	1	0	0

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas									
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia		Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	64.92	65,34	66,26	67,18	68,10	68,10
	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Indikator Sasaran: Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.8	8,73	8,849	8,97	9,09	9,09
		Indikator Sasaran: Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.31	14,05	14,61	15,17	15,73	15,73
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Indikator Sasaran: Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	9	15	45	55	60	60
		Indikator Sasaran: Peringkat pada event olahraga daerah (PORPROV)	Peringkat	10	10	9	9	8	8
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indikator Sasaran: Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67.73	68,04	68,5	68,96	69,42	69,42
		Indikator Sasaran: Prevalensi Stunting	Persen	15.9	15,22	14,53	13,85	13,16	13,16
		Indikator Sasaran: Total Fertility Rate (TFR)	Angka	3.18	3.16	3.08	3.06	3.06	3.06

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya literasi Masyarakat	Indikator Sasaran: Indeks Literasi Masyarakat	Indeks	23.28	24	24.2	25	25.2	25.2
		Indikator Sasaran: Tingkat kegemaran membaca	Nilai	0	0	30	40	61	61
Meningkatnya Kesetaraan Gender		Indikator Tujuan: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	59,06	61,56	64,06	66,56	69,06	69,06
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indikator Sasaran: Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	84.86	87,47	87,62	87,77	87,92	87,92
Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal									
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif		Indikator Tujuan: Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4.12	5,04	5,31	5,59	5,87	5,87
		Indikator Tujuan: PDRB Per Kapita	Juta rupiah	14.72	14,2	15	15,8	16,6	16,6
	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan dan potensial	Indikator Sasaran: PDRB ADHB	Persen	40.97	42,82	43,41	44	44,59	44,59

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya realisasi nilai investasi	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan realisasi nilai PMA	Persen	108.15	40	41	42	43	43
		Indikator Sasaran: Persentase peningkatan realisasi nilai PMDN	Persen	110.5	32	34	35	36	36
		Indikator Tujuan: Indeks Gini	Angka	0.340	0,332	0,324	0,316	0,308	0,308
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	23.53	32.86	40	42.86	54.29	54.29
		Indikator Sasaran: Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas	Persen	0	0	19.67	24,6	29.5	29.5
		Indikator Tujuan: Laju Inflasi	Angka	6.65	3-3,2	3-3,2	3-3,2	3-3,2	3-3,2
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indikator Sasaran: Indeks ketahanan pangan	Nilai	75.17	75,61	77,13	78,65	80,17	80,17
	Meningkatnya stabilitas harga barang	Indikator Sasaran: Indeks Harga Konsumen	Nilai	113.54	104,44-104,53	104,44-104,53	104,44-104,53	104,44-104,53	104,44-104,53
		Indikator Tujuan: Tingkat Kemiskinan	Persen	17.15	15,65	15,09	14,55	14,01	14,01

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
	Menurunnya pengangguran	Indikator Sasaran: Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.91	3,40	3,29	3,18	3,07	3,07
	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Indikator Sasaran: Angka PPKS	Angka	54.68	59.68	64.68	69.68	74.68	74.68
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan									
Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah		Indikator Tujuan: Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	N/A	64,77	67,41	69,89	72,49	72,49
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Indikator Sasaran: Tingkat kemantapan jalan	Persen	51.02	52.99	54.83	60.63	68.4	68.4
	Meningkatnya ketersediaan air baku	Indikator Sasaran: Rasio luas daerah pertanian yang terlayani jaringan irigasi	Rasio	0.535	0,547	0,558	0,569	0,580	0,580
		Indikator Sasaran: Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Persen	69.74	74,39	79,47	84,90	90,70	90,70

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah Domestik	Indikator Sasaran: Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	75	98.6	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Indikator Sasaran: Rasio Konektivitas	Rasio	1.18	1.2	1.22	1.26	1.3	1.3
	Meningkatnya akses rumah layak huni	Indikator Sasaran: Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0.63	0,385	0,390	0,396	0,402	0,402
	Meningkatnya ketaatan penataan ruang	Indikator Sasaran: Persentase kesesuaian fungsi, struktur, dan pola ruang (RTRW)	Persen	62.27	100	100	100	100	100
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup		Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70.47	68.66	72.63	76.6	76.81	76.81
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70.47	68.66	72.63	76.6	76.81	76.81
Menurunnya risiko bencana		Indikator Tujuan: Indeks Risiko Bencana	Nilai	151.62	151,12	150,62	150,12	149,62	149,62

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
		(IRB)							
	Meningkatnya upaya mitigasi dan pengendalian bencana	Indikator Sasaran: Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,49	1,09	1,69	2,29	2,89	2,89
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani									
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis		Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53.79 (CC)	55 (CC)	58 (CC)	60 (B)	62 (B)	62 (B)
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indikator Sasaran: Nilai SAKIP	Nilai	62.16	69	72	75	81	81
		Indikator Sasaran: Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indikator Sasaran: Total PAD	Juta rupiah	190,819	251,517	333,615	414,044	502,289	502,289
		Indikator Sasaran: Maturitas SPIP	Nilai/Predikat	2.69 (Berkembang)	3 (Terdefinisi)	3.2 (Terdefinisi)	3.3 (Terdefinisi)	3.4 (Terdefinisi)	3.4 (Terdefinisi)
		Indikator Sasaran: Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	31,89/39,78	50	68	71	74	74
		Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan	Nilai	77.87	79	80	82	84	84

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target Kinerja				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
		Masyarakat (IKM)							
		Indikator Sasaran: Indeks Arsip	Nilai	86.1	86.2	86.4	86.5	87	87
	Terwujudnya birokrasi yang melayani berbasis teknologi informasi	Indikator Sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3.01	3,05	3,35	3,65	3,95	3,95
		Indikator Sasaran: Indeks Inovasi Daerah	Nilai	54,65	55,25	55,85	56,45	57,05	57,05
Meningkatnya kemandirian desa		Indikator Tujuan: Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0.5922	0,6324	0,6574	0,6824	0,7074	0,7074
	Meningkatnya keberdayaan desa	Indikator Sasaran: Persentase Desa Maju	Persen	4.87	9.75	14.63	18.29	21.95	21.95

Efektivitas dan fokus kinerja diharapkan tercapai melalui penyederhanaan rumusan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD. Penyederhanaan jumlah tujuan dari 10 menjadi 9, indikator tujuan dari 15 menjadi 13, sasaran dari 34 menjadi 24, serta indikator sasaran dari 51 menjadi 35. Penyederhanaan tersebut, selain didasarkan pada kebutuhan pembangunan Manggarai Barat, juga berpijak pada pendekatan orientasi hasil (*outcome*) dalam perencanaan kinerja. Efektivitas kinerja juga dibentuk melalui penguatan sinergi lintas sektor (*crosscutting*) dalam merespon isu strategis. Crosscutting diperlukan agar pencapaian tujuan pembangunan atau *final outcome* tidak bersifat silo atau diintervensi hanya oleh 1 misi. Kolaborasi antar urusan/Perangkat Daerah atau antar misi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Isu strategis pariwisata diarusutamakan untuk penguatan lintas sektor dengan pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 5. 1. Pohon Kinerja Pariwisata Inklusif dan Berkelanjutan

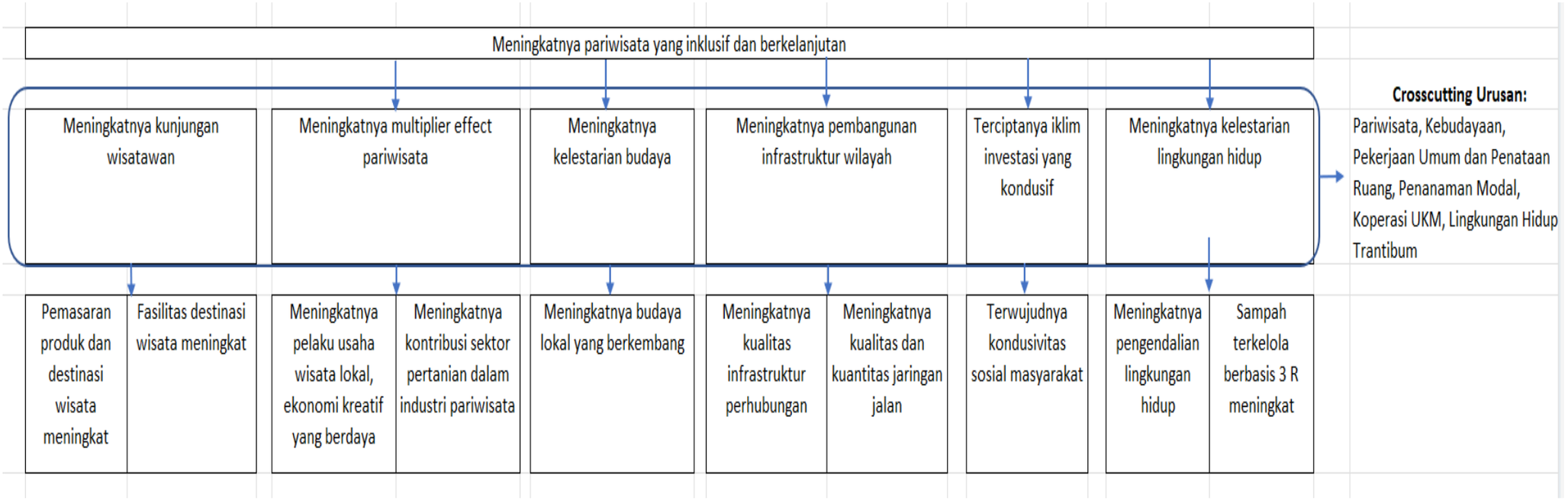

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Secara umum bab ini mencakup tiga poin besar, yaitu: strategi dan arah kebijakan, arah kebijakan tahunan, dan program pembangunan daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi. Selain itu, rumusan strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan memperhatikan rumusan masalah dan akar masalah dari setiap urusan yang sudah dijabarkan pada Bab IV. Strategi yang dirumuskan akan menjadi panduan dalam merumuskan program pembangunan maupun perangkat derah, sedangkan arah kebijakan akan menjadi petunjuk bagi perumusan kegiatan pada level Renstra. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 6. 1. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah			
Meningkatnya Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan kualitas daya tarik wisata	Optimalisasi kajian dan pengembangan terhadap potensi destinasi wisata baru
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata yang inklusif
			Penyiapan SDM melalui pemberdayaan komunitas
			Penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata
		Peningkatan pemasaran destinasi wisata	Peningkatan promosi pada pasar regional dan global
			Peningkatan promosi tidak langsung (luring dan daring)
		Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan
			Peningkatan pemanfaatan ekonomi destinasi wisata untuk masyarakat lokal
			Penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan
		Penguatan kelembagaan dan kerjasama pariwisata	Integrasi kerjasama dengan sektor-sektor terkait
			Intergrasi pariwisata dengan Pokdarwis, Bumdes, BUMD dan lembaga usaha lainnya
			Peningkatan kerjasama dengan pemerintah pusat dalam mendorong Labuan Bajo sebagai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			destinasi wisata super premium
			Pemanfaatan nilai budaya untuk menopang pariwisata
		Pengintegrasian ekonomi masyarakat untuk menopang kegiatan wisata	Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi di sekitar destinasi wisata
			Fasilitasi pemasaran produk lokal di sekitar destinasi wisata
		Peningkatan kapasitas produksi ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas SDM pelaku Ekraf
			Peningkatan kualitas sarana / teknologi penopang ekraf
			Peningkatan kemudahan terhadap akses bantuan permodalan
			Peningkatan ketersediaan bahan baku produksi
			Pengembangan metode produksi berorientasi bisnis
		Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif	Penerapan standar sertifikasi produk Ekraf
	Meningkatnya kelestarian budaya daerah	Peningkatan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Pengembangan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya
			Peningkatan peran lembaga adat dalam pengembangan nilai budaya
			Peningkatan kolaborasi budaya dengan kegiatan pariwisata
			Optimalisasi identifikasi dan pengelolaan seni budaya
			Peningkatan kelembagaan tata kelola seni budaya
	Meningkatnya kondusivitas sosial masyarakat	Peningkatan pengawasan dan kewaspadaan dini	Peningkatan penanganan trantibum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan deteksi dan pencegahan dini konflik
Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Peningkatan fasilitas pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP	Pembangunan dan pembaharuan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
		peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan	Peningkatan kualitas pengelolaan dapodik
			Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
			Peningkatan sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana pendidikan
			Peningkatan monitoring pengelolaan sistem pendidikan
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan kompetensi guru
			Peningkatan keprofesian guru
			Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
			Pengembangan kurikulum muatan lokal
			Pengembangan pendidikan karakter sejak usia dini
			peningkatan akreditasi sekolah SD dan SMP
		Peningkatan daya saing siswa	peningkatan stadar isi, standar proses, standar evaluasi dan standar kelulusan di tingkat satuan pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas ibu	peningkatan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
			peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan
			peningkatan penanganan komlikasi saat persalinan
			peningkatan penanganan komplikasi pasca persalinan/nifas
			peningkatan kunjungan K1 dan K4
		Peningkatan kualitas kesehatan bayi	penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
			peningkatan gizi bayi
			peningkatan Imunisasi dasar Lengkap (IDL)
		Peningkatan penanganan gizi buruk dan *Stunting*	pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil
			pemenuhan gizi bayi dan balita
			optimalisasi pemberian PMT
			peningkatan penerpan PHBS
		peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular	peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang
			peningkatan pemahaman masyarakat terkait penyakit menular dan tidak menular
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan
			peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas
			peningkatan kapasistas SDM tenaga kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			peningkatan pengawasan obat dan makanan
		peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	peningkatan peran kader kesehatan
			peningkatan partisipasi masayarakat dalam urusan kesehatan
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Peningkatan pelembagaan pengarusutamaan gender
			Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik
			Mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas
		Peningkatan perlindungan terhadap perempuan	Peningkatan kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan
			Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan
			Peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan
			Peningkatan fasilitas layanan pengaduan
		Peningkatan perlindungan terhadap anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
			Peningkatan kesadaran hak-hak anak
			Peningkatan sarana dan prasarana ramah anak
Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 3: Mengembangkan Daya saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan dan potensial	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan ketersediaan irigasi
			Peningkatan partisipasi petani dalam pengembangan system irigasi
			Perluasan lahan pertanian
			Penurunan alih fungsi lahan
			Peningkatan ketersediaan jalan usaha tani
			Peningkatan sarana pertanian (benih unggul, pupuk , obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)
			Penurunan serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim
			Penerapan metode pertanian berorientasi agribisnis
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
			Peningkatan ketersediaan tanaman produktif
			Peningkatan sarana produksi perkebunan
		Peningkatan kualitas produk pertanian	Peningkatan penerapan *good handling practices*
		Peningkatan produksi hasil ternak	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan
			Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			ketersediaan pakan
			Peningkatan ketersediaan bibit unggul
			Penurunan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan penyakit zoonosis lainnya
		Peningkatan kualitas produk hasil ternak	Peningkatan standarisasi penanganan produk pasca panen
		Peningkatan populasi ternak	Peningkatan kelahiran ternak
			Peningkatan kesehatan ternak
			Penurunan tingkat kematian ternak
		Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan sarana penangkapan
			Peningkatan kapasitas SDM nelayan
			Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan ketersediaan pakan bersubsidi
			Peningkatan ketersediaan bibit unggul
			Peningkatan akses bantuan modal
			Peningkatan penguasaan teknologi
			Peningkatan metode budidaya berorientasi agribisnis
			Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok perikanan budidaya
		Peningkatan kualitas produk perikanan	Standarisasi penanganan produk perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian, perikanan dan produk lokal	Penerapan metode 8Ps marketing-mix (Price, promotion, physical evidence, people, product, process, place, planet)
		Revitalisasi pasar tradisional	Peningkatan kualitas sarana pasar
			Peningkatan kapasitas SDM pedagang
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Pengembangan pasar tertib ukur
		Peningkatan nilai produksi IKM	Peningkatan ketersediaan bahan baku secara kontinu
			Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan sarana produksi
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
		Peningkatan daya saing produk IKM	Pengingkatan standarisasi pengolahan produk IKM
	Meningkatnya realisasi nilai investasi	Peningkatan minat/ daya tarik investasi	Identifikasi potensi dan peluang investasi
			Peningkatan promosi potensi investasi
		Peningkatan kepatuhan investor untuk melaporkan perkembangan usahanya	Pengembangan sistem pelaporan perkembangan usaha
		Peningkatan kemudahan perizinan berinvestasi	Standarisasi pelayanan perizinan sesuai SOP
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Peningkatan kualitas manajerial koperasi	Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi
			Peningkatan akses terhadap bantuan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			permodalan
			Peningkatan sarana koperasi
		Peningkatan omzet usaha mikro	Peningkatan kapasitas produksi
			Peningkatan kualitas produk
			Peningkatan kapasitas pemasaran
	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan kapasitas pengolahan produk pertanian	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
			Peningkatan sarana dan prasarana produksi
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
		Peningkatan pemasaran produk olahan pertanian	Peningkatan penerapan metode marketing mix (8Ps)
		Peningkatan ketersediaan pangan	Peningkatan stok cadangan pangan daerah
			Peningkatan ketersediaan lumbung pangan dan sarana pendukungnya
		Peningkatan akses pangan	Peningkatan kemudahan pendistribusian pangan
			Peningkatan akses informasi pangan
		Peningkatan pemanfaatan pangan	Peningkatan diversifikasi pangan lokal
		Peningkatan keamanan keamanan pangan	Penurunan jenis pangan masih menggunakan bahan kimia di luar ambang batas
	Meningkatnya stabilitas harga barang	Peningkatan kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting
			Stabilisasi ketersediaan barang pokok dan barang penting

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Menurunnya pengangguran	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja
			Pengembangan jaringan penempatan tenaga kerja
		Penurunan permasalahan hubungan industrial	Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan
	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Peningkatan layanan sosial	Peningkatan layanan perlindungan sosial
			Peningkatan layanan rehabilitasi sosial
			Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Kelestarian Lingkungan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan pemeliharaan jalan
			Optimalisasi pengawasan penyelenggaraan jalan
			Peningkatan pemerataan jaringan jalan
	Meningkatnya ketersediaan air baku	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
		Peningkatan akses air minum	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
	Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah Domestik	Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana	Peningkatan ketersediaan dermaga rakyat dan pelabuhan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perlengkapan jalan dan laut	pengumpan
			Optimalisasi pengelolaan keselamatan pelayaran angkutan laut
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal
			Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
			Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan
		Pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan	Peningkatan kelaikan angkutan umum
			Optimalisasi pengelolaan parkir
			Optimalisasi layanan angkutan darat
	Meningkatnya akses rumah layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah tidak layak/ rusak
			Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh
			Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
		Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan
			Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman
	Meningkatnya ketaatan penataan ruang	Optimalisasi kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
			Meningkatkan pengawasan perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan	Fasilitasi sengkata tanah garapan
			Fasilitasi sengkata tanah ulayat
		Optimalisasi penyelesaian ganti rugi tanah pembangunan	Peningkatan penggantian ganti rugi tanah pembangunan
		Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Optimalisasi pengawasan pembangunan gedung
		Peningkatan kualitas jasa kontruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran air	Optimalisasi pemantauan kualitas air di badan air
			Minimalisasi penggunaan bahan kimia oleh pelaku usaha dan atau kegiatan
			Optimalisasi konservasi sumber mata air
		Pengendalian pencemaran udara	Pengendalian emisi gas industri dan kendaraan
			Pengendalian emisi gas rumah kaca
			Optimalisasi pemantauan kualitas udara
		Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati	Optimalisasi pengelolaan RTH
			Optimalisasi pengelolaan flora dan fauna
			Pengendalian alih fungsi lahan
Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya upaya mitigasi dan pengendalian bencana	Optimalisasi penanggulangan kebencanaan	Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana baik petugas maupun kelompok masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan penyusunan dokumen kebencanaan
			Optimalisasi pendampingan korban pasca bencana
			Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan
		Peningkatan cakupan layanan penanganan kebakaran	Peningkatan sarana pdan prasaranan pemadam kebakaran
			Penambahan jumlah WMK
			Penambahan personil pemadam kebakaran
		Peningkatan ketersediaan bangunan pengendali bencana	Peningkatan capaian pembangunan drainase perkotaan
			Normalisasi Sungai
			Penurunan luasan kawasan genangan
			Peningkatan ketersediaan bangunan penahan longsor
			Peningkatan ketersediaan bangunan pengaman pantai
Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
			Peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan
			Peningkatan tindak lanjut partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan
			Pembangunan dan manajemen sistem data kinerja
		Penguatan pelembagaan dan implementasi reformasi birokrasi	Fasilitasi penerapan SAKIP di setiap Perangkat Daerah
			Fasilitasi penerapan 8 area perubahan di setiap perangkat daerah
		Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan sinkronisasi dan penerapan instrumen pengendalian kebijakan
			Peningkatan administrasi kewilayahan
			Peningkatan implementasi kerjasama pemerintah daerah
			Optimalisasi fungsi evaluasi dan pengawasan realsasi anggaran
			Peningkatan kapasitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik
			Peningkatan kapasitas manajerial BUMD
		Peningkatan kualitas pelaporan keuangan	Peningkatan inventarisasi aset daerah
			Peningkatan kapasitas pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Pengintegrasian sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan
		Peningkatan kapasitas PAD	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak (kapal dan restoran)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan retribusi daerah
			Optimalisasi pengurangan kebocoran potensi PAD
			Optimalisasi peran Perumda Bidadari
		Peningkatan fungsi kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Pengelolaan arsip secara baku
		Percepatan implementasi rencana aksi pemberantasan korupsi	Peningkatan kelembagaan pengawasan daerah
		Peningkatan kualitas dan sistem pengawasan daerah	Peningkatan sistem pengendalian intern dii setiap perangkat daerah
			Peningkatan akses dan penyelesaian pengaduan masyarakat
	Terwujudnya birokrasi yang melayani berbasis teknologi informasi	Percepatan iplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Optimalisasi aplikasi e-government untuk pelayanan publik
			Integrasi aplikasi e-government untuk layanan internal pemerintah daerah
		Penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik	Penguatan kapasitas PPID dan PPID pembantu
			Penguatan ruang/media interaksi masyarakat dengan pemerintah daerah
Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya keberdayaan desa	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan desa
			Optimalisasi kewenangan lokal berskala desa
		Peningkatan pengelolaan potensi desa	Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan
			Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
			Peningkatan pembinaan lembaga desa
		Peningkatan peran lembaga desa dalam perencanaan dan pembangunan desa	Peningkatan pembinaan lembaga desa
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan harus dicapai dan dijalankan setiap tahun yang disertai adanya penekanan dan prioritas tahunan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu disusun arah kebijakan tahunan yang berbasis pada proyeksi kebutuhan daerah yang perlu diintervensi setiap tahun. Arah kebijakan tahunan akan membangun sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan yang menjadi tema dan prioritas pembangunan setiap tahun sebagai berikut:

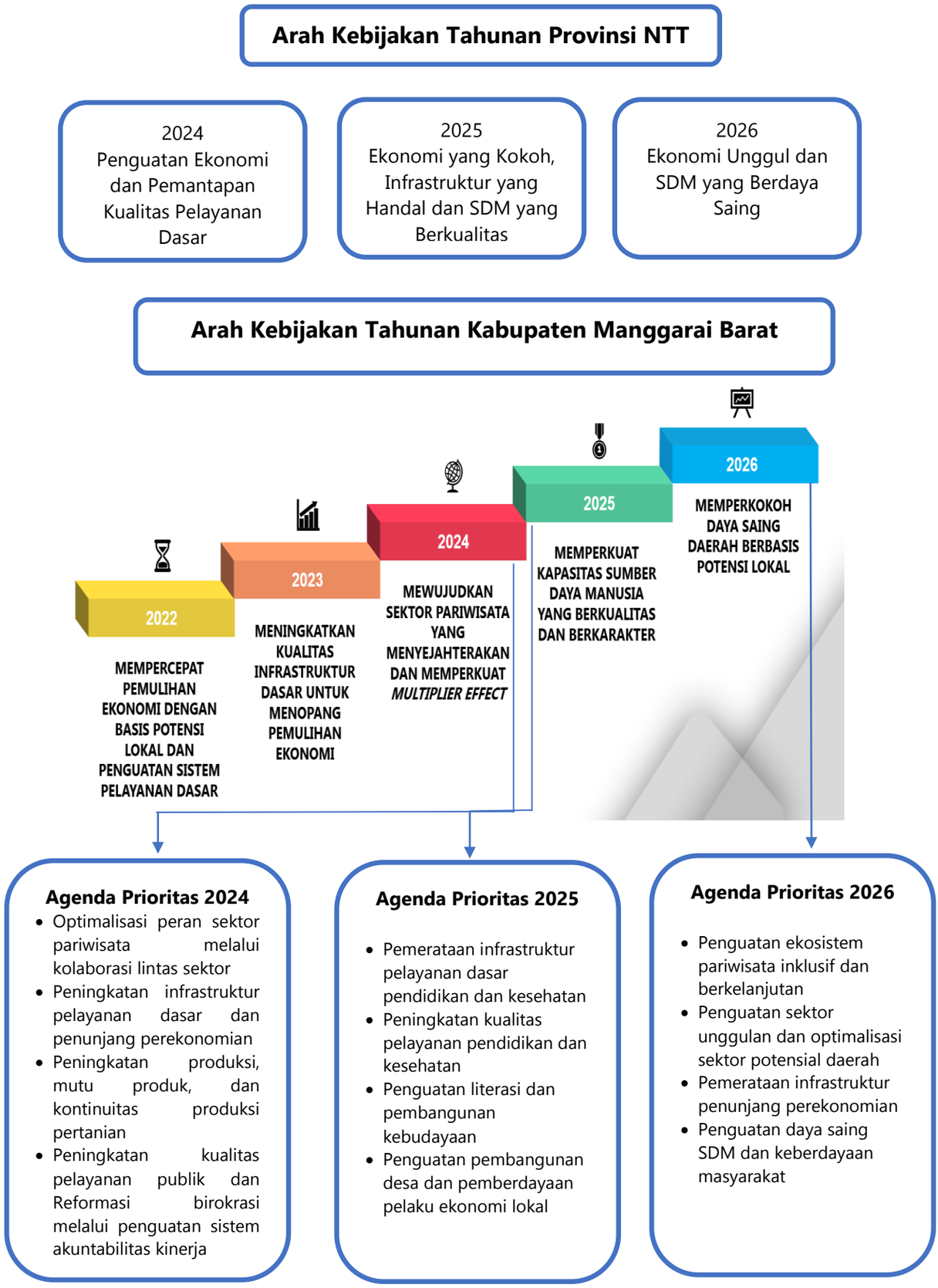

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang memiliki dimensi politik dan teknokratik dan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Program pembangunan daerah dalam dimensi politik berisi prioritas pembangunan dan bersifat unggulan yang menjadi kesatuan dalam rumusan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program tersebut merupakan janji politik yang harus diwujudkan dan dimulai dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat dalam periode 2021-2026 pada dasarnya adalah penjabaran atas makna Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap. Makna ini diangkat dari nilai kerja keras dalam budaya orang Manggarai seperti yang tersirat dari peribahasa "***Neka Mejeng Hese, Neka Ngonde Holes***". Oleh karena itu pula, program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2021-2026 ini juga diberi nama **Program Mabar Bangkit** dan **Program Mabar Mantap**. Program pembangunan ini merupakan program lintas sektor dan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun.

Program Mabar Bangkit diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan dan peningkatan kualitas SDM sehingga diharapkan nantinya akan tercipta masyarakat yang unggul dan tangguh. Sedangkan Program Mabar Mantap lebih diarahkan untuk menciptakan Manggarai Barat yang maju dan populer melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas infrastruktur dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang efektif. Berikut uraian kedua program ini selengkapnya:

Tabel 6. 2. Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050-5889

No	Program Prioritas Pembangunan	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050-5889	Urusan
1.	**Program MABAR BANGKIT**		
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		Program Pengembangan	Koperasi-Ukm

No	Program Prioritas Pembangunan	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050-5889	Urusan
		UMKM	
	Pertanian, peternakan dan perikanan zonasi berbasis teknologi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan Kelautan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan Kelautan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan Kelautan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian
	Beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta insentif bagi tenaga medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Non Urusan
	Perhatian khusus bagi para lansia, komitmen untuk tekan angka kematian ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
	Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal produktif di semua sector	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja

No	Program Prioritas Pembangunan	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050-5889	Urusan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga
2.	**Program MABAR MANTAP**		
	Labuan Bajo smart city dan penciptaan kota-kota baru di kecamatan	Program Aplikasi Informatika	Kominfo
		Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
	Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Program Pengembangan Sdm	Pendidikan Dan Pelatihan
		Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kewilayah-Kecamatan
	Layanan publik berbasis tekologi	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Kominfo
		Program Aplikasi Informatika	Kominfo
	Generasi berani wirausaha	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga

No	Program Prioritas Pembangunan	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050-5889	Urusan
	Pemerataan dan peningkatan kualitas semua jenis infrastruktur pelayanan masyarakat dan jalan raya	Program Pengembangan Perumahan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perhubungan
	Pengelolaan air minum berbasis teknologi informasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Perumusan program pembangunan daerah dalam dimensi teknokratik mengacu pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran, serta berdasarkan rumusan strategi yang telah dipilih. Program pembangunan dalam dimensi teknokratik juga membangun keterpaduan antara prioritas pembangunan yang bersifat politik dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi *outcome* dan *impact*.

Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki oeh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan inovatif guna mencapai apa yang menjadi cita-cita bersama tersebut. Oleh karena itu, gerakan inovasi daerah menjadi suatu keharusan. Inovasi daerah menjadi suatu kewajiban, bukan lagi suatu rutinitas belaka. Inovasi akan membantu daerah dalam mempercepat proses pembangunan di daerah. Berikut adalah rincian seluruh program pembangunan daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan sasaran pembangunan daerah:

Tabel 6. 3. Program Pembangunan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1: Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah																
Tujuan: Meningkatnya pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan	Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	N/A	58.2		62.5		65		67.5		70		70		
Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	5.8	6.1		6.3		6.5		6.7		6.9		6.9		
	Persentase Kunjungan Wisatawan (Target kunjungan 2022-2026 sebesar 2,5 juta kunjungan)	Persen	N/A	4.16		15		45		70		100		100		
	Jumlah Belanja Wisatawan (Spend of money)	USD	118.25	135.01		128.12		137.36		141.79		152.17		152.17		
Program Pembangunan Daerah																
Program pemasaran pariwisata	Persentase even pariwisata yang dilaksanakan	Persen	N/A		647,361,848		900,000,000	33.33	2,780,000,000	66.67	2,780,000,000	100	4,387,708,756	100	11,495,070,604	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan secara digital	Persen	64.29	63.79		70		77.78		88.89		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program peningkatan daya tarik destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya	Persen	34.62	10.34	1,673,338,197	40	2,701,244,744	60	11,610,105,800	80	11,515,000,000	100	14,465,000,000	100	48,997,873,782	
	Persentase destinasi wisata baru yang dikembangkan	Persen	0	0	2,981,317,925	25	4,051,867,116	50		75		100		100		
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual	Persen	N/A	4.79	597,361,848	15	475,000,000	42.5	775,000,000	70	775,000,000	100	2,050,000,000	100	4,672,361,848	
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	2.73	5.26	1,575,545,210	8.81	2,475,992,245	9.41	3,063,212,000	10	2,938,212,000	12.73	3,163,212,000	12.73	13,216,173,455	
Sasaran: Meningkatnya Kelestarian Budaya Daerah	Persentase Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pembangunan Daerah																
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Persen	N/A	100	1,258,434,852	100	2,000,000,000	100	5,233,266,434	100	2,733,266,434	100	2,733,266,434	100	13,958,234,154	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase warisan sejarah yang dilestarikan	Persen	100	100	100,000,000	100	451,478,415	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	851,478,415	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	100	66.67	1,800,000,000	100	2,000,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	6,500,000,000	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian daerah yang dikelola dengan baik	Persen	58.90	100	853,936,957	100	1,107,659,679	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	3,011,596,636	
Sasaran: Meningkatnya kondusivitas sosial masyarakat	Angka Konflik Sosial	Angka	3	3		2		2		1		0		0		
Program Pembangunan Daerah																
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan potensi konflik sosial	Persen	58	100	944,775,574	100	575,000,000	100	573,229,544	100	1,310,000,000	100	1,615,000,000	100	5,018,005,118	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	Persentase partai politik yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	43	100	1,735,303,574	100	1,600,000,000	100	136,691,900,000	100	1,371,850,000	100	1,371,850,000	100	142,770,903,574	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga pendidikan yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	0	14	438,583,048	44	288,862,692	45.45	275,500,000	72.73	480,000,000	100	500,000,000	100	1,982,945,740	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Potensi Konflik SARA yang Diselesaikan	Persen	100	100	748,775,574	100	601,000,000	100	47,500,000	100	505,000,000	100	1,018,729,543	100	2,921,005,117	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Desa yang Berkarakter Kebangsaan Berdasarkan Budaya Lokal	Persen	0	75	979,775,574	100	830,000,000	100	1,088,070,457	100	1,088,070,457	100	1,288,070,457		5,273,986,945	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3)	Persen	80	92	1,600,000,000	100	1,756,387,275	100	1,460,000,000	100	3,685,269,201	100	4,000,000,000	100	12,501,656,476	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penggantian kerugian dan santunan tanah masyarakat terdampak pembangunan	Persen	N/A	100	3,423,579,200	100	3,560,476,176	100	2,389,651,802.00	100	3,672,071,372.00	100	3,686,261,587	100	16,732,040,137	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik tanah yang difasilitasi	Persen	N/A	100	489,082,743	100	508,639,454	100	513,692,315.00	100	515,000,000.00	100	515,000,000	100	2,541,414,512	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Misi 2: Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas																
Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	63.5	64.92		65.34		66.26		67.18		68.10		68.10		
Sasaran: Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8.26	7.80		8.73		8.84		8.97		9.09		9.09		
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11.59	12.31		14.05		14.61		15.17		15.73		15.73		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan pendidikan	APK PAUD	Persen	46	63.16	121,689,225,349	100	128,899,131,807	100	124,632,971,699	100	125,884,731,846	100	128,764,304,461	100	629,870,365,162	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	98.01	83.2		100		100		100		100		100		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	92.67	70.07		100		100		100		100		100		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	104.93	100		100		100		100		100		100		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	persen	97.75	98		100		100		100		100		100		
	Persentase SD yang terakreditasi	Persen	58.76	62		66		66		70		74		74		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase SMP yang terakreditasi	Persen	76	93.75		94		95		97		100		100		
	Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertarma/ Madrasah Tsanawiyah) (SPM)	Persen	95.97	96.45		100.00		100.00		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	Persen	1	97.86		100		100		100		100		100		
	Indeks literasi siswa SD	Angka	N/A					1.77		1.87		1.97		1.97		
	Indeks literasi siswa SMP	Angka	N/A					1.66		1.77		1.86		1.86		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Indeks Numerasi Siswa SD	Angka	N/A					1.68		1.78		1.88		1.88		
	Indeks Numerasi Siswa SMP	Angka	N/A					1.68		1.78		1.88		1.88		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik	Persen	24.47	23.61	5,805,518,130	24	5,951,718,130	25	12,963,000,000	30	12,963,000,000	35	12,963,000,000	35	50,646,236,260	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Jumlah guru TK, SD dan SMP yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak	Orang	NA	66		100		125		150		175		175		
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan	Persen	N/A	25	96,986,390	50	130,000,000	75	195,000,000	100	200,000,000	100	355,000,000	100	976,986,390	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan non formal yang dikembangkan	Persen	N/A	25		50		75		100		100		100		
Sasaran: Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	64.81	9		15		45		55		60		60		
	Peringkat pada event olahraga daerah (PORPROV)	Peringkat	10	10		10		9		9		8		8		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	N/A	9	1,020,534,410	15	1,046,534,410	45	27,000,000	55	270,000,000	60	270,000,000	60	2,634,068,820	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	Persen	65	100	1,065,960,000	100	1,175,960,000	100	400,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	3,341,920,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Fasilitas Olahraga dalam Kondisi Baik	Buah	N/A	420	2,797,310,080	420	2,952,310,460	430	1,680,000,000	440	1,680,000,000	460	1,680,000,000	460	10,789,620,540	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Cakupan Pelatih yang Tersertifikasi	Orang	6	18		18		23		28		33		33		
	Cakupan Atlet Muda yang Dibina	Orang	N/A	30		33		35		40		45		45		
Sasaran: Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Literasi Masyarakat	Indeks	4.48	23,28		24		24.20		25		25.2		25.2		
	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	N/A					30		40		61		61		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Nilai	50	79.61	396,326,689	80	510,750,000	81	156,674,040	82	156,674,040	83	156,674,040	84	1,377,098,809	Dinas Kearsipan dan Perpustakaa

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0.17	0.73	154,326,690	0.74	237,162,839	0.75	104,449,360	0.76	104,449,360	0.77	104,449,360	0.77	704,837,609	n
Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67.12	67.73		68.04		68.5		68.96		69.42		69.42		
	Prevalensi Stunting	Persen	19.06	15.9		15.22		14.53		13.85		13.16		13.16		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (SPM)	Persen	73.74	91	25,822,674,100	100	25,129,583,610	100	103,376,089,065	100	135,515,859,066	100	137,890,202,200	100	450,296,455,751	Dinas Kesehatan
	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	87.3	91	3,531,295,000	100	3,564,460,000	100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	60.37	100	3,531,295,000	100	3,564,460,000	100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	88	100	81,335,100	100	89,468,610	100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	60.94	62	93,400,000	100	47,900,000	100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	100	100	975,752,000	100	482,120,000	100		100		100		100		
	Persentase balita gizi kurang	Persen	10.26	16	271,812,000	15	205,920,000	6		5.8		5.5		5.5		
	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persen	36	44	2,267,330,000	46	2,055,500,000	100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	Persen	92	85	300,000,000	100	300,000,000	100		100		100		100		
	Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	Persen	67.98	67	300,000,000	100	300,000,000	100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	Persen	63	67		100	-	100		100		100		100		
	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (SPM) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0.010		0.010		0.010		0.010		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	Persen	48	0	100,000,000	0	100,000,000	100		100		100		100		
	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) terakreditasi	Persen	68.18	81.82	100,000,000	95.45	100,000,000	100		100		100		100		
Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio Daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio	1;1032,9	N/A	14,170,455,000	1 : 1000	14,219,755,000	1 : 1000	85,590,363,158	1 : 1000	99,856,547,375	1 : 1000	110,562,793,411	0.73611111	324,399,913,944	RSUD Komodo

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan	Persen	N/A	N/A	19,393,167,754	60	23,250,649,824.00	100	10,626,475,000	100	10,636,475,000	100	10,656,475,000	100	74,563,242,578	Dinas Kesehatan
	Persentase Tenaga Kesehatan RSUD yang Besertifikat Khusus	Persen	N/A	20	6,193,865,000	30	6,193,865,000	43.33	3,117,716,698	76.67	8,118,716,698	100	8,118,918,698	100	31,743,082,094	RSUD Komodo
Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS	Persen	60	60.40	1,030,000,000	62	1,215,000,000	67	2,391,494,000	68	2,519,944,000	70	2,475,944,000	70	9,632,382,000	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Peserta Penyuluh Keamanan Pangan yang Mendapat Sertifikat	Persen	99.93	93.93	50,000,000	100	55,000,000	100	272,800,000	100	294,580,000	100	318,538,000		1,342,548,000	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	100	100.00	175,630,000	100	176,000,000	100		100		100		100		
Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.08	3.18		3.16		3.08		3.06		3.06		3.06		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengendalian Penduduk	Persentase Sektor yang Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	N/A	14.00	470,043,360	15.00	423,794,012	16.67	498,000,000	18.75	530,000,000	20.83	680,000,000		2,601,837,372	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	65.51	61.28	4,889,744,964	61,32	4,669,505,712	61,36	5,878,052,024	61,40	7,380,595,730	62	8,539,733,987	62	31,357,632,417	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi	Persen	20.89	16.98		16,94		16,90		16,86		15.93		15.93		
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	Persen	22.35	34.1		34,15		34,18		34,20		34,22		34,22		
	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat Kontrasepsi Masyarakat	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	Persen	0	16.67	893,298,054	25	848,883,287	33.33	2,606,407,976	41.67	3,760,000,000	50	4,280,000,000	50	14,403,691,762	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	0	21	411,903,443	21	339,553,315	21		21		21		21		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB	Persen	80.13	80.13	251,438,572	80.15	169,776,657	82.18		84.23		86.28		86.28		
	Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB	Persen	82.94	82.94	251,438,572	83	169,776,657	85.03		86.76		88.48		88.48		
	Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB	Persen	76.92	76.92	251,438,572	77.12	169,776,657	78.94		80.77		82.59		82.59		
Tujuan: Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	58.46	59.06		61.56		64.06		66.56		69.06		69.06		
Sasaran: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	87.17	84.86		87.47		87.62		87.77		87.92		87.92		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan pengambil keputusan publik	Persen	7.5	10	379,069,658	12.5	423,794,012	15	447,370,401	17.5	634,346,401	20	770,000,000	20	2,654,580,472	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan korban kekerasan yang ditangani	Persen	78.26	79.34	284,302,244	85	317,845,509	100	252,628,000	100	258,259,831	100	302,658,000	100	1,415,693,584	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																n Anak
Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	72.72	77.27	284,302,244	81.81	327,742,000	100	354,773,831	100	407,142,000	100	418,642,000	100	1,792,602,075	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 3: Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal																
Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	0.89	4.12		5.04		5.31		5.59		5.87		5.87		
	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	12.6	14.72		14.2		15		15.8		16.6		16.6		
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan dan potensial	PDRB ADHB	Persen	41.05	40.97		42.82		43.41		44		44.59		44.59		
Program Pembangunan Daerah:																
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Pengembangan Jaringan irigasi dan sumber-sumber air dalam kondisi baik	Persen	85.20	75.12	12,005,764,929	77.04	15,967,000,000	79.65	26,500,000,000	81.91	28,400,000,000	83.98	31,400,000,000	83.98	114,272,764,929	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pesentase peningkatan Luas Lahan pertanian Fungsional	Persen	36,159	34.47		34.47		34.47		34,474		34,474		34,474		
	Luas lahan pertanian LP2B yang tidak beralih fungsi (ha)	Ha	18.267	16,892.48		16,893.48		16,894.48		16,895.48		16,896.48		16,896.48		
	Persentase Jalan Usaha Tani Berkondisi Baik	Persen	95.32	N/A		90.45		92.55		93.93		94.91		94.91		
	Persentase Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar	Persen	N/A	33	8,050,000,000	0	5,500,000,000	66.67	2,934,882,000	0	1,925,000,000	100	2,981,000,000	100	21,390,882,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase Prasarana Pembibitan ternak, HPT dan Veteriner	Persen	46.67	53.4		73.33		86.67		93.33		100		100		
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase luas lahan pertanian tanaman pangan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk , Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persen	3.34	2.21	11,200,000,000	3	15,000,000,000	3.39	13,879,697,500	4.10	15,250,000,000	4.39	18,300,000,000	4.39	73,629,697,500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase luas lahan pertanian *Hortikultura* yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persen	0.97	7.15		1.46		2.44		3.25		4.06		4.06		
	Persentase luas lahan pertanian *Perkebunan* yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persen	1.58	0.75		0.80		0.91		1.10		1.28		1.28		
	Persentase kelompok petani (perkebunan) yang memiliki sarana perkebunan sesuai standar	Persen	0.23	0.45		0.45		0.73		0.85		1.01		1.01		
	Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar	Persen	14.75	38.71	1,841,621,801	45	6,254,154,292	59.21	6,641,673,820	69.62	8,870,151,274	84.34	9,234,275,366	84.34	32,841,876,552	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar	Persen	19.84	14.52		35.46		43.05		52.80		71.64		71.64		
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas lahan pertanian yang terserang hama penyakit yang dapat dikendalikan (Ha)	Persen	N/A	100	2,850,000,000	100	3,850,000,000	100	1,750,000,000	100	1,950,000,000	100	2,500,000,000	100	12,900,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Persentase Luas lahan pertanian yang ditanggulangi akibat perubahan iklim dan bencana (Ha)	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	Persen	1.7	2.90	6,370,000,000	2.97	8,549,122,499	3.53	7,938,000,000	4.09	8,277,536,188	4.66	11,283,690,698	4.66	42,418,349,385	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Persentase SDM petani yang terlatih	Persen	2.08	4.15		4.33		4.90		5.60		6.53		6.53		
	Persentase kelompok Tani yang naik kelas	Persen	31.85	41.09		45.49		50.08		54.68		59.28		59.28		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase produk pertanian yang tertangani sesuai standar GHP (*Good Handing Practices*)	Persen	N/A	0		40		60		80		100		100		
	Persentase SDM kelompok peternak terlatih	Persen	15.48	22.83	650,000,000	30.95	2,025,000,000	46.83	1,329,250,000	67.46	1,395,712,500	100	1,465,498,125	100	6,865,460,625	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode peternakan berorientasi agribisnis	Persen	2.78	4.13		7		9.52		11.90		14.29		14.29		
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kematian ternak akibat penyakit ternak	Persen	8.15	0.022	2,657,635,246	1.5	5,651,500,000	2	4,576,319,000	1.5	5,139,762,750	0.5	5,516,097,438	0.5	23,541,314,434	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Tingkat kejadian Penyakit Zoonosis	Persen	0.04	0.008		0.012		0.010		0.007		0		0		
	Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar sertifikasi	Persen	12.23	36.48		40		46.06		53.08		68.2		68.2		
Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana penangkapan yang sesuai standar	Persen	43.5	55.6	1,055,202,500	59.7	3,079,970,125	41	1,887,788,983	44	5,326,206,573	46	7,227,297,120	46	18,576,465,301	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kelompok nelayan terlatih	Persen	3.2	3.2		3.7		4.65		8.89		14.89		14.89		
	Persentase kelompok nelayan yang meningkat kelasnya	Persen	5.6	7		7.3		5.12		5.78		6.38		6.38		
Program pengeloaan perikanan budidaya	Persentase kelompok yang mendapat bantuan sarana	Persen	39.2	43.1	2,267,064,608	62.75	3,531,901,674	73	1,116,250,000	84.31	4,842,660,340	100	6,828,441,260	100	18,586,317,882	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memiliki ketersediaan bibit unggul sesuai standar	Persen	26.5	30.39		48		59.8		71.57		91.2		91.2		
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang menguasai penggunaan IPTEK	Persen	4.9	5.9		8.8		10.8		12.75		14.7		14.7		
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang menggunakan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persen	4.9	5.9		8.8		10.8		12.75		14.7		14.7		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang naik kelas	Persen	0	0		1.96		2.94		3.92		4.9		4.9		
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar prosedur yang sertifikasi	Persen	0	30	600,000,000	40	700,000,000	60	360,000,000	80	900,000,000	100	1,740,000,000	100	4,300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pedagang yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	Persen	N/A		75,000,000	25	174,334,250	29.86	300,000,000	41	410,000,000	52	410,000,000	52	1,369,334,250	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Persentase IKM yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	Persen	N/A	3.57		15		55		59		65		65		
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana sesuai standar	Persen	6.67	6.67	1,500,000,000	33.33	2,695,485,000	13.3	13,002,652,829	20	14,650,000,000	26.67	15,900,000,000	26.67	47,748,137,829	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Persentase pedagang Pasar yang terlatih	Persen	N/A	0		13		26		34.64		51.95		51.95		
	Persentase pedagang pasar yang difasilitasi permodalan	Persen	N/A	0		5.4		11		22		33		33		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase pasar tradisional yang berstatus pasar tertib ukur	Persen	9.09	6.5	264,000,000	25	474,405,360	31	190,000,000	63	350,000,000	100	750,000,000	100	2,028,405,360	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang bahan baku produksi yang tersedia secara kontinu	Persen	N/A		301,840,000	50	320,000,000	78	5,336,000,000	82	5,700,000,000	86	6,145,000,000	86	22,256,520,551	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Persentase pelaku IKM terlatih	Persen	21.9	33.33	950,000,000	39.29	1,780,000,000	43		49		55		55		
	Persentase pelaku IKM yang memiliki sarana produksi sesuai standar	Persen	13.1	16.43	485,387,464	15.36	1,018,293,087	16.9		18.5		22.18		22.18		
	Persentase IKM yang difasilitasi permodalan	Persen	N/A		100,000,000	6.16	120,000,000	9.24		12.32		15.40		15.40		
Sasaran: Meningkatnya realisasi nilai investasi	Persentase peningkatan realisasi nilai PMA	Persen	20	108.15		40		50		60		70		70		
	Persentase peningkatan realisasi nilai PMDN	Persen	24	110.5		32		56		62		76		76		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persen	N/A	100	541,230,563	100	750,000,000	100	600,000,000	100	1,190,000,000	100	800,000,000	100	3,881,230,563	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Satu Pintu
Program promosi penanaman modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	Persen	N/A	40	425,000,000	45	650,000,000	50	350,000,000	55	650,000,000	60	25,000,000	60	2,100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program pelayanan penanaman modal	Persentase pelayanan perizinan yang dijalankan sesuai SOP	Persen	84.37	85	635,000,000	87	1,100,000,000	90	536,400,000	92	575,000,000	95	1,300,000,000	95	4,146,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Indeks Gini	Nilai	0.356	0.34		0.332		0.324		0.316		0.308		0.308		
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	47	23.53		32.86		40		42.86		54.29		54.29		
	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	Persen	N/A	0		0		19.67		24.6		29.5		29.5		
Program Pembangunan Daerah:																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki SDM terlatih	Persen	7.41	27.21	250,000,000	29.63	509,000,000	43.65	724,000,000	59.52	300,000,000	75.40	400,000,000	75.40	2,183,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	Persentase Koperasi yang difasilitasi Permodalan	Persen	N/A					1.59		2.38		3.17		3.17		
Program Penagaawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pesentase Koperasi simpan pinjam yang merugikan Masyarakat	Persen	N/A	0	10,000,000	0	125,000,000	0	175,000,000	0	700,000,000	0	415,427,592	0	1,425,427,592	Bab VII
Program pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	Persen	1.43	22.22	260,000,000	28.74	528,000,000	57.47	1,671,018,990	86.21	4,423,943,850	100	4,500,000,000	100	11,382,962,840	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	Persentase produk usaha mikro yang bersertifikat	Persen	20.71	46.29		50		57.47		86.21		100		100		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	Persen	0.82	N/A	150,000,000	15	200,000,000	19.67	515,000,000	24.58	3,850,000,000	29.50	5,900,000,000	29.50	10,615,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Laju Inflasi	Nilai	3-3,4	6.65		3-3,2		3-3,2		3-3,2		3-3,2		3-3,2		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan	Nilai	71.05	75.17		75.61		77.13		78.65		80.17		80.17		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Stok cadangan pangan daerah	Ton	11.55	0	2,289,796,923	40	2,098,992,500	45	685,000,000	50	1,372,936,738	55	1,364,135,129	55	7,810,861,290	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik	Persen	82	76.92		86.7		84.62		92.31		100		100		
Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa/Kelurahan yang Masuk ke dalam Kategori Sulit untuk Pendistribusian Pangan	Persen	N/A		175,000,000	5.92	200,000,000	2.37	101,250,000	1.78	250,000,000	1.18	435,000,000	1.18	1,161,250,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase desa/kelurahan yang tidak bisa Mengakses Informasi Pangan	Persen	N/A					25		23		21		21		
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi pangan non-beras	Persen	6.67	23	2,232,445,000	25	2,226,007,500	30	865,703,375	60	2,255,000,000	95	2,421,900,000	95	10,001,055,875	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan aman /bebas zat kimia berbahaya	Persen	100	100	500,000,000	100	600,000,000	100	315,000,000	100	850,000,000	100	826,500,000	100	3,091,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Meningkatnya stabilitas harga barang	Indeks Harga Konsumen	Nilai	106.86	113.54		104,44-104,53		104,44-104,53		104,44-104,53		104,44-104,53		104,44-104,53		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat stabilitas harga barang pokok	Persen	0.5	0	200,000,000	0.7	359,398,000	6	395,000,000	6	840,000,000	6	1,080,000,000	6	3,086,409,852	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Tingkat stabilitas harga barang penting	Persen	N/A	0		0		3		3		3		3		
	Tingkat stabilitas Ketersediaan barang pokok dan barang penting	Persen	2	0	75,800,000	90	136,211,852	90		90		90		90		
Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Tingkat kemiskinan	Persen	18.01	17.15		15.65		15.09		14.55		14.01		14.01		
Sasaran: Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.73	4.91		3.4		3.29		3.18		3.07		3.07		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	Persen	N/A	N/A	200,000,000	5	200,000,000	10	75,000,000	20	200,000,000	30	200000000	30	875,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja lokal yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar	Persen	11.98	24.75	1,060,000,000	25.02	3,720,000,000	30.01	1,927,990,000	40.01	5,730,000,000	59.99	9,887,517,260	59.99	22,325,507,260	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	75.62	28.44	350,000,000	76	450,000,000	77	450,000,000	78.01	1,650,000,000	78.4	1,950,000,000	78.4	4,850,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang mematuhi regulasi ketenagakerjaan	Persen	31.73	68.36	591,884,763	100	1,070,888,157	100	900,000,000	100	1,600,000,000	100	1,450,000,000	100	5,612,772,920	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Angka PPKS	Angka	81.77	54.68		59.68		64.68		69.68		74.68		74.68		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat dalam DTKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan sosial	Persen	NA	54.68	941,194,000	59.68	1,560,210,192	64.68	635,189,629	69.68	752,849,077	74.68	1,383,920,666	74.68	5,273,363,564	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	3.73	6.72	222,130,000	3.51	239,545,455	4.52	155,000,000	7.53	174,048,714	11.55	221,250,000	11.55	1,011,974,169	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluarpanti (SPM)	Persen	0.87	1.12	161,605,000	4.05	240,545,455	5.59	183,821,078	7.52	251,882,934	11.55	309,777,780	11.55	1,147,632,247	
	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	Persen	0	0	43,198,873	100	89,545,455	100	476,400,000	100	577,955,560	100	691,282,260	100	1,878,382,148	
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	10.38	11.73	203,630,000	100	272,837,009	100	814,500,000	100	965,833,870	100	1,075,089,960	100	3,331,890,839	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat (SPM)	Persen	98.27	100	510,700,000	100	510,536,713	100	387,482,650	100	595,982,650	100	448,982,650	100	2,453,684,663	Dinas Sosial P3A
Program Pemberdayaan Sosial	Presentase lembaga masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	10.71	42.85	166,110,000	10.71	205,545,455	71.42	160,834,847	85.71	317,334,847	100	385,500,000	100	1,235,325,149	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang bersertifikat	Persen	77.1	82.97	145,308,220	81.68	219,545,455	86.26	250,000,000	91.6	373,500,000	100	477,000,000	100	1,465,353,675	
Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan																
Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	54.35	N/A		64.77		67.41		69.89		72.49		72.49		
Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Tingkat kemantapan jalan	Persen	52.77	52.02		52.99		54.83		60.63		68.40		68.40		
Program Pembangunan Daerah:																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	55.53	34.88	778,665,418,413	33.91	65,143,848,216	32.07	96,171,573,000	26.27	130,171,573,000	18.5	138,171,573,000	18.5	1,208,323,985,629	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	44.47	52.02		52.99		54.83		60.63		68.4		68.4		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Kontruksi yang terlatih	Persen	40	0	525,000,000	65.5	1,000,000,000	77.5	900,000,000	90	1,106,582,474	100	1,000,000,000	100	4,531,582,474	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	Persen	58	N/A		70		75		85		100		100		
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan air baku	Rasio luas daerah pertanian yang terlayani jaringan irigasi	Rasio	0.514	0.535		0.547		0.558		0.569		0.580		0.580		
	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Persen	61.01	69.74		74.39		79.47		84.90		90.70		90.70		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengelolaan sumber daya air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	52.72	59.66	16,400,000,000	65.66	18,650,000,000	70.66	12,300,000,000	70.83	22,400,000,000	75.83	19,113,569,392	75.83	56,063,569,392	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM	Persen	30.56	29.06	22,444,201,100	30.17	7,791,003,882	32.17	8,919,606,347	36.17	10,431,902,222	42.17	11,656,061,647	42.17	16,354,372,998	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	79.24	75		98.6		100		100		100		100		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD	Persen	73.88	72.36	4,602,000,000	73	20,077,000,882	73.13	7,849,253,585	75.93	9,180,073,955	78.93	10,257,334,249	78.93	51,965,662,671	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran: Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Rasio Konektivitas	Rasio	0.33	1.18		1.20		1.22		1.26		1.3		1.3		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengelolaan pelayaran	Persentase angkutan laut yang memiliki izin operasi	Persen		100	875,631,490	100	650,000,000	40	290,000,000	50	740,000,000	70	1,000,000,000	70		Dinas Perhubungan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat dalam kondisi baik	Persen						60	530,200,000	75	1,400,000,000	90	1,500,000,000	90		
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Fasilitas Terminal dalam Kondisi baik	Persen			2,064,078,725		1,686,774,764	100	200,000,000	100	487,273,595	100	2,329,796,161	100		Dinas Perhubungan
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	45	37.17		43		60	530,200,000	75	1,400,000,000	90	1,500,000,000	90		
	Persentase kepemilikan KIR	Persen	20	20		25		30	421,518,397	40	1,200,000,000	50	1,450,000,000	50		
	Cakupan layanan angkutan umum	Persen	20	25		30		40	200,000,000	50	400,000,000	70	500,000,000	70		
	Persentase Fasilitas Kantong Parkir yang disediakan							60	400,000,000	75	1,200,000,000	100	1,300,000,000			
Sasaran: Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak huni	Rasio	0.366	0.63		0.385		0.390		0.396		0.402		0.402		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan rumah layak huni	Persen	36.62	56.41	10,830,244,680	57.91	14,343,014,407	56.78	4,000,000,000	57.19	4,400,000,000	57.65	5,000,000,000	46.9	38,573,259,087	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban terdampak relokasi program pemerintah	Persen	N/A	N/A	4,283,190,901	100	2,543,197,269	100	820,000,000	100	1,170,000,000	100	1,170,000,000	100	16,812,776,340	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	Persen	N/A	N/A	4,283,190,901	100	2,543,197,269	100		100		100		100		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase jalan di kawasan permukiman dan permukiman kumuh dalam kondisi baik	Persen	N/A	33.37	2,228,604,615	33	2,848,587,004	33.4	8,562,392,849	33.45	12,568,984,599	33.47	15,008,093,294	33.47	41,216,662,361	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran: Meningkatnya ketaatan penataan ruang	Persentase kesesuaian fungsi, struktur, dan pola ruang (RTRW)	Persen	62.27	62.27		100		100		100		100		100		
Program Pembangunan Daerah:																
Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Dokumen RDTR yang Tersedia	Persen	N/A	100	2,700,000,000	100	3,500,000,000	100	1,628,683,592	100	4,848,683,592	100	6,500,000,000	100	19,177,367,184	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan dengan IMB	Persen	N/A	20.14	350,000,000	22.15	500,000,000	25.10	1,628,683,592	30.14	4,848,683,592	35.15	6,500,000,000	35.15	13,827,367,184	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	62.19	70.47		68.66		72.63		76.6		76.81		76.81		
Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	62.19	70.47		68.66		72.63		76.60		76.81		76.81		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Sungai yang memenuhi baku mutu	Persen	N/A	100	1,352,050,094	100	1,793,324,452	100	417,500,000	100	458,000,000	100	457,000,000	100	4,477,874,546	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan adminitratif dan teknis pencegahan pencemaran air	Persen	1.64	21		30		35		40		45		50		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase udara ambien yang memenuhi baku mutu	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
	Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ion CO2eq)	Predikat	Baik	N/A		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
Program pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	Persen	1.47	N/A	8,504,484,886	4.23	7,108,230,278	4.34	9,205,257,235	4.40	13,729,257,235	4.62	15,759,430,398	4.62	54,306,660,032	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	Persentase penyediaan sarana prasarana persampahan	Persen	N/A	N/A		25		30		35		40		40		
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase Ruang terbuka Hijau yang terkelola	Persen	N/A	N/A	270,410,019	100	251,065,423	100	250,000,000	100	300,000,000	100	320,000,000	100		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang taat dalam pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	N/A	15	405,615,028	35	466,264,357	40	470,000,000	45	477,000,000	50	481,000,000	50		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Tujuan: Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	163.57	151.62		151.12		150.62		150.12		149.62		149.62		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Meningkatnya upaya mitigasi dan pengendalian bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	N/A	0.49		1.09		1.69		2.29		2.89		2.89		
Program Pembangunan Daerah:																
Program penanggulangan bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh pelatihan mitigasi	Persen	0.06	1.03	331,763,549	2.07	445,055,647	67.57	350,000,000	83.78	600,000,000	100	700,000,000	100	2,426,819,196	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase korban yang mendapat pendampingan pasca bencana	Persen	100	100	109,293,549	100	296,313,006	100	645,000,000	100	1,900,702,110	100	2,770,000,000	100	5,721,308,665	
	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi kebencanaan	Persen	0.29	0.86	149,720,000	4.76	896,060,000	58.6	250,000,000	78.6	400,000,000	100	400,000,000	100	2,095,780,000	
	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	0	0	317,346,372	1.21	236,600,000	1.82	100,000,000	2.43	100,000,000	3.04	150,000,000	3.04	903,946,372	
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran yang Ditangani dan Diakses dalam waktu Maksimal 15 Menit	Persen		88	224,751,099		2,165,627,148	100	774,188,514	100	2,002,840,446	100	3,962,911,204	100	9,130,318,411	Satuan Polisi Pamong Praja

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program pengelolaan sumber daya air	Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi dan banjir yang terlindungi bangunan pengaman pantai	Persen	N/A	0	7,600,000,000	30	14,839,143,043	41.12	1,700,000,000	45.46	2,600,000,000	49.99	2,900,000,000	49.99	29,639,143,043	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir	Persen	32.55	0.27	2,066,000,000	1.27	1,600,000,000	2.3	1,070,352,762	4.27	1,251,828,267	6.27	1,398,727,398	6.27	7,386,908,427	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani																
Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/Predikat	53,76 (CC)	53,79 (CC)		55 (CC)		58 (CC)		60 (B)		62 (B)		62 (B)		
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	63.12	62.16		69		72		75		81		81		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	Persen	N/A	100	1,605,112,329	100	2,332,528,906	100	2,163,621,329	100	3,002,000,000	100	3,320,800,000	100	12,424,062,564	Badan Perencanaan Pembangun

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		an Daerah
	Persentase keselarasan Renja dengan RKPD	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase realisasi target program RPJMD	Persen	N/A	38.35		42		46		53		61		61		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah	Persen	N/A	9.52	1,834,414,091	12	2,665,747,322	15	2,420,253,000	20	3,369,548,460	25	3,610,000,000	25	13,899,962,873	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	61		63		65		71		75		75		Bagian Organisasi
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang tersedia sesuai standar	Persen	80	100	504,745,903	100	683,101,133	100	203,434,000	100	273,920,656	100	288,565,000	100	1,953,766,692	Bagian Pemerintahan
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen		100	244,120,117,000	100	272,580,788,038	100	234,946,538,393	100	235,124,831,313	100	237,965,235,718	100	1,224,737,510,462	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu setelah berkas lengkap	Persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase OPD yang menyerahkan SPJ tepat waktu	Persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase keterpenuhan Mandatory Spending terhadap APBD	Persen		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Total Belanja Daerah	Persen	92.76	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan rekonsiliasi aset tetap waktu	Persen		100	3,031,609,750	100	3,358,706,750	100	2,850,111,700	100	2,715,002,500	100	3,001,387,600	100	14,956,818,300	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase OPD yang melaksanakan rekonsiliasi persediaan tepat waktu	Persen		100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase pemanfaatan barang milik daerah	Persen	97	97		100		100		100		100		100		
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Total PAD	Juta Rupiah	146.157	190.819		251.517		333,615		414,044		502,289		502,289		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen	8.59	72.21	4,022,033,120		3,825,629,329	35.52	5,880,995,462	24.74	7,033,883,135	20.45	7,429,181,396	20.45	28,191,722,442	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Pertumbuhan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Persen		-19.28				20		40		45		40		
	Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah	Persen		-32.20				27.82		22.99		24.23		24.23		
	Persentase Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah lainnya	Persen		-69.84		5		5		5		5		5		
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai/Predikat	2.77 (Berkembang)	2.69 (Berkembang)		3 (Terdefenisi)		3.2 (Terdefenisi)		3.3 (Terdefenisi)		3.4 (Terdefenisi)		3.4 (Terdefenisi)		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pembangunan Daerah:																
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) internal dan eksternal	Persen	74.38	74.38	728,086,366	77	398,606,053	81	999,000,000	85	2,250,000,000	90	3,182,207,713	90	13,594,829,221	Inspektorat
	Persentase pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	100	100	1,572,645,536	100	3,142,578,787	100		100		100		100		
	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Persen	100	100	789,430,066	100	532,274,700	100		100		100		100		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menjalankan Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)	Persen	0	0	799,613,395	10.81	542,458,029	21.62	423,000,000	43.24	932,207,713	86.49	1,250,000,000	86.49	3,947,279,137	Inspektorat
	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Persen	65.32			69		72		75		78		78		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rata-rata Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Persen	0	65		65		71		75		76		76		Bagian Organisasi

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	N/A	31,89/39,78		50		68		71		74		74		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program Pembangunan Daerah:																
Program Kepegawaian Daerah	Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai	Persen	67	62	3,036,035,700	84	3,526,951,420	85	1,947,000,000	91	2,734,255,738	100	2,890,875,881	100	34,507,570,216	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Baik"	Persen	23.76	93		95		97		99		100		100		
	Persentase layanan pegawai sesuai Standar Pelayanan (SP)	Persen	85	82		85		86		90		95		95		
	Persentase pegawai yang disiplin	Persen	1.4	99.7		100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	N/A	16	2,006,085,782	36	2,173,987,212	45	950,000,000	75	4,500,000,000	90	5,305,000,000	90	14,935,072,994	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Jabatan Struktural yang telah Lulus Diklat PIM Tk.2, PKA, PKP	Persen	43.10	27		46.51		48.21		49.91		53.49		53.49		
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	72.1	77.87		79		80		82		84		84		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan e-KTP	Persen	95.73	98	1,869,215,977	98.5	1,244,026,236	99	514,666,616	99.50	820,000,000	100	770,000,000	100	5,217,908,829	Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
	Persentase kepemilikan dokumen KIA	Persen	10.59	33		37.6		40		41.97		43.1		43.1		
	Persentase kepemilikan dokumen KK Ber-barcode	Persen	N/A	56		71.35		78.30		87.01		97.29		97.29		
Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persen		96	618,378,119	96.5	720,703,039	96.75	510,761,351	97	825,000,000	97.20	725,000,000	97.20	3,399,842,509	Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
	Persentase Pengajuan akta Kematian yang terlayani	Persen	180	100		100		100		100		100		100		
	Persentase kepemilikan dokumen akta Perkawinan	Persen		72.59		73.06		74.38		75.26		76.11		76.11		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan data kependudukan yang dimutakhirkan	Persen		100	895,989,201	100	102,409,567	100	282,360,438	100	454,290,117	100	427,360,400	100	2,162,409,723	Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
	Persentase OPD/instansi pemerintah yang memanfaatkan data kependudukan sesuai ketentuan regulasi	Persen	0	10.3		41.3		58.6		75.8		100		100		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	96.21	100	13,511,126,237	100	14,358,863,338	100	11,833,407,671	100	15,026,730,322	100	15,986,646,251	100	70,716,773,819	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	2,729,568,664	100	3,881,476,750	100	3,965,207,593	100	3,403,354,865	100	3,327,690,407	100	17,307,298,279	Bagian Umum
	Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	Persen	2.08	10.42	1,250,000,000	16.67	650,000,000	20.83	650,000,000	25	1,374,106,114	30	1,586,473,920	30	5,510,580,034	Bagian Organisasi
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dok SOP Sesuai Standar	Persen	N/A	6.25		16.67		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai standar	Persen	100	100	1,296,500,000	100	1,154,057,706	100	517,450,000	100	780,500,000	100	822,000,000	100	4,570,507,706	Bagian Prokopim
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Persen	0	100	700,000,000	100	750,000,000	100	160,000,000	100	244,500,000	100	257,675,000	100	2,112,175,000	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rata-rata Nilai SPM Perangkat Daerah	Persen	0	100	387,245,903	100	224,049,688	100	400,500,000	100	458,479,532	100	510,500,000	100		Bagian Pemerintahan
	Persentase titik batas wilayah yang diselesaikan	Persen	20	30	362,186,403	40	419,033,333	100		100		100		100		Bagian Pemerintahan
	Persentase kerjasama pemerintah daerah yang berjalan	Persen	100	100	330,989,596	100	85,600,000	100	390,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	1,996,589,596	Bagian Pemerintahan
	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	5,176,247,350	100	5,671,850,718	100	11,916,498,084	100	15,316,498,084	100	15,316,498,084	100	53,397,592,320	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	Persen	100	100	1,675,664,470	100	1,577,080,600	100	1,147,272,130	100	2,007,613,486	100	2,298,494,161	100	8,706,124,847	Bagian Hukum

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	Persen	20	30	633,599,422	50	314,461,730	100	868,365,475	100	2,005,700,276	100	2,244,228,567	100	6,066,355,470	Bagian Perekonomian & SDA
	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Pembangunan	Persen	99.4	98.7	622,401,282	98.5	305,167,295	100	749,365,475	100	960,271,041	100	1,080,228,567	100	3,717,433,660	Bagian Administrasi Pembangunan
Program Pembangunan Daerah:																
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen	N/A	100	875,025,041	100	1,417,316,508	100	115,000,000	100	126,000,000	100	138,000,000	100		Kecamatan Komodo
		Persen		100		100		100	85,000,000	100	110,000,000	100	266,000,000	100		Kecamatan Boleng
		Persen		100		100		100	90,000,000	100	101,000,000	100	108,000,000	100		Kecamatan Mbeliling
		Persen		100		100		100	42,318,108	100	108,000,000	100	110,700,000	100		Kecamatan Sano Nggoang
		Persen		100		100		100	120,000,000	100	135,000,000	100	150,000,000	100		Kecamatan Lembor

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persen		100		100		100	90,000,000	100	101,000,000	100	103,000,000	100		Kecamatan Welak
		Persen		100		100		100	120,000,000	100	135,000,000	100	145,000,000	100		Kecamatan Lembor Selatan
		Persen		100		100		100	75,000,000	100	65,000,000	100	80,000,000	100		Kecamatan Kuwus
		Persen		100		100		100	61,000,000	100	79,205,300	100	115,000,000	100		Kecamatan Macang Pacar
		Persen		100		100		100	45,000,000	100	55,000,000	100	62,500,000	100		Kecamatan Ndoso
		Persen		100		100		100	52,000,000	100	95,000,000	100	110,000,000	100		Kecamatan Kuwus Barat
		Persen		100		100		100	44,000,000	100	51,000,000	100	56,000,000	100		Kecamatan Pacar
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan	Persen	N/A	100	2,718,640,436	100	5,607,318,570	100	532,294,000		554,000,000		587,000,000			Kecamatan Komodo
		Persen	N/A	100		100		100	70,000,000	100	93,000,000	100	115,592,932	100		Kecamatan Boleng

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persen	N/A	100		100		100	90,000,000	100	102,000,000	100	109,000,000	100		Kecamatan Mbeliling
		Persen	N/A	100		100		100	29,000,000	100	85,000,000	100	87,125,000	100		Kecamatan Sano Nggoang
		Persen	N/A	100		100		100	312,632,000	100	319,000,000	100	335,773,995	100		Kecamatan Lembor
		Persen	N/A	100		100		100	90,000,000	100	95,000,000	100	98,000,000	100		Kecamatan Welak
		Persen	N/A	100		100		100	90,632,000	100	95,000,000	100	109,773,995	100		Kecamatan Lembor Selatan
		Persen	N/A	100		100		100	471,500,000	100	466,500,000	100	481,500,000	100		Kecamatan Kuwus
		Persen	N/A	100		100		100	80,000,000	100	86,000,000	100	115,592,932	100		Kecamatan Macang Pacar
		Persen	N/A	100		100		100	85,000,000	100	102,000,000	100	122,500,000	100		Kecamatan Ndoso
		Persen	N/A	100		100		100	71,632,000	100	85,000,000	100	105,000,000	100		Kecamatan Kuwus Barat

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persen	N/A	100		100		100	37,000,000	100	55,000,000	100	62,000,000	100		Kecamatan Pacar
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa di wilayah kecamatan yang tertib menjalankan kalender pembangunan	Persen	N/A	100	804,809,893	100	1,285,275,191	100	100,000,000	100	126,000,000	100	125,500,000			Kecamatan Komodo
		Persen	N/A	100		100		100	75,000,000	100	101,000,000	100	100,000,000	100		Kecamatan Boleng
		Persen	N/A	100		100		100	80,000,000	100	115,000,000	100	108,000,000	100		Kecamatan Mbeliling
		Persen	N/A	100		100		100	15,283,862	100	63,000,000	100	64,575,000	100		Kecamatan Sano Nggoang
		Persen	N/A	100		100		100	80,000,000	100	105,100,000	100	125,000,000	100		Kecamatan Lembor
		Persen	N/A	100		100		100	100,000,000	100	122,880,600	100	114,000,000	100		Kecamatan Welak
		Persen	N/A	100		100		100	80,000,000	100	130,000,000	100	125,000,000	100		Kecamatan Lembor Selatan
		Persen	N/A	100		100		100	17,500,000	100	85,000,000	100	90,000,000	100		Kecamatan Kuwus

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persen	N/A	100		100		100	80,000,000	100	95,000,000	100	130,000,000	100		Kecamatan Macang Pacar
		Persen	N/A	100		100		100	147,500,000	100	172,500,000	100	195,000,000	100		Kecamatan Ndoso
		Persen	N/A	100		100		100	50,000,000	100	100,000,000	100	120,000,000	100		Kecamatan Kuwus Barat
		Persen	N/A	100		100		100	29,600,000	100	80,433,850	100	54,104,710	100		Kecamatan Pacar
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Arsip	Nilai	48.8	86.1		86.2		86.4		86.5		87		87		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	16.67	14.58	146,204,963	37.5	223,219,618	43.75	161,908,126	71	400,000,000	100	450,000,000	100	1,381,332,707	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase Pengelola Arsip Bersertifikat	Persen	45.45	22	85,000,000	30	97,000,000	47,46	242,862,189	72.88	600,000,000	100	675,000,000	100	1,699,862,189	
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang Terlindungi dan Terselamatkan	Persen	8.55	20.5	319,448,417	20.60	427,693,218	20.72	404,770,316	20.80	1,000,000,000	21	1,125,000,000	21	3,276,911,951	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang melayani berbasis teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	N/A	54.65		55.25		55.85		56.45		57.05		57.05		Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah
Program Pembangunan Daerah:																
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Riset yang dihasilkan	Persen	N/A	0	1,146,508,807	22.2	1,666,092,076	55.56	3,561,666,666	77.78	6,286,666,666	100	9,036,666,668	100	21,697,600,883	Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah
	Persentase Hasil Riset yang dimanfaatkan	Persen	N/A	0		0		100		100		100		100		
	Persentase Inovasi Daerah yang diterapkan	Persen	N/A	0		100		100		100		100		100		
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang melayani berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2.15	3.01		3.05		3.35		3.65		3.95		3.95		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25	81.82	3,121,309,103	91.82	3,677,694,790	100	1,929,185,100	100	3,772,134,713	100	4,413,678,139	100	16,914,001,845	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Persen	40	81.82		91.82		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	0	90	805,219,880	92	797,023,331	95	274,706,800	98	1,088,571,498	100	1,311,699,089	100	4,277,220,598	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	Persen	N/A	9.76		75.00		85		90		100		100		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	38.00	51.22	106,896,426	55.00	137,913,555	60	73,048,400	70	87,653,913	80	89,732,760	80	495,245,053	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	10	20	71,264,284	23.00	91,942,370	25	-	30	145,142,866	35	262,104,900	35	570,454,420	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Aplikasi Persandian yang Diterapkan dalam SPBE	Persen	10	18.18		30		40		50		60		60		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	83.48	90.01	1,642,556,913	95.98	1,629,684,758	100	1,791,415,824	100	2,916,939,707	100	2,980,849,523	100	10,961,446,725	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Tujuan: Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0.5574	0.5922		0.6324		0,6574		0,6824		0,7074		0,7074		
Sasaran: Meningkatnya keberdayaan desa	Persentase desa maju	Persen	N/A	4.87		9.75		14.63		18.29		21.95		21.95		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	21	28	1,915,282,728	35	1,925,000,000	50	2,377,150,131	65	3,377,150,132	75	3,317,150,131	75	12,911,733,122	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Menjalin Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Persen	0	8	300,000,000	11	340,000,000	14	175,000,000	17	175,000,000	20	225,000,000		1,215,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Melakukan Penataan Desa sesuai Ketentuan Regulasi	Persen	5	18.29	8,605,111,810		8,222,212,461	27	286,000,000	27	286,000,000	30	410,000,000		17,809,324,271	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	63	64	900,000,000	66	1,101,820,050	100	934,349,869	100	834,349,868	100	1,170,340,570	100	4,940,860,357	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian								Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif	Persen	0%	15	200,000,000	17	225,000,000	22	75,000,000	29	75,000,000	37	150,000,000	27	725,000,000	dan Desa
Total					**1,498,747,216,173**		**878,218,932,011**		**1,087,829,672,286**		**1,143,693,666,229**		**1,229,619,020,990**		**5,723,902,598,223**	

6.4. Integrasi KLHS P-RPJMD

Tabel 6. 4. Matriks Penelaahan Integrasi KLHS Dalam P-RPJMD Kabupaten Manggarai Barat

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
TUJUAN 1 Mengakhiri Kemiskinan	1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim	Perencanaan pembangunan di desa masih terfokus pada kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	• Perlindungan dan jaminan sosial • Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	• Pengelolaan anak-anak terlantar • Pengelolaan data fakir miskin • Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga • Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terdapat masyarakat Manggarai Barat yang hidup di bawah garis kemiskinan • SDM masih rendah	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Strategi: Peningkatan tata kelola penanganan PPKS Arah kebijakan: • Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin • Peningkatan upaya rehabilitasi sosial di luar panti • Peningkatan pemberdayaan PPKS	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
TUJUAN 1 Mengakhiri Kemiskinan	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Perencanaan pembangunan di desa masih terfokus pada kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	• Perlindungan dan jaminan sosial • Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	• Pengelolaan anak-anak terlantar • Pengelolaan data fakir miskin • Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga • Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terdapat masyarakat Manggarai Barat yang hidup di bawah garis kemiskinan • SDM masih rendah	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Strategi: Peningkatan tata kelola penanganan PPKS Arah kebijakan: • Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									• Peningkatan upaya rehabilitasi sosial di luar panti • Peningkatan pemberdayaan PPKS	
TUJUAN 1 Mengakhiri Kemiskinan	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Perencanaan pembangunan di desa masih terfokus pada kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Program hubungan industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• SDM masih rendah • Masih banyak masyarakat yang pendapatannya di bawah UMR	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Strategi: Penurunan permasalahan hubungan industrial Arah Kebijakan: Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan	Program hubungan industrial
TUJUAN 1 Mengakhiri Kemiskinan	1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Belum meratanya akses layanan dasar khususnya Pendidikan dan kesehatan antar wilayah khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan	• Pengelolaan Pendidikan • Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat • Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	• Pengelolaan pendidikan sekolah dasar • Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama • Penyediaan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKP • Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan • Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Sudah tercantum di Bab 2	Pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: • Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi: • Peningkatan fasilitas pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP • Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan • peningkatan upaya kesehatan	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									berbasis masyarakat Arah kebijakan: • Pembangunan dan pembaharuan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP • Peningkatan kompetensi guru • peningkatan kompetensi tenaga kependidikan • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan • peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan • peningkatan partisipasi masayarakat	

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									dalam urusan kesehatan	
TUJUAN 1 Mengakhiri Kemiskinan	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Sumber daya yang tersedia belum mencukupi untuk mengakhiri kemiskinan	• Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • rogram Penyediaan dan P engembangan Prasarana Pertanian • rogram Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	• Koordinasi Kegiatan • Pemberdayaan Desa • Pemberdayaan Kelurahan • Penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan • Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten • Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten • Pengembangan Prasarana Pertanian • Pembangunan Prasarana Pertanian • Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten • Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten • Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	Alokasi secara langsung sumberdaya untuk program pengentasan kemiskinan	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: • Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan dan potensial • Meningkatnya ketahanan pangan	Strategi: Peningkatan penyerapan tenaga kerja	• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program pengelolaan sumber daya air • Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian • Program peningkatan daya tarik destinasi wisata

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	• Pola pangan harapan masih bergantung pada beras • Ketersediaan dan keterjangkauan pangan • Pola usaha pertanian masih bersifat konvensional & belum berkelanjutan • Lemahnya rantai pasok produksi	Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Sudah tercantum di Bab 2	• Pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi kuantitas dan kualitas serta nilai tambah produk pertanian • Daya beli masyarakat terhadap produk pangan masih rendah • Keanekaragaman pangan dan keberlanjutan	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan	Strategi: Peningkatan ketersediaan pangan	Program penanganan kerawanan pangan
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	• Pola pangan harapan masih bergantung pada beras • Ketersediaan dan keterjangkauan pangan • Pola usaha pertanian masih bersifat konvensional & belum berkelanjutan • Lemahnya rantai pasok produksi	Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Sudah tercantum di Bab 2	• Pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi kuantitas dan kualitas serta nilai tambah produk pertanian • Daya beli masyarakat terhadap produk pangan masih rendah • Keanekaragaman pangan dan keberlanjutan	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan	Strategi: Peningkatan ketersediaan pangan	Program penanganan kerawanan pangan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan	2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	• Pola pangan harapan masih bergantung pada beras • Ketersediaan dan keterjangkauan pangan • Sosialisasi pangan selain beras kurang massif	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Keanekaragaman pangan dan keberlanjutan • Ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah Manggarai Barat • Optimalisasi kearifan lokal	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan	Strategi: Peningkatan ketersediaan pangan	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan	2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	• Kesadaran masyarakat terkait kesehatan masih rendah • Keterbatasan anggaran kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Sudah tercantum di Bab 2	• Rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi: Peningkatan ketersediaan pangan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan	2.4.1 Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	• Pola usaha pertanian masih bersifat konvensional & belum berkelanjutan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Sudah tercantum di Bab 2	• Pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi kuantitas dan kualitas serta nilai tambah produk pertanian	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya ketahanan	Strategi: Peningkatan kapasitas pengolahan produk pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								pangan		
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan	2.4.1(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	• Pola usaha pertanian masih bersifat konvensional & belum berkelanjutan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	•Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B •Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Sudah tercantum di Bab 2	• Pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi kuantitas dan kualitas serta nilai tambah produk pertanian	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan	Strategi: Peningkatan kapasitas pengolahan produk pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan	2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	• Pola usaha pertanian masih bersifat konvensional & belum berkelanjutan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	•Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten •Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten •Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Optimalisasi kearifan lokal	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan	Strategi: Peningkatan produksi hasil ternak	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
Tujuan 3 Hidup Sehat dan Sejahtera	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	• Kesadaran masyarakat terkait kesehatan masih rendah • Keterbatasan anggaran kesehatan • Sarana dan prasarana	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Sudah tercantum di Bab 2	• Kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan • Rendahnya aksesibilitas	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Strategi: peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		kesehatan masih kurang				layanan kesehatan masyarakat		Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
Tujuan 3 Hidup Sehat dan Sejahtera	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	• Kesadaran masyarakat terkait kesehatan masih rendah • Keterbatasan anggaran kesehatan • Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Sudah tercantum di Bab 2	• Kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan • Rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi: peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan 3 Hidup Sehat dan Sejahtera	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	• Kesadaran masyarakat terkait kesehatan masih rendah	Program pembinaan keluarga berencana	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Perlunya peningkatan SDM dan fasilitas bidang kesehatan	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi: Peningkatan cakupan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB)	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
Tujuan 3 Hidup Sehat	3.8.1* Cakupan pelayanan	• Kesadaran masyarakat terkait kesehatan masih rendah	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan	• Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Sudah tercantum	• Kuantitas dan kualitas sarana prasarana	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya	Tujuan: Meningkatnya	Strategi: Peningkatan kualitas pelayanan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
dan Sejahtera	kesehatan esensial	• Keterbatasan anggaran kesehatan • Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang	kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten	di Bab 2	kesehatan • Rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat	Manusia Berkualitas	kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	kesehatan	Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan 3 Hidup Sehat dan Sejahtera	3.8.1.[a] Unmet Need Pelayanan Kesehatan	• Kesadaran masyarakat terkait kesehatan masih rendah • Keterbatasan anggaran kesehatan • Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan • Rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan 3 Hidup Sehat dan Sejahtera	3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	• Kesadaran masyarakat terkait kesehatan masih rendah • Keterbatasan anggaran kesehatan • Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	• Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Pengadaan obat dan vaksin	Sudah tercantum di Bab 2	• Kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan • Rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan	Strategi: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								masyarakat		
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	4.1.2.[a] Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, dan SMP/sederajat	• Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan • Ketersediaan data terkait warga yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan/menengah kurang baik • Masih banyak masyarakat desa yang berpendidikan SD bahkan tidak tamat SD.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan		• Kualitas SDM masih rendah • Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana prasarana kegiatan pembelajaran • Aksesibilitas pendidikan yang belum merata	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Strategi: Peningkatan fasilitas pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP Arah kebijakan: Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP Strategi: peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan Arah Kebijakan: • peningkatan kualitas pengelolaan dapodik • peningkatan kualitas pelayanan pendidikan Strategi: Peningkatan	• Program Pengelolaan pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Kurikulum

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									kualitas penyelenggaraan pendidikan Arah Kebijakan: • peningkatan kompetensi guru • peningkatan kompetensi tenaga kependidikan Pengembangan pendidikan karakter sejak usia dini	
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	• Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan • Ketersediaan data terkait warga yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah kurang baik • Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur wilayah	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana prasarana kegiatan pembelajaran • Aksesibilitas pendidikan yang belum merata • Daya tampung sekolah negeri terbatas	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Strategi: Peningkatan fasilitas pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP Arah kebijakan: • Pembangunan dan pembaharuan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tingkat PAUD, SD	• Program Pengelolaan pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Kurikulum

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									dan SMP Strategi: peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan Arah Kebijakan: • peningkatan kualitas pengelolaan dapodik • peningkatan kualitas pelayanan pendidikan • peningkatan monitoring pengelolaan sistem pendidikan Strategi: Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Arah Kebijakan: • peningkatan kompetensi guru • peningkatan	

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									kompetensi tenaga kependidikan Pengembangan pendidikan karakter sejak usia dini	
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat	• Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan • Ketersediaan data terkait warga yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah kurang baik • Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur wilayah	Program pengelolaan pendidikan	• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana prasarana kegiatan pembelajaran • Aksesibilitas pendidikan yang belum merata • Daya tampung sekolah negeri terbatas	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Strategi: Peningkatan fasilitas pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP Arah kebijakan: • Pembangunan dan pembaharuan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP Strategi: peningkatan kualitas tata kelola/manajemen	• Program Pengelolaan pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									pendidikan Arah Kebijakan: • peningkatan kualitas pengelolaan dapodik • peningkatan kualitas pelayanan pendidikan • peningkatan monitoring pengelolaan sistem pendidikan Strategi: Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Arah Kebijakan: • peningkatan kompetensi guru • peningkatan keprofesian guru • peningkatan kompetensi tenaga kependidikan • pengembangan	

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									kurikulum muatan lokal peningkatan akreditasi sekolah SD dan SMP	
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	• Lemahnya pemahaman tentang gender • Masih kuatnya budaya patriarkis • Lemahnya peran Lembaga adat dan agama dalam membangun kesetaraan gender	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penangangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak • Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih rendah	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya Kesetaraan Gender Sasaran: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Strategi: • Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Arah Kebijakan: • Peningkatan pelembagaan pengarusutamaan gender • Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik • Mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas Strategi: Peningkatan perlindungan terhadap	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program perlindungan khusus anak • Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									perempuan Arah kebijakan: • Peningkatan kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan • Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan • Peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan • Peningkatan fasilitas layanan pengaduan Strategi: Peningkatan perlindungan terhadap anak Arah Kebijakan:	

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									• Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat • Peningkatan kesadaran hak-hak anak Peningkatan sarana dan prasarana ramah anak	
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	• Lemahnya pemahaman tentang gender • Masih kuatnya budaya patriarkis • Lemahnya peran Lembaga adat dan agama dalam membangun kesetaraan gender	• Program perlindungan perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak	• Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten • Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penangangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak • Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih rendah	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya Kesetaraan Gender Sasaran: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Strategi: Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Arah Kebijakan: • Peningkatan pelembagaan pengarusutamaan gender • Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik • Mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program perlindungan khusus anak • Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									organisasi dan komunitas Strategi: Peningkatan perlindungan terhadap perempuan Arah kebijakan: • Peningkatan kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan • Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan • Peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan • Peningkatan fasilitas layanan pengaduan	

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									Strategi: Peningkatan perlindungan terhadap anak Arah Kebijakan: • Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat • Peningkatan kesadaran hak-hak anak Peningkatan sarana dan prasarana ramah anak	
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	• Lemahnya pemahaman tentang gender • Masih kuatnya budaya patriarkis • Lemahnya peran Lembaga adat dan agama dalam membangun kesetaraan gender	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih rendah	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya Kesetaraan Gender Sasaran: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Strategi: Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Arah Kebijakan: • Peningkatan pelembagaan pengarusutamaan gender • Peningkatan peluang partisipasi	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									perempuan di ranah publik • Mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas	
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	• Lemahnya pemahaman tentang gender • Masih kuatnya budaya patriarkis • Lemahnya peran Lembaga adat dan agama dalam membangun kesetaraan gender	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih rendah	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya Kesetaraan Gender Sasaran: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Strategi: Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Arah Kebijakan: • Peningkatan pelembagaan pengarusutamaan gender • Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik • Mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									Strategi: Peningkatan perlindungan terhadap perempuan Arah Kebijakan: Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan	
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	• Lemahnya pemahaman tentang gender • Masih kuatnya budaya patriarkis • Lemahnya peran Lembaga adat dan agama dalam membangun kesetaraan gender	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten • Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten.	Sudah tercantum di Bab 2	• Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penangangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak • Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih rendah	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya Kesetaraan Gender Sasaran: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Strategi: Peningkatan perlindungan terhadap perempuan Arah Kebijakan: • Peningkatan kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan • Peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan • Peningkatan fasilitas layanan pengaduan	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program perlindungan khusus anak • Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									Strategi: Peningkatan perlindungan terhadap anak Arah Kebijakan: • Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat • Peningkatan kesadaran hak-hak anak Peningkatan sarana dan prasarana ramah anak	
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi	6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	• Infrastruktur air bersih maupun sanitasi masih terbatas • Kesadaran masyarakat terkait sanitasi masih rendah • Terbatasnya infrastruktur sanitasi • Masih ada kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan (pada suangai dan sumber air)	• Program pengelolaan sumber daya air (SDA) • Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional • Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten • Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terbatasnya akses terhadap layanan air bersih • Sanitasi lingkungan • Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah Sasaran: • Meningkatnya ketersediaan air baku • Meningkatnya ketersediaan Sistem Air	Strategi: • Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi Arah Kebijakan: • Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi • Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi	• Program pengelolaan sumber daya air • Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Program pengelolaan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								Limbah Domestik Meningkatnya akses rumah layak huni	jaringan irigasi Strategi: • Peningkatan akses air minum Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM Strategi: • Optimalisasi pengelolaan air limbah Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL Strategi: • Peningkatan akses rumah layak huni Arah Kebijakan: • Peningkatan kualitas rumah tidak layak/ rusak	dan pengembangan sistem air limbah • Program Kawasan Permukiman • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									Strategi • Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum Arah Kebijakan: • Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh	
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi	6.3.1 Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	• Terbatasnya infrastruktur sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik • Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Pengelolaan limbah domestik dan limbah industri (khususnya di Labuan Bajo dan Kecamatan Kota Labuan Bajo)	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah Sasaran: • Meningkatnya ketersediaan air baku • Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah Domestik • Meningkatnya akses rumah	Strategi: • Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi Arah Kebijakan: • Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi • Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi Strategi: • Peningkatan akses air minum	• Program pengelolaan sumber daya air • Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								layak huni Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM Strategi: • Optimalisasi pengelolaan air limbah Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL Strategi: • Peningkatan akses rumah layak huni Arah Kebijakan: • Peningkatan kualitas rumah tidak layak/ rusak Strategi • Peningkatan ketersediaan prasarana,	• Program Kawasan Permukiman • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									sarana dan utilitas umum Arah Kebijakan: • Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh Strategi: Pencegahan pencemaran air Arah Kebijakan: Optimalisasi pemantauan kualitas air di badan air	
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi	6.3.2 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik	• Masih ada kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan (pada suangai dan sumber air) • Terbatasnya upaya konservasi daerah tangkapan air	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Kualitas air permukaan rendah • Penurunan debit air permukaan	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah Sasaran: • Meningkatnya ketersediaan air baku • Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah	Strategi: • Peningkatan akses air minum Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM Strategi: • Optimalisasi pengelolaan air limbah	• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								Domestik • Meningkatnya akses rumah layak huni Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL Strategi: • Peningkatan akses rumah layak huni Arah Kebijakan: • Peningkatan kualitas rumah tidak layak/ rusak Strategi • Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum Arah Kebijakan: • Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh Strategi: Pencegahan	• Program Kawasan Permukiman • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									pencemaran air Arah Kebijakan: • Optimalisasi pemantauan kualitas air di badan air • Minimalisasi penggunaan bahan kimia oleh pelaku usaha dan atau kegiatan • Optimalisasi konservasi sumber mata air	
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi	6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku	• Infrastruktur air bersih maupun sanitasi masih terbatas • Masih ada kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan (pada suangai dan sumber air) • Terbatasnya upaya konservasi daerah tangkapan air	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terbatasnya akses terhadap layanan air bersih • Terbatasnya sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan air baku • Kualitas air permukaan rendah • Penurunan debit air permukaan	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah Sasaran: • Meningkatnya ketersediaan air baku • Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah	Strategi: • Peningkatan akses air minum Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM Strategi: • Optimalisasi pengelolaan air limbah Arah Kebijakan:	• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Program

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								Domestik Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	• Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL Strategi: Pencegahan pencemaran air Arah Kebijakan: • Optimalisasi pemantauan kualitas air di badan air • Minimalisasi penggunaan bahan kimia oleh pelaku usaha dan atau kegiatan • Optimalisasi konservasi sumber mata air	Kawasan Permukiman • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi	6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku	• Infrastruktur air bersih maupun sanitasi masih terbatas	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terbatasnya akses terhadap layanan air bersih • Terbatasnya sarana dan prasarana pemenuhan	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian	Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah Sasaran: Meningkatnya ketersediaan	Strategi: • Peningkatan akses air minum Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan	• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
						kebutuhan air baku	Lingkungan	Sistem Air Limbah Domestik Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	SPAM Strategi: • Optimalisasi pengelolaan air limbah Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL Strategi: Pencegahan pencemaran air Arah Kebijakan: • Optimalisasi pemantauan kualitas air di badan air • Optimalisasi konservasi sumber mata air	• Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi	6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	• Infrastruktur air bersih maupun sanitasi masih terbatas	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	•Pembangunan sumur air tanah untuk air baku Pembangunan unit air baku	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terbatasnya akses terhadap layanan air bersih • Terbatasnya sarana dan prasarana	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis	Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah Sasaran:	Strategi: • Peningkatan akses air minum Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengelolaan dan	• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
						pemenuhan kebutuhan air baku	Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya ketersediaan air baku Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	pengembangan SPAM Strategi: • Optimalisasi pengelolaan air limbah Arah Kebijakan: • Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL Strategi: Pencegahan pencemaran air Arah Kebijakan: • Optimalisasi pemantauan kualitas air di badan air • Optimalisasi konservasi sumber mata air	minum • Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
Tujuan 7 Energi Terjangkau dan Terbarukan	7.2.1* Bauran energi terbarukan	• Butuh waktu lama dalam pengembangan energi terbarukan dan biaya produksi energi terbarukan masih mahal • Kurangnya kapasitas	Program pengelolaan energi baru terbarukan	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih rendahnya pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan • Kapasitas SDM dalam pengelolaan	Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis	Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran:	Strategi: Pengendalian pencemaran udara Arah Kebijakan: • Pengendalian emisi gas	Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		SDM dalam pengelolaan sumber-sumber energi				sumber-sumber energi	Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	industri dan kendaraan • Pengendalian emisi gas rumah kaca	
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita	• Belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah • Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha • Kurangnya investasi oleh investor lokal • Masih terbatasnya infrastruktur pendukung perekonomian • Amenitas di destinasi wisata belum optimal • Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi belum merata	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan pendapatan daerah	Sudah tercantum di Bab 2	• Ketersediaan lapangan kerja • Akses UMKM terhadap Lembaga keuangan • Multiplier effect pariwisata • Pemetaan potensi ekonomi • Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: • Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan dan potensial • Meningkatnya realisasi nilai investasi • Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	• Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura • Peningkatan produksi tanaman perkebunan • Peningkatan kualitas produk pertanian • Peningkatan produksi hasil ter Peningkatan kualitas produk hasil ternak nak • Peningkatan populasi ternak • Peningkatan produksi perikanan tangkap • Peningkatan produksi perikanan budidaya • Peningkatan kualitas produk perikanan • Peningkatan	• Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian • Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian • Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian • Program penyuluhan pertanian • Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner • Program pengelolaan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									kapasitas pemasaran produk pertanian, perikanan dan produk lokal • Peningkatan nilai produksi IKM • Revitalisasi pasar tradisional • Peningkatan daya saing produ Peningkatan minat/ daya tarik investasi k IKM • Peningkatan kepatuhan investor untuk melaporkan perkembangan usahanya • Peningkatan kemudahan perizinan berinvestasi • Peningkatan kualitas manajerial koperasi • Peningkatan omzet usaha mikro	perikanan tangkap • Program pengeloaan perikanan budidaya • Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri • Program peningkatan sarana distribusi perdagangan • Program standardisasi dan perlindungan konsumen • Program perencanaan dan pembangunan industry • Program pengembangan iklim penanaman modal • Program

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
										promosi penanaman modal • Program pelayanan penanaman modal • Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	• Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha • Keragaman jenis lapangan kerja masih terbatas pada sektor pariwisata dan pertanian	• Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Program penempatan tenaga kerja	• Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi • Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja • Ketersediaan lapangan kerja • Belum optimalnya pengembangan mata pencaraharian alternatif • Perlunya peningkatan kreativitas masyarakat	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: • Menurunnya pengangguran • Meningkatnya kesejahteraan PPKS	• Peningkatan penyerapan tenaga kerja • Penurunan permasalahan hubungan industrial • Peningkatan layanan sosial	• Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Program penempatan tenaga kerja • Program hubungan industrial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	• Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha • Keragaman jenis	Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	• Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan	Misi 3: Mengembangkan Daya Saing	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan	• Penurunan permasalahan hubungan industrial	• Program pelatihan kerja dan produktivitas

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Pertumbuhan Ekonomi		lapangan kerja masih terbatas pada sektor pariwisata dan pertanian		Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		mengalami pemutusan hubungan kerja • Ketersediaan lapangan kerja • Belum optimalnya pengembangan mata pencaraharian alternatif • Perlunya peningkatan kreativitas masyarakat	Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: • Menurunnya pengangguran • Meningkatnya kesejahteraan PPKS	• Peningkatan layanan sosial	tenaga kerja • Program penempatan tenaga kerja • Program hubungan industrial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	• Terbatasanya pendidikan dan pelatihan bidang UMKM • Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya Pendidikan • Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur wilayah	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Sudah tercantum di Bab 2	• Kualitas SDM masih rendah • Masih terdapat anak putus sekolah, nilai IPM yang belum optimal dan perlunya peningkatan sarana prasarana kegiatan pembelajaran • Aksesibilitas pendidikan yang belum merata • Optimalisasi pendidikan dan pelatihan khusus	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sasaran: Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	• peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan • peningkatan kualitas pengelolaan dapodik • peningkatan kualitas pelayanan pendidikan • peningkatan monitoring pengelolaan sistem pendidikan	• Program Pengelolaan pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
									• Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan • peningkatan kompetensi guru • peningkatan kompetensi tenaga kependidikan • Pengembangan pendidikan karakter sejak usia dini	
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	• Masih terbatasnya infrastruktur pendukung perekonomian • Belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah	Penyelenggaraan Jalan	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Sudah tercantum di Bab 2	• Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi • Perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan nfrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan	• Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan • Peningkatan pemeliharaan jalan • Optimalisasi pengawasan penyelenggaraan jalan • Peningkatan pemerataan jaringan jalan	Program penyelenggaraan jalan
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	9.a.1 Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi	• Kurangnya Kerja sama antar pihak • Kolaborasi antar Lembaga belum	Program kemitraan G to G pembangunan infrastruktur	Peningkatan kerjasama Pemda dengan NGO Internasional	Sudah tercantum di Bab 2	• Perlunya peningkatan kerja sama antar pihak dalam	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan	Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur	Peningkatan implementasi kerjasama pemerintah daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
	pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur	terkoordinis secara baik dan terukur				pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah • Kolaborasi stakeholders • Optimalisasi Kerja sama antar pihak	Infrastruktur Yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	wilayah		Rakyat
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan	10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri	• Belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah • Masih terbatasnya infrastruktur pendukung perekonomian • Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi belum merata	Program administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Sudah tercantum di Bab 2	• Adanya kesenjangan ekonomi (rasio Gini) • Perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal • Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani	Tujuan: Meningkatnya Kemandirian desa Sasaran: Meningkatnya Keberdayaan desa	• Peningkatan pengelolaan potensi desa • Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa • Peningkatan pembinaan lembaga desa	• Program Administrasi Pemerintahan Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	• Belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah • Masih terbatasnya infrastruktur pendukung perekonomian • Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi belum merata • Data keunggulan komparatif tiap wilayah belum tersedia • Keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata • Amenitas di destinasi wisata belum optimal.	• Program padat karya berbasis pertanian • Peningkatan jaringan pemasaran produk lokal • Peningkatan efektivitas dana desa untuk urusan pemberdayaan • Peningkatan infrastruktur • Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, serta industri Kecil dan menengah	• Verifikasi dan validasi data KK miskin • Penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan • Kegiatan Fasilitasi PKH • Bantuan bibit unggul pertanian • Bantuan pengolahan lahan pertanian • Peningkatan aksesibilitas distribusi barang dan jasa, konektivitas antar wilayah, dan prasarana pendukung	Sudah tercantum di Bab 2	• Adanya kesenjangan ekonomi (rasio Gini) • Perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal • Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi • Pemetaan potensi ekonomi • Aksesibilitas ke destinasi wisata • Amenitas di destinasi wisata	Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	Tujuan: Meningkatnya Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisatawan Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	• Peningkatan pemasaran destinasi wisata • Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan • Pengintegrasian ekonomi masyarakat untuk menopang kegiatan wisata • Peningkatan kapasitas produksi ekonomi kreatif • Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif • Peningkatan kualitas produk pertanian • Peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian, perikanan dan produk lokal	• Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian • Program penyuluhan pertanian • Program pemasaran pariwisata • Program peningkatan daya tarik destinasi wisata • Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual • Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Ketersediaan sarana transportasi umum yang aman dan nyaman masih sangat terbatas	Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Terbatasnya transportasi umum	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah Sasaran: Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan laut	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	• Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana • Pemahaman tentang bencana belum optimal • Belum optimalnya sosialisasi kesiagaan terhadap bencana	Penanganan bencana	• Penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana • Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten • Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Masih terjadinya bencana banjir • Edukasi siaga bencana • Pencegahan dan penanggulangan bencana	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Menurunnya risiko bencana Sasaran: Meningkatnya upaya mitigasi dan pengendalian bencana	Optimalisasi penanggulangan kebencanaan	Program penanggulangan bencana
Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM_{10}	Peningkatan partikulat di udara akibat peningkatan aktivitas antropogenik di Kota Labuan Bajo	Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Sudah tercantum di Bab 2	Polusi udara	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Strategi: Pengendalian pencemaran udara Arah Kebijakan: Optimalisasi pemantauan kualitas udara	Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
Tujuan 11	11.7.2	• Belum semua	Program	Pencegahan Kekerasan		• Belum	Mewujudkan	Tujuan:	Strategi:	Program

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Kota dan Permukiman Berkelanjutan	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	stakeholders terkait mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak • Lemahnya pemahaman tentang gender	perlindungan perempuan	terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten		optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penangangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya Kesetaraan Gender Sasaran: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan Arah Kebijakan: Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	• Belum semua stakeholders terkait mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak • Lemahnya pemahaman tentang gender	• Program perlindungan perempuan Program Perlindungan Khusus Anak	• Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten • Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penangangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Sasaran: Meningkatnya kondusivitas sosial	Strategi: Peningkatan deteksi dan kewaspadaan dini pada gangguan stabilitas sosial masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengolahannya	• Keterbatasan anggaran untuk infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah • Terbatasnya infrastruktur sanitasi • Terbatasnya sarana prasarana pengelolaan limbah B3	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	• Penyimpanan sementara limbah B3 Pengumpulan limbah B3 dalam 1(satu) daerah kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Belum terpenuhinya layanan terhadap pengelolaan sampah domestik dan limbah B3 • Pengelolaan limbah domestik dan limbah industri khususnya di	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Strategi: Optimalisasi pengelolaan sampah Arah Kebijakan: Optimalisasi pengelolaan limbah B3	Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
						Labuan Bajo dan Kecamatan Kota Labuan Bajo				
Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	12.b.1(a) Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development*	• Kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan belum dilakukan secara terpadu • Kurangnya praktik-praktik pariwisata berkelanjutan oleh industri pariwisata • Kurangnya partisipasi masyarakat local dalam memanfaatkan peluang pariwisata • Keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	• Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kabupaten • Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	• Safe tourism: implementasi CHSE di destinasi pariwisata • Sustainable tourism dan inklusif tourism • Pemetaan potensi ekonomi • Aksesibilitas ke destinasi wisata	Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi	Tujuan: Meningkatnya Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya kunjungan wisatawan	Strategi: Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan Arah Kebijakan: Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Tujuan 13 Mengatasi Perubahan Iklim	13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	• Kesiapsiagaan bencana daerah masih belum optimal • Belum ada rencana aksi mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim • Belum tersedianya baseline data tentang perubahan iklim • Belum adanya kajian risiko iklim	Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim • Kajian proyeksi iklim dan risiko iklim	Sudah tercantum di Bab 2	• Perlunya peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim • Dampak perubahan iklim terhadap kekeringan, ketersediaan air bersih dan produktivitas pertanian • Meningkatnya bencana	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Strategi: Pengendalian pencemaran udara Arah Kebijakan: Pengendalian emisi gas rumah kaca	Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
						hidrometeorologi di pesisir akibat perubahan iklim dan perubahan lahan di hulu				
Tujuan 15 Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan	15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	• Rendahnya peran serta masyarakat dalam menghijaukan lahan kritis dan keterbatasan anggaran	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Sudah tercantum di Bab 2	Revegetasi dan penghijauan pada lahan kritis	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Strategi: Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati Arah Kebijakan: Pengendalian alih fungsi lahan	Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Masih banyak masyarakat/ pemohon yang mengajukan akta kelahiran menunggu pada saat anak memasuki usia sekolah	Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Sudah tercantum di Bab 2	Cakupan kepemilikan akta lahir penduduk usia 0-17 masih rendah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang melayani berbasis teknologi informasi	Strategi: Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang	• Belum semua stakeholders terkait mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan	• Program perlindungan perempuan Program Perlindungan	• Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten • Pencegahan Kekerasan	Sudah tercantum di Bab 2	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penangangan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,	Strategi: Peningkatan deteksi dan kewaspadaan dini pada gangguan	Program perlindungan khusus anak

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
	mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	perempuan dan anak	Khusus Anak	Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten		korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		efektif, dan dinamis Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang melayani berbasis teknologi informasi	stabilitas sosial masyarakat	
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.1 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.	Keengganan korban kekerasan menghadapi proses hukum	Program perlindungan perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	Kompresivitas layanan terhadap korban kekerasan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Sasaran: Meningkatnya kondusivitas sosial masyarakat	Strategi: Peningkatan deteksi dan kewaspadaan dini pada gangguan stabilitas sosial masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Keengganan korban kekerasan menghadapi proses hukum	Program perlindungan perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	Kompresivitas layanan terhadap korban kekerasan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Sasaran: Meningkatnya kondusivitas sosial masyarakat	Strategi: Peningkatan deteksi dan kewaspadaan dini pada gangguan stabilitas sosial masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	Tatalaksana birokrasi dan koordinasi antar OPD belum optimal	• Program Administrasi Umum • Penelitian dan Pengembangan Daerah	• Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi • Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Sudah tercantum di Bab 2	Perlunya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis Sasaran:	Strategi: Penguatan pelembagaan dan implementasi reformasi birokrasi Arah Kebijakan: Fasilitasi penerapan 8 area	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
								Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	perubahan di setiap perangkat daerah	
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Masih banyak masyarakat/ pemohon yang mengajukan akta kelahiran menunggu pada saat anak memasuki usia sekolah	Program pencatatan sipil	• Fasilitasi pembuatan akta kelahiran • Peningkatan layanan pembuatan akta kelahiran	Sudah tercantum di Bab 2	Pencatatan kelahiran bagi anak di bawah 5 tahun dan kepemilikan akta lahir	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang melayani berbasis teknologi informasi	Strategi: Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	• Belum semua stakeholders terkait mendapatkan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak • Lemahnya peran Lembaga adat dan agama dalam membangun kesetaraan gender	• Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan	• Pelembagaan Pengarusutaman Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten • Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penangangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Tujuan: Meningkatnya Kesetaraan Gender Sasaran: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Strategi: Peningkatan perlindungan terhadap perempuan Arah Kebijakan: Peningkatan kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan	Indikator	Permasalahan	Rekomendasi KLHS		Integrasi dalam RPJMD					
			Program	Kegiatan	Kondisi Daerah	Isu Strategis	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	•Belum Optimal pengelolaan potensi pajak daerah yang ada sehingga support pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan sumber pembiayaan. •Perlu adanya upaya optimalisasi peningkatan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Pengelolaan Pajak Daerah • Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah • Penagihan Pajak Daerah • Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sudah tercantum di Bab 2	Anggaran domestik yang didanai pajak domestik masih relatif rendah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Strategi: Peningkatan kualitas pelaporan keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Belum meratanya pembangunan sarana infrastruktur jaringan serat optik di tingkat kecamatan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Sudah tercantum di Bab 2	Perluasan akses transportasi digital tingkat kecamatan	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan	Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Strategi: Peningkatan sistem pengendalian dan percepatan kualitas pelayanan publik	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjabarkan indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta yang memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain target program, bab ini juga memuat pagu indikatif yang merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada Bab III (Tiga) RPJMD terutama yang berkaitan dengan kerangka pendanaan yang terdiri atas kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024-2026

Uraian	APBD Tahun Berjalan 2023	Proyeksi		
		2024	2025	2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.606.575.863.841,00**	**1.574.342.327.817,00**	**1.665.832.176.154,00**	**1.765.358.796.390,00**
Prioritas I	1.294.402.362.680,25	1.317.562.092.420,65	1.385.046.160.734,55	1.429.105.814.150,31
Prioritas II dan III	312.173.501.160,75	256.780.235.396,35	280.786.015.419,45	336.252.982.239,69

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat, melainkan juga dari APBN maupun sumber pendanaan lainnya. Meskipun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah pada bagian ini hanya mencantumkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Manggarai Barat. Kerangka pendanaan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program atau pagu indikatifnya. Program-program yang telah memperoleh distribusi pagu indikatif menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas Perubahan RPJMD yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
x			Non Urusan																
x	x x		Non Urusan																
x	x x	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah																
				Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	2,729,568,664	100	3,881,476,750	100	3,965,207,593	100	3,403,354,865	100	3,327,690,407	100	17,307,298,279	Bagian Umum
				Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	Persen	2.08	10.42	1.250.000.000	16.67	650.000.000	20.83	650,000,000	25	1,374,106,114	30	1,586,473,920	30	5.510.580.034	Bagian Organisasi
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Dok SOP Sesuai Standar	Persen	N/A	6.25		16.67		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai standar	Persen	100	100	1.296.500.000	100	1.154.057.706	100	517,450,000	100	780,500,000	100	822,000,000	100	4.570.507.706	Bagian Prokopim
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Persen	0	100	700,000,000	100	750,000,000	100	160,000,000	100	244,500,000	100	257,675,000	100	2,112,175,000	Bagian Perencanaan dan Keuangan
1			Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																
1	1	2	Program Pengelolaan pendidikan	APK PAUD	Persen	46	63.16	121,689,225,349	100	128,899,131,807	100	124,632,971,699	100	125,884,731,846	100	128,764,304,461	100	629,870,365,162	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	98.01	83.2		100		100		100		100		100		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	92.67	70.07		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	104.93	100		100		100		100		100		100		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	persen	97.75	98		100		100		100		100		100		
				Persentase SD yang terakreditasi	Persen	58.76	62		66		66		70		74		74		
				Persentase SMP yang terakreditasi	Persen	76	93.75		94		95		97		100		100		
				Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertarma/ Madrasah Tsanawiyah) (SPM)	Persen	95.97	96,45		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	Persen	1	97.86		100		100		100		100		100		
				Indeks literasi siswa SD	Angka	N/A					1.77		1.87		1.97		1.97		
				Indeks literasi siswa SMP	Angka	N/A					1.66		1.77		1.86		1.86		
				Indeks Numerasi Siswa SD	Angka	N/A					1.68		1.78		1.88		1.88		
				Indeks Numerasi Siswa SMP	Angka	N/A					1.68		1.78		1.88		1.88		
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangk	Persen	N/A	25	96,986,390	50	130,000,000	75	195,000,000	100	200,000,000	100	355,000,000	100	976,986,390	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				an															
				Persentase kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan non formal yang dikembangkan	Persen	N/A	25		50		75		100		100		100		
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik	Persen	24.47	23.61	5,805,518,130	24	5.951.718.130	25	12,963,000,000	30	12,963,000,000	35	12,963,000,000	35	50,646,236,260	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Jumlah guru TK, SD dan SMP yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak	Orang	N/A	66		100		125		150		175		175		
1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	2	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (SPM)	Persen	73.74	91	25,822,674,100	100	25,129,583,610	100	103,376,089,065	100	135,515,859,066	100	137,890,202,200	100	450.296.455.752	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	87.3	91	3,531,295,000	100	3,564,460,000	100		100		100		100		
				Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	60.37	100	3,531,295,000	100	3,564,460,000	100		100		100		100		
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	88	100	81,335,100	100	89,468,610	100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	60.94	62	93,400,000	100	47,900,000	100		100		100		100		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	100	100	975,752,000	100	482,120,000	100		100		100		100		
				Persentase balita gizi kurang	Persen	10.26	16	271,812,000	15	205,920,000	6		5.8		5.5		5.5		
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persen	36	44	2,267,330,000	46	2,055,500,000	100		100		100		100		
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	Persen	92	85	300,000,000	100	300,000,000	100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	Persen	67.98	67	300,000,000	100	300,000,000	100		100		100		100		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	Persen	63	67		100		100		100		100		100		
				Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (SPM) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0.01		0.01		0.01		0.01		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	Persen	48	0	100,000,000	0	100,000,000	100		100		100		100		
				Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) terakreditasi	Persen	68.18	81.82	100.000.000	95.45	100.000.000	100		100		100		100		
				Rasio Daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio	1 : 1032,9	1 : 1000	14.170.455.000	1 : 1000	14.219.755.000	1 : 1000	85,590,363,158	1 : 1000	99,856,547,375	1 : 1000	110,562,793,411	1 : 1000	324.399.913.944	RSUD Komodo
1	2	3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan minimal 9 jenis tenaga kesehatan	Persen	N/A	22,7	19.393.167.754	60	23.250.649.824	100	10,626,475,000	100	10,636,475,000	100	10,656,475,000	100	74.563.242.578	Dinas Kesehatan
				Persentase tenaga kesehatan RSUD yang bersertifikat khusus	Persen	N/A	20	6.193.865.000	30	6.193.865.000	43.33	3,117,716,698	76.67	8,118,716,698	100	8,118,918,698	100	31.743.082.094	RSUD Komodo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	4	Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase peserta penyuluh kemanan pangan yang mendapat sertifikat	Persen	99.93	93.93	50.000.000	100	55.000.000	100	272.800.000	100	294.580.000	100	318.538.000	100	1.342.548.000	Dinas Kesehatan
				Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	100	100	175.630.000	100	176.000.000	100		100		100		100		
1	2	5	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS	Persen	60	60.4	1,030,000,000	62	1,215,000,000	67	2,391,494,000	68	2,519,944,000	70	2,475,944,000	70	9,632,382,000	Dinas Kesehatan
1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1	3	2	Program pengelolaan sumber daya air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	52.72	59.66	16,400,000,000	65.66	18,650,000,000	70.66	12,300,000,000	70.83	22,400,000,000	75.83	19,113,569,392	75.83	56.063.569.392	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi dan banjir yang terlindungi bangunan pengaman pantai	Persen	N/A	0	7.600.000.000	30	14.839.143.043	41.12	1,700,000,000	45.46	2,600,000,000	49.99	2,900,000,000	49.99	29.639.143.043	dan Bina Konstruksi
1	3	3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM	Persen	30.56	29.06	22.444.201.100	30.17	7.791.003.882	32.17	8,919,606,347	36.17	10,431,902,222	42.17	11,656,061,647	42.17	16.354.372.998	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD	Persen	73.88	72.36	4,602,000,000	73	20,077,000,882	73.13	7,849,253,585	75.93	9,180,073,955	78.93	10,257,334,249	78.93	51,965,662,671	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir	Persen	32.55	0.27	2,066,000,000	1.27	1,600,000,000	2.3	1,070,352,762	4.27	1,251,828,267	6.27	1,398,727,398	6.27	7,386,908,427	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1	3	9	Program penataan bangunan gedung	Persentase bangunan dengan IMB	Persen	N/A	20.14	350.000.000	22.15	500.000.000	25.1	1.628.683.592	30.14	4.848.683.592	35.15	6.500.000.000	35.15	13.827.367.184	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	55.53	34.88	778,665,418,413	33.91	65,143,848,216	32.07	96,171,573,000	26.27	130,171,573,000	18.5	138,171,573,000	18.5	1,208,323,985,629	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
				Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	44.47	52.02		52.99		54.83		60.63		68.4		68.4		
1	3	11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Kontruksi yang terlatih	Persen	40	40	525,000,000	65.5	1.000.000.000	77.5	900,000,000	90	1,106,582,474	100	1,000,000,000	100	4.531.582.474	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	Persen	58	58		70		75		85		100		100		dan Bina Konstruksi
1	3	12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase dokumen RDTR yang tersedia	Persen	N/A	100	2.700.000.000	100	3.500.000.000	100	1,628,683,592	100	4,848,683,592	100	6,500,000,000	100	19.177.367.184	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman																
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban terdampak relokasi program pemerintah	Persen	N/A	100	4,283,190,901	100	2,543,197,269	100	820,000,000	100	1,170,000,000	100	1,170,000,000	100	16.812.776.340	Dinas Cipta Karya. Tata Ruang, Perumahandan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	Persen	N/A	100	4,283,190,901	100	2,543,197,269	100		100		100		100		
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan rumah layak huni	Persen	36.62	56.41	10,830,244,680	57.91	14,343,014,407	56.78	4,000,000,000	57.19	4.400.000.000	57.65	5,000,000,000	57.65	38.573.259.087	Dinas Cipta Karya. Tata Ruang, Perumahandan Kawasan Permukiman
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase jalan di kawasan permukiman dan permukiman kumuh dalam kondisi baik	Persen	N/A	33.37	2,228,604,615	33	2,848,587,004	33.4	8,562,392,849	33.45	12,568,984,599	33.47	15,008,093,294	33.47	41,216,662,361	Dinas Cipta Karya. Tata Ruang, Perumahandan Kawasan Permukiman
1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3)	Persen	80	92	1,600,000,000	100	1,756,387,275	100	1,460,000,000	100	3,685,269,201	100	4,000,000,000	100	12,501,656,476	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	3	Program penanggulangan bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh pelatihan mitigasi	Persen	0.06	1.03	331,763,549	2.07	445,055,647	67.57	350,000,000	83.78	600,000,000	100	700,000,000	100	2,426,819,196	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase korban yang mendapat pendampingan pasca bencana	Persen	100	100	109,293,549	100	296,313,006	100	645,000,000	100	1,900,702,110	100	2,770,000,000	100	5,721,308,665	
				Persentase masyarakat yang memperoleh informasi kebencanaan	Persen	0.29	0.86	149,720,000	4.76	896,060,000	58.6	250,000,000	78.6	400,000,000	100	400,000,000	100	2,095,780,000	
				Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	0	0	317,346,372	1.21	236,600,000	1.82	100,000,000	2.43	100,000,000	3.04	150,000,000	3.04	903,946,372	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	5	4	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran yang Ditangani dan Diakses dalam waktu Maksimal 15 Menit	Persen	N/A	88	224.751.099	100	2.165.627.148	100	774,188,514	100	2,002,840,446	100	3,962,911,204	100	9.130.318.411	Satuan Polisi Pamong Praja
1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Presentase lembaga masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	10.71	42.85	166,110,000	10.71	205,545,455	71.42	160,834,847	85.71	317.334.847	100	385.500.000	100	1.235.325.149	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang bersertifikat	Persen	77.1	82.97	145,308,220	81.68	219,545,455	86.26	250,000,000	91.6	373.500.000	100	477.000.000	100	1.465.353.675	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	6	3	Program Penanganan Warga Negara Migran dan Eks Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan orang terlantar yang dpulangkan dari Labuan Bajo ke Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Persen	100	100	25,779,320	100	26,390,936	100	40,298,417	100	60,138,969	100	78,079,334	100	230,686,976	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	3.73	6.72	222,130,000	3.51	239,545,455	4.52	155,000,000	7.53	174,048,714	11.55	221,250,000	11.55	1,011,974,169	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dil uar	Persen	0.87	1.12	161,605,000	4.05	240,545,455	5.59	183,821,078	7.52	251,882,934	11.55	309,777,780	11.55	1,147,632,247	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				panti (SPM)															
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	Persen	0	0	43,198,873	100	89,545,455	100	476,400,000	100	577,955,560	100	691,282,260	100	1,878,382,148	
				Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	10.38	11.73	203,630,000	100	272,837,009	100	814,500,000	100	965,833,870	100	1,075,089,960	100	3,331,890,839	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	6	5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat dalam DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	N/A	54.68	941,194,000	59.68	1,560,210,192	64.68	635,189,629	69.68	752,849,077	74.68	1,383,920,666	74.68	5,273,363,564	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat (SPM)	Persen	98.27	100	510,700,000	100	510,536,713	100	387,482,650	100	595,982,650	100	448,982,650	100	2,453,684,663	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Persentase sarpras TMP yang layak	Persen	0	10	158,180,000	15	149,927,381	0	0	0	0	0	0	0	308,107,381	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persen	N/A	5	200.000.000	5	200.000.000	10	75,000,000	20	200,000,000.00	30	200,000,000	30	875,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	7	3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi sesuai dengan Permintaan Pasar	Persen	11.98	24.75	1,060,000,000	25.02	3,720,000,000	30.01	1,927,990,000	40.01	5.730.000.000	59.99	9.887.517.260	59.99	22.325.507.260	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	75,62	28.44	350,000,000	76	450,000,000	77	450,000,000	78.01	1,650,000,000	78.4	1,950,000,000	78.4	4,850,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	7	4	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang mematuhi regulasi ketenagakerjaan	Persen	31,73	68.36	591,884,763	100	1,070,888,157	100	900,000,000	100	1.600.000.000	100	1.450.000.000	100	5.612.772.920	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan pengambil keputusan publik	Persen	7.5	10	379.069.658	12.5	423.794.012	15	447,370,401	17.5	634,346,401	20	770,000,000	20	2.654.580.472	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	Program perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	Persen	78.26	79.34	284,302,244	85	317,845,509	100	252,628,000	100	258,259,831	100	302,658,000	100	1,415,693,584	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	8	6	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase fasilitas publik layak anak	Persen	45	50	189,534,829	54	211,897,006	55	230,776,000	60	345,800,000	65	430,840,000	65	1,408,847,835	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	72.72	77.27	284,302,244	81.81	317,845,509	100	354,773,831	100	407,142,000	100	418,642,000	100	1.792.602.075	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	Program s anak	Peang diselesaikan	Perse														
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																
2	9	2	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Stok cadangan pangan daerah	Ton	11,550	0	2,289,796,923	40	2,098,992,500	45	685,000,000	50	1,372,936,738	55	1,364,135,129	55	7,810,861,290	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik	Persen	82	76.92		86.7		84.62		92.31		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	9	3	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi pangan non-beras	Persen	6.67	23	2,232,445,000	25	2,226,007,500	30	865,703,375	60	2,255,000,000	95	2,421,900,000	95	10,001,055,875	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	9	4	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa/Kelurahan yang Masuk ke dalam Kategori Sulit untuk Pendistribusian Pangan	Persen	N/A		175.000.000	5.92	200.000.000	2.37	101,250,000	1.78	250,000,000	1.18	435,000,000	1.18	1.161.250.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase desa/kelurahan yang tidak bisa Mengakses Informasi Pangan	Persen	N/A					25		23		21		21		
2	9	5	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Aman /bebas Zat kimia berbahaya	Persen	100	100	500,000,000	100	600,000,000	100	315,000,000	100	850,000,000	100	826,500,000	100	3,091,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	10	2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Izin yang di keluarkan sesuai SOP	Persen	N/A	100	978,165,486	100	978,165,486	100		100		100			1,956,330,972	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik tanah yang difasilitasi	Persen	N/A	100	489,082,743	100	508,639,454	100	513,692,315	100	515,000,000	100	515,000,000	100	2,541,414,512	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penggantian kerugian dan santunan tanah masyarakat terdampak pembangunan	Persen	N/A	100	3,423,579,200	100	3,560,476,176	100	2,389,651,802	100	3,672,071,372	100	3,686,261,587	100	16,732,040,137	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diimplementasikan	Persen	100	100	270,410,019	100	251,065,423	100	75,000,000	100	85,000,000	100	75,000,000	100	756,475,442	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11	3	Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Sungai yang memenuhi baku mutu	Persen	N/A	100	1.352.050.094	100	1.793.324.452	100	417.500.000	100	458.000.000	100	457.000.000	100	4.477.874.546	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan adminitratif dan teknis pencegahan pencemaran air	Persen	1.64	21		30		35		40		45		50		
				Persentase udara ambien yang memenuhi baku mutu	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
				Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ion CO2eq)	Predikat	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
2	11	4	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase Ruang terbuka Hijau yang terkelola	Persen	N/A	100	270,410,019	100	251.065.423	100	250,000,000	100	300,000,000	100	320,000,000	100		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang taat dalam pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	N/A	15	405,615,028	35	466,264,357	40	470,000,000	45	477,000,000	50	481,000,000	50		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	6	Program Pembinaan dan pengawasan terhadao ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0	0	0	50	250,000,000	50	305,000,000	50	305,000,000	50	860,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2	11	11	Program Pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	Persen	1.47	N/A	8,504,484,886	4.23	7,108,230,278	4.34	9,205,257,235	4.4	13,729,257,235	4.62	15,759,430,398	4.62	54,306,660,032	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
				Persentase penyediaan sarana prasarana persampaha	Persen	N/A	N/A		25		30		35		40		40		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				n															
2	12		Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil																
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan e-KTP	Persen	95.73	98	1,869,215,977	98.5	1,244,026,236	99	514,666,616	99.5	820,000,000	100	770,000,000	100	5,217,908,829	Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
				Persentase kepemilikan dokumen KIA	Persen	10.59	33		37.6		40		41.97		43.1		43.1		
				Persentase kepemilikan dokumen KK Ber-barcode	Persen	N/A	56		71.35		78.3		87.01		97.29		97.29		
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persen		96	618.378.119	96.5	720.703.039	96.75	510,761,351	97	825,000,000	97.2	725,000,000	97.2	3.399.842.509	Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
				Persentase Pengajuan akta Kematian yang terlayani	Persen	180	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan	Persen		72.59		73.06		74.38		75.26		76.11		76.11		
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan data kependudukan yang dimutakhirkan	Persen		100	895,989,201	100	1,024,095,677	100	282,360,438	100	454,290,117	100	427,360,400	100	2.162.409.723	Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
				Persentase OPD/instansi pemerintah yang memanfaatkan data kependudukan sesuai ketentuan regulasi	Persen	0	10.3		41.3		58.6		75.8		100		100		
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	13	2	Program Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa sesuai ketentuan	Persen	5	18.29	8,605,111,810	24	8,222,212,461	27	286,000,000	27	286,000,000.00	30	410,000,000.00	30	17.809.324.271	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				regulasi															
2	13	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalin kerjasama desa dan pihak ketiga	Persen	0%	8%	300,000,000	11%	340,000,000	14	175,000,000	17	175,000,000.00	20	225,000,000.00	20	1.215.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	21%	28%	1,915,282,728	35%	1,925,000,000	50	2,377,150,131	65	3,377,150,132.00	75	3,317,150,131.00	75	12.911.733.122	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	63%	64%	900,000,000	66%	1,101,820,050	100	934,349,869	100	834,349,868.00	100	1,170,340,570.00	100	4.940.860.357	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif	Persen	0%	15%	200,000,000	17%	225,000,000	22	75,000,000	29	75,000,000	37	150,000,000.00	37	725.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
2	14	2	Program pengendalian penduduk	Persentase Sektor yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	N/A	14	470,043,360	15	423,794,012	16.67	498,000,000	18.75	530,000,000	20.83	680,000,000	20.83	2.601.837.372	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
2	14	3	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif	Persen	65.51	61.28	4.889.744.964	61.32	4.669.505.712	61.36	5.878.052.024	61.4	7.380.595.730	62	8.539.733.987	62	31.357.632.417	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi	Persen	20.89	16.98		16.94		16.9		16.86		15.93		15.93		
				Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	Persen	22.35	34.1		34.15		34.18		34.2		34,22		34,22		
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				kontrasepsi masyarakat															
2	1 4	4	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	Persen	0	16.67	893,298,054	25	848,883,287	33.33	2,606,407,976	41.67	3,760,000,000	50	4,280,000,000	50	14.403.691.762	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
				Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	0	21	411,903,443	21	339,553,315	21		21		21		21		
				Cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB	Persen	80.13	80.13	251,438,572	80.15	169,776,657	82.18		84.23		86.28		86.28		
				Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB	Persen	82.94	82.94	251,438,572	83	169,776,657	85.03		86.76		88.48		88.48		
				Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB	Persen	76.92	76.92	251,438,572	77.12	169,776,657	78.94		80.77		82.59		82.59		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	1 5		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																
2	1 5	2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik	Persen	35	45	2.064.078.725	55	1.686.774.764	100	200,000,000	100	487,273,595	100	2,329,796,161	100	6.767.923.245	Dinas Perhubungan
				Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	45	37.17		43		60	530,200,000	75	1,400,000,000	90	1,500,000,000	90	3.430.200.000	
				Persentase kepemilikan KIR	Persen	20	20		25		30	421,518,397	40	1,200,000,000	50	1,450,000,000	50	3.071.518.397	
				Persentase Fasilitas Kantong Parkir yang disediakan	Persen	N/A	0		0		60	400,000,000	75	1,200,000,000	100	1,300,000,000	100	2.900.000.000	
				Cakupan layanan angkutan umum	Persen	20	25		30		40	200,000,000	50	400,000,000	70	500,000,000	70	1.100.000.000	
2	1 5	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentasi Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat	Persen	N/A	0,05		0,25		60	530.200.000	75	1.400.000.000	90	1.500.000.000	90	3.430.200.000	Dinas Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				dalam kondisi baik															
				Persentase angkutan laut yang memiliki izin operasi	Persen	45	55	875.631.490	67	650.000.000	40	290,000,000	50	740,000,000	70	1,000,000,000	70	3.555.631.490	
2	16		Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika																
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	0	90	805,219,880	92	797,023,331	95	274,706,800	98	1,088,571,498	100	1,311,699,089	100	4,277,220,598	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	Persen	N/A	9.76		75		85		90		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	16	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25	81.82	3,121,309,103	91.82	3,677,694,790	100	1,929,185,100	100	3,772,134,713	100	4,413,678,139	100	16,914,001,845	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Persen	40	81.82		91.82		100		100		100		100		
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																
2	17	2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi simpan pinjam yang merugikan masyarakat	Persen	N/A	0	100,000,000	0	125,000,000	0	175,000,000	0	700.000.000	0	415,427,592	0	1.425.427.592	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	17	6	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Koperasi yang memiliki SDM terlatih	Persen	7.41	27.21	250.000.000	29.63	509.000.000	43.65	724.000.000	59.52	300.000.000	75.4	400.000.000	75.4	2.183.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
				Persentase Koperasi yang difasilitasi	Persen	N/A					1.59		2.38		3.17		3.17		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Permodalan															
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	Persen	0.82	N/A	150.000.000	15	200.000.000	19.67	515.000.000	24.58	3.850.000.000	29.5	5.900.000.000	29.5	10.615.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	17	8	Program pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	Persen	1.43	22.22	260.000.000	28.74	528.000.000	57.47	1.671.018.990	86.21	4.423.943.850	100	4.500.000.000	100	11.382.962.840	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
				Persentase produk usaha mikro yang bersertifikat	Persen	20.71	46.29		50		57.47		86.21		100		100		
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																
2	18	2	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persen	N/A	100	541,230,563	100	750,000,000	100	600,000,000	100	1,190,000,000	100	800,000,000	100	3,881,230,563	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	18	3	Program promosi penanaman modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	Persen	N/A	40	425,000,000	45	650,000,000	50	350,000,000	55	650,000,000	60	25,000,000	60	2,100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	Program pelayanan penanaman modal	Persentase pelayanan perizinan yang dijalankan sesuai SOP	Persen	84.37	85	635,000,000	87	1,100,000,000	90	536,400,000	92	575,000,000	95	1,300,000,000	95	4,146,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	Persen	N/A	50	411,834,150	55	432,425,858	60	480,000,000	65	515,000,000	70	850,000,000	70	2,689,260,008	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase calon investor yang terlayani kebutuhan datanya dan informasi perizinan	Persen	0	100	72,666,546	100	162,826,929	100	150,000,000	100	100,000,000	100	250,000,000	100	735493475	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang kepemudaan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			dan Olahraga																
2	19	2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	N/A	9	1,020,534,410	15	1,046,534,410	45	27,000,000	55	270,000,000	60	270,000,000	60	2.634.068.820	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	Buah	N/A	420	2,797,310,080	420	2,952,310,460	430	1,680,000,000	440	1,680,000,000	460	1,680,000,000	460	10,789,620,540	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Cakupan pelatih yang tersertifikasi	Orang	6	18		18		23		28		33		33		
				Cakupan Atlet muda yang dibina	Orang	N/A	30		33		35		40		45		45		
2	19	4	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	Persen	65	100	1,065,960,000	100	1,175,960,000	100	400,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	3,341,920,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase PD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	38	51.22	106,896,426	55	137,913,555	60	73,048,400	70	87,653,913	80	89,732,760	80	495,245,053	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	10	20	71,264,284	23	91,942,370	25		30	145,142,866	35	262,104,900	35	570,454,420	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE	Persen	10	18.18		30		40		50		60		60		
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Persen	N/A	100	1,258,434,852	100	2,000,000,000	100	5,233,266,434	100	2,733,266,434	100	2,733,266,434	100	13,958,234,154	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2	22	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian daerah yang dikelola dengan baik	Persen	58.9	100	853,936,957	100	1,107,659,679	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	3,011,596,636	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2	22	4	Program pembinaan sejarah	Persentase warisan sejarah yang dilestarikan	Persen	100	100	100,000,000	100	451,478,415	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	851,478,415	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2	22	5	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	100	66.67	1,800,000,000	100	2,000,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	100	6,500,000,000	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																Dinas Kerasipan dan Perpustakaan
2	23	2	Program Pembinaan perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaa	Nilai	50	79.61	396,326,689	80	510,750,000	81	156,674,041	82	156,674,040	83	156,674,040	83	1,377,098,810	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				n															
				Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0.17	0.73	154,326,690	0.74	237,162,839	0.75	104,449,360	0.76	104,449,360	0.77	104,449,360	0.77	704,837,609	
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	16.67	14.58	146,204,963	37.5	223,219,618	43.75	161,908,126	71	400,000,000	100	450,000,000	100	1.381.332.707	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase pengelola Arsip bersertifikat	Persen	45.45	22	85,000,000	30	97,000,000	47.46	242,862,189	72.88	600,000,000	100	675,000,000	100	1.699.862.189	
2	24	3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Persen	8.55	20.5	319,448,417	20.6	427,693,218	20.72	404,770,316	20.8	1,000,000,000	21	1,125,000,000	21	3.276.911.951	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																
3	25	3	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana penangkapan yang sesuai standar	Persen	43.5	55.6	1,055,202,500	59.7	3,079,970,125	41	1,887,788,983	44	5,326,206,573	46	7,227,297,120	46	18,576,465,301	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase kelompok nelayan terlatih	Persen	3.2	3.2		3.7		4.65		8.89		14.89		14.89		
				Persentase kelompok nelayan yang meningkat kelasnya	Persen	5.6	7		7.3		5.12		5.78		6.38		6.38		
3	25	4	Program pengeloaan perikanan budidaya	Persentase kelompok yang mendapat bantuan sarana	Persen	39.2	43.1	2,267,064,608	62.75	3,531,901,674	73	1,116,250,000	84.31	4,842,660,340	100	6,828,441,260	100	18,586,317,882	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang memiliki ketersediaan	Persen	26.5	30.39		48		59.8		71.57		91.2		91.2		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				bibit unggul sesuai standar															
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang menguasai penggunaan IPTEK	Persen	4.9	5.9		8.8		10.8		12.75		14.7		14.7		
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang menggunakan metode budidaya berorientasi agribisnis	Persen	4.9	5.9		8.8		10.8		12.75		14.7		14.7		
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang naik kelas	Persen	0	0		1.96		2.94		3.92		4.9		4.9		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	25	6	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar prosedur yang sertifikasi	Persen	0	30	600,000,000	40	700,000,000	60	360,000,000	80	900,000,000	100	1,740,000,000	100	4,300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																
3	26	2	Program peningkatan daya tarik destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya	Persen	34.62	10.34	1,673,338,197	40	2,701,244,744	60	11,610,105,800	80	11,515,000,000	100	14,465,000,000	100	48.997.873.782	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
				Persentase destinasi wisata baru yang dikembangkan	Persen	0	0	2,981,317,925	25	4,051,867,116	50		75		100		100		
3	26	3	Program pemasaran pariwisata	Persentase Even Pariwisata yang dilaksanakan	Persen	N/A		647,361,848		900,000,000	33.33	2,780,000,000	66.67	2,780,000,000	100	4,387,708,756	100	11.495.070.604	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase destinasi wisata yang dipasarkan secara digital	Persen	64.29	63.79		70		77.78		88.89		100		100		n
3	26	4	Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual	Persen	N/A	4.79	597,361,848	15	475,000,000	42.5	775,000,000	70	775,000,000	100	2,050,000,000	100	4,672,361,848	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
3	26	5	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	2.73	5.26	1,575,545,210	8.81	2,475,992,245	9.41	3,063,212,000	10	2,938,212,000	12.73	3,163,212,000	12.73	13,216,173,455	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	27	2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase luas lahan pertanian tanaman pangan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk , Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persen	3.34	2.21	11,200,000,000	3	15,000,000,000	3.39	13,879,697,500	4.1	15,250,000,000	4.39	18,300,000,000	4.39	73,629,697,500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase luas lahan pertanian Hortikultura yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persen	0.97	7.15		1.46		2.44		3.25		4.06		4.06		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase luas lahan pertanian Perkebunan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persen	1.58	0.75		0.8		0.91		1.1		1.28		1.28		
				Persentase kelompok petani (perkebunan) yang memiliki sarana perkebunan sesuai standar	Persen	0.23	0.45		0.45		0.73		0.85		1.01		1.01		
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar	Persen	14.75	38.71	1,841,621,801	45	6,254,154,292	59.21	6,641,673,820	69.62	8,870,151,274	84.34	9,234,275,366	84.34	32,841,876,552	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar	Persen	19.84	14.52		35.46		43.05		52.8		71.64		71.64		
3	27	3	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Pengembangan Jaringan irigasi dan sumber-sumber air dalam kondisi baik	Persen	85.2	75.12	12,005,764,929	77.04	15,967,000,000	79.65	26,500,000,000	81.91	28,400,000,000	83.98	31,400,000,000	83.98	114,272,764,929	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Pesentase peningkatan Luas Lahan pertanian Fungsional	Persen	36.159	34.47		34.47		34.47		34.474		34.474		34.474		
				Luas lahan pertanian LP2B yang tidak beralih fungsi (ha)	Ha	18,267	16,892.48		16,893.48		16,894.48		16,895.48		16,896.48		16,896.48		
				Persentase jalan usaha tani berkondisi baik	Persen	95.32	90,45		90.45		92.55		93.93		94.91		94.91		
				Persentase Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar	Persen	N/A	33	8,050,000,000	0	5,500,000,000	66.67	2,934,882,000	0	1,925,000,000	100	2,981,000,000	100	21.390.882.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Prasarana Pembibitan ternak, HPT dan Veteriner	Persen	46.67	53.4		73.33		86.67		93.33		100		100		
3	27	4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kematian ternak akibat penyakit ternak	Persen	8.15	0.022	2,657,635,246	1.5	5,651,500,000	2	4,576,319,000	1.5	5,139,762,750	0.5	5,516,097,438	0.5	23,541,314,434	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Tingkat kejadian Penyakit Zoonosis	Persen	0.04	0.008		0.012		0.01		0.007		0		0		
				Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar sertifikasi	Persen	12.23	36.48		40		46.06		53.08		68.2		68.2		
3	27	5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas lahan pertanian yang terserang hama penyakit yang dapat dikendalikan (Ha)	Persen	N/A	100	2.850.000.000	100	3.850.000.000	100	1,750,000,000	100	1,950,000,000	100	2,500,000,000	100	12.900.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Luas lahan pertanian yang ditanggulangi akibat perubahan iklim dan bencana (Ha)	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase permohonan Usaha Pertanian yang diusulkan dan diproses	Persen	N/A	100	150,000,000	100	150,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	400,000,000	100	1,300,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase Permohonan Usaha Peternakan yang direkomendasikan	Persen	26.8	35.2	102,000,000	59.2	450,000,000	77.46	150,000,000	91.55	157,500,000	100	165,375,000	100	1,024,875,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	7	Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	Persen	1.7	2.9	6,370,000,000	2.97	8,549,122,499	3.53	7,938,000,000	4.09	8,277,536,188	4.66	11,283,690,698	4.66	42,418,349,385	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase SDM petani yang terlatih	Persen	2.08	4.15		4.33		4.9		5.6		6.53		6.53		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase kelompok tani yang naik kelas	Persen	31.85	41.09		45.49		50.08		54.68		59.28		59.28		
				Persentase produk pertanian yang tertangani sesuai standar GHP (Good Handing Practices)	Persen	N/A	0		40		60		80		100		100		
				Persentase SDM kelompok peternak terlatih	Persen	15.48	22.83	650,000,000	30.95	2,025,000,000	46.83	1,329,250,000	67.46	1,395,712,500	100	1,465,498,125	100	6,865,460,625	
				Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode peternakan berorientasi agribisnis	Persen	2.78	4.13		7		9.52		11.9		14.29		14.29		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	3 0		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	30	3	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana sesuai standar	Persen	6.67	6.67	1,500,000,000	33.33	2,695,485,000	13.3	13,002,652,829	20	14,650,000,000	26.67	15,900,000,000	26.67	47,748,137,829	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase kelompok pedagang yang terlatih	Persen	N/A	0		13		26		34.64		51.95		51.95		
				Persentase pedagang pasar yang difasilitasi permodalan	Persen	N/A	0		5.4		11		22		33		33		
3	30	4	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat stabilitas harga barang pokok	Persen	0.5	0	200,000,000	0.7	359,398,000	6	395,000,000	6	840,000,000	6	1,080,000,000	6	3.086.409.852	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Tingkat stabilitas harga barang penting	Persen	N/A	0		0		3		3		3		3		
				Tingkat stabilitas Ketersediaan barang pokok dan barang penting	Persen	2	0	75,800,000	90	136,211,852	90		90		90		90		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	30	6	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase pasar tradisional yang berstatus pasar tertib ukur	Persen	9.09	6.5	264,000,000	25	474,405,360	31	190,000,000	63	350,000,000	100	750,000,000	100	2,028,405,360	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	7	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pedagang yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	Persen	N/A		75.000.000	25	174.334.250	29.86	300,000,000	41	410,000,000	52	410,000,000	52	1.369.334.250	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase IKM yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	Persen	N/A	3.57		15		55		59		65		65		
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																
3	31	2	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang bahan baku produksi yang tersedia secara kontinu	Persen	N/A		301.840.000	50	320.000.000	78	5,336,000,000	82	5,700,000,000	86	6,145,000,000.00	86	22.256.520.551	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pelaku IKM terlatih	Persen	21.9	33.33	950,000,000	39.29	1,780,000,000	43		49		55		55		
				Persentase pelaku IKM yang memiliki sarana produksi sesuai standar	Persen	13.1	16.43	485,387,464	15.36	1,018,293,087	16.9		18.5		22.18		22.18		
				Persentase IKM yang difasilitasi permodalan	Persen	N/A		100.000.000	6.16	120.000.000	9.24		12.32		15.4		15.4		
3	31	3	Program Pengendalian Izin usaha industri Kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki NIB	Persen						44	200,000,000	48	200,000,000	55	300,000,000	55	700,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	4	Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM terdata di SINAS	Persen						19	100,000,000	29	275,000,000	48	275,000,000	48	650,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																
3	32	3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penataan Kawasan Transmigrasi	Persen	67	67	1,550,000,000	67	850,000,000	100	200,000,000	100	500,000,000	100	1,100,000,000	100	4,200,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																			dan UKM
3	3 2	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri	Persen	67	67	181,000,000	67	250,000,000	67	100,000,000	100	323,943,850	100	400,000,000	100	1,254,943,850	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
4	1		Sekretariat Daerah																
4	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang tersedia sesuai standar	Persen	80	100	504,745,903	100	683,101,133	100	203.434.000	100	273.920.656	100	288.565.000	100	1.953.766.692	Bagian Pemerintahan
				Persentase Rata-rata Nilai SPM Perangkat Daerah	Persen	0	100	387.245.903	100	224.049.688	100	400.500.000	100	458.479.532	100	510.500.000	100		Bagian Pemerintahan
				Persentase titik batas wilayah yang	Persen	20	30	362,186,403	40	419,033,333	100		100		100		100		Bagian Pemerintahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				diselesaikan															
				Persentase kerjasama pemerintah daerah yang berjalan	Persen	100	100	330,989,596	100	85,600,000	100	390,000,000	100	595,000,000	100	595,000,000	100	1,996,589,596	Bagian Pemerintahan
				Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	5,176,247,350	100	5,671,850,718	100	11,916,498,084	100	15,316,498,084	100	15,316,498,084	100	53,397,592,320	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	Persen	100	100	1,675,664,470	100	1,577,080,600	100	1,147,272,130	100	2,007,613,486	100	2,298,494,161	100	8,706,124,847	Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	Persen	20	30	633,599,422	50	314,461,730	100	868.365.475	100	2.005.700.276	100	2.244.228.567	100	6.066.355.470	Bagian Perekonomian & SDA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase penyediaan dokumen administrasi pembangunan	Persen	99.4	98.7	622,401,282	98.5	305,167,295	100	749,365,475	100	960,271,041	100	1,080,228,567	100	3,717,433,660	Bagian Administrasi Pembangunan
				Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	83,48	90,01	1.642.556.913	95,98	1.629.684.758	100	1.791.415.824	100	2.916.939.707	100	2.980.849.523	100	10.961.446.725	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	2		Sekretariat DPRD																
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	96.21	100	13,511,126,237	100	14,358,863,338	100	11,833,407,671	100	15,026,730,322	100	15,986,646,251	100	70,716,773,819	Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
5	1		Perencanaan																
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan	Persentase realisasi target program RPJMD	Persen	N/A	38.35	1,834,414,091	42	2,665,747,322	46	2,420,253,000	53	3,369,548,460	61	3,610,000,000	61	13,899,962,873	Badan Perencanaan Pembangunan,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Daerah	Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah	Persen	N/A	9.52		12		15		20		25		25		Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	Persen	N/A	100	1,605,112,329	100	2,332,528,906	100	2,163,621,329	100	3,002,000,000	100	3,320,800,000	100	12,424,062,564	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
				Persentase keselarasan Renja dengan RKPD	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		
5	2		Keuangan																
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen		100	244.120.117.000	100	272.580.788.038	100	234.946.538.393	100	235.124.831.313	100	237,965,235,718	100	1.224.737.510.462	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu setelah berkas lengkap	Persen		100		100		100		100		100		100		
				Presentase OPD yang menyerahkan SPJ tepat waktu	Persen		100		100		100		100		100		100		
				Presentase keterpenuhan Mandatory Spending terhadap APBD	Persen		100		100		100		100		100		100		
				Persentase Realisasi Belanja terhadap Total Belanja Daerah	Persen	92.76	100		100		100		100		100		100		
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan rekonsiliasi aset tetap tepat waktu	Persen		100	3.031.609.750	100	3.358.706.750	100	2,850,111,700	100	2,715,002,500	100	3,001,387,600	100	14.956.818.300	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Presentase OPD yang melaksanakan rekonsiliasi persediaan	Persen		100		100		100		100		100		100		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				tepat waktu															
				Presentase pemanfaatan barang milik daerah	Persen	97	97		100		100		100		100		100		
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen	8.59	72.21				35.52		24.74		20.45		20.45		
				Persentase Pertumbuhan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Persen		-19.28	4.022.033.120		3.825.629.329	20	5,880,995,462	40	7,033,883,135	45	7,429,181,396	40	28.191.722.442	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah	Persen		-32.2				27.82		22.99		24.23		24.23		
				Persentase Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah lainnya	Persen		-69.84		5		5		5		5		5		
5	3		Kepegawaian																Badan Kepegawaian dan Pengembangan
5	3		Program Kepegawaian Daerah	Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai	Persen	67	62	3,036,035,700	84	3,526,951,420	85	1,947,000,000	91	2,734,255,738	100	2,890,875,881	100	34.507.570.216	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Baik"	Persen	23.76	93		95		97		99		100		100		Sumber Daya Manusia
				Persentase layanan pegawai sesuai Standar Pelayanan (SP)	Persen	85	82		85		86		90		95		95		
				Persentase pegawai yang disiplin	Persen	1.4	99.7		100		100		100		100		100		
5	4		Pendidikan dan Pelatihan																
5	4	;02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentasi jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	N/A	16	2,006,085,782	36	2,173,987,212	45	950,000,000	75	4,500,000,000	90	5,305,000,000	90	14,935,072,994	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase jabatan struktural yang telah lulus diklat Pim Tk 2,	Persen	43.1	27		46.51		48.21		49.91		53.49		53.49		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				PKA, PKP															
5	5		Penelitian dan Pengembangan																
5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase riset yang dihasilkan	Persen	N/A	0	1.146.508.807	22.2	1.666.092.076	55.56	3,561,666,666	77.78	6,286,666,666	100	9,036,666,668	100	21.697.600.883	Badan Riset dan Inovasi Daerah
				Persentase Hasil Riset yang dimanfaatkan	Persen	N/A	0		0		100		100		100		100		
				Persentase Inovasi Daerah yang dimanfaatkan	Persen	N/A	0		100		100		100		100		100		
6			Unsur Pengawasan Pemerintahan Daerah																
6	1		Inspektorat Daerah																
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) internal dan	Persen	74.38	74.38	728,086,366	77	398,606,053	81	999,000,000	85	2,250,000,000	90	3,182,207,713	90	13,594,829,221	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				eksternal															
				Persentase pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	100	100	1,572,645,536	100	3,142,578,787	100		100		100		100		
				Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Persen	100	100	789,430,066	100	532,274,700	100		100		100		100		
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase OPD yang menjalankan Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)	Persen	0	0	799,613,395	10.81	542,458,029	21.62	423,000,000	43.24	932,207,713	86.49	1,250,000,000	86.49	3.947.279.137	Inspektorat
				Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Persen	65.32			69		72		75		78		78		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7			Unsur Kewilayahan																
7	1		Kecamatan																
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen	N/A	100	875.025.041	100	1.417.316.508	100	115.000.000	100	126.000.000	100	138.000.000	100		Kecamatan Komodo
					Persen	N/A	100		100		100	85.000.000	100	110.000.000	100	266.000.000	100		Kecamatan Boleng
					Persen	N/A	100		100		100	90.000.000	100	101.000.000	100	108.000.000	100		Kecamatan Mbeliling
					Persen	N/A	100		100		100	42.318.108	100	108.000.000	100	110.700.000	100		Kecamatan Sano Nggoang
					Persen	N/A	100		100		100	120.000.000	100	135.000.000	100	150.000.000	100		Kecamatan Lembor
					Persen	N/A	100		100		100	90.000.000	100	101.000.000	100	103.000.000	100		Kecamatan Welak
					Persen	N/A	100		100		100	120.000.000	100	135.000.000	100	145.000.000	100		Kecamatan Lembor Selatan
					Persen	N/A	100		100		100	75.000.000	100	65.000.000	100	80.000.000	100		Kecamatan Kuwus
					Persen	N/A	100		100		100	61.000.000	100	79.205.300	100	115.000.000	100		Kecamatan Macang Pacar
					Persen	N/A	100		100		100	45.000.000	100	55.000.000	100	62.500.000	100		Kecamatan Ndoso
					Persen	N/A	100		100		100	52.000.000	100	95.000.000	100	110.000.000	100		Kecamatan Kuwus Barat
					Persen	N/A	100		100		100	44.000.000	100	51.000.000	100	56.000.000	100		Kecamatan Pacar
7	1	3	Program Pemberdayaan	Persentase kelembagaa	Persen	N/A	100	2.718.640.4	100	5.607.318.5	100	532.294.000	100	554.000.000	100	587.000.000	100		Kecamatan Komodo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Masyarakat Desa dan Kelurahan	n masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan	Persen	N/A	100	36	100	70	100	70.000.000	100	93.000.000	100	115.592.932	100		Kecamatan Boleng
					Persen	N/A	100		100		100	90.000.000	100	102.000.000	100	109.000.000	100		Kecamatan Mbeliling
					Persen	N/A	100		100		100	29.000.000	100	85.000.000	100	87.125.000	100		Kecamatan Sano Nggoang
					Persen	N/A	100		100		100	312.632.000	100	319.000.000	100	335.773.995	100		Kecamatan Lembor
					Persen	N/A	100		100		100	90.000.000	100	95.000.000	100	98.000.000	100		Kecamatan Welak
					Persen	N/A	100		100		100	90.632.000	100	95.000.001	100	109.773.995	100		Kecamatan Lembor Selatan
					Persen	N/A	100		100		100	471.500.000	100	466.500.000	100	481.500.000	100		Kecamatan Kuwus
					Persen	N/A	100		100		100	80.000.000	100	86.000.000	100	115.592.932	100		Kecamatan Macang Pacar
					Persen	N/A	100		100		100	85.000.000	100	102.000.000	100	122.500.000	100		Kecamatan Ndoso
					Persen	N/A	100		100		100	71.632.000	100	85.000.000	100	105.000.000	100		Kecamatan Kuwus Barat
					Persen	N/A	100		100		100	37.000.000	100	55.000.000	100	62.000.000	100		Kecamatan Pacar
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	100	449.777.601	100	665.149.318	100	1.158.782.503	100	995.919.785	100	1.171.268.423	100	4.440.897.630	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	1	5	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	Persen	N/A	100	1.776.785.134	100	2.966.206.419	100	3.527.273.028	100	3.608.321.406	100	3.963.588.169	100	15.842.174.157	Kecamatan
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa di wilayah kecamatan yang tertib menjalankan kalender pembangunan	Persen	N/A	100	804.809.893	100	1.285.275.191	100	100.000.000	100	126.000.000	100	125.500.000	100		Kecamatan Komodo
					Persen	N/A	100		100		100	75.000.000	100	101.000.000	100	100.000.000	100		Kecamatan Boleng
					Persen	N/A	100		100		100	80.000.000	100	115.000.000	100	108.000.000	100		Kecamatan Mbeliling
					Persen	N/A	100		100		100	15.283.862	100	63.000.000	100	64.575.000	100		Kecamatan Sano Nggoang
					Persen	N/A	100		100		100	80.000.000	100	105.100.000	100	125.000.000	100		Kecamatan Lembor
					Persen	N/A	100		100		100	100.000.000	100	122.880.600	100	114.000.000	100		Kecamatan Welak
					Persen	N/A	100		100		100	80.000.000	100	130.000.000	100	125.000.000	100		Kecamatan Lembor Selatan
					Persen	N/A	100		100		100	17.500.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100		Kecamatan Kuwus
					Persen	N/A	100		100		100	80.000.000	100	95.000.000	100	130.000.000	100		Kecamatan Macang Pacar
					Persen	N/A	100		100		100	147.500.000	100	172.500.000	100	195.000.000	100		Kecamatan Ndoso
					Persen	N/A	100		100		100	50.000.000	100	100.000.000	100	120.000.000	100		Kecamatan Kuwus Barat
					Persen	N/A	100		100		100	29.600.000	100	80.433.850	100	54.104.710	100		Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																			Pacar
8			Unsur Pemerintahan Umum																
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik																
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase desa yang berkarakter kebangsaan berdasarkan budaya lokal	Persen	0	75	979,775,574	100	830,000,000	100	1,088,070,457	100	1,088,070,457	100	1,288,070,457	100	5,273,986,945	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	43	100	1,735,303,574	100	1,600,000,000	100	136,691,900,000	100	1,371,850,000	100	1,371,850,000	100	142,770,903,574	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase lembaga pendidikan yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	0	14	438,583,048	44	288,862,692	45.45	275,500,000	72.73	480,000,000	100	500,000,000	100	1,982,945,740	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	1	4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi serta dibina	Persen	45	55	870,775,574	65	729,500,000	90	125,000,000	97	560,500,000	100	960,500,000	100	3,246,275,574	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Potensi Konflik sara yang diselesaikan	Persen	100	100	748,775,574	100	601,000,000	100	47,500,000	100	505,000,000	100	1,018,729,543	100	2,921,005,117	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan potensi konflik sosial	Persen	58	100%	944,775,574	100	575,000,000	100	573,229,544	100	1,310,000,000	100	1,615,000,000	100	5,018,005,118	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

No	IKU Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	58,2	62,5	65	67,5	70	70
2	Indeks Gini	Persen	0,340	0,332	0,324	0,316	0,308	0,308
3	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	Angka	64,92	65,34	66,26	67,18	68,10	68,10
4	Prevalensi Stunting	Persen	15,9	15,22	14,53	13,85	13,16	13,16
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	59,06	61,56	64,06	66,56	69,06	69,06

No	IKU Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,5922	0,6324	0,6574	0,6824	0,7074	0,7074
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,12	5,04	5,31	5,59	5,87	5,87
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	17,15	16,90	16,64	16,38	16,13	16,13
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,91	4,80	4,69	4,58	4,47	4,47
10	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	14,72	14,2	15	15,8	16,6	16,6
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	70.47	68.66	72.63	76.6	76.81	76.81
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	151.62	151,12	150,62	150,12	149,62	149,62
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka dan Predikat	53,79 (CC)	CC	CC	B	B	B
14	Total PAD	Juta Rupiah	190,819	251,517	333,615	414,044	502,289	502,289
15	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	N/A	64,77	67,41	69,89	72,49	72,49

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU OPD secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berikut adalah IKU dari masing – masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Th. 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	6.9
		Persentase Kunjungan Wisatawan (Target kunjungan 2022-2026 sebesar 2,5 juta kunjungan)	Persen	4.16	15	45	70	100	100
		Spend of Money	USD/Hari	135.01	128.12	137.36	141.79	152.17	152.17
		Persentase Budaya yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.8	8.73	8.84	8.97	9.09	9.09
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.31	14.05	14.61	15.17	15.73	15.73
		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	9	15	45	55	60	60
		Peringkat pada Event Olahraga Daerah (PORPROV)	Peringkat	10	10	9	9	8	8
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Literasi Masyarakat	Indeks	23.28	24	24.2	25	25.2	25.2
		Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	0	0	30	40	61	61
		Indeks Arsip	Nilai	86.1	82.5	86.4	86.5	87	87
4	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	99.72	89.22	78.72	68.22	57.72	57.72
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	8.92	7.92	6.92	5.92	4.92	4.92
		Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	Angka	2	2	2	2	2	2

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Th. 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	3.18	3.16	3.08	3.06	3.06	3.06
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	84.86	87.47	87.62	87.77	87.92	87.92
		Angka PPKS	Persen	54.68	59.68	64.68	69.68	74.68	74.68
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Maju	Persen	4.87	9.75	14.63	18.29	21.95	21.95
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produksi Padi	Ton	221,474.10	233,625.46	187,713.76	188,435.74	189,518.70	189,518.70
		Produksi Jagung	Ton	13,187.10	64,068.90	22,200,000.00	28,000,000.00	33,900,000.00	33,900,000.00
		Produksi Kedelai	Ton	153.38	495.1	168.75	183.6	205.5	205.5
		Produksi Porang	Ton	19,329.65	10,500	20,281	20,712	21,144	21,145
		Produksi Tanaman Sayuran (Sayur Daun dan Sayur Buah)	Kg	16,901.05	20,862	19,683	19,877	20,071	20,071
		Produksi Tanaman Buah-buahan	Kg	13,234.50	13,838	13,808.06	14.089.60	14,271.90	14,271.90
		Produksi Biofarmaka (Jahe)	Kg	489.42	820	800	851	902	902
		Produksi Kopi	Kg	1,346	1,778.40	1,791.90	1.790.56	1,796.66	1,796.66
		Produksi Kakao	Kg	526	744.96	776	807.04	838.08	838.08
		Produksi Cengkeh	Kg	409.96	699.05	701.5	704.42	709.8	709.8
		Produksi Vanili	Ton	51	40.39	40.83	41.27	41.85	41.85
		Persentase Produk Pertanian yang Tersertifikasi	Persen	0	100	5	10	15	15
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Produksi Telur	Ton	5.11	31.24	60.44	69.51	79.94	79.94
		Produksi Daging Sapi	Kg	110,960	123,827	130,070	136,678	142,824	142,824

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Th. 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
		Produksi Daging Babi	Kg	904,258	123,827	130,070	136,678	142,824	142,824
		Persentase Produk Hasil Ternak yang Bersertifikasi ASUH	Persen	82.95	85	90	95	100	100
		Populasi Sapi	Ekor	18,625	19,040	20,388	21,831	23,158	23,158
		Populasi Kerbau	Ekor	15,464	19,002	19,572	20,159	20,726	20,726
		Populasi Kambing	Ekor	11,489	7,497	7,872	8,265	8,679	8,679
		Populasi Babi	Ekor	143,533	193,188	206,538	220,809	236,067	236,067
		Populasi Ayam	Ekor	128,562	154,491	158,662	162,946	167,346	167,346
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6.7	4.6	6.8	7.48	8.228	8.228
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11.6	27	15.08	19.6	23.52	23.52
		Persentase Produk Perikanan yang Tersertifikasi	Persen	30	100	60	80	100	100
		Skor PPH Ketersediaan	Angka	71.51	96.85	73.51	75.51	77.51	77.51
		Skor PPH Konsumsi	Angka	76.4	0	78.4	80.4	82.4	82.4
		Persentase Pangan Segar Beracun	Persen	0	0	0	0	0	0
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan	Persen	N/A	31.77	38.62	45.47	52.32	52.32
		Nilai Produksi IKM	Angka	59,049,285,000	8,059,000,000	8,359,000,000	8,659,000,000	8,959,000,000	8,959,000,000
		Persentase Produk IKM yang Tersertifikasi	Persen	0	0	20	25	30	30

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Th. 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
		Tingkat Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting	Persen	90	90	90	90	90	90
		Persentase Pasar Tradisional yang berhasi di Revitalisasi	Persen	10	30	13.3	20	26.67	26.67
		Persentase Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Lokal lainnya	Persen	N/A	15.5	20.5	25.5	30.5	30.5
		Nilai Produksi Produk Pertanian	Nilai	5,236,135,000	680,000,000	700,000,000	710,000,000	720,000,000	720,000,000
		Persentase Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Olahan Pertanian	Persen	N/A	15.5	38.62	45.47	52.31	52.31
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Peningkatan Investor	Persen	63	30	68	73	78	78
		Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persen	37.22	50	80	90	100	100
		Tingkat Kemudahan Perizinan Investasi	Persen	98	87	100	100	100	100
		Persentase Investor yang Melaporkan Perkembangan Usahanya	Persen	42	90	60	70	80	80
13	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Tingkat Serapan Tenaga Kerja	Persen	71.07	75	80	85	90	90
		Persentase Koperasi yang Aktif	Persen	46.26	55.56	59.52	63.49	67.46	67.46
		Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzetnya	Persen	14.75	20	30	40	50	50
		Persentase Penurunan Permasalahan Hubungan Industrial	Persen	63.63	45.45	27.27	9.09	0	0

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Th. 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
14	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas	Angka	1.18	1.20	1.22	1.26	1.30	1.30
15	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	52.02	52.99	54.83	60.63	68.40	68.40
		Rasio Luas Daerah Pertanian yang Terlayani Jaringan Irigasi	Angka	0.535	0.547	0.558	0.569	0.580	0.580
16	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen	69.74	74.39	79.47	84.90	90.7	90.7
		Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Persen	75	98.6	100	100	100	100
		Persentase Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (RTRW)	Persen	62.27	100	100	100	100	100
		Rasio Rumah Layak Huni	Angka	0.63	0.385	0.39	0.396	0.402	0.402
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Indeks Kualitas Air	Angka	52.11	50	60	70	70	70
		Indeks Kualitas Udara	Angka	87.55	91.56	92.03	92.5	92.98	92.98
		Indeks Kualitas Lahan	Angka	70.42	58.34	71	71.51	71.58	71.58
		Persentase Sampah yang Tertangani	Persen	45	87.51	90.23	93.03	95.92	95.92
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.49	1.09	1.69	2.29	2.89	2.89
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Angka	3.01	3.05	3.35	3.65	3.95	3.95
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	83.17	80	84.17	85.17	86.17	86.17
21	Badan Perencanaan Pembangungan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Angka	N/A	68	72	75	78	78

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Th. 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Angka	54.65	55.25	55.85	56.45	57.05	57.05
23	Sekretariat Daerah	Nilai / Peringkat EKPPD	Nilai/Peringkat	N/A	2.9	2.95	3	3.05	3.05
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77.87	76	78	80	82	82
24	Sekretariat DPRD	IKM Pelayanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	Angka	77.87	83	86	89	92	92
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Badan Pendapatan Daerah	Total PAD	Juta Rp.	190,819	251,517	333,615	414,044	502,289	502,289
27	Inspektorat	Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai/Predikat	2,69 (Berkembang)	3 (Terdefinisi)	3,2 (Terdefinisi)	3,3 (Terdefinisi)	3,4 (Terdefinisi)	3,4 (Terdefinisi)
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	39.78	50	68	71	74	74
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka Konflik Sosial	Angka	3	2	2	1	0	0
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Angka Gangguan K3	Angka	12	11	10	9	8	8
31	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83.1	76	84	85	86	86

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Kabupaten Manggarai Barat disajikan sebagai berikut.

Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 -2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
A	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**								
1.1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	46	50	54	60	64	68	68
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,01	98,25	98,5	98,75	99	99,25	99,25
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	92,67	93	93,25	93,5	93,75	94	94
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	1	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,45
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**								
2.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,01	0,03	0,03	0,03	0,07	0,07	0,07
2.2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	90,00	92,00	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	89,10	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	93,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	91,20	92,00	93,00	93,00	94,00	94,00	94,00
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	35,80	44	46,00	48,00	50,00	50,00	50,00
2,7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	60,37	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2,8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	32,00	52,00	63,00	71,00	75,00	80,00	80,00
2,9	Persentasae warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	60,96	62,00	65,00	68,00	70,00	75,00	75,00
2,1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	62,66	67,00	70,00	75,00	77,00	80,00	80,00
2,11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	67,98	67,00	70,00	75,00	77,00	80,00	80,00
2,12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	47,96	52,00	56,00	58,00	60,00	65,00	65,00
2,13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2,14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	**Urusan Pemerntahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
3,1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	51	52,39	55,31	58,39	64,55	69,98	69,98

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
3,2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	Persen	30,56	36,2	43,8	51,7	60,4	69,4	69,4
3,3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Nilai	52,72	64,06	75,94	89,09	100	100	100
3,4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	68,54	81,39	85,86	89,66	94,60	100	100
3,5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	73,88	75,19	82,38	85,32	92,85	100	100
3,6	Rasio kepatuhan IMB	Persen	39,78	43,22	53,52	65,48	86,09	87,87	87,87
3,7	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	44,47	65,12	66,09	67,93	73,73	81,50	81,50
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
4,1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
4,2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
4,3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	N/A	18	20	22	25	27	27
4,4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	26,67	40,00	53,34	73,34	86,67	100,00	100,00
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
5,1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
5,2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**								
6,1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	2,01	0,49	0,61	0,71	1,22	1,61	6,65
6,2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	98,27	100	100	100	100	100	100
B	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**								
1,1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1,2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	11,98	22	25	30	40	60	60
1,3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	31,73	40	50,00	100	100	100	100,00
1,4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	75,62	81,55	83,62	85,47	87,12	88,59	88,59
1,5	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Persen	11,98	22	25	30	40	60	60

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1,6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	31,73	40	50,00	100	100	100	100,00
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**								
2,1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	18,7	18,85	20	20,15	20,23	20,32	20,32
2,2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,014	0,015	0,016	0,017	0,019	0,019	0,019
2,3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	70,44	68,91	68,41	66,61	65,85	64,32	64,32
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**								
3,1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen	454,67	459,67	464,67	328,77	332,27	335,77	335,77
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**								
4,1	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Jumlah	3.752	4.752	5.752	6.752	7.752	8.752	8.752
4,2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**								
5,1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,19	64.69	68.66	72.63	76.60	76.81	76.81
5,2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen	77,32	84,88	87,51	90,23	93,03	95,92	95,92
5,3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	2	27	42	52	72	92	92
6	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
6,1	Persentase perekaman KTP elektronik	Persen	95,73	95,9	95,93	96	96,84	97,88	100
6,2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu)	Persen	10,59	39,8	52,73	64,35	74,85	84,39	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	hari yang memiliki KIA								
6,3	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	92,44	96	97,12	98,15	98,2	98,22	100
6,4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
7	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**								
7,1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	26%	34%	42%	50%	60%	69%	69%
7,2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0%	3%	6%	9%	13%	16%	16%
8	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
8,1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Persen	N/A	0,29	0,45	0,62	0,83	1,05	1,05
8,2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	Angka	N/A	1,69	1,57	1,45	1,33	1,26	1,26
8,3	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	N/A	0,11	0,22	0,32	0,42	0,52	0,52
8,4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	65,51	66,41	67,38	68,36	69,42	70,47	70,47
8,5	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8,6	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	34,11	35	35,94	36,85	37,81	38,74	38,74
8,7	Persentasae pelayanan KB pasca persalinan	Persen		0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	0,7
8,8	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	20,89	20	19,02	18,04	16,98	15,93	15,93
8,9	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	N/A	3,32	3,37	3,42	3,47	3,52	3,52
9	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**								
9,1	Rasio konektivitas	Angka	0,46	0,29	0,41	1,22	1,26	1,30	1,30

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
9,2	Kinerja lalu lintas	Persen	70	61	117	67	67	85	85
10	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**								
10,1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	92	100	100	100	100	100	100
10,2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25	50	60	75	85	100	100
10,3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persen	53	62	70	73	78	80	80
11	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
11,1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	67,41	72,59	77,78	50	66,67	70	70
12	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**								
12,1	Persentase peningkatan investasi	Persen	18,72	25	30	35	40	50	50
13	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**								
13,1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	1,06	1,5	2	2,5	3	3,5	3,5
13,2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,46	1	1,5	2	2,5	3	3
14	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**								
14,1	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	38	45	50	60	70	80	80
14,2	Persentase OPD yang menggunakan statistik	Persen	38	45	50	60	70	80	80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah								
15	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**								
15,1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	10	15	20	25	30	35	35
16	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**								
16,1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	3.840	5.500	6.500	8.000	10.500	15.000	15.000
16,2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,22	0,22
16,3	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	0,36	4,57	5,71	5,9	4,57	7,62	7,62
16,4	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen	0,17	0,18	0,18	0,19	0,2	0,21	0,21
16,5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
17	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**								
17,1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	23,03	23,02	22,99	22,96	22,94	22,94	22,94
17,2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	7,87	7,96	8,06	8,17	8,25	8,23	8,23
18	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**								
18,1	Rasio cagar budaya yang terlestarikan	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
C	**Urusan Pemerintahan Pilihan**								
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1,1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Angka	43	4.523	4.627	6.815,08	7.499,60	8.251,52	8.251,52
2	**Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata**								
2,1	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara	Persen	-89,13	1262,40	65,20	45	70	100	100
2,2	Persentase kunjungan wisatawan nusantara	Persen	-70,21	473,50	51,33	45	70	100	100
2,3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	N/A	2,97	2,51	7,49	7,55	7,61	7,61
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**								
3,1	Produktivitas pertanian per hektas per tahun								
	Tanaman Pangan	Angka	5,31	5,718	5,72	5,59	5,64	5,67	5,67
	Tanaman Perkebunan	Angka	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45
	Tanaman Hortikultura	Angka	12,30	12,50	12,80	12,44	12,54	12,61	12,61
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**								
4,1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	Persen	N/A	65	70	75	80	85	90
4,2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	N/A	80	100	100	100	100	100
4,3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	N/A	73,78	80	100	100	100	100
5	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**								
5,1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	N/A	24,629	26,19	26,51	26,85	27,04	27,07
5,2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	N/A	-	0	0	30	40	50

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
5,3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	N/A	70	75	80	85	90	90
D	**Urusan Penunjang Pemerintahan**								
1	**Sekretariat Daerah**								
1,1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0
1,2	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	69,18	70,05	73,2	75	78,3	80,2	85,3
1,3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	12,81	15	17	21,45	24,25	35,2	40
2	**Sekretariat Dewan**								
2,1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2,2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2,3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	DPRD								
3	**Perencanaan**								
3,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,5	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3,6	Persentase konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3,7	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	**Keuangan**								
4,1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	8,65	5,94	9,2	8,47	8,49	7,41	7,41
4,2	Rasio PAD terhadap APBD non migas	Persen	8,96	16,79	24,65	35,51	49,55	64,59	64,59
4,3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	8,64	9,71	15,5	15,55	13,15	12,39	12,39
4,4	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4,5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	82,29	84,75	88,79	90,5	97,65	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
4,6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	82,29	85,78	88,79	95,25	100	100	100
4,7	Persentase aset yang terinterventarisasi	Persen	86,72	92,75	98,05	100	100	100	100
4,8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	3,05	2,85	2,35	2,15	1,95	1,65	1,65
4,9	Persentase informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	25,15	45,78	100	100	100	100	100
410	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang tersedia	Persen	15,75	35,75	100	100	100	100	100
5	**Kepegawaian**								
5,1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	Persen	3,29	4,69	5,77	6,87	7,90	8,86	8,86
5,2	Rasio pegawai fungsional	Persen	0,03	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,12
5,3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	90	91	92	93	94	95	95
5,4	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun	0,42	25	23	21	20	21	21
5,5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,007
5,6	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	43,10	44,80	46,51	48,21	49,91	53,49	53,49
6	**Penelitian dan Pengembangan**								
6,1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6,2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6,3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
6,4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
7	**Pengawasan**								
7,1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat	2	3	3	3	3	3	3
			(skor 2,77)	(skor 3,0)	(skor 3,3)	(skor 3,5)	(skor 3,7)	(skor 3,9)	(skor 3,9)
7,2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat	2	2	3	3	3	3	3

BAB IX
PENUTUP

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 berisi tentang upaya pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyejahterakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal, serta optimalisasi potensi pariwisata daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menjadi visi pembangunan daerah yaitu "**MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP"** yang dijabarkan ke dalam rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah.

Ketersediaan dokumen Perubahan RPJMD menjadi sangat penting dalam rangka membangun manajemen kinerja dan menjalankan pembangunan yang berorientasi hasil, serta sebagai instrumen pengukuran kinerja daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akuntabilitas kinerja sangat bergantung pada penjabaran dan pelaksanaan dokumen Perubahan RPJMD. Sebagai upaya untuk memastikan sinergi antar dokumen perencanaan dan efektivitas implementasi, maka dalam dokumen Perubahan RPJMD ini diperlukan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Manggarai Barat;

2. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 ini selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen RKPD Tahun 2024, 2025, dan 2026;

3. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat memiliki kewajiban untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan melaksanakan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang telah dirumuskan;

4. Perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat menindaklanjuti Perubahan RPJMD dengan menyusun Perubahan Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya;

5. Perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat diwajibkan untuk membuka selebar-lebarnya ruang aspirasi dan partisipasi publik tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama dan gender melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku;

6. Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan dokumen Perubahan RPJMD, maka perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi urusan Perencanaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat.

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021-2026